BRIN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

BADAN PUSAT STATISTIK

Mencatat UNTUK MEMBANGUN NEGERI

Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi

Jilid 1 Indonesia Tengah-Timur

Editor:
M. Alie Humaedi,
Dian Karinawati Imron, &
Agus Pramono

BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

Mencatat UNTUK MEMBANGUN NEGERI

Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi

Jilid 1 Indonesia Tengah-Timur

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Diterbitkan pertama pada 2023 oleh Penerbit BRIN.

Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id.

Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 4.0 International license (CC BY-NC-SA 4.0).
Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC-BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Mencatat UNTUK MEMBANGUN NEGERI

Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi

Jilid 1 Indonesia Tengah-Timur

Editor:
M. Alie Humaedi,
Dian Karinawati Imron, &
Agus Pramono

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Penerbit BRIN

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Pusat Riset Kesejahteraan, Sosial, Desa dan Konektivitas

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 1 Indonesia Tengah-Timur/M. Alie Humaedi, Dian Karinawati Imron, & Agus Pramono (Ed.)–Jakarta: Penerbit BRIN, 2023.

xxxi + 377 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-623-8052-93-6 (no.jil.lengkap)
978-623-8052-94-3 (jil.1)
978-623-8052-97-4 (no.jil.lengkap PDF)
978-623-8052-98-1 (jil.1 PDF)

1. Sensus Penduduk
2. Regsosek
3. Pendataan Kuantitatif
4. Survei

304.609598

Copy editor : Ayu Tya Farany & Apriwi Zulfitri
Proofreader : Emsa Ayudia Putri, Noviastuti Putri Indrasari, & Rahma Hilma T.
Penata isi : Meita Safitri & Hilda Yunita
Desainer Sampul : Gustaf Wijaya & Meita Safitri

Cetakan Pertama : September 2023

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, Anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie Lt. 8, Jl. M.H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: +62 811-1064-6770
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id
Penerbit BRIN
@penerbit_brin
penerbit.brin

Riset dan penerbitan buku ini atas dukungan:
Badan Pusat Statistik (Statistic Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6–8 Jakarta,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710
E-mail: bpshq@bps.go.id
Website: www.bps.go.id

Buku ini tidak diperjualbelikan.

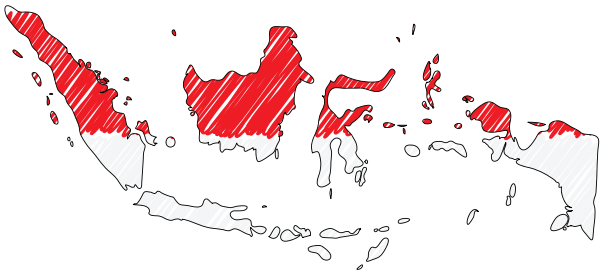

Mereka yang membutuhkan data

untuk kebaikan umat manusia

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

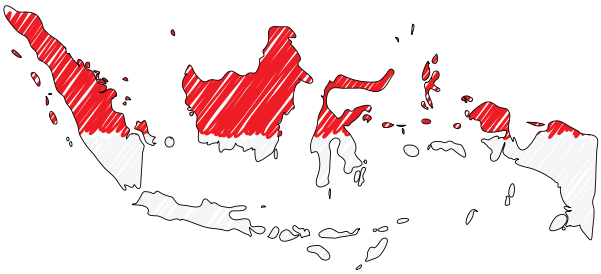

Peta Konteks Cerita

SERI 2
(Indonesia Tengah - Barat)
1. Balikpapan, Kalimantan Timur
2. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah
3. Mempawah, Kalimantan Barat
4. Sampang, Jawa Timur
5. Surakarta, Jawa Tengah
6. Indramayu, Jawa Barat
7. Lampung Selatan, Lampung
8. Sabang dan Aceh Besar, Aceh
9. Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

SERI 1 (Indonesia Tengah - Timur)
1. Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur
2. Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat
3. Wajo, Sulawesi Selatan
4. Gorontalo, Gorontalo
5. Donggala, Sulawesi Tengah
6. Manokwari, Papua Barat
7. Ternate, Maluku Utara

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

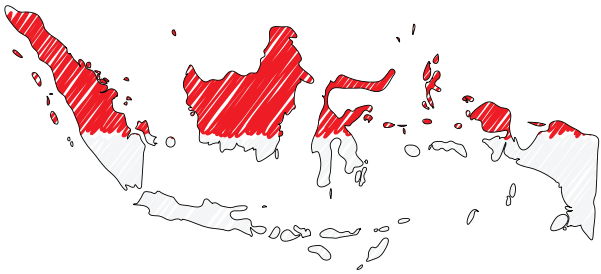

Daftar Isi

Halaman Persembahan v
Peta Konteks Cerita vii
Daftar Gambar xi
Daftar Tabel xv
Pengantar Penerbit xvii
Kata Pengantar Sekretaris Utama BPS RI xix
Kata Pengantar Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN xxiii
Prakata xxvii
Ucapan Terima Kasih xxxi

1 Mendata Bangsa, Menawarkan Solusi: Benang Merah Penarasian Emik Tujuh Lokasi 1
M. Alie Humaedi

2 Membelah Karang, Menggali Data: Regsosek Timor Tengah Selatan (TTS) 17
Bilal As'Adhanayadi & *Gustaf Wijaya*

3 Impian Pendatang, Tantangan Pendataan: Upaya Memahami Silang Sengkarut Kependudukan di Episentrum Pariwisata Lombok Utara 59
R. G. Erwinsyah & *Delfirman*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

4 Mencatat Wajo dalam Regsosek, Menghadirkan Wajah Indonesia 101
M. Alie Humaedi & *Fatwa Nurul Hakim*

5 Narasi Emik Proses Regsosek di Provinsi Gorontalo 165
Sahajuddin & *Risyanto*

6 Narasi Emik Regsosek Dusun Lima Apumpae, Desa Limboro, Donggala 215
Arditya Wicaksono & *Tedi Gunawan*

7 Regsosek: Isu dan Tantangan Meretas Angka di Bentang Alam Manokwari 261
Djoko Puguh Wibowo & *Yudha Raphael*

8 Mencacah Angka, Menarasikan Realitas: Memotret Realitas Kelindan Regsosek dan Masyarakat di Pulau Ternate 301
Lukman Nul Hakim & *Reza Amarta Prayoga*

#9 Ruang Sadar dan Representasi Makna: Menyusuri Pembelajaran Regsosek 345
Dian Karinawati Imron

Lampiran 353
Glosarium 355
Tentang Editor 363
Tentang Penulis 367
Indeks 375

Buku ini tidak diperjualbelikan.

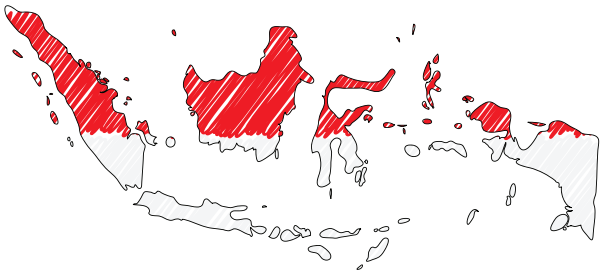

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Timor Tengah Selatan 23
Gambar 2.2 Verifikasi data awal oleh PPL Timor Tengah Selatan.....32
Gambar 2.3 PML dan PPL menjangkau wilayah yang sangat luas & kontur berbukit. 47
Gambar 2.4 Responden tinggal seorang diri di bukit tanpa aliran listrik dan mengandalkan hasil kebun.....54
Gambar 3.1 Peta Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara, NTB..65
Gambar 3.2 Pulau Gili Air dan Gili Trawangan.....68
Gambar 3.3 Perahu Penyeberangan ke Desa Gili Indah 68
Gambar 3.4 Berjalan kaki mengitari pulau 72
Gambar 3.5 PPL tidak dapat menemui warga yang sudah didatangi berkali-kali.....77
Gambar 3.6 Pendataan Masyarakat Kurang Mampu 80
Gambar 3.7 Bang Anto.....84
Gambar 3.8 Bang Redi 87
Gambar 3.9 Bang Wawan.....88
Gambar 3.10 Pak Husni 90
Gambar 3.11 Nenek Kemasin.....94
Gambar 3.12 Nenek Rupinah dan Keluarga 95
Gambar 4.1 Model Bendungan Passelloreng..... 108
Gambar 4.2 Peta Administratif Kabupaten Wajo 109

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Gambar 4.3 Kampung Air Pasca Pembangunan Bendungan 110
Gambar 4.4 Pendataan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Wajo..... 142
Gambar 4.5 Pendataan terhadap Kepala Bappeda 143
Gambar 4.6 Pendata Fivi sedang Mendata Keluarga 145
Gambar 4.7 Supiyah, Ibu Rumah Tangga Perkawinan Muda 152
Gambar 4.8 Korban Perkawinan Muda..... 159
Gambar 5.1 Wawancara dengan Kepala BPS Provinsi Gorontalo ... 167
Gambar 5.2 Wawancara dengan Kepala BPS Kabupaten Gorontalo 168
Gambar 5.3 Peta Wilayah Provinsi Gorontalo..... 170
Gambar 5.4 Bentang Alam Desa Pinogu Kabupaten Bone Bolango 171
Gambar 5.5 Kepala BPS Prov Gorontalo menerangkan proses sosialisasi Regsosek kepada Penjabat Gubernur Gorontalo..... 174
Gambar 5.6 Pendataan Awal Regsosek dengan Penjabat Gubernur Gorontalo..... 175
Gambar 5.7 Sosialisasi dan Dukungan Regsosek 2022..... 175
Gambar 5.8 Salah satu kegiatan Regsosek adalah memfoto rumah dan bagian rumah..... 176
Gambar 5.9 Salah Satu Kondisi Rumah Responden Regsosek 2022 176
Gambar 5.10 Kepala BPS Kab. Gorontalo dan Camat Melepas Petugas 179
Gambar 5.11 Tim Regsosek Bersama Responden 179
Gambar 5.12 Diskusi dengan Lurah Kayubulan Kec. Limboto..... 181
Gambar 5.14 Petugas mewawancarai responden. 184
Gambar 5.13 Petugas menuju lokasi keluarga pendataan awal Regsosek 2022..... 184
Gambar 5.15 Bagian Atap Rumah yang Difoto 185
Gambar 5.16 Pendataan Pada Tempat Pengungsian Akibat Banjir .. 185
Gambar 5.17 Gapura Menuju Desa Torosiaje Kab. Pohuwato 188
Gambar 5.18 Jalan Menuju Penyeberangan ke Perumahan Terapung 189
Gambar 5.19 Salah Satu Lorong di Perkampungan Torosiaje 190

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Gambar 5.20 Nelayan dan Perumahan di Desa Torosiaje..... 192
Gambar 5.21 Kondisi Permukiman Masyarakat Torosiaje..... 193
Gambar 6.1 Peta Pola Ruang Kab. Donggala Desa Limboro 219
Gambar 6.2 Verifikasi Faktual..... 228
Gambar 6.3 Diskusi Bersama BPS Kab. Donggala dan BPS Provinsi 229
Gambar 6.4 Kegiatan Koordinasi di Desa Limboro..... 238
Gambar 6.5 Kondisi Faktual dan Life Story Warga Dusun Lima Apumpae..... 250
Gambar 7.1 Peta Adminisitrasi Kabupaten Manokwari..... 264
Gambar 7.2 Kondisi IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Tahun 2020..... 266
Gambar 7.3 Kondisi Jalan Menuju Desa Nimbay..... 280
Gambar 7.4 Petugas PML dan PPL melakukan pendataan. 281
Gambar 7.5 Perbincangan bersama dengan Bapak Martin dan DRK..... 284
Gambar 8.1 Pengumuman Rekrutmen Mitra Pendataan Regsosek..... 303
Gambar 8.2 Hasil Seleksi Calon Petugas Regsosek BPS Kota Ternate..... 304
Gambar 8.3 Aplikasi Wilkerstat..... 306
Gambar 8.4 Pulau Ternate..... 308
Gambar 8.5 Kondisi Permukiman di Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara 310
Gambar 8.7 Jalan menjulang terjal eksotisme hamparan indah dari selatan Gunung Gamalama. 312
Gambar 8.6 Potret Makam Sultan Ternate, Babullah di Foramadiahi 312
Gambar 8.8 Perjalanan menuju Pulau Hiri yang dihiasi hamparan biru laut 313
Gambar 8.9 Pesona Tebing Karang Gurabala di Pantai Tomajiko, Pulau Hiri Ternate 314
Gambar 8.10 Potret anak jalanan tidur di dekat Ternate Landmark. 315

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Gambar 8.11 Potret Kemiskinan Lansia Penjual Kue, Janda Beranak 10, Aisyah Alting di Kasturian, Ternate Utara, Kota Ternate 316
Gambar 8.12 Spanduk untuk menyukseskan Regsosek terpasang di depan pelabuhan kecil Pulau Hiri. 325
Gambar 8.13 Potret Kisah Salah Satu Responden Regsosek 335
Gambar 8.14 Potret Senyum Kepolosan Nur Santi Hidayat Sula di Foramadiahi Ketika Pendataan 336

Buku ini tidak diperjualbelikan.

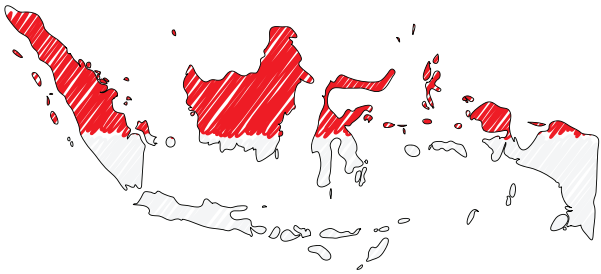

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Jumlah Penginapan dan Kedai Makanan di Kecamatan Pemenang.....66

Tabel 4.1 Perkembangan Data Penduduk Kab. Wajo 112

Tabel 8.1 Hasil Seleksi Final Petugas PML dan PPL Kota Ternate..... 304

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

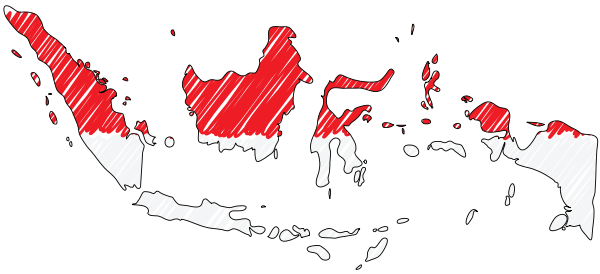

Pengantar Penerbit

Sebagai penerbit ilmiah, Penerbit BRIN mempunyai tanggung jawab untuk terus berupaya menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas Penerbit BRIN untuk turut serta membangun sumber daya manusia unggul dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Pengumpulan data merupakan awal dari banyak pengambilan kebijakan. Presiden RI menyampaikan langsung betapa strategisnya hal ini untuk dilakukan. Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) kemudian diamanatkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dilakukan pada tahun 2022. Tentunya diperlukan sinergi dengan banyak pihak untuk menghasilkan data yang valid dan holistik. Di sinilah BRIN hadir; Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas bersama-sama dengan BPS melaksanakan kegiatan Regsosek yang tidak hanya berisikan data, tetapi juga rekaman emik kualitatif masyarakat Indonesia.

Buku ini merupakan kompilasi dari pelaksanaan Regsosek 2022 untuk menunjukkan bagaimana sensus dan citranya di masyarakat. Pendataan bukanlah sekadar mencacah, melainkan usaha mendalam untuk menyediakan akurasi informasi yang kemudian menjadi pegangan pemerintah dalam mengambil kebijakan ke depan. *Mencatat untuk*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Membangun Negeri: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi terdiri dari dua seri. Jilid 1 ini memaparkan hasil pelaksanaan Regsosek di tujuh lokasi di bagian timur Indonesia. Tercakup di dalamnya adalah Timur Tengah Selatan, Lombok Utara, Wajo, Gorontalo, Donggala, Manokwari, dan Ternate.

Besar harapan kita semua bahwa buku ini akan menjadi dukungan utama bagi Satu Data Indonesia, yang kemudian dapat dijadikan acuan bagi upaya-upaya Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan dan program. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

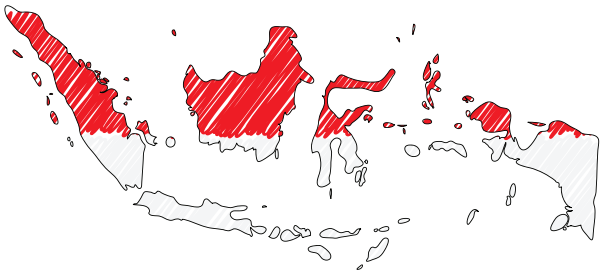

Kata Pengantar
Sekretaris Utama BPS RI

Data yang akurat dan berkualitas merupakan penentu keberhasilan dalam penyusunan kebijakan dan arah pembangunan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki tugas dalam penyediaan data statistik untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan, salah satunya adalah untuk perencanaan dan pelaksanaan program perlindungan sosial. Pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 dan 2022 dicetuskan tiga reformasi struktural menuju Indonesia Maju 2045, di mana salah satunya mengenai reformasi sistem perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh penduduk melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Perluasan cakupan data perlindungan sosial merupakan sebuah keniscayaan, terlebih setelah kehadiran pandemi Covid-19 dan peningkatan kejadian bencana alam dalam beberapa tahun terakhir yang dampaknya dirasakan oleh banyak kalangan. Pada Oktober–November 2022, BPS diamanatkan untuk melaksanakan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022. *Output* Regsosek 2022 adalah basis data yang mencakup seluruh penduduk. Dari Pendataan Awal Regsosek akan diperoleh data-data yang dapat digunakan untuk mendukung kebijakan di berbagai sektor, seperti perumahan, kesehatan, UMKM, dan ketenagakerjaan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Data ini bersifat strategis karena akan menjadi acuan dalam penyusunan dan implementasi program perlindungan sosial yang bersifat adaptif dan inklusif. Kegiatan Pendataan Awal Regsosek 2022 telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN 2023 di depan rapat paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2022. Mengingat nilai strategisnya, tantangan kegiatan Pendataan Awal Regsosek bagi BPS dan kementerian/lembaga adalah sinergi untuk kolaborasi dalam pelaksanaan tugas ini. Pengumpulan data sosial ekonomi seperti ini memang bukan yang pertama dilakukan BPS, sebelumnya pernah dilakukan pada 2005, 2011, dan terakhir 2015. Meskipun demikian, tidak satupun di antaranya yang cakupannya menyasar 100% penduduk Indonesia. Oleh karenanya, kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak mutlak diperlukan, salah satunya dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas, Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM).

Dukungan BRIN, khususnya Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas yang diamanahi menjadi pelaksana kegiatan, adalah merekam kegiatan pendataan Regsosek dari sisi yang berbeda, seperti interaksi pendata dan masyarakat, dukungan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, hingga cerita-cerita menarik *behind the screen* yang ditemui di lapangan sehingga akan memperkaya narasi Regsosek sebagai sebuah kerja kolaboratif. Fakta-fakta dari sudut pandang tersebut yang terkadang terlewat dari perhatian BPS yang banyak disibukkan oleh aktivitas teknis pendataan dan menjaga akurasi data. Di sisi lain, BRIN sebagai lembaga riset terbesar di Indonesia saat ini tentunya akan memberikan gambaran yang objektif dari perspektif kualitatif yang menjadi salah satu keahliannya. Hasil dari penelitian yang dilakukan Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas di bawah OR TKPEKM di 16 Provinsi ini, saya harapkan bisa menjadi referensi yang reflektif, dengan belajar dari kasus-kasus spesifik hingga rekomendasi strategis yang sifatnya komprehensif.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Saya mengapresisasi sinergi yang baik antara BPS dan BRIN dalam kegiatan ini. Dua jilid buku "Mencatat untuk Membangun Negeri" akan menjadi sumbangan berharga pada upaya pemerintah dalam melaksanakan reformasi data perlindungan sosial di Indonesia.

Jakarta, Mei 2023

Ir. Atqo Mardiyanto, M.Si.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

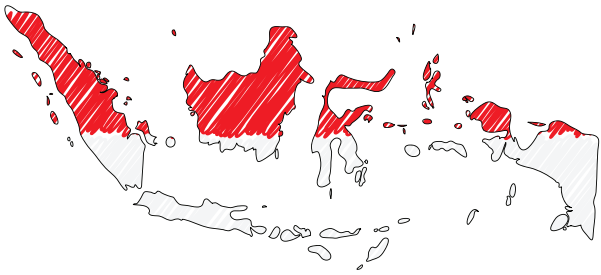

Kata Pengantar

Menyusun Variabel Emik Pendukung Regsosek

Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), sebuah aktivitas "se-model sensus" yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 menjadi momentum penting untuk membangun "Satu Data Indonesia" terkait perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Data yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi basis dari perumusan, perencanaan, dan implementasi kebijakan serta program pemerintah terkait bantuan sosial yang sebelumnya sering kali salah sasaran, kurang tepat, dan merenggangkan kohesivitas sosial.

Pendataan pada aspek-aspek sosial dan ekonomi pada skema Regsosek ini bersifat holistik dan integral, yang memungkinkan validitas dan akurasi datanya sangat tinggi. Terlebih kegiatan Regsosek ini juga didukung dengan penggunaan metode *geo-tagging* lokasi pada Satuan Lingkungan Sensus atau Satuan Lingkungan Setempat (SLS) dan pengambilan foto pada empat dimensi secara utuh dari masyarakat subjek pendataan. Pemilihan metode kuantitatif yang didukung dengan aplikasi pemodelan dan *geo-tagging* ini menjadi jalan penting inisiatif pemerintah dalam menyiapkan skema yang tepat dari berbagai program pembangunan yang akan diluncurkannya.

Inisiatif pemerintah yang mendelegasikan pelaksanaannya kepada BPS didasarkan kepentingan pencapaian tiga dari empat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tujuan negara sebagaimana yang diamanahkan dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan negara terkait perlindungan warga negara, peningkatan kesejahteraan umum, dan pencerdasan anak bangsa sangat kentara dalam berbagai konsep, variabel, dan indikator yang ditetapkan dan dituangkan dalam berbagai pertanyaan Regsosek. Jawaban subjek pendata atas pertanyaan itu menjadi data yang akan diolah, diprediksi, dan ditemukan model preferensinya sehingga berbuah pada kecenderungan program yang dapat dirumuskan dan diimplementasikan.

Niatan baik pemerintah yang dilakukan BPS di atas seyogianya perlu didukung oleh berbagai pihak, termasuk oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), khususnya oleh Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM). Visi besar OR TKPEKM yang berusaha mendorong adanya rancang bangun sistem tata kelola pemerintahan yang *proper* bagi kebijakan perlindungan sosial menjadi mandat dukungan terhadap kegiatan Regsosek BPS tahun 2022 ini. Sensus, survei dan registrasi, sesungguhnya adalah bagian tidak terpisahkan dari aktivitas penelitian.

Oleh karena itulah, melakukan kegiatan Regsosek dan mendampingi aktivitasnya sebenarnya sama saja melakukan penelitian, terlebih ketika para peneliti mengambil satu perspektif atau satu ranah tersendiri dari aktivitas Regsoseknya. Aktivitas teknis dan substansi Regsosek yang menjadi ranah tanggung jawab BPS tidak dimasuki. Namun, tim melihat dan merekam proses pendataan, strategi dalam pelaksanaan alur bisnis Regsosek, interaksi antara subjek data dan pendata, dukungan kelembagaan sosial tradisi, *life story* pendata, serta *life story* keluarga subjek data menjadi fokus utamanya.

Sekalipun berada "di luar dari aktivitas Regsosek", namun perekaman dan pemahaman secara emik kualitatif atas "rangkaian perilaku aktivitas" ini memungkinkan hadirnya tawaran strategi baru dalam sosialisasi dan pelaksanaan, perumusan variabel, dan indikator

Buku ini tidak diperjualbelikan.

baru untuk kepentingan substansi ruang lingkup Regsosek, serta mendokumentasikan peristiwa bersejarah yang diciptakan negara dalam upaya membangun Satu Data Indonesia.

Dalam konteks inilah para peneliti dari Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas (OR KSDK) hadir. Bukan dengan tujuan melegitimasi kegiatan Regsosek, melainkan di dalamnya memiliki tujuan besar, yaitu menciptakan arkeologi pengetahuan yang bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan masyarakat dan secara masif dapat menumbuhkan kesadaran bersama atas pentingnya data dan pendataan. Buku *Mencatat untuk Membangun Negeri* yang terdiri dari dua jilid ini menjadi bukti keinginan dan semangat para peneliti untuk menjadi ujung tombak pencerahan dan pencerdasan masyarakat Indonesia.

Saya menyambut gembira atas terbitnya dua jilid buku ini, seiring ucapan terima kasih kepada BPS RI yang bersedia memfasilitasi kegiatan "penelitian" dan menyertakan para peneliti dalam kegiatan Regsosek. Semoga kerja sama ini terus berlanjut, termasuk kesempatan para peneliti mengakses data Regsosek untuk kepentingan penelitian terkait perlindungan dan jaminan sosial. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas (PR KSDK), Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM), yang berusaha membangun kerja sama dengan pihak BPS, mempersiapkan para peneliti, dan menerbitkan buku luar biasa ini.

Untuk para peneliti di PR KSDK, saya ucapkan terima kasih dan selamat atas terbitnya buku ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Penerbit BRIN dari Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah (RPMI) BRIN yang menerbitkan buku ini. Demikian juga ucapan terima kasih yang sama saya sampaikan untuk lembaga penerbitan dan percetakan BPS RI yang bersedia mencetak

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan mendistribusikan buku ini secara *hardcopy*. Semoga buku ini akan menjadi "jalan dari arkeologi pengetahuan", dokumen hidup dan bagian tidak terpisahkan dari peristiwa bersejarah kegiatan Regsosek. Insya Allah, buku ini akan bermanfaat bagi masyarakat umum.

Jakarta, 23 Mei 2023

Dr. Agus Eko Nugroho, S.E., M.Econ.

Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan,
Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

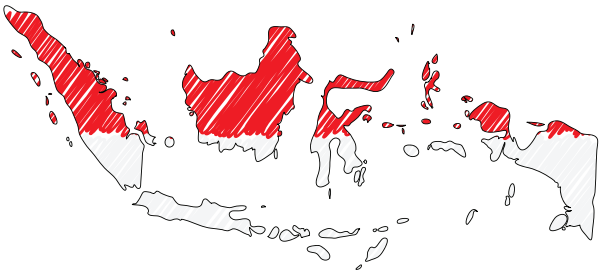

Prakata

Mencatat untuk Membangun Negeri: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi jilid 1 dan 2 merupakan dua buku kompilasi yang menarik. Narasi tentang proses pendataan kuantitatif yang diceritakan menunjukkan bahwa kegiatan survei atau sensus tidaklah semudah yang dibayangkan. Para pendata bukan sekadar membawa lembar kuesioner, bertanya dengan berbagai pertanyaan standar kepada para responden, mencentang dan menorehkan angka, serta memeriksa kembali jawaban responden, melainkan juga di dalamnya penuh perjuangan untuk bertemu responden, yang sering kali tidak dapat dilakukan dalam satu atau dua kali kunjungan.

Dengan beragam alasan, khususnya dari kelompok sosial ekonomi menengah ke atas, para responden berusaha menghindar diri dari pendataan, terlebih di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat privat terkait tingkat kekayaan, kepemilikan tanah dan emas, ataupun tingkat kualitas kesehatan. Sebaliknya, bagi kelompok menengah ke bawah, bukanlah mereka menghindari kegiatan pendataan, tetapi mereka berusaha menyembunyikan kekayaan yang dimilikinya, dan berusaha memesona para pendata agar memasukkannya sebagai kelompok entitas orang yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tak hanya itu, kelompok rentan dan miskin, dengan segala kesulitannya, selalu berharap bahwa pendataan ini akan menghantarkan dirinya untuk tetap mendapatkan program bantuan pemerintah. Sementara bagi mereka yang belum atau tidak pernah mendapatkan bantuan, tetapi sering kalinya pendataan dilakukan, tak jarang sifat tidak acuh dan caci maki pun melayang kepada Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML).

Respons yang menyakitkan dan harapan yang melambung tinggi dari para responden, ditambah bentang alam yang menyulitkan, menjadi "benang merah" narasi emik kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) ini. Cerita kepedihan di antara sedikit kebahagiaan nyaris menghiasi seluruh cerita yang ditulis para peneliti dari Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional (PR KSDK-BRIN).

Di sinilah kelebihan buku ini. Ia mampu menggambarkan aktivitas kuantitatif berupa kegiatan "model sensus" ke dalam amatan kualitatif yang mendalam dan memberikan pemaknaan atas seluruh perilaku dan interaksi yang terjadi di antara masyarakat subjek pendataan dan para petugas lapangan. Tidak hanya itu, aspek dukungan kelembagaan formal dan sosial tradisi beserta *life story* dari para pendata dan subjek masyarakat yang didata dikisahkan sebagai jalan utama dari "lika liku" program pendataan nasional ini.

Buku ini, selain berkontribusi bagi ilmu pengetahuan, juga menumbuhkan kesadaran atas pentingnya satu data Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan dan program perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat yang tepat dan efektif. Buku ini juga menghantarkan para pembaca untuk dapat menghormati pelaksanaan "tugas negara" yang dilakukan para petugas pendataan. Sebagai ujung tombak pendataan, mereka harus mampu memosisikan diri secara tepat di antara kepentingan kelompok masyarakat dan mendorongnya untuk bersedia didata. Partisipasi para pihak dalam mengumpulkan data sehingga dapat terhimpun dalam buku ini patut diapresiasi. Temuan data terkait foto dan hasil wawancara yang ditampilkan pun

Buku ini tidak diperjualbelikan.

telah mendapat persetujuan dari para pihak yang terkait dalam proses pendataan ini.

Menghadirkan buku *Mencatat untuk Membangun Negeri: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi* jilid 1 dan 2 ini seolah sedang mengemas rasa ingin tahu dan semangat keindonesiaan kita untuk dimaknai oleh seluruh warga bangsanya. Selamat membaca.

Jakarta, 10 Januari 2023
Editor

M. Alie Humaedi
Dian Karinawati Imron
Agus Pramono

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

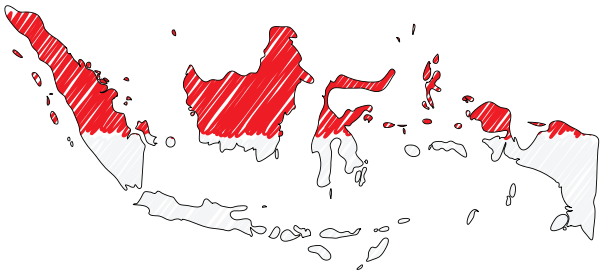

Ucapan Terima Kasih kepada Kepala BPS Provinsi 7 Lokus Kabupaten/Kota Amatan

Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas (PR KSDK)-Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan para kepala BPS provinsi yang menjadi naungan BPS kabupaten/kota yang menjadi lokasi kegiatan narasi emik Registrasi Sosial Ekonomi BPS tahun 2022.

1.	Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	:	Matamira B. Kale, S.Si, M.Si.
2.	Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	:	Drs. Wahyudin, MM.
3.	Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan	:	Dr. Suntono, SE, M.Si.
4.	Kepala BPS Provinsi Gorontalo	:	Mukhammad Mukhanif, S.Si, M.Si.
5.	Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah	:	Drs. Simon Sapary, M.Sc.
6.	Kepala BPS Provinsi Papua Barat		Maritje Pattiwaellapia, SE, M.Si.
7.	Kepala BPS Provinsi Maluku Utara	:	Aidil Adha, SE, ME.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

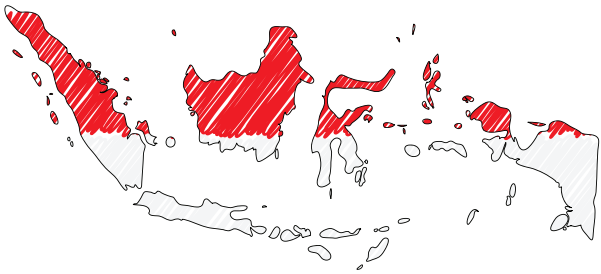

1

Mendata Bangsa, Menawarkan Solusi: Benang Merah Penarasian Emik Tujuh Lokasi

M. Alie Humaedi

A. Mencari Alat Ikat Pendataan: Suatu Pengantar

Kebesaran sebuah bangsa yang mencakup potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi lainnya, baik secara kuantitas maupun kualitas, harus dapat dilakukan semaksimal mungkin. Demikian juga, tingkat kerentanan dalam aspek sumber daya, kesehatan, keterbatasan akses, dan konektivitas yang ada pun harus terpetakan dengan baik. Proses pendataan potensi dan kerentanan sama pentingnya dengan perumusan kebijakan pembangunan yang diperuntukkan kemaslahatannya bagi warga bangsa. Tujuan penghimpunan data yang valid, akurat, dan transparan selain untuk merencanakan kebijakan dan program yang menyejahterakan kehidupan masyarakat, juga di dalamnya ada penegasan tentang kemandirian dan kedaulatan sebagai sebuah bangsa.

M. A. Humaedi
Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: mali002@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Humaedi, M. A. (2023). Mendata bangsa, menawarkan solusi: benang merah penarasian emik tujuh lokasi. Dalam M. A. Humaedi., D. K. Imron, & A. Pramono (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 1 Indonesia Tengah-Timur* (1–16). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.775.c695 ISBN: 978-623-8052-94-3 E-ISBN: 978-623-8052-98-1

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Data bukan sekadar deretan angka tak bermakna, melainkan di dalamnya ada kepentingan perencanaan pembangunan yang memadai. Ketiadaan data ataupun data yang kurang valid sama artinya dengan membawa proses pembangunan menjadi tidak jelas arah dan tidak pula mencapai target ujung capaiannya. Demikian juga, klaim atas keberhasilan pembangunan juga tidak dapat dilakukan serta merta, apalagi ketika dihadapkan pada upaya membangun citra posisi negara di tengah pergaulan internasional. Ketika negara tidak memiliki data atau data yang diajukan salah, bagaimana mungkin kita mengajukan diri sebagai negara dalam status tertentu, misalnya status negara maju, status negara G-20, status pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan lainnya. Data pada aspek-aspek tertentu sesuai dengan ruang lingkup kebutuhannya menjadi bagian tidak terpisahkan dari kedaulatan sebuah bangsa.

Untuk kepentingan itu, pencacahan dalam berbagai sisi dilakukan oleh negara. Sensus, survei, ataupun registrasi nasional terkait jumlah penduduk, sosial, dan ekonomi dilakukan untuk kepentingan merancang bangun berbagai kebijakan terkait hal tersebut. Pencacahan menjadi garda terdepan dari sebuah proses pembangunan. Arah dan target pembangunan ditetapkan berdasarkan rasional kalkulatif yang didasarkan pada perhitungan *rigid* antara kepemilikan, kebutuhan, dan rasio lainnya. Menafikan kepentingan pencacahan, berarti sama saja mendorong pembangunan bangsa tanpa arah dan tujuan pasti. Akibatnya, empat tujuan negara, khususnya terkait perlindungan warga negara, meningkatkan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945, tidak akan terwujud.

Kegiatan sensus penduduk misalnya, secara umum bertujuan mendapatkan data karakteristik dari suatu populasi pada waktu tertentu. Sensus penduduk juga bertujuan untuk membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun program-program kependudukan dan sosial, termasuk penetapan kursi beserta beban biaya politik dalam berbagai pemilihan umum legislatif dan eksekutif. Hal ini dikarenakan data hasil sensus penduduk tidak hanya meliputi jumlah orang, tetapi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

juga komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk, seperti jenis kelamin, usia, bahasa, dan parameter demografi lain yang dianggap perlu, terlebih data sensus adalah hal yang penting bagi negara dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan di berbagai bidang. Bahkan, tidak jarang data kependudukan juga digunakan oleh sektor industri dalam menskenariokan strategi pemasaran beserta sistem mata rantai produksi-konsumsinya. Ibaratnya, menguasai data berarti juga menguasai mata rantai sektor industri.

Dari waktu ke waktu juga dilakukan berbagai penyesuaian terkait tujuan, metode, dan ruang lingkup sensus penduduk, termasuk pada sensus penduduk tahun 2020. Sebagai contoh, sensus penduduk tahun 2020 tidak hanya untuk melakukan pendataan penduduk saja, tetapi juga untuk mendukung tercapainya "Satu Data Kependudukan Indonesia". Hal ini dikarenakan kegiatan sensus penduduk terkini dilakukan untuk mendukung proses penyempurnaan data administrasi kependudukan yang dipegang oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Data kependudukan sesungguhnya menjadi basis data untuk berbagai kepentingan dan skenario pembangunan yang ditetapkan pemerintah.

Sensus penduduk ataupun registrasi sosial ekonomi merupakan "ide modern" yang menempatkan penduduk beserta aspek sosial di dalamnya sebagai deret angka, dan diperhadapkan dengan kepentingan tujuan negara. Artinya, sensus dan registrasi menjadi pencacahan lengkap semua orang dan karakteristik penting masyarakat untuk tujuan memahami struktur dasar dan tren masyarakat. Sejarah telah menunjukkan bagaimana pencacahan secara skala besar pertama kali dilakukan pada populasi Acadia (Nova Scotia) dengan termin 10 kali selama 1671–1714 (Ross & Deveau, 1992; Hynes, 1973). Italia melakukan lima sensus di antara waktu Unifikasi dan Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1861, 1871, 1881, 1901, dan 1911 (A'Hearn dkk., 2021).

Sementara itu, di Amerika Serikat, sensus periode awal dilakukan pada 1790–1840, di mana data yang disediakan masih pada level rumah tangga, dan pada tahun 1850 kemudian dirumuskan data pada

Buku ini tidak diperjualbelikan.

level individu (Winkle, 1994). Inggris melakukan sensus pertamanya pada tahun 1801 (Campbell-Kelly, 1996). Prancis pun melakukan kegiatan pencatatan warga pada tahun 1791 di bawah aturan *ancient regime,* tetapi menandai tahun 1836 sebagai register populasi yang regular dan sistematik (Haug, 1979). Namun, terdapat kelemahan pada sistem administrasinya yang dipandang kurang baik sehingga kegiatan pendataan terus ditingkatkan perbaikannya. Pendataan penduduk akhirnya menjadi cara paling efektif bagi masyarakat modern dalam menetapkan kebesaran suatu bangsa beserta karakter sosial budaya dan ekonominya.

Falsafah dasar tersebut juga diikuti oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS menjadi penanggung jawab pendataan untuk kepentingan negara. Artinya, BPS menjadi satu-satunya lembaga negara pemangku data. Jika ada kementerian/lembaga lain yang melakukan kegiatan pendataan, sebenarnya dapat dikatakan sebagai aktivitas di luar tugas dan fungsinya yang berkorelasi pada ketidakefektifan anggaran negara. Hal lainnya, pendataan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga di luar BPS memungkinkan terciptanya kesimpangsiuran dan ketumpangtindihan data yang memicu konflik arus bawah yang mematikan. Silang sengkarut data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Sosial (bansos) yang tidak tepat atau salah sasaran, misalnya, telah menyebabkan konflik laten di tingkat masyarakat lokal. Kecenderungan kerusakan moral (*moral hazard*) dan terjadinya entitas maladaptif (penuh kemenduaan atau kepalsuan) juga makin hari makin besar seiring dengan ketidaktepatan sasaran penerima BLT ataupun program perlindungan dan jaminan sosial lainnya (Nyman & Maude-Griffin, 2001).

Selain persoalan tersebut, pendataan yang dilakukan secara sektoral telah memicu terjadinya peningkatan persepsi negatif bahwa pendataan itu berhubungan erat dengan penerimaan program bantuan. Akhirnya, setiap pendataan akan berujung pada tuntutan atas bantuan sosial sebagaimana yang dipersepsikan masyarakat. Suasana batin seperti ini menyulitkan para pendata di lapangan, termasuk pada perangkat organik dan non-organik BPS.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab penuh terhadap pendataan penduduk beserta aspek-aspek lainnya, secara rutin BPS pun mengadakan sensus penduduk, sensus sosial ekonomi, berbagai survei aktual, dan registrasi sosial ekonomi (Regsosek). Dalam konteks sensus, BPS telah dikenal oleh masyarakat di tingkat desa ataupun wilayah terpencil sekalipun. Hal ini terjadi karena basis data sensus di tingkat rumah tangga memungkinkan "nama BPS" masuk ke alam kesadaran masyarakat Indonesia. Beberapa penelitian dan penulisan pun telah banyak dilakukan para akademisi sehingga pembangunan citra tentang BPS sebagai pemangku dan pelaksana pendataan atas aspek kependudukan, perkembangan sosial ekonomi, dan aspek lainnya masuk menjadi "arkeologi pengetahuan" dari kelompok pelajar dan terpelajar (Guntara dkk., 2019; Wulansari dkk., 2022; Hafifah & Marsisno, 2022). Kenyataan ini ditambah dengan pemberitaan terus-menerus dari media massa, baik cetak maupun *online* yang memberitakan pentingnya sensus penduduk, sensus pertanian, ataupun survei-survei lainnya, terlebih ketika jadwal-jadwal waktu itu telah rutin dilakukan.

Angka akhir di urutan tahun akan menjadi rutinitas atas jadwal sensus atau survei tertentu. Angka 0, misalnya akan identik dengan sensus penduduk (seperti 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020). Sementara angka 3 di belakang, selalu identik dengan sensus pertanian, misalnya tahun 2003, 2013, dan 2023. Ada juga angka 6, yaitu dikhususkan untuk sensus ekonomi, seperti tahun 2006, 2016, dan 2026 nantinya. Angka akhir 1, 2, 4, 5, 7, 8, dan 9 pada umumnya digunakan untuk aktivitas sensus yang direncanakan atau survei yang bersifat sampling dan tidak menyeluruh. Salah satu sensus yang direncanakan itu adalah Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Kata registrasi yang ada telah menunjukkan proses pendaftaran kembali dari data sensus yang ada pada pendataan sebelumnya. Program Regsosek ini semacam sensus karena berbasiskan keluarga di Satuan Lingkungan Setempat (SLS).

Pendataan Regsosek adalah pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri dari profil, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Data Regsosek akan menjembatani koordinasi dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

berbagi pakai data lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan pemakaian data yang konsisten karena terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan. Regsosek mencakup informasi kondisi sosial ekonomi yang meliputi di antaranya, yaitu (1) Kondisi sosio-ekonomi demografis; (2) kondisi perumahan dan sanitasi air bersih; (3) kepemilikan aset; (4) kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus; (5) informasi geospasial; (6) tingkat kesejahteraan; dan (7) informasi sosial ekonomi lainnya. Selain penghimpunan data tersebut, Regsosek juga mengikhtiarkan adanya analisis lokasi dan dimensi keruangan (*geotagging*) serta keadaan rumah yang sebenarnya. Hal ini memungkinkan data bersifat valid, autentik, dan akurat sehingga dapat digunakan untuk kepentingan penetapan rumah tangga penerima program perlindungan dan jaminan sosial di kemudian hari.

Akhirnya, Regsosek adalah pendataan kesejahteraan sosial ekonomi yang bersifat holistik dan integral bagi seluruh penduduk Indonesia. Tujuan Regsosek yang sangat penting ini perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, tak terkecuali dari lembaga riset dan inovasi seperti Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional (PR KSDK BRIN). Dalam konteks perlindungan dan jaminan sosial, Regsosek dapat diposisikan sebagai salah satu strategi pelaksanaan reformasi sistem perlindungan sosial. Upaya pendataan kuantitatif yang berhubungan dengan perlindungan sosial seperti ini perlu dikuatkan dengan penarasian emik kualitatif, baik dalam proses pendataannya maupun dalam substansi data terkait aspek-aspek terkait dalam perlindungan sosialnya.

Kata emik yang dimaksud di sini adalah sebuah proses penggalian sudut pandang dari subjek yang diteliti, baik dari kelompok masyarakat umum yang didata maupun para petugas pendata yang terdiri dari Petugas Pencatatan Lapangan/PPL dan Petugas Pemeriksa Data Lapangan/PML. Sudut pandang subjek tersebut tidak akan terlepas dari karakter sosial budaya (*social cultural specificity*) wilayah-wilayah lokal setempat yang berbeda antara satu dan lainnya. Penarasian emik pada aktivitas Regsosek berarti menunjukkan adanya upaya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mengangkat perspektif dan praktik lokal dalam menerjemahkan aktivitas yang bersifat etik, baik berupa kebijakan, program, maupun strategi yang berskala nasional dan *general*. Penerjemahan itu bisa dilihat dari kelompok masyarakat sebagai kelompok target yang didata ataupun para agen penghubung pelaksana kegiatan nasional tersebut. Penarasian emik Regsosek menjadi kekuatan tersendiri dalam mengungkap kedalaman data dan sisi sosial-politik atas data yang bersifat lokal.

Buku yang mengangkat narasi emik pendataan pada 16 lokasi amatan yang dipecah pada dua serial buku ini berusaha menelisik proses pendataan Regsosek yang dianggap sebagai "sensus model baru" sehingga titik kelebihan dan kelemahannya dapat diketahui. Hal ini menjadi sangat penting untuk proses pembaruan ataupun konstruksi ulang kegiatan Regsosek di tahun-tahun berikutnya. Selain tujuan itu, substansi buku ini juga menawarkan berbagai variabel dan indikator baru yang dapat dikembangkan dalam penentuan aspek-aspek kesejahteraan sosial dan kelayakan penerima program perlindungan dan jaminan sosial.

Dua tujuan buku tersebut merupakan sumbangsih para peneliti di PR KSDK dalam mendukung segala ikhtiar BPS yang berhubungan dengan penguatan tata kelola dan pencapaian tujuan program perlindungan dan jaminan sosial bagi warga negara.

B. Menelisik Proses dan Memahami Pengalaman dalam Pendataan: Alur Metode

Kegiatan penarasian emik Regsosek tahun 2022 yang dilakukan oleh Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional berada pada dua aspek utama. *Pertama*, prosesi pendataan yang dilakukan para pelaksana kegiatan, baik Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML), maupun Petugas Pendataan Lapangan (PPL), yang tersebar di berbagai wilayah. Selain soal prosesi pendataan, amatan, dan pengumpulan data juga difokuskan pada pelaksanaan alur bisnis beserta keputusan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kepala BPS Kabupaten/Kota lokus amatan dan strategi dari perangkat organik dan non-organik BPS. *Kedua*, subjek data atau individu dan keluarga yang didata. Data amatan dan wawancara ini penting untuk mendapatkan konstruksi baru terkait variabel dan indikator penting yang bisa dikembangkan untuk kepentingan perumusan sistem dan mekanisme penetapan kelayakan warga masyarakat penerima program perlindungan dan jaminan sosial dari negara.

Kata penarasian emik berarti tertuju pada keseluruhan informasi, sudut pandang, praktik hidup dan nilai-nilai yang dipedomani berdasarkan karakter sosial budaya tertentu yang berkembang pada dua kelompok subjek penelitian di atas. Kegiatan penarasian emik Regsosek ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang di dalamnya menuntut adanya kedalaman data untuk memahami proses interaksi, perilaku, harapan, dan tujuan yang hendak dicapai di dalamnya. Metode ini dipilih sebagai ikhtiar untuk mendapatkan pemahaman mendalam atas berbagai aktivitas. Di dalamnya dilakukan dua teknik pengumpulan data utama, yaitu (1) wawancara mendalam terhadap para pelaku lapangan (supervisor, enumerator, dan masyarakat); (2) observasi atas *gesture* dan proses pelaksanaan kegiatan Regsosek.

Pemahaman ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan pengetahuan atas kegiatan pendataan dan perolehan angka yang muncul pasca-pendataan tersebut. Artinya, angka tidak sekadar angka yang dihasilkan dari lembar kuesioner yang ditanyakan pendata kepada subjeknya tetapi di dalamnya ada makna dan harapan yang dihadirkan oleh subjek yang penuh dengan berbagai motivasi. Oleh karena itulah, wawancara mendalam, observasi terlibat, dan diskusi dilakukan oleh para peneliti terhadap para informan yang berasal dari responden pendataan ataupun dari para pelaksana pendata, tokoh masyarakat, dan kelompok pejabat yang dianggap mengetahui prosesi kegiatan, alur bisnis, dan daya dukung pelaksanaan kegiatan Regsosek.

Setelah data itu diperoleh, proses triangulasi data dan sumber data dilakukan secara bersamaan saat di lapangan. Jika ia informasi tunggal, seperti *life story*, triangulasi data akan dihadapkan pada

Buku ini tidak diperjualbelikan.

informan sekitar ataupun didasarkan pada jawaban-jawaban atas pertanyaan di dalam kuesioner Regsosek. Triangulasi data juga dilakukan dengan mengonfirmasikan informasi yang ada dengan warga pada satuan lingkungan setempat ataupun tokoh yang menjadi pemangku wilayahnya. Amatan keadaan lingkungan sekitar dan lainnya akan dikuatkan dengan data yang berasal dari desa, dinas terkait, dan dokumen lainnya. Tujuannya, data kualitatif yang dihadirkan dari para informan dapat tervalidasi dengan berbagai informasi tertulis yang mendukung. Dalam prosesnya, setiap tim peneliti telah diberikan panduan wawancara, observasi, dan bahkan *outline* sementara yang bisa dikembangkan berdasarkan temuan yang ada di daerah amatannya masing-masing.

Kegiatan pengumpulan data untuk penulisan buku ini dilakukan oleh 32 orang peneliti PR KSDK yang tersebar pada 16 provinsi di Indonesia. Pemilihan kabupaten/kota yang menjadi lokus penelitian didasarkan pada aspek-aspek utama terkait ruang lingkup perlindungan dan jaminan sosial. Aspek terkait kemiskinan ekstrem, angka *stunting*, perkawinan muda/di bawah umur, rendahnya akses dan konektivitas, minimnya fasilitas publik, kurangnya kualitas kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, banyaknya tenaga kerja migran, minimnya pertanian, dampak buruk pembangunan, dan lainnya yang melekat pada status dan keadaan masyarakat pada sebuah wilayah menjadi dasar pemilihan kabupaten/kota sebagai lokus penelitiannya.

Bisa jadi suatu daerah kabupaten/kota mencakup aspek-aspek tersebut, namun aspek dominan lah yang menjadi pertimbangan utama dari pemilihan suatu daerah tertentu menjadi lokus penelitian. Dengan pertimbangan tertentu maka penelitian atas kegiatan Regsosek pada setiap satu kabupaten/kota dengan cakupan aspek yang ada diamati oleh dua orang peneliti. Mereka bertugas untuk mengamati proses Regsosek dan sekaligus melakukan pengumpulan data terkait variabel dan indikator baru untuk kemiskinan serta memahami tingkat keberterimaan masyarakat, dukungan kelembagaan sosial tradisi dalam promosi Regsosek, *life story* pendata, dan *life story* keluarga yang didata.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ada makna penting di balik penelusuran *life story* subjek data. Informasi dan pengalaman dari sebuah keluarga yang terikat pada lingkungan sekitarnya dapat memunculkan variabel dan indikator terbaru terkait kemiskinan dan kesejahteraan yang diharapkan. Aspek inilah yang menjadi tujuan strategis dari pelaksanaan kegiatan kemitraan antara BPS dan PR KSDK. Harapannya, penelitian dengan metode kualitatif ini dapat (1) memberikan penjelasan dan masukan terhadap proses bisnis pelaksanaan kegiatan Regsosek bagi BPS; (2) mendorong perbaikan proses bisnis berdasarkan data temuan di lapangan, beserta analisis *forecasting* dalam pengembangan ke depannya; dan (3) mendokumentasikan seluruh proses kegiatan Regsosek secara emik di berbagai lokasi, sebagai pembelajaran baik bagi para pihak maupun masyarakat umum tentang potensi dan kendala membangun Satu Data Indonesia.

C. Struktur Penceritaan Emik

Penelitian atas kegiatan Regsosek tahun 2022 yang dilakukan secara keseluruhan terdiri dari 16 bagian. Jumlah ini didasarkan pada lokus penelitian beserta cakupan aspek utama yang dikembangkan dalam melihat permasalahan di lokasi Regsosek. Berdasarkan tujuan komprehensi tulisan, seluruh tulisan ini dibagi ke dalam dua buah buku terbitan dengan judul *Mencatat untuk Membangun Negeri 1: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Indonesia Tengah dan Timur;* dan *Mencatat untuk Membangun Negeri 2: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Indonesia Tengah dan Barat*. Pemecahan bagian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan geohistoris kawasan tanpa menafikan karakter masing-masing wilayah dengan ikatan lama dan fenomena umum di pulau besarnya.

Buku jilid pertama ini terdiri dari sembilan bab. Sebagai penarik benang merah dari beragam tulisan yang ada, tulisan ini dibuka oleh M. Alie Humaedi dengan judul "Mendata Bangsa, Menawarkan Solusi: Mencari Benang Merah Penarasian Emik Tujuh Lokasi". Bagian ini tentu menjadi ujung tombak kemasan yang mudah dibaca terkait tujuan dari proses penarasian emik kegiatan Regsosek ini.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pada bagian tulisan kedua, Bilal As'Adhanayadi dan Gustaf Wijaya secara cermat menulis fenomena alam, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di Timor Tengah Selatan, khususnya pada saat Regsosek dilakukan. Dengan mengambil judul "Membelah Karang, Menggali Data: Regsosek Timor Tengah Selatan (TTS)", keduanya menceritakan betapa sulitnya pendataan di daerah terpencil, miskin, dan sulitnya akses konektivitas. Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi pemula dari proses narasi buku ini dengan harapan bahwa orientasi pembangunan, khususnya pada perlindungan dan jaminan sosial, diharapkan dapat diarahkan pada wilayah dan masyarakat yang memiliki kedaruratan sangat tinggi. Kabupaten TTS di NTT berdasarkan data BPS yang ada disebut-sebut sebagai peringkat pertama angka *stunting* dan salah satu kabupaten termiskin di Indonesia.

Selaras dengan fenomena di NTT, kemiskinan juga terjadi di Nusa Tenggara Barat. Bahkan, dalam konteks NTB, silang sengkarut persoalan kependudukan beserta penyebab dan dampaknya menjadi fenomena tambahan yang tidak bisa dinafikan begitu saja. Lombok yang terlihat hebat di bidang pariwisata rupanya tidak berdaya dalam penataan persoalan kependudukan, termasuk data kependudukan di dalamnya. Sekalipun keduanya tidak terhubung, tetapi jika ditelusuri lebih dalam lagi, keduanya saling terkait dan dapat menjadi indikator penting korelasi antara pembangunan industri pariwisata dengan kemiskinan dan lahirnya kelompok pinggiran baru. Keadaan ini juga memungkinkan kesulitan tersendiri dalam pendataan pada kegiatan Regsosek. Fenomena ini direkam secara baik oleh Rudy G. Erwinsyah dan Delfirman dengan mengangkat judul bab tiga "Impian Pendatang, Tantangan Pendataan: Upaya Memahami Silang Sengkarut Kependudukan di Episentrum Pariwisata Lombok Utara". Fenomena silang sengkarut kependudukan ini menyulitkan pendataan para Petugas Pendataan Lapangan (PPL), khususnya terkait tempat tinggal dan keanggotaan keluarga.

Buah pembangunan tidak selalu jatuh ke masyarakat lokal, bahkan memicu dampak buruk terhadap fenomena kependudukan sebagaimana yang disampaikan pada bab empat, yaitu pada kasus

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pembangunan bendungan Paselloreng di Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, yang pada awalnya bertujuan baik untuk meningkatkan produktivitas padi di wilayah lumbung pangan Sulawesi Selatan, juga membawa dampak sampingan yang cukup memprihatinkan. Setidaknya ada tiga desa yang tenggelam. Kehidupan warga berubah dari kehidupan daratan dengan segala sistem budaya dan *livelihood system*-nya menjadi "manusia perairan" yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dalam proses pendataan Regsosek, keadaan ini sangat menyulitkan para pendata. Keadaan ini belum ditambah dengan fenomena sosial perkawinan muda atau di bawah umur yang dalam proses pendataannya menyulitkan kepastian status anak atau suami di dalam suatu rumah tangga tertentu. Ingin dinyatakan sebagai anggota keluarga tetapi statusnya belum tercantum dalam dokumen kependudukan. Demikian juga daya dukung kepemilikan dokumen pun menjadi persoalan tersendiri. M. Alie Humaedi dan Fatwa Nurul Hakim secara cermat memetakan kesulitan pendataan Regsosek ini ke dalam bab empat yang berjudul "Mencatat Wajo dalam Regsosek, Menghadirkan Wajah Indonesia".

Masih dari satu daratan yang sama, yaitu pulau Sulawesi, tulisan pada bab lima terkait narasi emik Regsosek di Provinsi Gorontalo diajukan oleh Sahajuddin dan Risyanto. Keduanya berusaha menelusuri sejarah pendirian Gorontalo yang berasal dari kerajaan-kerajaan kecil sebagai buah pemekaran dari Sulawesi Utara. Persoalan batas-batas wilayah yang berpengaruh terhadap tempat tinggal dalam Satuan Lingkungan Setempat (SLS) menjadi problem tersendiri. Keadaan ini tentu menyulitkan para Petugas Pendataan Lapangan (PPL) saat mendata anggota masyarakat ataupun keluarga yang berada di antara batas-batas dua wilayah berbeda SLS itu. Pemekaran rupanya tidak selalu membawa pada kemakmuran dan kesejahteraan, tetapi juga menciptakan kesenjangan yang cukup besar antara mereka yang dapat mengakses kekuasaan dan kebijakan dengan yang tidak. Status sosial ekonomi seperti ini kadang sulit terpetakan dalam proses pendataan,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

terlebih ketika posisi ekonomi tinggi juga masih mempertahankan karakter rumah-rumah lama yang terbuat dari kayu dan papan.

Sedikit meloncat ke bagian tengah, wilayah Sulawesi Tengah dianggap sebagai wakil dari pertemuan berbagai etnis di Sulawesi. Di sana, tentu semarak etnis lokal seperti Kaili, Kulawi, dan lainnya terlihat kuat. Namun, kelompok etnik Bugis, Makassar, Buton, Ternate, Jawa, dan Bali pun tidak kalah kuatnya. Terlebih di wilayah Donggala, sebuah wilayah yang dianggap sebagai "kerajaan lama" dan sekaligus wilayah transmigrasi yang memungkinkan masuknya berbagai kelompok etnik ke dalam wilayahnya. Pertemuan budaya dan pernikahan silang etnik menjadi fenomena umum di masyarakat Donggala. Selain itu, masyarakat memiliki kebiasaan untuk menetap dalam tempo cukup lama di rumah-rumah kebunnya untuk mengurus ladang, kebun, dan sawah mereka. Keadaan itu juga cukup menyulitkan para petugas lapangan. Beberapa kali kunjungan ke rumah tempat tinggal tidak selalu dipastikan akan berjumpa dengan keluarga yang didata. Persoalan seperti ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaksana Regsosek di lapangan. Semua aspek kehidupan masyarakat beserta kendala dalam pendataan direkam oleh Arditya Wicaksono dan Tedi Gunawan dalam tulisan pada bab enam yang berjudul "Narasi Emik Regsosek Dusun Lima Apumpae, Desa Limboro, Donggala".

Setelah berada di daratan besar Sulawesi, bab tujuh dan delapan mulai mengarah ke wilayah Indonesia Timur, yaitu Papua dan Maluku Utara. Apa yang ditulis oleh Djoko Puguh Wibowo dan Yudha Raphael dalam "Regsosek: Isu dan Tantangan Meretas Angka di Bentang Alam Manokwari" menjadi pelajaran penting bagi pembaca mengenai betapa sulitnya melakukan pendataan di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Pendataan itu bukan sekadar menorehkan keterangan angka atau centang pada lembar kuesioner, tetapi bagaimana angka itu dimunculkan oleh responden terkait. Padahal untuk menelusur responden, jarak tinggal yang jauh, dan ditambah dengan aspek keamanan dan sistem tradisi yang ada, memungkinkan pendataan itu mengalami kesulitan. Jika para pendata bukan orang setempat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

atau bukan mereka yang berdomisili di lingkungan sekitar, sulit terbayangkan bagaimana proses pendataan itu dilakukan. Terlebih dengan tingkat kemiskinan, permasalahan sosial, stabilitas politik keamanan, konflik antarkampung, dan lainnya akan memberikan ancaman tersendiri bagi keselamatan para pendata di lapangan.

Karakter Indonesia Tengah dan Timur memang khas. Diakui, lingkungan kesemestaannya sangat indah. Bentangan laut yang luas dan pantai yang memesona menjadi karakter umum dari keadaan geografis di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara ini. Lukman Nul Hakim dan Reza Amarta Prayoga dalam tulisan "Mencacah Angka, Menarasikan Realitas: Memotret Realitas Kelindan Regsosek dan Masyarakat di Pulau Ternate" menggambarkan keterpesonaannya dalam narasi yang mengalir. Meskipun demikian, sebagai wilayah kepulauan, Maluku Utara pun memiliki persoalan tersendiri. Selain trauma masa lalu terkait konflik atas nama agama, dan di dalamnya juga ada unsur primordialisme etnik, sirkulasi perpindahan penduduk yang besar, kemiskinan yang tinggi, kurangnya diversifikasi pekerjaan, dan akses konektivitas yang rendah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di sana. Dalam proses pendataan, sebagaimana umumnya di tempat lain, masyarakat sangat berharap terhadap adanya bantuan sosial yang akan diterima. Penjelasan bahwa pendataan Regsosek ini tidak terkait dengan program bantuan sering kali sulit diterima oleh masyarakat. Bagi mereka, didata berarti akan menerima bantuan pemerintah.

Pada bagian penutup, pengalaman Regsosek dari tujuh lokasi dikemas ringkas oleh Dian Karinawati Imron dalam "Ruang Sadar dan Representasi Makna: Menyusuri Pembelajaran Regsosek". Bab ini menelusuri ragam pengalaman yang hadir di ruang sadar para pihak dan pemaknaannya. Narasi seluruh penulis menjadi cermin tahapan pendataan, mengenalkan suara-suara yang disebut sebagai saudara sebangsa dan mengingatkan kembali nilai-nilai yang ditunjukkan para pihak dalam setiap tahapan kegiatan ini.

Akhirnya, buku ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sekaligus pembelajaran bahwa proses pendataan yang terlihat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sederhana dengan cara menanyakan sebagaimana dalam daftar pertanyaan di kuesioner, pada praktiknya memiliki kesulitan tersendiri. Para petugas lapangan berusaha untuk membangun "hubungan baik (*rapport*)" dalam waktu pendek untuk mendapatkan kepercayaan dari subjek data. Jika petugas bukan tipe individu yang luwes dan terbuka maka dapat dipastikan proses Regsosek ini akan sulit memenuhi target waktu dan target responden yang ditetapkan berdasarkan SLS tersebut. Metode yang berbeda dengan penelitian kualitatif seperti ini memungkinkan efektivitas dalam proses pendataannya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam atas proses pendataan Regsosek, sebagai "model sensus perdana" secara kualitatif sebagaimana yang digambarkan dalam tujuh bab buku ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya meninggalkan *legacy* arkeologi pengetahuan yang ada. Dalam konteks tertentu, Regsosek adalah sebuah peristiwa bersejarah yang perlu direkam dan ditransmisikan segala nilai baik, kendala, kelemahan, dan kelebihannya. Buku ini hadir untuk menjadi bagian dari peristiwa bersejarah itu.

Daftar Pustaka

A'Hearn, B., Delfino, A., & Nuvolari, A. (2022). Rethinking age heaping: a cautionary tale from nineteenth-century Italy. *Economic History Review*, *75*, 111–37.

Campbell-Kelly, M. (1996). Information technology and organizational change in the British Census, 1801-1911. I*nformation Systems Research, 7*(1), 22–36. http://www.jstor.org/stable/23010787

Guntara, C. C., Setiawan, N. Y., & Aknuranda, I. (2019). Perbaikan proses bisnis menggunakan Business Process Improvement pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 3*(2), 1971–1977.

Haug, C. J. (1979). Manuscript census materials in France: the use and availability of the listes nominatives. *French Historical Studies, 11*(2), 258–274. https://doi.org/10.2307/286604

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Hafifah, S., & Marsisno, W. (2022). Permasalahan dan potensi dalam diseminasi official statistics pada Badan Pusat Statistik. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Official Statistics 2022*, Vol. 2022 No. 1.

Hynes, G. I. (1973). Some aspects of the demography of Port Royal, 1650–1755. *Acadiensis, 3*(1), 3–17. http://www.jstor.org/stable/30302422

Nyman, J. A., & Maude-Griffin, R. (2001). The welfare economics of moral hazard. *International Journal of Health Care Finance and Economics,* (1), 23–42. https://doi.org/10.1023/A:1011547904553

Ross, S., & Deveau, A. (1992). The Acadians of Nova Scotia: Past and present. Nimbus.

Winkle, K. J. (1994). The United States census and community history. *The History Teacher, 28*(1), 87–101. https://doi.org/10.2307/494293

Wulansari, D., Fauziah R., & Syahputra, A. K. (2022). Pengembangan aplikasi SDGs menerapkan metode agile dengan framework Codeigniter DII BPS Asahan. *J-Com, 2*(2), https://doi.org/10.33330/j-com.v2i2.1725

Buku ini tidak diperjualbelikan.

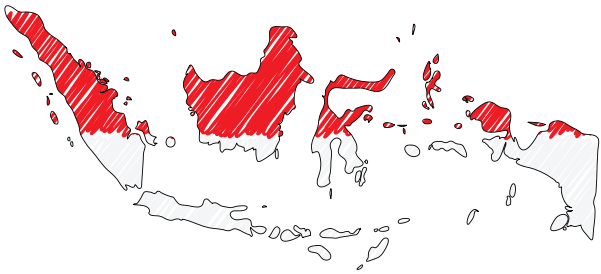

2

Membelah Karang, Menggali Data: Regsosek Timor Tengah Selatan (TTS)

Bilal As'Adhanayadi & Gustaf Wijaya

A. Membuka Tabir Data Kemiskinan: Sebuah Pengantar

Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022 yang dilaksanakan di provinsi paling selatan di Indonesia, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), tentu sangat menarik ketika dihadapkan pada fenomena kemiskinan ekstrem yang melanda Indonesia. Tantangan alam dan lokasi yang berpulau–pulau membuat BPS Provinsi NTT harus mengatur siasat sebaik mungkin untuk memenuhi tenggat waktu yang ada. Sayup-sayup terdengar *zoom meeting* yang cukup rutin dilakukan, antarpulau, antarkabupaten, dalam naungan BPS provinsi.

Berbicara tentang sosial ekonomi NTT tentu tidak lepas dari garis kemiskinan ekstrem yang cukup tinggi serta penanganan

B. As'Adhanayadi & G. Wijaya
Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: bila001@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional
As'Adhanayadi, B., & Wijaya, G. (2023). Membelah karang, menggali data: regsosek Timor Tengah Selatan (TTS). Dalam M. A. Humaedi., D. K. Imron, & A. Pramono (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 1 Indonesia Tengah-Timur* (17–58). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.775.c694 ISBN: 978-623-8052-94-3 E-ISBN: 978-623-8052-98-1

Buku ini tidak diperjualbelikan.

stunting yang butuh banyak perhatian. NTT adalah peringkat ke-3 provinsi termiskin menurut data BPS, dalam angka 20,44% (BPS, 2022). Artinya, 1 dari 5 orang di NTT, atau sekitar 1 juta dari 5 juta total penduduk NTT, masuk dalam kategori miskin. Sementara itu, miskin ekstrem terjadi pada 212.672 jiwa dalam setidaknya 89.410 rumah tangga. Terdapat lima kabupaten yang menjadi penyumbang angka terbesar, yakni Kabupaten Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah, dan Manggarai Timur (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021a). Dalam konteks ini, di mana lokus tulisan adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan, tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 17,30% dengan jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 81.180 jiwa (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021b). Dasar angka lain mengapa NTT sangat memerlukan perhatian dan akurasi data yang kuat adalah situasi kecukupan gizi, atau isu *stunting* yang ada. Selengkapnya disampaikan pada subbab berikutnya.

NTT memiliki banyak potensi. Provinsi ini adalah lumbung jagungnya Indonesia dengan 24% lahan jagung nasional (BPS, 2021). Selain itu, sedang dikembangkan untuk diekspor komoditas lain, seperti kacang tanah, kacang hijau, dan bawang merah, dengan tujuan utama ke Timor Leste. Di samping pertanian, NTT juga kaya akan mineral yang belum dieksplorasi secara optimal, seperti logam mangan, nikel, tembaga, kromium, dan emas. Batuan Kompleks Bobonaro yang membentuk kepulauan di NTT menjadikannya logam mangan dengan kualitas yang sangat baik dan salah satu yang terbaik di dunia. Tentu eksplorasinya perlu dikaji dan direncanakan sebaik mungkin agar tidak merusak alam dan lingkungan hidup di NTT sendiri. Adapun sumber daya kelautan dan perikanan juga masih banyak menyisakan pekerjaan rumah: perlu ditingkatkan pemanfaatan, pengelolaan, dan pembangunan sumber daya kelautan tersebut demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Provinsi NTT.

Dengan masyarakat etnis yang masih kental dan kuat dalam kesehariannya, wisata budaya dan hasil budaya di NTT masih cukup menjanjikan potensi yang luas. Hasil budaya mencakup variasi kain tenun yang dihasilkan masyarakat, seperti kain tenun khas Sumba, khas Rote, khas Timor Tengah Selatan, dan khas Manggarai. Wisata

Buku ini tidak diperjualbelikan.

budaya ada pada keindahan pariwisata alam dan adat, seperti Pulau Komodo, Labuan Bajo, Danau Kelimutu, Pantai Batu Biru, dan Air Terjun Oenesu. Hal ini bersandingan dengan beragam ritual adat, atraksi budaya, dan upacara adat setempat yang kerap dilaksanakan pada momen tertentu, seperti halnya di Wae Rebo misalnya.

Fokus kali ini mengerucut pada pulau Timor. Sesuai dengan namanya, pulau ini menjadi pulau yang paling timur di gugusan kepulauan Nusa Tenggara atau Sunda Kecil. Luas pulau ini mencapai 30.777 km^2. Separuh timur bagian pulau ini menjadi bagian dari Timor Leste. Pulau ini sudah ada dalam catatan sejarah sejak abad ke-14 pada zaman Majapahit sebagai pulau penghasil kayu cendana, madu, lilin, serta budak (Pageh, 2020). Pada fase berikutnya, pulau ini mulai diduduki Portugis pada pertengahan abad-16 dan mulai menjadikan Kupang sebagai basis perekonomian dan kekuasaannya.

Penghuni lokal pulau ini adalah suku Atoni, juga dikenal sebagai Suku Atoni Meto atau Dawan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Uab Meto atau bahasa Dawan. Bahasa ini masih menjadi bahasa sehari-hari masyarakat lokal, khususnya di wilayah pedesaan. Suku ini hampir tersebar di seluruh wilayah daratan Pulau Timor. Atoni Meto terdiri dari dua suku kata, Atoni adalah manusia atau orang, sedangkan Meto adalah tanah kering sehingga secara kebahasaan, Atoni Meto adalah "orang-orang dari tanah kering".

Falsafah hidup suku ini adalah Feto-Mone. Feto adalah perempuan dan Mone adalah laki-laki. Suku ini menjunjung tinggi kesatuan yang saling menghargai satu dengan yang lain. Mone atau laki-laki lebih banyak mengerjakan pekerjaan ranah publik, seperti berperang, bersosialisasi, dan berkebun, sedangkan Feto atau perempuan mengurusi ranah privat, seperti mencuci, memasak dan menjamu tamu. Masyarakat Dawan melihat perempuan sebagai "Ibu kehidupan". Penetrasi agama bersamaan dengan pendudukan kolonial di Pulau Timor membuat sebagian besar warga suku Dawan beragama Kristen Protestan.

Pulau ini dalam sejarahnya menjadi perebutan Hindia Belanda dan Portugis (Pageh, 2020). Hal ini memaksa geopolitik yang ter-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

jadi membuka dualisme kepemimpinan. Belanda dan Portugis selanjutnya menempuh perjanjian akad Lisboa pada 1859, hingga mereka menetapkan batas jajah masing-masing atas pulau ini pada 1912. Koloni Portugis, berada di sisi timur, menjadi cikal bakal negara Timor Leste, termasuk Oecussi-Ambeno. Sedangkan Koloni Belanda di sisi Barat masuk dalam provinsi NTT dan Kota Kupang menjadi ibu kota provinsinya.

Timor adalah pulau karang terbesar di Indonesia yang berpenghuni. Jika tanahnya digali maka akan terlihat kapur dan karang. Hal ini membuat vegetasi yang bisa dikembangkan terbatas. Ditambah dengan lokasinya yang terhimpit oleh dua benua, sangat dekat dengan Australia namun masih menjadi bagian dari Asia, cuaca sangat kering dan panas. Hal ini pulalah yang membuat air menjadi barang mewah di pulau ini. Masyarakat sudah akrab dengan pola hidup yang bergantung pada sumber-sumber mata air untuk segala aspek kehidupan mereka. Meskipun di beberapa titik tertentu, seperti di pegunungan sekitaran Gunung Mutis misalnya, curah hujan cukup baik, namun tipologi yang ada membuat air masih saja sulit diakses.

Hal ini membuat banyak pihak menaruh perhatian pada pulau ini. Bantuan berupa sarana prasarana air, akses dan konektivitas, literasi, pemberdayaan desa, pendidikan, gizi dan pangan, hingga program penguatan modal sosial lainnya terus digulirkan. Masyarakat dengan kesejahteraan rendah dapat dengan mudah ditemui dalam jangka waktu dan jarak yang tidak jauh dari perkotaan. Sayangnya hal ini sekaligus membentuk *mindset* atau pola pikir bahwa hidup apa adanya saja, pemerintah akan bantu mereka, apapun bentuknya. Masyarakat tampak akrab dengan "pendataan" dan mengharap ujungnya adalah "bantuan". Hal inilah yang menjadi urgensi Regsosek di NTT, khususnya Kabupaten Timor Tengah Selatan.

B. Bentang Alam Tersulit, Tanpa Menyerah

"Yang kami pijak ini bukanlah tanah yang berkarang, melainkan karang yang bertanah". Setidaknya begitulah narasi awal warga Timor tentang apa yang merepresentasikan wilayahnya. Terbayang banyaknya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bebatuan, tandusnya tanah, dan keringnya air, mencerminkan topografi Pulau Timor secara umum. Peneliti emik Regsosek tahun 2022 masuk ke Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Argumentasi yang mendasari pemilihan wilayah ini adalah tingginya angka kemiskinan dan *stunting* tidak hanya di Nusa Tenggara Timur (NTT), tetapi juga di Indonesia (BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2022; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Pada Maret 2022, TTS menjadi salah satu tujuan lawatan Presiden RI Joko Widodo dengan tematik secara khusus melihat perkembangan penanganan *stunting* di desa rawan gizi. Pada hari ketika tim masuk Kabupaten TTS, Gubernur NTT Victor Laiskodat ternyata juga sedang mengumpulkan seluruh jajaran kepala daerah se-Provinsi NTT di TTS guna membahas penanganan *stunting*.

Konteks gizi buruk dan kemiskinan merupakan dua tema yang belum bisa lepas dari Provinsi NTT. Belum ada kabupaten atau kota di NTT yang masuk status prevalensi gizi biru atau hijau. Status gizi paling "baik" daerah di NTT masuk kategori "kuning", yakni prevalensi 20% hingga 30%. Di antaranya di Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang, dan Flores Timur. Artinya, 1 dari 5 anak di wilayah tersebut, mengalami gizi buruk. Selanjutnya, ada 15 wilayah lain yang masuk kategori "merah", yakni Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata, dan Malaka, di mana 1 dari 3 anak di wilayah ini mengalami *stunting*.

Adapun Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara memiliki prevalensi di atas 46% (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2021; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Khusus di Timor Tengah Selatan, angka prevalensinya menyentuh 48,3%, atau nyaris 1 dari 2 anak di kabupaten ini, *stunting* (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Angka ini tertinggi secara nasional. Bagaimana *stunting* bisa terjadi tentu tidak lepas dari angka kemiskinan yang terjadi, keduanya saling terkait sebab akibat. Angka kemiskinan di NTT secara umum masih cukup tinggi. Timor Tengah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Selatan menjadi salah satu daerah dengan miskin ekstrem tertinggi dengan total 168.265 jiwa dengan kategori miskin ekstrem dari total 459.600 jiwa penduduk (BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2023; P3KE Kemenko PMK, 2023). Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten TTS menjadi salah satu Kabupaten dengan jumlah penduduk termiskin di Provinsi NTT dan masuk ke dalam 1 dari 214 kabupaten prioritas penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia (Adji dkk., 2022). Sanitasi layak juga baru tersedia pada 60% keluarga. Angka ini merupakan yang tertinggi di NTT.

Luas wilayah Timor Tengah Selatan, yang merupakan daerah terluas di Pulau Timor, menjadi salah satu kendala penanganan *stunting* dan kemiskinan. Dengan wilayah seluas itu, Timor Tengah Selatan menjadi kabupaten peringkat tiga terendah kepadatan penduduk di NTT. Dalam konteks konektivitas, seluruh wilayah Timor Tengah Selatan dapat dicapai dengan darat. Namun, bentang alam yang terjal dan naik-turun membuat sebaran penduduk terpisah–pisah dan berjarak. Koneksi jalan yang baik sudah ada di Jalan Nasional Lintas Timor dan seputaran Kota Soe. Namun, selepas dari rutenya, jalan menjadi cukup terjal, masih berbatu, dan belum tersentuh pembangunan. Transportasi umum penghubung yang diandalkan masyarakat Timor Tengah Selatan adalah *travel*, bus, dan kendaraan pribadi. Masih banyak ditemukan juga masyarakat yang berjalan kaki untuk mencapai titik tertentu, baik karena alasan geografis (bentang yang menantang) maupun karena alasan ekonomis (tidak mampu membeli alat transportasi).

Tim masuk dalam tiga bentang alam yang merepresentasikan Kabupaten TTS, yakni pegunungan dengan curah hujan tinggi di utara, pegunungan dengan curah hujan rendah di tengah, dan daerah dataran rendah arah pantai di selatan. Secara umum, ketiganya terhubung dengan satu kata, pegunungan. Hal ini membuat Regsosek menjadi menantang karena jarak dan konektivitas satu desa dengan desa lain cukup jauh, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1, dan terjal. Bagi Petugas yang memang sebagian besar warga lokal, hal ini merupakan tantangan yang biasa saja, mereka dapat dengan mudah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Memotret TTS dari Utara, Tengah, dan Selatan

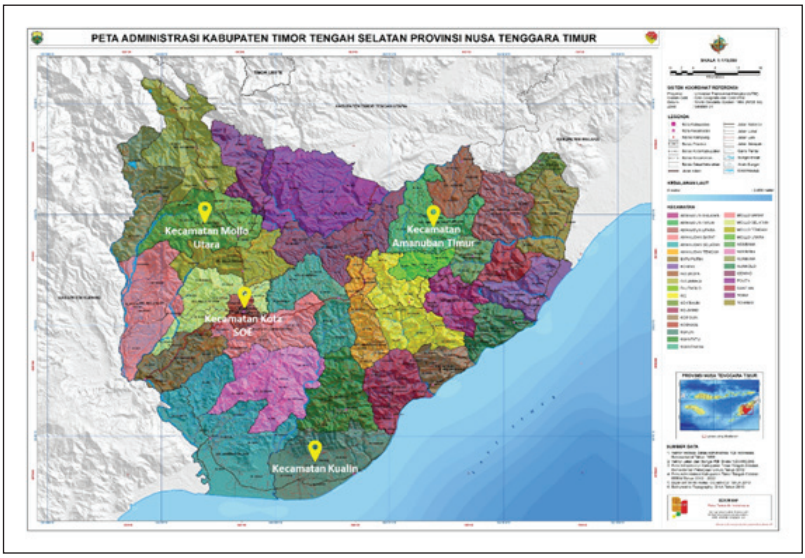

Sumber: Peta Tematik Indonesia, (t.t.)

Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Timor Tengah Selatan

melaluinya. Secara umum, hal ini menunjukkan betapa konektivitas masih menjadi PR besar pemerintah setempat. Namun, rasanya Tuhan tetap saja adil. Rumah mereka banyak berjarak tetapi PPL banyak mendapatkan "target" SLS sejumlah 12–13 KK; tidak terlalu gemuk, tetapi cukup menguras keringat. Terlebih jika saat dikunjungi si empu rumah tidak ada, padahal sudah naik-turun menyusuri jalan terjal berbatu.

Sepanjang 26 kilometer (km) ke arah utara dari Kota Soe, di kanan jalan kita akan menemukan sebuah tugu bertuliskan "Selamat Datang Desa Bosen". Desa ini merupakan salah satu dari 18 desa di Kecamatan Mollo Utara. 17 dari 18 desa di kecamatan ini masih bergantung pada kayu bakar untuk memasak. Jika pembaca ingat iklan sebuah perusahaan air minum yang memberikan bantuan sosial dengan jargon "sumber air su dekat" beberapa tahun yang lalu, bantuan sosial tersebut diberikan kepada Desa Binaus. Desa Bosen

Buku ini tidak diperjualbelikan.

hanya 4 km di utara desa tersebut. Jalan utama lintas utara Kota Soe cukup baik, dengan kerusakan aspal di beberapa titik. Sementara itu, jika masuk dalam Desa Bosen, kondisi jalan berbatu sudah sangat sulit untuk dilalui.

Desa Bosen memiliki kondisi wilayah dengan rumah-rumah warga yang tersebar di antara bukit dan sungai. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjangkau beberapa wilayah yang jauh dari pusat desa. Orang asli desa sudah terbiasa dengan kondisi ini dan cukup mudah bagi mereka untuk menjangkaunya. Sementara itu, bagi warga luar desa kondisi alam Desa Bosen menyulitkan untuk dijangkau dengan medan tanah berlumpur, perbukitan, dan melewati sungai. Jalan utama desa rusak parah. Luas Desa ini memiliki luas 8,9 km^2 dengan 1.618 penduduk (terpadat ketiga di Mollo Utara) dalam 8 RW dan 18 RT yang tersebar di seluruh Desa Bosen dalam tingkat kesulitan jangkauan yang berbeda. Kondisi cuaca di Desa Bosen khususnya dan Mollo Utara pada umumnya sering turun hujan karena wilayah ini tidak mengenal musim untuk turun hujan. Namun, topografi yang curam dan ekstrem membuat aliran air tidak merata. Dusun berada cukup tinggi di atas mata air sehingga perlu pompa air guna mengangkat air ke wilayah mereka.

Masyarakat di Desa Bosen menggantungkan hidup dengan berkebun untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Tanaman yang menjadi bahan pangan pokok di antaranya adalah jagung dan umbi-umbian. Ada pula sayur mayur yang menjadi bahan untuk konsumsi sehari-hari dan terkadang dijual ke pasar terdekat. Selain itu, ada beberapa program pemerintah, seperti PKH, BLT, dan pemberdayaan melalui pembagian bibit ayam untuk dipelihara dengan sistem bergulir antar warga desa. Terdapat juga program pemberdayaan lain, seperti penuturan Rifat Togar Matoto (32) Kaur Keuangan Desa, masyarakat juga mulai dikenalkan pembudidayaan lele. Bibit awal dan pakan disediakan pemerintah desa, sedangkan saat panen, 10% dari hasil panennya dikembalikan ke desa sebagai pendapatan asli desa.

Desa Bosen mewakili bentuk daerah utara TTS yang umumnya pegunungan dengan curah hujan yang cukup tinggi. Namun, meski-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pun dengan curah hujan yang tinggi, kekeringan masih relevan sebagai isu di daerah ini karena memang secara umum daratan di pulau Timor adalah karang sehingga air sulit meresap ke dalam tanah, dan jika ada tanah untuk diolah, pastilah warga mengolahnya untuk kebutuhan pangan sehari-hari, seperti jagung dan ubi.

Jagung memang "menu" utama. Tidak hanya di Desa Bosen, di Mollo Utara, atau TTS, jagung merupakan komoditas andalan NTT. Data BPS menyebutkan bahwa TTS mampu memanen hingga 183.931 ton jagung, di mana hasil tersebut merupakan 25% dari jumlah panen jagung se-Provinsi NTT, yakni 750.166 ton (BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023). Bahkan, NTT dicanangkan sebagai lumbung jagung nasional dan menjadi salah satu tulang punggung swasembada jagung, sebagai bagian dari pertahanan pangan di tengah gempuran jagung impor. Ironisnya, perdagangan jagung tidak dikuasai kaum pribumi. Selain faktor modal ekonomi, modal budaya juga mendukung terjadinya hal ini, di mana mayoritas petani lokal TTS akan menyimpan jagung untuk mereka sendiri, di lumbung mereka sendiri, sebagai cadangan makanan hingga satu tahun ke depan. Sebagian juga mereka siapkan untuk bibit tahun berikutnya. Bibit yang digunakan juga tidak selalu unggul, karena mereka tidak punya alokasi untuk biaya tambahan pembelian bibit, dan secara tradisi turun-temurun cara bertanam jagung adalah dengan menyisihkan hasil panennya untuk bibit tahun depan. Adapun bibit lain mungkin mereka akan tanam, namun dengan intervensi bantuan dari desa. Jika tidak, mereka cukup menanam kembali bibit yang ada. Meskipun demikian, memang sejatinya kualitas jagung NTT sudah cukup baik, rasanya khas, kenyal, dan mengenyangkan, serta ada sedikit rasa manis. Mayoritas penduduk setempat mulai menanam jagung ketika musim hujan tiba. Dengan kondisi iklim dan cuaca Pulau Timor yang bervariasi, warga Timor tidak serempak menanam jagung, menyesuaikan daerahnya sudah mulai hujan atau belum.

Hal yang sama juga terjadi pada penduduk Desa Oelet dan Mauleum. Kedua desa ini terletak di Kecamatan Amanuban Timur, kurang lebih 59 km dari pusat Kota Soe ke arah timur. Lepas dari

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Trans Timor, menyusuri Jalan Ahmad Yani, Amanuban Timur, setidaknya ada dua jembatan kayu besar yang harus dilewati oleh warga Amanuban Timur sebagai akses mereka dari dan ke Kota Soe. Dalam konteks tahun 2022 ini, kedua jembatan yang membelah Sungai Benain dan anak sungainya itu tampak sudah tidak layak secara keamanan dan perlu diperbaiki, mengingat jembatan tersebut merupakan sendi utama konektivitas warga setempat.

Adapun Desa Oelet, yang berpenduduk 1.717 jiwa, terbagi atas 4 RW dan 13 RT. Secara umum, warga menggantungkan hidup dari berkebun. Seperti halnya daerah lain di TTS, sebagaimana disampaikan sebelumnya, komoditas yang kerap digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari adalah jagung dengan masa tanam yang ditentukan oleh datangnya musim penghujan. Sebagai sampingan pendapatan, ada dua komoditas yang bisa dijual oleh warga, yaitu buah asam dan kemiri, walaupun tidak sepanjang tahun berbuah. Asam, misalnya, hanya berbuah satu tahun sekali. Asam basah dijual Rp4.000,00 per kilo, jika cungkil bersih akan menjadi Rp10.000,00 per kilo. Asam ini seperti bonus bagi warga Oelet. Ibrahim Nase, Sekretaris Desa Oelet, menuturkan bahwa penjualan asam adalah bonus tahunan bagi warga sehingga apa yang menjadi keinginan warga, rata-rata baru tercapai setelah jual asam, entah renovasi rumah, beli baju, atau keperluan lainnya. *Papalele* (pedagang) berdatangan saat musim asam tiba.

Sulitnya akses jalan karena cenderung berbatu dan tidak bisa dilewati ketika hujan membuat warga terbiasa untuk berjalan jauh di jalanan yang terjal. Kemiskinan yang menjerat memaksa mereka untuk berjalan kaki karena membeli sepeda dayung (kayuh) saja tidak mampu. Selain kondisi alam dan konektivitas, budaya juga menjadi salah satu kendala pengentasan dari kemiskinan di Oelet. Masyarakat tidak terlalu memahami bagaimana cara mengelola keuangan, mengelola pangan, dan mendapatkan gizi seimbang. Pola pikir masyarakat sederhana, yaitu bagaimana kebun aman, hasilnya ditahan di lumbung untuk setahun, dan disisakan untuk tanam lagi. Padahal kebutuhan hidup tidak hanya pangan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Isu lainnya adalah masih banyak warga yang belum terdata secara administratif kependudukan atau memiliki NIK. Hal ini sangat mendasar sehingga mereka tidak bisa mendapat akses tertentu, seperti sekolah gratis. Bahkan ada dalam satu keluarga yang 13 anggotanya tidak memiliki NIK. Terdapat beberapa suku dan agama di Oelet yang hidup rukun berdampingan sehingga dicanangkan sebagai Desa Pancasila oleh Koramil karena kemajemukan masyarakat dan menjadi salah satu desa dengan tingkat toleransi yang tinggi. Tim juga mencoba untuk menembus desa lain, masih dalam wilayah kecamatan Amanuban Timur, yakni Desa Mauleum. Desa ini juga tidak kalah kering, gersang, dan lebih tinggi secara topografi, sebuah komposisi yang tepat untuk mengerucut pada satu tema "kekeringan" sebagai isu utamanya. Selain itu, isu konektivitas tampak nyata menjadi catatan bersama, mengingat jalan desa ini sangat buruk dan tidak layak untuk kendaraan. Terdapat satu jembatan kayu lagi saat menyeberangi kawasan ini pun kondisi kayunya sudah memerlukan pergantian; beberapa lapuk dan patah sehingga jembatan berlubang.

Sambil membaca buku ini, jika pembaca dapat berselancar di mesin pencari dengan kata kunci "Desa Mauleum", jawabannya adalah krisis air bersih yang telah dialami desa ini selama bertahun-tahun. Banyak program, wakaf, bantuan dari jemaat, dan bantuan pemerintah hadir di desa ini untuk menanggulangi krisis air yang terjadi. Mauleum terdiri dari 2.212 Jiwa dalam 6 RW dan 15 RT. Di desa inilah terletak satu dari empat pasar yang ada di Amanuban Timur, dengan konstruksi non-permanen. Andalan penduduk untuk hidup adalah kebun dan ternak, sedangkan yang muda, merantau ke luar negeri, luar pulau, atau ke Kota Soe. Jarak yang cukup jauh dari kota membuat desa ini cukup terisolir, meskipun memang ada banyak desa lain di TTS yang lebih *remote* dari ini. Kabar baiknya, jaringan internet sudah masuk desa ini. Bukan hal yang mengherankan ketika menemukan anak muda berselancar dengan gawai Android walau rumahnya sangat sederhana.

Tim mengikuti PPL yang akan melakukan verifikasi dan persiapan untuk masuk RT 13. Rumah Bapak RT tampak di seberang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

rumah Kepala Desa; bukan terpisah oleh jalan, melainkan terpisah lembah. Untuk mencapainya, PPL harus turun gunung, lalu naik kembali sebelum masuk area lahan RT 13 tersebut, dengan sambutan gonggongan anjing tentunya. Dalam sebuah verifikasi pada RT 13 desa ini, Ketua RT, Timothius Tony, menyebutkan, hampir 20 nama lebih di luar daftar yang terdata oleh sistem. Meskipun kebenarannya akan ditelusuri saat pencacahan data dari rumah ke rumah, hal yang sama juga terjadi di desa lain yang ditemui. Batas RT yang terdapat pada sistem beberapa kali tidak sesuai dengan mutasi penduduk di lapangan.

Keadaan di atas menjadi salah satu titik kompleksitas data awal Regsosek, hal yang tidak mudah untuk diselesaikan. Perlu koordinasi antar PPL dan strategi PML untuk menyelesaikannya karena jika dibantah atau diputuskan saat verifikasi itu juga, tidak semua Ketua RT berkenan dengan jawaban yang mereka terima. PPL dalam hal ini harus bisa bijak dalam memutuskan dan mengakomodir pendapat RT, karena tentu lah ia ada "rasa memiliki" atas warga yang disebutkan tadi. Sedangkan dapat dipahami bahwa mobilitas penduduk desa pegunungan di TTS cukup tinggi. Pagi mereka berkebun, tidur malam di rumah lain, kadang tidur di rumah orang tuanya, kadang tidur di kebun, kadang tidur di rumah lainnya lagi, atau rumah saudaranya. Kondisi–kondisi seperti ini yang menjadi salah satu tantangan dalam pendataan.

Tantangan yang sama terjadi saat tim masuk Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin. Jarak desa ini 87 km dari arah barat daya Kota Soe, lalu ke selatan melalui Kecamatan Batu Putih dan Amanuban Selatan, ke timur dengan jalan berbatu masuk kecamatan Kualin hingga masuk Desa Nunusunu. Akses ke pantai di daerah ini cukup bagus, tetapi khusus akses ke pegunungan di desa ini rusak total. Di daerah Bena, Amanuban Selatan, hamparan sawah luas terbentang, 100 ha, menjadikan Bena sebagai salah satu penghasil beras di TTS. Wilayah ini cenderung datar, berbeda dengan wilayah lain di TTS. Di sisi selatan, tampak wilayah pesisir, dengan pantai Oetune sebagai salah satu andalan pariwisata lokal.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Secara medan, akses, dan fasilitas, wilayah ini masih jauh dari kata siap untuk menjadi destinasi wisata. Selanjutnya, naik ke arah pegunungan selama 30 menit dengan jalan berbatu, masuk desa Nunusunu. Jagung, kopra, asam, bawang, dan sayur menjadi komoditas andalan desa ini. Dengan kontur yang beragam, desa ini pun tidak lepas dari kekeringan. Baru pada tahun 2018 lalu dibangun instalasi air yang cukup baik, namun terbatas di dua RT. Penduduk di atas RT tersebut harus mengangkut air dengan jeriken sendiri. Terdiri dari empat dusun, satu dusun di desa ini harus membelah gunung untuk menjangkaunya. Dusun 04 ini juga sedang mengajukan pemekaran, mengingat luasan desa yang akhirnya membuat mereka terpinggirkan karena terpencil.

Dari lapangan, tim berusaha menangkap sisi Timor Tengah Selatan dari Utara (Mollo Utara), Selatan dan Barat (Amanuban selatan dan Kualin), Tengah (Soe), dan Timur (Amanuban Timur). Meskipun tidak berhasil menjangkau daerah *remote* seperti Suku Boti, dengan kendala cuaca hujan yang terjadi di setiap siang hari, setidaknya tulisan ini berusaha menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat TTS dalam sudut pandang sosial ekonomi, serta apa saja solusi yang perlu ditawarkan oleh pemerintah, baik pemerintah setempat, provinsi, maupun pusat.

C. Menelisik Awal Pemahaman Proses Bisnis Registrasi

Regsosek di TTS merupakan salah satu yang paling menantang di NTT. Di atas kertas, kecamatan di TTS adalah yang terbanyak sehingga memaksa BPS Kabupaten tidak hanya memaksimalkan petugas dari internal BPS, tetapi juga mitra hingga tingkat Koseka. Fakta ini ditambah dengan jumlah penduduk TTS yang merupakan terbanyak di NTT, 455.410 Jiwa. Sebaran penduduknya juga menantang, di mana kontur pegunungan dan lembah yang ada membuat permukiman menyebar cukup merata. Dalam sebagian SLS misalnya, hanya terdiri dari belasan KK, namun jarak tempuh antar rumah dan medan yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tidak mudah membuat belasan KK yang seharusnya bisa dicacah dengan cepat ini harus menambah hari untuk menyelesaikannya.

Registrasi Sosial Ekonomi yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi masyarakat dengan kategori keluarga miskin dan sangat miskin. Hal ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat basis data keluarga (*by name by address*), mengingat di Provinsi NTT terdapat banyak wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem (salah satunya di Kabupaten TTS yang merupakan daerah kemiskinan ekstrem tertinggi di NTT). Dimulai pada bulan September tahun 2022, kegiatan Regsosek diawali dengan penetapan anggaran dan pelatihan-pelatihan untuk petugas pendata di lapangan. Ada beberapa tingkatan petugas yang melatih mulai dari tingkat nasional atau yang disebut Instruktur Nasional (Petugas dari BPS Provinsi dan kabupaten/kota) yang akan melatih di tingkat Provinsi dan Instruktur Daerah yang akan melakukan kegiatan pelatihan untuk petugas lapangan Regsosek. Ada tiga petugas lapangan yaitu Koordinator Sensus tingkat Kecamatan atau yang biasa disebut sebagai Koseka lalu ada Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML) dan Petugas Pendataan Lapangan (PPL) yang ada di tiap desa atau satuan lingkungan setempat.

Petugas mitra di TTS umumnya dipersyaratkan minimal berpendidikan SMA serta memiliki pengalaman pada kegiatan BPS sebelumnya. BPS memiliki preferensi untuk memilih mitra yang benar-benar tidak memiliki kesibukan lain karena Regsosek dilakukan selama satu bulan penuh saat pencacahan berlangsung. Satu hal detail tambahan dalam prasyarat ini adalah harus memiliki gawai Android. Hal ini ditujukan untuk mempermudah dalam proses pelatihan dan pendataan di lapangan, serta *tagging* lokasi yang diperlukan. Sekitar 700-an lamaran masuk saat *open recruitment* dibuka, dan 100-an di antaranya terseleksi menjadi PML dan Koseka Mitra BPS. Pada rekrutmen kali ini, BPS TTS mendapatkan *talent* yang lebih banyak dari yang awal direncanakan. *Talent* ini kemudian diakomodasi sebagai PPL, namun ditugaskan di daerah yang padat, seperti Kota Soe, atau yang *remote* dan dirasa butuh beberapa PPL yang taktis, seperti Desa

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Oelet. Selain itu, PPL biasanya merupakan orang asli dari desa tempat tinggal mereka untuk melakukan pendataan. Kehadiran orang "asli kampung sini alias *akamsi*" dimaksudkan untuk memudahkan dan mempercepat proses kerja pencacahan. Beberapa desa menggunakan perangkat desanya langsung sebagai pencacah, seperti Yendry Aby, Kepala Dusun 04 Desa Nunusunu, Kualin, yang menjadi pencacah bagi warganya sendiri. Ada juga yang masih kerabat dari perangkat desa, seperti Vinsensius Tabun (20), pemuda yang baru lulus SMA dari Desa Oelet, Amanuban Timur.

Pada saat pelatihan, seluruh petugas lapangan, terutama untuk PPL, diberikan pelatihan untuk simulasi wawancara dengan menggunakan instrumen survei. Pelatihan dilaksanakan selama dua hari. Hal ini untuk memastikan lancarnya pengisian lembar survei yang ada, termasuk kode-kode yang perlu dipahami masing-masing petugas, serta indikator lainnya. Jumlah pertanyaan yang cukup banyak dengan berbagai indikator isian, membuat PPL harus memastikan dirinya benar–benar menguasai kuesioner. Kepala BPS TTS, Patrisius Tupen, dalam pelatihan ini menekankan agar wawancara lebih natural, tidak kaku, karena sejatinya dengan melihat, atau bahkan sudah mengenal jika tetangga sendiri maka isian akan mudah selesai. Pelatihan juga dilakukan untuk memastikan proses di lapangan berjalan sesuai SOP.

Sebelum melakukan pendataan lapangan, Koseka bersama PML dan PPL melakukan kunjungan awal ke wilayah yang akan dijadikan lokasi survei. Mereka melakukan verifikasi data melalui perangkat setempat, seperti Kepala Desa, RW, dan RT, untuk memastikan bahwa keluarga yang akan disurvei jelas keberadaannya. Dalam proses ini juga petugas dan perangkat desa fokus mengondisikan warganya agar siap didata. Cuaca di TTS pada saat Regsosek sedang sering hujan. Masyarakat yang sebagian besar berkebun mulai ancang–ancang untuk menanam jagung sehingga hanya ada dua pilihan, warga diimbau tidak ke berkebun saat hari PPL akan mencacah atau PPL mengalah dan mencacah di malam hari setelah warga pulang dari kebun.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Bilal (2022)

Gambar 2.2 Verifikasi data awal oleh PPL Timor Tengah Selatan

Dalam proses pendataan lapangan, PPL memiliki peran penting karena sebagai ujung tombak dalam memperoleh data yang valid. PPL bertugas untuk mengumpulkan data awal dan juga melakukan verifikasi atas temuan data lapangan langsung dengan masyarakat (Gambar 2.2) Sementara itu, Koseka dan PML memiliki tugas untuk melakukan supervisi terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh PPL. Pada tingkat provinsi, BPS memiliki sistem untuk memantau proses pelaksanaan survei Regsosek di tiap kabupaten. Setiap hari, BPS provinsi dapat memantau progres data yang dikirimkan petugas pendata sehingga semua wilayah dapat terpantau proses pendataannya dan teridentifikasi wilayah yang memiliki masalah-masalah teknis dalam proses pendataan.

Beberapa masalah teknis pada proses pendataan lapangan adalah kesulitan melakukan unggah *geotagging* dikarenakan akses sinyal yang sulit. Selain itu, masalah lainnya adalah kesulitan menemui responden di lapangan dikarenakan sedang bekerja. Beberapa kali permasalahan yang dapat mengganggu substansi dari proses Regsosek adalah kejenuhan masyarakat terhadap kegiatan survei. Hal ini dikarenakan ada anggapan bahwa ketika ada survei maka akan ada bantuan yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

datang, ini menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan untuk meyakinkan responden dalam memberikan jawaban yang valid.

Terdapat kecenderungan di masyarakat yang menganggap adanya hubungan survei dengan mendapatkan bantuan. Mereka yang disurvei merasa mendapatkan bantuan setelahnya sehingga ketika mereka di survei mereka selalu menanyakan kapan akan mendapatkan bantuan. Akibatnya, ada kasus warga yang menjawab survei dengan "memiskinkan diri" atau tidak jujur pada aset yang dimiliki. Berbagai kendala dan tantangan akan dijabarkan dalam lanjutan tulisan ini. Untuk mengantisipasi hal ini, dalam survei Regsosek salah satu prosesnya adalah melakukan pengambilan foto rumah pada rumah tangga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin dan sangat miskin. Hal ini dilakukan untuk memastikan validasi data rumah tangga dengan kategori miskin dan sangat miskin, sedangkan untuk data *geotagging* dilakukan ke seluruh responden survei.

Saat tim KSDK masuk di Kabupaten TTS, data Regsosek sudah masuk 61%, di atas 100 SLS per PPL. Beberapa Koseka organik BPS sudah kembali ke kantor BPS untuk melakukan pekerjaan lain dan pemantauan hasil pencacahan. Seperti halnya yang terjadi di daerah lain, mereka fokus melakukan evaluasi pada awal-awal pencacahan, terutama pada 1–2 hari pertama dan minggu pertama di mana PPL, PML, dan Koseka sedang mencari ritme kerjanya masing-masing. Salah satu PPL Desa Bosen, Yonisam Liem (33), memilih untuk memulai langkahnya dari SLS yang jauh dan terjal terlebih dahulu. Ia mendapat tugas di 10 SLS. Menurutnya, lima di antaranya adalah SLS dengan medan yang sulit, dan lima lainnya tergolong mudah karena sederet dengan jalan desa, meskipun jalan desa ini terjal karena terdiri dari batu bersusun saja.

Koordinasi dan kolaborasi dengan perangkat desa turut menentukan kelancaran proses Regsosek di masing-masing desa. Selain membantu pengondisian warganya, perangkat desa juga membantu memastikan masyarakat terdata sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Jika lancar, satu hari satu PPL di TTS rerata mampu menjangkau cacah 10 hingga 15 KK per hari, di mana mereka

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dibebani rataan 250 KK per PPL. Angka ini tentu berbeda satu desa dengan desa lain, menyesuaikan sosial ekonomi setempat.

Banyak warga TTS, khususnya di kawasan pedesaan, menerima dengan baik kedatangan petugas. Setidaknya 3 (tiga) kemungkinan hal ini terjadi, pertama, sifat asli orang Timor yang memang ramah dan terbuka. Kedua, karena petugas PPL yang datang misalnya adalah tetangga sendiri sehingga ada unsur kedekatan. Atau ketiga, karena mengharap bantuan sebagai bagian tindak lanjut pendataan yang ada. Alasan pertama dan kedua tentu memudahkan, sedangkan alasan ketiga, akan membahayakan validitas data yang menjadi bias. Beberapa PPL yang baru melakukan survei, tampak canggung untuk bertanya, utamanya perihal pengeluaran keluarga. Sedangkan PPL yang sudah memiliki pengalaman sensus sebelumnya, tampak menguasai medan dengan berbagai siasatnya, seperti menyiapkan kertas dan menghitung item pengeluaran domestik rumah tangga satu demi satu, mulai dari berapa kali makan sehari dikali jumlah kepala, berapa minyak goreng dan beras dibeli dalam sebulan, dan seterusnya.

Bias perihal pengeluaran rumah tangga ini cukup besar dan variatif terjadi. Karena pendekatan sebagian besar warga pedesaan di TTS adalah sedang menerima pendataan dalam rangka akan mendapatkan "bantuan" maka mereka malu-malu untuk jujur terkait asetnya, baik lahan, kendaraan, maupun ternak dan perhiasan. Sebagian yang lain asal saja dalam menyebutkan pengeluaran makan dan minum, mengingat mereka merasa makan dari hasil olah lahan kebun sendiri, serta minum juga ambil secara gratis dari mata air atau tandon air setempat. Oleh karena itu, di akhir, setelah semua warga dalam satu desa tercacah, akan dilakukan Forum Konsultasi Publik (FKP), di mana ketua SLS dan tokoh masyarakat setempat bersama fasilitator yang ditunjuk BPS akan mendiskusikan hasil pendataan yang telah dilakukan. Hal ini guna memastikan data per kepala apakah sudah sesuai dengan kondisi sejatinya menurut perangkat desa setempat. Hal ini direncanakan dilakukan *by name* sehingga keseluruhan data akan benar–benar mencerminkan apa yang ada di lapangan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Detailnya pertanyaan dalam kuesioner Regsosek memunculkan optimisme dari pelaksana. Data yang ada diharapkan benar-benar masuk dengan valid, agar dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan-kebijakan serta program utama yang tepat bagi masyarakat. Oleh karena itu, validitas data sebagai refleksi situasi sosial ekonomi di lapangan berperan sangat vital. Setelah FKP, internal BPS juga akan melakukan *proxy mean test* guna mendapatkan angka yang lebih tepat dan kuat sebagai wujud penguatan data di tiap pelaksanaan pendataan. Bahkan, sekalipun direncanakan untuk diolah pada awal tahun depan, BPS Kabupaten telah mendapatkan instruksi dari BPS pusat terkait *proxy mean test* pada setidaknya 400 sampel data Regsosek, sekaligus sebagai upaya uji coba atas validitas data Regsosek ini secara nasional dalam tahun 2022. Salah satu hal lain yang menjadi tantangan PPL di lapangan adalah menguasai logika kode–kode kuesioner dengan lebih cepat. Beberapa PPL perlu 3–4 hari kerja untuk mulai terbiasa dengan kode–kode ini. Makin sering mereka melakukan pencacahan makin terbiasa pula dengan kode-kode yang ada sehingga makin lama durasi pencacahan tiap SLS makin cepat. Dari yang awalnya perlu 30–60 menit per SLS, menjadi 15–20 menit pada tiap SLS yang dikunjungi. Hal ini tentu menyesuaikan juga pada berapa individu dalam satu KK di tiap rumahnya.

D. Antara Nilai Positif dan Tantangan dalam Mendata

Sebagai salah satu kabupaten yang memiliki penduduk miskin dan miskin ekstrem dengan jumlah yang besar secara nasional, warga TTS akrab dengan "bantuan". Hal ini dapat dengan mudah dilihat, terutama di luar kecamatan Kota Soe. Sepanjang jalan pedesaan, kita dengan mudah menemukan tandon-tandon air hasil bantuan, baik dari pemerintah, NGO, wakaf, maupun jemaat gereja tertentu. Pada hari tertentu, ibu hamil dikumpulkan di kantor desa untuk makan bersama guna mencegah *stunting*. Hingga rumah warga yang tampak baru dibangun dengan keseragaman yang cukup mencolok karena

Buku ini tidak diperjualbelikan.

berasal dari dana desa, ataupun bantuan bedah rumah dari sumber donor lainnya. Namun, patutlah disadari bersama bahwa tidak semua bantuan berdampak baik bagi warga. Beberapa bantuan justru membentuk psikologis warga menjadi mental "pengemis", menolak bekerja keras karena merasa hidupnya sudah "ditanggung", sekolah dan gizi anaknya sudah "diurus", dan perutnya sudah "dicukupi" bantuan.

Bantuan yang ada tentu datang dengan pendataan sebagai awalannya. Selain persoalan mental, masalah "angka" yang sudah ada juga menjadi tumpang tindih. Pada tahun 2022 ini saja, BPS sudah mendata mereka pada sensus penduduk lanjutan. Selain dari BPS, mereka juga telah mendapat pendataan SDGs, yang menurut beberapa warga yang ditemui, poin pertanyaan dalam kuesioner tidak jauh berbeda dengan poin pertanyaan Regsosek ini. Terdapat juga survei dari dinas kesehatan, dinas pertanian, dan lain lain. Hal ini membuat masyarakat pedesaan di TTS sangat akrab dengan pendataan. Bahkan petugas yang melakukan sebagian adalah orang yang sama. Meskipun hasil akhirnya kadang tidak berkorelasi, seperti hasil angka kemiskinan dari dinas sosial misalnya, berbeda dengan hasil survei kecukupan gizi (survei *stunting*), di TTS sendiri tidak memunculkan keterikatan sebagaimana yang dinarasikan oleh publik kebanyakan. Isu–isu ini membuat keberadaan Regsosek menjadi penting sebagai awal pendataan yang terintegrasi, dalam satu data, satu metode dan validitas yang sama, dengan objek data per kepala dan *by name by address* sehingga diharapkan data yang dihasilkan valid.

Tantangan yang kerap kali terjadi pada PPL adalah sulitnya menemukan waktu untuk menemukan responden. Hal ini beberapa kali diakui oleh PPL karena pada waktu PPL turun ke lapangan sering kali bertepatan dengan waktu bekerja warga yang menjadi responden Regsosek. Walaupun demikian, PPL memiliki caranya tersendiri untuk mengatasi kendala ini. Beberapa PPL meminta kepada ketua RT untuk melakukan pemberitahuan kepada warganya. Selain itu, PPL biasa memberitahukan kepada anggota keluarga lain ataupun tetangga yang ditemuinya untuk disampaikan kepada calon responden. Pendekatan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ini terbukti ampuh di banyak titik. Banyak warga menurut dengan pemberitahuan dari perangkat desa setempat. Sekali lagi, karena mereka enggan namanya terlewat jika ada "bantuan".

Paradigma Regsosek yang berpancang pada kartu keluarga berbeda dengan pola pikir sensus yang berdasar pada rumah tangga. Hal ini membuat petugas pada awal kegiatan pendataan Regsosek kesulitan untuk memahami teknis pengisian kuesioner dan ketentuan survei untuk keluarga (bukan rumah tangga). Warga pun, hingga tulisan ini disusun di tengah Regsosek berjalan, tidak semua menerima dirinya didata di lokasi tempat ia bertemu petugas, khususnya bagi mereka yang masih berpindah–pindah tempat tinggal, misalnya karena lahan kebunnya berbeda lokasi, kerabat yang berbeda tempat, atau masih tinggal dengan orang tua. Rata-rata mereka tidak mau kehilangan status administratifnya di tempat lama, dan takut jika data ini nanti digunakan sebagai justifikasi perpindahan administratif ke lokasi baru tempat ia didata dalam Regsosek. Maklum, jarak dari desa menuju pusat Kota Soe untuk mengubah data administratif cukup jauh. Jika tanpa keperluan lain maka bagi banyak warga desa akan memakan biaya dan waktu. Selain itu, hal–hal teknis administratif seperti ini adalah hal yang sulit bagi mereka. Oleh karena itu, tidak jarang di lapangan petugas menemukan warga tanpa NIK yang valid. Sejatinya ini adalah salah satu luaran temuan yang bagus dari Regsosek. Warga tanpa NIK telah dengan sendirinya teridentifikasi. Tinggal bagaimana Dinas Pencatatan Sipil setempat merespons hal ini kemudian, serta menjemput bola untuk mendata NIK warganya. NIK dan KTP adalah kebutuhan yang sangat mendasar sebagai warga negara karena segala hal administratif akan memerlukannya.

Regsosek TTS: Alur Pendataan di Lapangan

Sebelum PPL memulai kegiatan pendataan dari pintu ke pintu, verifikasi data responden perlu dilakukan terlebih dahulu dengan melibatkan RT/Kepala Satuan Lingkungan Setempat. Pemadanan data ini dilakukan untuk memudahkan PPL yang akan menjangkau responden. Beberapa aktivitas verifikasi ini antara lain, menentukan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

apakah keluarga memiliki kategori sangat miskin, miskin, atau tidak miskin. Lalu yang kedua adalah untuk menentukan keberadaan warga (hidup atau sudah meninggal), dan yang terakhir adalah untuk memastikan warga yang tidak ada dalam data awal yang dibagikan kepada PPL. Untuk warga yang belum masuk ke dalam *pre list* atau data awal ini akan dimasukkan ke dalam tabel terpisah untuk dicatat dan akan menjadi tambahan responden yang akan diwawancara oleh PPL.

Setelah PPL memastikan data responden telah sesuai dan terverifikasi oleh bapak ketua RT, langkah selanjutnya yang dilakukan PPL adalah mengunjungi rumah responden satu persatu untuk melakukan wawancara. Selain wawancara dengan kuesioner, PPL juga melakukan pendataan penitikan lokasi rumah responden dan dokumentasi rumah responden dengan kategori sangat miskin dan miskin. Beberapa dokumentasi kondisi rumah yang perlu dipotret adalah kondisi depan rumah, atap, lantai, serta kondisi MCK. Ini untuk memastikan bahwa kondisi responden tersebut memang tergolong warga dengan kategori miskin dan sangat miskin.

Proses wawancara yang dilakukan oleh PPL rata-rata memakan waktu antara 15 menit hingga 1 jam tergantung kondisi responden yang ditemui. Beberapa pertanyaan yang memakan waktu PPL untuk menuliskan jawabannya adalah pada bagian pencatatan nomor kependudukan, penghasilan, serta pengeluaran. Untuk pencatatan nomor kependudukan misalnya, apabila sedikit maka cenderung cepat, akan tetapi pada kondisi responden dengan 13 anak maka diperlukan waktu yang cukup lama untuk menuliskannya secara tepat.

Setelah proses wawancara selesai dilakukan PPL, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah pengumpulan hasil isian kuesioner untuk diperiksa kembali oleh PML. Dalam proses inilah kondisi validitas data ditentukan, karena PML memastikan bahwa isian data PPL merupakan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang mendorong PML untuk terus memantau dan memastikan PPL di bawahnya untuk bekerja dengan baik dan benar serta jujur. Di beberapa tempat, PML bahkan menginap di lokasi pendataan,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

meskipun dia bukan warga setempat. Hal ini untuk memudahkan pemantauan serta verifikasi kuesioner. Untuk wilayah di Timor Tengah Selatan dengan bentangan alam yang beragam dan banyak desa yang sulit diakses dari luar kerja seperti ini merupakan hal yang lumrah dilakukan PML yang berasal dari luar wilayah desa.

Setelah proses pengecekan kuesioner selesai dilakukan oleh PML, selanjutnya PML akan menyerahkan kumpulan isian data kuesioner kepada Koordinator Kecamatan (Koseka). Koseka akan melakukan pengecekan akhir sebelum data isian diserahkan kepada BPS kabupaten untuk dilakukan input data ke dalam komputer. Proses pengecekan berjenjang ini dilakukan untuk memastikan kembali isian data telah benar dan dapat diinput. Peran Koseka sebagai penanggung jawab kegiatan Regsosek di lapangan memiliki tanggung jawab yang besar. Selain untuk memastikan validitas data, Koseka juga memiliki peran untuk pengawasan baik teknis maupun non-teknis dalam proses pendataan lapangan. Pada posisi ini, pengetahuan Koseka baik mengenai kondisi lapangan maupun kualitas data sangat diperlukan untuk memastikan proses pencatatan data dapat terlaksana dengan baik.

Setelah semua proses pencatatan data lapangan Regsosek selesai, selanjutnya adalah proses input data yang akan dilakukan oleh petugas BPS kabupaten. Penginputan data inilah yang akan menyita banyak waktu sehingga di kabupaten, proses ini akan terbagi dalam dua termin, yaitu pada proses percepatan penginputan data pada mulai bulan November hingga Desember, dan sisanya akan dilakukan pada tahun depan atau tahun 2023.

Pada kasus kesulitan teknis pengisian kuesioner, seperti cara pengisian dan pemahaman atas pertanyaan, terjadi karena beberapa PPL baru memiliki pengalaman terlibat dalam proses pendataan sosial ekonomi di lapangan. Selain itu, pada 3 hari awal pelaksanaan kegiatan Regsosek PPL belum diberitahukan untuk wajib mendata pengeluaran tiap responden sehingga pada awal pencatatan jumlah pengeluaran responden belum ada yang tercatat. Sementara itu, pada kasus pemahaman PPL mengenai ketentuan survei Regsosek

Buku ini tidak diperjualbelikan.

adalah kejadian dalam satu rumah tangga dengan 2 keluarga atau lebih ternyata hanya satu saja yang di wawancara. Padahal dalam ketentuannya, survei Regsosek ini menghendaki pencatatan data lapangan pada setiap keluarga dengan responden Kepala Keluarga. Karena itu, pada beberapa kasus tersebut, Koseka melalui PML mengingatkan PPL untuk kembali melakukan wawancara kepada keluarga tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai ketentuan survei.

Hal-hal teknis tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan memaksimalkan proses pelatihan PPL sebelum terjun langsung melakukan pendataan di lapangan. Sekali lagi, karena PPL merupakan ujung tombak pencatatan data sosial ekonomi masyarakat yang akan digunakan dalam proses penyusunan Satu Data Indonesia, agar nantinya tidak ada lagi kata tidak tepat sasaran, tumpang tindih, ketidaksesuaian data kemiskinan, dan lain sebagainya terkait persoalan data nasional masyarakat di Indonesia.

Cerita menarik, beberapa keluarga dengan cacah anggota yang banyak, ada 13 orang, 11 orang, memaksa PPL mengeluarkan hingga 3 lembar kuesioner, dan memaksa PMLnya untuk ke kota mengambil kekurangan kuesioner yang ada. Setidaknya ada 2 hal yang bisa disimak dalam hal ini, yaitu pertama memang pengetahuan akan keluarga berencana (KB) di desa wilayah TTS yang masih sangat kurang. Kedua, budaya setempat yang memang terbiasa memiliki anak yang banyak karena bagi mereka anak adalah hadiah dari Tuhan, dan Tuhan akan memelihara mereka. Begitulah keyakinannya. Faktanya, anak mereka hanya disekolahkan hingga SD atau SMP, lalu menjadi kawan orang tuanya berkebun atau bekerja meskipun masih di bawah umur. Sebagian orang tua, menurut penuturan setempat, lebih suka membeli rokok atau pesta, dari pada membelikan bahan makanan bergizi untuk anaknya. Sebuah budaya yang perlu dobrakan bersama dari setiap penjuru unsur kesejahteraan masyarakat, baik dinas setempat, provinsi, maupun pusat.

Isu lain yang terangkat dalam konteks pendataan adalah penambahan aplikasi "*Regsosek khusus*" untuk pendokumentasian rumah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

warga dengan kategori miskin dan sangat miskin. Penggantian aplikasi ini tentu saja memberikan masalah tersendiri bagi petugas lapangan yang sedang bekerja. Di tengah proses mereka melakukan pendataan terdapat pemberitahuan penggantian aplikasi ini sehingga pada beberapa lokasi yang sulit sinyal menjadi terlambat informasinya dan mereka merasa resah apakah data yang mereka input perlu diulangi. Mengingat kondisi sebaran wilayah responden yang berjauhan tentu membuat PPL berpikir 2 kali jika harus mengulanginya. Ini yang seharusnya menjadi catatan penting, meskipun nantinya ada kelonggaran untuk penggunaan aplikasi baru. Namun, permasalahan teknis seperti ini sangat menyulitkan pada wilayah-wilayah dengan topografi seperti di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan perbukitan dan akses jalan yang beraneka ragam, baik melalui sungai, bukit, maupun jalan berbatu yang tentu saja menanjak dan menurun.

Selain beberapa kendala teknis yang terjadi, ada beberapa kendala non-teknis dalam proses pendataan registrasi sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi substansi dan validitas data yang didapatkan. Beberapa hal ini di antaranya, kesulitan PPL untuk mengetahui aset-aset yang dimiliki oleh responden dan kesulitan PPL dalam mengetahui pengeluaran yang dikeluarkan oleh responden dalam satu bulan terakhir. Kendala tersebut disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, masalah kesulitan dalam mendapatkan informasi aset yang dimiliki responden disebabkan oleh keengganan responden yang tidak ingin dianggap sebagai orang kaya karena memiliki aset seperti hewan ternak ataupun perhiasan emas. Banyak warga yang berpendapat proses pendataan ini berkaitan secara langsung dengan pendataan bantuan sosial yang akan diberikan pemerintah sehingga mereka akhirnya khawatir jika aset mereka disebutkan nantinya tidak dapat bantuan dari pemerintah. Beberapa cara yang dilakukan oleh PPL untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan pengecekan sendiri di sekitar rumah responden atau dengan bertanya kepada tetangganya untuk mengetahui aset yang dimiliki oleh responden terkait. Namun demikian, hal ini tentu saja tidak dapat memotret secara tepat jumlah aset yang dimiliki, karena di TTS sen-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

diri di beberapa wilayah misalnya ada warga yang memiliki ternak yang dilepas di tengah hutan dan tidak dipelihara di rumah. PPL memiliki keterbatasan waktu maupun akses untuk menjangkau maupun memastikan terjawabnya pertanyaan mengenai aset tersebut.

Kedua, persoalan sulitnya mencatat pengeluaran responden Regsosek. Meskipun demikian, dalam daftar pertanyaan kuesioner Regsosek tidak memuat pertanyaan mengenai pengeluaran responden, namun wajib untuk ditanyakan dan jawabannya dimasukkan ke dalam kolom catatan. Ada setidaknya dua bagian pengeluaran yang harus diidentifikasi oleh PPL, yang pertama adalah pengeluaran makanan dan yang kedua adalah non-makanan. Kesulitan yang sering ditemui adalah ketidaktahuan responden mengenai jumlah pengeluaran, misalnya jika responden ditanya berapa pengeluaran untuk makanan dalam sebulan, beberapa responden menjawab kalau apa yang mereka konsumsi adalah yang mereka tanam (hasil tani subsistem). Tentu saja hal ini membingungkan PPL maupun responden.

Selanjutnya, untuk pengeluaran non-makanan, baik PPL maupun responden harus secara detail menanyakan apa saja yang dibeli dalam sebulan. Sebagai contoh, berapa uang untuk membeli sabun dan membeli pulsa. Hal inilah yang cukup memakan waktu, karena PPL harus menghitungnya sendiri, dengan catatan apa yang disampaikan oleh responden sifatnya hanya pengakuan saja tanpa bisa diverifikasi secara tepat jumlah pengeluaran tersebut. Penggunaan *blocknote* juga digunakan untuk mencatat detail pengeluaran SLS, seperti yang dilakukan Yonisam Liem di Bosen dan terbukti ampuh untuk mengorek data pengeluaran warga setempat.

Kendala-kendala yang ditemui di lapangan tersebut setidaknya harus menjadi sebuah catatan penting untuk meningkatkan kualitas perolehan data lapangan. Mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan, kendala adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari, namun bisa diperbaiki. Baik sisi manajerial maupun teknis di lapangan sama-sama memiliki porsi tersendiri untuk terus memperbaiki proses kegiatan Regsosek.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

E. Dukungan Kelembagaan Sosial Adat dalam Pendataan

Di luar kendala yang ada, pemerintah desa di TTS pada umumnya memahami Regsosek dengan baik. Dengan dilibatkannya perangkat desa sebagai verifikator, pendamping, sekaligus menjadi bagian dari konsultasi publik, membuat mereka tampaknya memahami apa yang sedang BPS setempat lakukan. Di titik-titik dimana tim masuk dan mendalami proses yang ada, perangkat desa secara aktif terlibat. Bahkan beberapa melibatkan dirinya sendiri, atau kerabatnya sebagai bagian dari upaya percepatan Regsosek. Meskipun demikian, hal ini juga menjadi pisau bermata dua.

Di satu sisi, PPL dari desa sendiri pasti sangat menguasai medan, tetapi di sisi lain, kedekatan mereka dengan lingkungan membuat mereka sulit untuk tidak mengakomodir apa yang disampaikan oleh responden. Misalnya, memaksa untuk ditulis "miskin" atau berani untuk tidak menyebut asetnya. Sejatinya, perangkat desa pun sudah mengimbau untuk sejujurnya terbuka kepada petugas, seperti yang dinyatakan oleh Sekretaris Desa Oelet Ibrahim Nase, maupun Kaur Keuangan Desa Bosen Rifat Togar Matoto, serta Sekretaris Desa Nunusunu, Yunus Babys. Di Nunusunu misalnya, Kadus 04 Yendri Aby sekaligus menjadi PPL di dusunnya sendiri. Alasan akses yang jauh dan terjal membuat tim tidak dapat mengkonfirmasi bagaimana progress yang dilakukan Yendri, tetapi pendataan di Nunusunu berjalan lancar, mengingat medannya sejatinya cukup terjal.

Medan pedesaan TTS yang menantang membuat masing–masing Koseka, PML dan PPL harus pandai bersiasat dengan medan dan bebannya sendiri. Di Bosen, Yonisam Liem memulai di SLS yang menurutnya jauh dan terjal sehinggakira-kira sudah menyelesaikan 50% pekerjaannya. 50% lainnya tinggal rumah–rumah di kanan kiri jalan utama desa, lebih mudah baginya. Pelaksanaan pencacahan Regsosek di Bosen sudah berjalan selama setengah bulan sejak 15 Oktober. Mekanisme yang dijalankan hampir sama dengan wilayah lain yang menggunakan sistem berjenjang baik untuk pelaporan maupun pengawasan. Proses pendataan dilakukan secara manual

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menggunakan kuesioner yang dibagikan dari BPS Kabupaten TTS. Kuesioner yang telah dicetak dibagikan kepada seluruh Koseka untuk disebar kembali kepada PML dan berakhir di PPL sebagai ujung tombak pendata data sosial ekonomi masyarakat.

Kegiatan pendataan data sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara serempak oleh semua PPL di SLS masing-masing yang telah dibagi oleh PML. Di Bosen sendiri, seluruh PPL merupakan warga asli desa yang perekrutannya berdasarkan rekomendasi kepala desa. Penunjukan warga asli sebagai PPL sangat memudahkan kerja pendataan di lapangan dengan medan yang sulit dijangkau. Beberapa kali PPL ditemani oleh bapak ketua RT setempat untuk mengunjungi warga yang akan didata. Saat ditemui Tim, PPL didampingi kaur keuangan desa, karena ketua RT yang bersangkutan sedang memperbaiki saluran air setempat.

Selain topografi, salah satu hambatan pendataan adalah sulitnya akses jalan. Desa Oelet misalnya, mungkin 2 jam dari Soe, namun di jalur desanya jalan rusak dan sulit. 2 dari 3 PPL Oelet adalah warga Soe, dan PMLnya, Aris (32), juga dari Kota Soe. Mereka memutuskan untuk menginap di lokasi pendataan, di rumah Vinsen, satu-satunya PPL "*akamsi*". Mereka mulai melakukan kegiatan pendataan Regsosek sejak tanggal 15 Oktober. Kendala bahasa menjadi faktor berikutnya, dimana PPL di TTS akan sangat dimudahkan jika memahami dan mampu menggunakan bahasa Dawan. Masyarakat desa kurang familiar dan kurang nyaman dengan bahasa Indonesia, terutama keluarga yang terpencil dan jauh dari pusat desa. Yandri, PML Desa Billa, dengan fasih membantu komunikasi dengan warga setempat, baik saat di Desa Oelet maupun di Desa Mauleum. Penerimaan warga saat petugas menggunakan bahasa Dawan sangat berbeda, mereka tampak menjadi nyaman dan akrab dengan bahasa tersebut.

Sementara itu, di wilayah lain, kecenderungan bentang alam yang sama terdapat di wilayah Suku Boti, wilayah dengan masyarakat adat yang masih kental di Desa Boti Kecamatan Kie. Warga Desa Boti, seperti banyak suku lain yang masih kental kesukuannya, masih mempertahankan nilai-nilai adat yang kental seperti penganut ke-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

percayaan dan menghindari masuknya peradaban luar yang bisa merusak tatanan kebudayaan warga Boti. Salah satunya adalah listrik yang tidak dapat masuk ke beberapa tempat karena warga Boti masih ingin suasana di desa mereka masih sama dan tetap terjaga seperti dahulu. Bantuan yang masuk ke Desa Boti ini pun tidak banyak, hanya BLT desa saja yang ada sementara ini.

Proses pendataan awal Regsosek di Boti tidak jauh berbeda dengan desa lain. Pendataan di wilayah ini terbagi ke dalam 19 SLS dengan pembagian tugas pendataan oleh 3 orang PPL dengan 1 PML, dengan 2 PPL asli warga Desa Boti dan 1 PPL serta PML dari luar yang menginap di Desa Boti. Sejauh ini masyarakat Boti menerima kegiatan pendataan Regsosek. Meskipun demikian, kendala yang dialami di Desa Boti ini tidak berbeda dengan kendala-kendala yang ditemui di desa lain yaitu, kondisi medan pendataan yang berat karena hujan serta kesulitan untuk menemui responden karena sedang berkebun. Waktu pelaksanaan pendataan yang bertepatan dengan waktu tanam membuat PPL kesulitan untuk mencari masyarakat pada jam-jam kerja, yaitu pagi dan siang hari. Namun demikian, menurut Koseka di Kecamatan Kie, melalui pendataan Regsosek ini diharapkan warga di Desa Boti dapat tercatat dengan benar terkait keluarga dengan kategori miskin dan sangat miskin. Walaupun selama ini di Desa Boti ada bantuan yang sementara ini masuk, yaitu BLT desa yang turut membantu warga desa dengan kategori miskin dan sangat miskin.

F. Kesulitan Kami Bukan Hambatan bagi Mereka: Profil Pendata Lapangan

"…lokasi responden ada di balik gunung itu.."
"…di musim tanam seperti saat ini,
kami kesulitan untuk menemui responden…"
"…di seberang kali itu tempat tinggal ketua RT…"
"…kalau kita terlambat melalui jalan bukit itu,
kita tidak bisa pulang karena banjir dan jalur yang licin…"

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Demikianlah beberapa percakapan yang terdengar saat turun menuju lokasi pendataan awal Regsosek. Selain itu, kontur wilayah dengan kondisi berbatu menanjak, berada di perbukitan, serta sungai, cuaca yang tak menentu seperti panas yang sangat terik lalu tiba-tiba turun hujan juga menjadi tantangan tersendiri. Namun, tidak ada keluhan yang tergambar dari wajah para petugas lapangan yang ditemui, mulai dari Koseka, PML, hingga PPL yang setiap hari harus melalui medan dan cuaca yang menantang dan sangat sulit untuk orang yang berasal dari luar daerah TTS. Gambaran mengenai kontur lokasi terlihat dari Gambar 2.3, di mana jalan masih berupa tanah dan berada di wilayah perbukitan.

Adelbertus Muti atau Aris merupakan salah satu PML di Desa Oelet. Bertempat tinggal Kota Soe, Aris turut mendaftar untuk menjadi PML pada kegiatan Regsosek di Kabupaten TTS. Aris mendapatkan tugas untuk menjadi PML di Desa Oelet yang berjarak kurang lebih 45 km dari tempat tinggalnya. Jarak yang cukup jauh dengan tanggung jawab lapangan yang harus dilakukan membuat Aris memutuskan untuk tinggal di Desa Oelet bersama dengan PPL di satu rumah. Ini dilakukan karena menempuh jarak Soe–Oelet cukup memakan waktu dan melelahkan jika dilakukan pulang-pergi setiap hari.

Aris sebagai PML memiliki tanggung jawab terhadap tiga PPL di bawahnya yang setiap hari tidak mengenal libur melakukan pendataan lapangan, baik siang maupun malam. Setiap hari, Aris melakukan pengecekan hasil isian kuesioner PPL yang telah melakukan wawancara untuk nantinya diserahkan kepada Koseka di Soe, di mana Koseka Amanuban Timur, Sisca Rianty, juga merupakan tim organik BPS sehingga lebih banyak berkutat pada pekerjaan domestik BPS kabupaten. Selain melakukan pemeriksaan kuesioner, dia juga membantu menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi oleh PPL, seperti kendala izin ketua RT, masalah responden sulit ditemui, hingga pengecekan data *pre-list* yang diverifikasi bersama dengan ketua RT.

Sebelumnya, Aris sudah beberapa kali bermitra dengan BPS Kabupaten TTS sehingga dia sedikit banyak mengetahui kegiatan-kegiatan survei sebelumnya dengan BPS. Menurut Aris sendiri ke-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Gustaf, 2022

Gambar 2.3 PML dan PPL menjangkau wilayah yang sangat luas dan kontur berbukit.

giatan Regsosek ini memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak jauh berbeda dengan survei sebelumnya seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), namun perbedaannya adalah Regsosek ini sifatnya sensus yang berbeda dengan survei sebelumnya yang hanya mengambil sampel saja. Model ini seperti mengulang kegiatan sensus penduduk tetapi dengan pertanyaan yang lebih sedikit dan mudah dipahami. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan Regsosek ini, wawancara dilakukan dengan bahasa daerah untuk melakukan *probing* kepada responden karena rata-rata responden lebih mudah memahami pertanyaan dengan menggunakan bahasa setempat.

BPS sengaja melakukan sistem perekrutan untuk posisi PML karena dibutuhkan kriteria khusus untuk melakukan pemantauan maupun pemeriksaan kuesioner. Pemahaman tentang isian kuesioner

Buku ini tidak diperjualbelikan.

serta cara mengatasi kendala lapangan membutuhkan respons yang cepat karena waktu untuk melakukan pendataan juga hanya dalam sebulan dengan masing-masing target responden per PPL sekitar 250 responden. Jumlah ini dapat lebih karena bisa saja di lapangan ada tambahan responden yang belum tercatat sehingga perlu strategi yang tepat di lapangan melalui kerja sama antara Koseka, PML, dan PPL.

Aris sebagai PML sendiri melakukan strategi yang tepat untuk memudahkan kegiatan Regsosek di lapangan dengan medan yang sulit. Hal pertama yang dilakukannya adalah memutuskan untuk menginap di desa atau lokasi tempatnya bekerja. Lalu yang kedua berusaha untuk membangun kerja sama dengan kepala desa, kepala dusun, dan ketua RT untuk sebagai sarana penyambung lidah ke warga yang akan didatangi untuk diwawancara. Yang menarik adalah pada kasus tertentu, misalnya saat verifikasi data dengan ketua RT lalu ditemukan pendataan warga yang dobel karena ketua RT tidak mau warganya dilepas ke RT lain, Aris melakukan penyesuaian data langsung di lapangan tanpa berdebat dengan ketua lingkungan setempat. *Gesture* seperti ini menjadi penting mengingat ketua RT merupakan pihak yang harus dijaga hubungannya untuk memudahkan proses pengumpulan data Regsosek di wilayahnya. Strategi-strategi untuk menghindari konflik seperti ini perlu dilakukan dengan menyelesaikan masalahnya dengan cara berkoordinasi dan kunjungan langsung ke responden bersama seluruh PPL di bawahnya.

Cerita lain datang dari Desa Bosen, Kecamatan Mollo Utara. Lokasi desa ini kurang lebih 22 km di utara pusat kota. Wilayah ini memiliki tipologi perbukitan dengan pohon dan hamparan rerumputan yang luas. Andriyani (32) merupakan Koseka Mitra di Kecamatan Mollo Utara. Sama dengan Aris, Andriyani adalah warga Kota Soe, namun Andriyani tidak menginap di desa lokasi pencacahan. Setiap hari, ia menjangkau Desa Bosen pulang-pergi menggunakan motor. Andriyani sebelumnya menyelesaikan Pendidikan D3 Kebidanan pada tahun 2017. Menarik mendengar cerita Andriyani mengenai pendidikan dan pekerjaan yang menurutnya memiliki tantangan tersendiri ketika "*balik kampung*" ke NTT.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sesudah menyelesaikan pendidikannya, Andriyani tidak bisa langsung bekerja di NTT. Kalaupun ada pekerjaan untuknya, bayaran yang diterima juga kecil dan sering kali hanya menjadi sukarelawan saja. Itulah mengapa Andriyani tertarik untuk ikut kegiatan Regsosek dan bermitra dengan BPS karena selain memiliki upah yang jelas, dia juga dapat mengisi waktu luang karena saat ini sedang tidak bekerja. Sama dengan Koseka lain di Kabupaten TTS, Andriyani menjadi pengatur di lapangan untuk kegiatan Regsosek di Mollo Utara. Dia mengumpulkan kuesioner, pemeriksaan akhir, dan membantu mengatasi kendala yang dihadapi oleh petugas lapangan lain di bawahnya. Tentu saja hal ini memiliki tantangan tersendiri karena dengan cakupan wilayah yang sangat luas, Mollo Utara menjadi salah satu wilayah yang memiliki dua Koseka, salah satunya Andriyani. Meskipun seorang perempuan, hal ini tidak menjadi halangan bagi Andriyani untuk menjangkau wilayah kerjanya. Hanya saja ia mengaku terkadang merasa ngeri juga jika harus pulang terlalu larut dan melewati hutan mahoni di seputaran Jalur Kapan—Soe. Namun, dengan jarak yang tidak terlalu jauh dan jalan yang cukup baik, pulang-pergi Soe—Mollo Utara memungkinkan untuknya.

Di desa Bosen, ada Oyisam Liem atau Om Sam yang merupakan PPL Regsosek setempat. Ia sebelumnya bekerja sebagai petani sawit di Kalimantan. Setelah kurang lebih 10 tahun merantau, Om Sam akhirnya memutuskan untuk kembali ke desanya karena sudah bisa membangun rumah dan membeli motor. Ia kini menjadi kepala keluarga dengan tiga anak. Di sela kegiatan berkebunnya di desa, Om Sam adalah salah satu yang direkomendasikan kepala desa untuk menjadi PPL pada kegiatan Regsosek ini. Sebelum Regsosek, Om Sam juga sempat menjadi petugas pendataan lapangan BPS pada sensus 2010 sehingga tidak mengherankan dirinya ditunjuk sebagai petugas lapangan Regsosek. Selain karena merupakan warga asli, dirinya juga telah memiliki pengalaman sebagai petugas pendata lapangan. Caranya berkomunikasi dan mengorek jawaban responden cukup baik, dan tercatat detail dan menarik. Selain itu, beberapa pertanyaan menurutnya juga sulit ditanyakan kepada responden,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

seperti pertanyaan mengenai asset yang sering kali mendapat jawaban yang tidak jujur dari responden. Terakhir, terkadang kebingungannya adalah untuk menanyakan jumlah pengeluaran responden karena selain harus detail bertanya juga harus menghitungnya secara manual di kertas terpisah.

Sebagai PPL, Om Sam bercerita bahwa dirinya dalam sehari dapat mewawancara hingga 13 responden dengan wilayah tempat responden yang berbagai macam rintangannya, mulai dari dipisah sungai hingga harus melewati padang rumput yang cukup luas untuk menjangkau satu responden. Dirinya juga bercerita pernah suatu kali mengunjungi responden yang lokasinya cukup jauh, namun saat didatangi calon responden tersebut tidak sedang berada di rumah. Hal ini cukup sering terjadi. Oleh karena itu, sesekali Om Sam ditemani oleh ketua RT untuk memudahkan mengetahui letak rumah responden serta keberadaannya. Kehadiran dan legitimasi dari ketua RT juga memudahkannya menemui 1–2 KK yang sudah diimbau di rumah, namun tetap saja jalan ke kebun saat akan dicacah. Om Sam bercerita jika dalam pengumpulan data yang dilakukannya ini kendala-kendala yang ditemui selain responden sulit ditemui adalah kendala cuaca karena di Mollo Utara hujan turun hampir setiap hari. Utamanya saat tim masuk ke TTS, siang hari memang cuaca meredup dan hujan kemudian turun hingga sore hari. Malam hari kemudian menjadi pilihan Om Sam untuk bergerak.

Mereka senang menjalani kegiatan ini tanpa pernah berkeluh kesah masalah honor ataupun masalah lain. Mereka berusaha mencari solusi atas masalah-masalah yang terjadi di lapangan dengan cara mereka sendiri. Selain itu, bagi beberapa PPL kegiatan Regsosek ini memberikan pengalaman baru pada mereka dalam melakukan pendataan karena mereka baru pertama kali mengikuti kegiatan seperti Regsosek ini.

Terakhir, Apris Seo (34), PML Desa Nunusunu. Bapak dua anak ini juga perangkat Desa Nunusunu. Perannya adalah Kaur Umum. Sebagai kaur, ia cukup paham dengan kondisi sosial ekonomi desa-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

nya. Ia juga termasuk dekat dengan warga. Sekali lagi, tantangan baginya adalah mengondisikan warganya untuk tetap ditempat saat dicacah. Menurutnya, pencacahan baru efektif di malam hari karena di siang semua warga berkebun. Tantangan lain adalah bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini bukanlah pendataan untuk bansos. Warga terlalu sering didata dan dibantu hingga akhirnya terbiasa menunggu bantuan datang setelah didata. Satu hal lagi yang ia keluhkan adalah peta batas RT dari BPS yang di beberapa titik berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Salah satu PPL yang ada di Desa Nunusunu adalah Daudens (32). Ia adalah lulusan STMIK Pasim Sukabumi, Jawa Barat. Saat ini ia adalah operator sekolah di SD GMIT Matsio. Perannya di sekolah membuat pekerjaan sebagai PPL ini seperti selayaknya guru yang berkunjung ke rumah muridnya karena memang di Nunusunu hanya ada 2 SD, yakni SD GMIT Matsio dan SD Inpres Nunusunu. Pekerjaan dari BPS ini berkah untuk Daudens, Sam, Vinsen, Andriany, Yandri, Aris dan petugas mitra lainnya, sebagai tambahan pemasukan yang cukup baik secara nominal, sekalipun hanya dalam satu bulan saja.

G. Petugas Catat, Bantuan *Sudekat*

Profil Responden Regsosek Timor Tengah Selatan

Keluarga Halena Nubatonis (50) merupakan keluarga yang hidup di Desa Oelet. Tidak ada yang spesial, hanya keluarga yang hidup sederhana dengan rumah permanen dengan alas semen atap asbes dan cemplung sebagai tempat buang air besar. Setidaknya itulah gambaran rumah permanen di Oelet yang meskipun sudah memiliki rumah permanen, namun untuk tempat BAB banyak warga yang masih memanfaatkan cemplung. Cemplung adalah semacam tempat berbentuk persegi ukuran 1 × 1 meter dengan lubang di tengahnya yang ditutup dengan daun lontar kering. Kondisi seperti ini lumrah ditemui di TTS. Rumah dengan bentuk permanen, semi permanen, ataupun rumah tradisional yang terbuat dari daun banyak yang masih

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menggunakan cemplung sebagai sarana BAB. Anak dari keluarga Helena Nubatonis, Vinsensius Tabun (20), baru lulus SMA, dan dalam Regsosek ini menjadi satu-satunya PPL asli Oelet. Dua orang PPL lain yang berasal dari Kota Soe, menginap di rumah ini.

Keluarga Ibu Milkaliu (50) sudah terbiasa dengan kerja pendataan di pedesaan karena dulu almarhum suaminya sudah menjadi petugas pendata sensus penduduk pada tahun 2000; sudah lama sekali, ketika pendataan yang dilakukan masih secara manual dan belum ada gawai yang digunakan sebagai alat pendukung. Oleh karena itu, keluarga Ibu Milkaliu sudah amat terbiasa dengan kerja pendata lapangan dan menyambut baik petugas pendata lapangan yang akan mewawancarainya. Tidak ada rasa kejenuhan yang ditampakkan, melainkan rasa senang hati untuk menjawab setiap pertanyaan.

Sama halnya dengan Sefrita Ton (40) di Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin. Beliau bersama keluarga sehari-hari bekerja sebagai petani kebun yang menanam jagung, singkong, serta pepaya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dari hasil bertanam jagung, Bapak Ton dalam setahun menghasilkan kurang lebih 30 kuda (satuan ikat dalam bahasa setempat yang nilainya kurang lebih sama dengan 20 kg/ikat). Dari hasil kebunnya tersebut, Bapak Ton menyisihkan sebagian untuk dijual dan sebagian lagi untuk dikonsumsi sehari-hari. Hasil panen Bapak Ton disimpan dalam lumbung dengan dikeringkan terlebih dahulu hingga dapat bertahan selama satu tahun untuk pemenuhan kebutuhan makan. Untuk konsumsi makanan tambahan lainnya, Bapak Ton mengandalkan hasil kebun saja, seperti singkong dan daunnya yang dimanfaatkan untuk sayur. Sementara itu, konsumsi daging sangat jarang. Di beberapa tempat ada ungkapan "*makan daging menunggu ada yang adakan pesta saja*".

Bapak Ton seperti halnya keluarga Ibu Milkaliu (50) dari Oelet tinggal di rumah permanen hasil dari penjualan hasil kebunnya. Keluarga Bapak Ton terdiri dari istrinya dan empat anaknya yang semuanya bersekolah mulai dari SD hingga SMP. Keempat anaknya tersebut mendapatkan bantuan KIP untuk pendidikannya. Meskipun

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pagi hingga menjelang siang bersekolah, anak-anak Bapak Ton ini turut membantu orang tuanya di kebun ketika sekolah usai. Jika Bapak Ton dan istri mulai berkebun dari mulai pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore, anak-anaknya mulai menuju kebun pada pukul 11 siang hingga pukul 6 sore kembali dengan orang tuanya. Kondisi ini umum terjadi di Desa Nunusunu maupun di desa-desa lain di Kabupaten TTS. Banyak anak yang membantu orang tuanya bekerja untuk membersihkan ladang maupun menanam jagung.

Sementara itu, nasib berbeda antara Bapak Ton dan Ibu Milkaliu yang tinggal di rumah permanen dengan dinding tembok. Bapak Agustinus Lassa tinggal di rumah adat sederhana dengan ukuran kurang lebih 2 × 3 meter yang berdiri sendiri di atas bukit. Bapak Agustinus Lassa tinggal seorang diri setelah kepergian istrinya, sementara anak-anaknya tinggal dengan mertua masing-masing. Setiap hari, siang dan malam, Bapak Agustinus beraktivitas di rumahnya tanpa listrik. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ia menanam jagung dan singkong untuk dikonsumsi. Dengan kondisi seperti itu, Bapak Agustinus tergolong pada kode 1 atau sangat miskin di dalam kolom isian kuesioner Regsosek.

Mayoritas desa dengan keluarga yang dikunjungi menyambut baik petugas pendata Regsosek. Mereka tidak ada yang melakukan penolakan untuk didata, semua pertanyaan dijawab tanpa ada yang terlewat, meskipun terkadang di semua wilayah PPL wajib untuk lancar berbahasa daerah setempat untuk mendapatkan informasi yang benar. Keluarga yang dikunjungi juga telah mendapatkan pemberitahuan akan adanya survei Regsosek ini melalui ketua RT atau SLS sehingga menjadi salah satu yang memudahkan PPL untuk menemui mereka di lapangan. Meskipun demikian, pada beberapa kasus ada keluarga yang tidak ingin waktunya terbuang hanya untuk menunggu PPL sehingga mereka memilih pergi ke kebun untuk bekerja. Salah seorang responden ditemui di kebunnya dan didata oleh petugas pendata (Gambar 2.4).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Gustaf (2022)

Gambar 2.4 Responden tinggal seorang diri di bukit tanpa aliran listrik dan mengandalkan hasil kebun.

Dari semua desa yang dikunjungi, ada satu suara yang terdengar mengenai berbagai kegiatan survei yang dilakukan, yaitu didata untuk mendapat bantuan. Didata untuk dapat bantuan itulah gambaran yang didapatkan ketika menemui Ketua RT Desa Mauleum Bapak Timotius Toni berbarengan dengan proses verifikasi pendataan warga di lingkungannya. PPL yang datang bersama dengan PML sempat meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan pendataan dan verifikasi. Pada proses verifikasi tersebut, tergambar bagaimana Bapak Ketua RT bersemangat ketika ditanya kondisi warganya yang akan didata.

"*…miskin total…*" "*….satu per dua miskin…*". Itulah kata-kata yang sering muncul ketika PPL bertanya untuk melakukan konfirmasi terhadap kondisi keluarga yang ada di wilayahnya. Bapak Ketua RT adalah salah satu yang mengasosiasikan pendataan dengan bantuan. Beliau tidak ingin satu pun warganya nanti tidak mendapatkan ban-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tuan dari pemerintah. Beliau tahu betul bagaimana keadaan warganya dan tidak ingin menimbulkan kecemburuan antara satu sama lain sehingga hasilnya adalah sebagian besar warga yang terverifikasi adalah warga dengan kategori 1 dan 2, yaitu sangat miskin dan miskin.

Hal yang umum ditemui adalah anggapan bahwa pendataan ini untuk mendapatkan bansos dari pemerintah. Memang kondisinya seperti itu; warga yang didata selalu mengasosiasikan bantuan dengan berbagai pendataan yang dilakukan pemerintah. Hal ini tidak sepenuhnya salah karena memang ada keterkaitan antara pendataan ini dan bantuan yang akan diberikan pemerintah, walaupun tidak terkait secara langsung. Namun, yang menjadi masalah adalah saat ada warga yang menganggap bahwa pendataan sama dengan akan mendapatkan bantuan, yang terjadi adalah ketidakjujuran warga dalam menjawab berbagai pertanyaan sensitif mengenai harta yang dimiliki dan pendapatan yang dihasilkan. Proses pendataan ini selain mengandalkan kecakapan PPL dalam wawancara, juga sangat mengandalkan kejujuran responden dalam menjawab pertanyaan sehingga yang dikhawatirkan terjadi adalah ketika nantinya data yang dihasilkan tidak valid.

Meskipun demikian, gambaran-gambaran nyata di lapangan seperti ini dapat menjadi pertimbangan yang sangat berharga mengenai proses pendataan dengan berbagai dinamikanya yang terjadi. Koseka, PML, dan PPL tentu berusaha dengan berbagai cara untuk menghasilkan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, berbagai keterbatasan baik dari sisi kompetensi serta kemampuan PPL yang beragam dan ketergantungan terhadap kejujuran jawaban dari responden tentu merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicari solusinya. Pengalaman Koseka, PML, dan PPL dalam mengatasi masalah-masalah seperti ini sangat berharga untuk masukan bagi proses perencanaan survei serupa Regsosek ke depannya, mengingat ini masih pendataan awal Regsosek. Suara-suara dari bawah sangat dibutuhkan untuk dinarasikan serta didengar oleh pemangku kebijakan yang memegang kendali kegiatan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

H. Komitmen Mendata Keterbatasan: Suatu Penutup

Secara umum, Regsosek di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) berjalan lancar dan disambut baik oleh masyarakat. Menariknya, sebagian besar masyarakat pedesaan di TTS cukup familiar dengan pendataan, khususnya dengan nama BPS. Hal ini dimungkinkan karena intensitas pendataan yang cukup sering dilakukan. Adapun beberapa kendala di lapangan yang terjadi adalah alokasi waktu Regsosek pada tahun ini yang bertepatan dengan datangnya awal musim hujan di TTS sehingga banyak masyarakat yang menghabiskan waktunya di kebun untuk bercocok tanam dari pagi hingga sore hari.

Tantangan lain muncul sebagai konsekuensi medan TTS yang cenderung naik-turun, terjal, dan terpencar-pencar antarlokasi rumah warga. Pendekatan *by name by address* yang juga ditekankan pada Regsosek kali ini membuat petugas berkeringat lebih dibandingkan program pendataan lainnya. Mayoritas responden menyambut baik kedatangan petugas, namun kurang terbuka terkait pengeluaran rumah tangga mereka. Masing-masing petugas perlu mengembangkan pendekatannya sendiri kepada responden untuk mengorek informasi seputar pengeluaran dalam satu bulan yang paling mendekati pengeluaran sebenarnya. Pola pertanian subsistem yang hasilnya untuk dimakan sendiri juga memaksa petugas harus pandai-pandai menghitung konversi pengeluarannya.

Sebagian besar desa mendukung Regsosek dengan membantu mengondisikan warganya untuk sengaja di rumah dan menanti petugas pada hari yang telah disepakati antara petugas dan perangkat desa yang mendampingi. Sinergi ini tampak baik berjalan, di mana beberapa PPL pun berasal dari usulan perangkat desa, atau bahkan perangkat desa itu sendiri. Perlu ada penguatan pelatihan terutama pada materi teknik wawancara dan *probing* yang baik, khususnya bagi PPL pemula yang baru sekali menjadi mitra BPS. Program pendataan seperti ini juga menjadi oase bagi para pemuda TTS yang berhasil melalui *open recruitment* BPS TTS. Talenta yang terbukti mampu

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bekerja dengan baik akan bermanfaat bagi BPS TTS pada masa yang akan datang, mengingat pendataan seperti ini akan terus dilakukan secara berkesinambungan.

Adapun beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat pasca-Regsosek dilaksanakan adalah kesatuan data yang sebelumnya tercecer hendaklah didukung dengan validitas data Regsosek yang kuat. Sebelumnya, survei dinas kesehatan terkait *stunting* dilaksanakan sendiri. Survei dinas sosial terkait kesejahteraan sosial dilaksanakan sendiri. Survei terkait SDGs dilaksanakan sendiri. Sudah selayaknya data-data tersebut disatukan dalam pangkal data yang diawali dengan pendataan awal Regsosek tahun 2022 ini. Juga, terkait banyaknya masyarakat yang ternyata belum memiliki NIK dan BPJS, selanjutnya perlu mendapat perhatian dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan BPJS setempat agar pihak terkait terus berupaya mendekatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Data Regsosek yang ada dalam bentuk kuesioner yang sangat komprehensif diharapkan dapat membantu memetakan bantuan kesejahteraan sosial kepada masyarakat TTS secara lebih tepat dan strategis. Dalam hal ini, program dan bantuan yang dijalankan hendaknya menyentuh permasalahan di hulu dan tidak sekadar "tersalurkan" namun dampaknya hanya sesaat saja. Data Regsosek yang ada harus segera diolah dan disampaikan kepada stakeholder terkait untuk ditindaklanjuti. Ibarat bermain bola, *kick off* sudah digulirkan oleh BPS melalui Regsosek, perlu pemain lain dalam perannya sebagai *second striker*, gelandang, bek, dan penjaga gawang untuk menuju satu gol, yakni Indonesia Maju yang sejahtera.

Daftar Pustaka

Adji, A., Asmanto, P., Nugroho, D., Sadikin, A., & Handayani, N. B. (2022). *Penentuan wilayah prioritas kemiskinan ekstrem 2021–2024*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

BPS. (2021). *Analisis produktivitas jagung dan kedelai di Indonesia 2021*. BPS.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BPS. (2022). *Persentase penduduk miskin (P0) menurut provinsi dan daerah 2021–2022*. BPS.

BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2022). *Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam angka tahun 2022*. BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan.

BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2023). *Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam angka tahun 2023*. BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan.

BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023). *Nusa Tenggara Timur dalam angka tahun 2023*. BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *D*ashboard peta sebaran kerentanan stunting. *Kementerian Dalam Negeri-Dirjen Dukcapil.* https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=b832cb42d23b4fe197e278ceca893ad7

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Buku saku hasil studi status gizi Indonesia (SSGI) tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota Tahun 2021*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

P3KE Kemenko PMK. (2023). *Sebaran data kemiskinan ekstrim*. Kemenko PMK. https://p3ke.kemenkopmk.go.id/sebaran

Pageh, I. M. (2020). *Soenda kecil: dinamika menuju Indonesia raya*. Lakeisha.

Peta Tematik Indonesia. (2015, 15 Mei). *Administrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan*. Diakses pada 6 Maret, 2023, dari https://petatematikindo.wordpress.com/2015/05/15/administrasi-kabupaten-timor-tengah-selatan/

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2021). *Terus perbaiki data, data kemiskinan ekstrem 2022–2024 diharapkan lebih mutakhir dan akurat*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://www.setneg.go.id/baca/index/terus_perbaiki_data_data_kemiskinan_%0Aekstrem_2022_2024_diharapkan_lebih_mutakhir_dan_akurat%0A

Buku ini tidak diperjualbelikan.

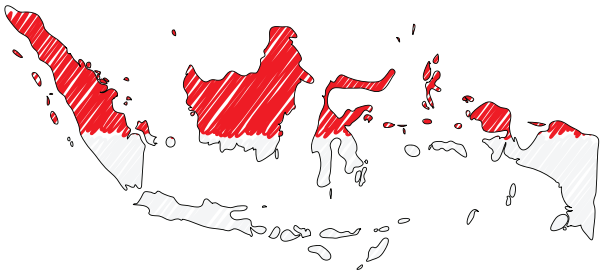

3

Impian Pendatang, Tantangan Pendataan: Upaya Memahami Silang Sengkarut Kependudukan di Episentrum Pariwisata Lombok Utara

R. G. Erwinsyah & Delfirman

A. Mencatat di Antara Beragam Masalah: Pengantar

"Ke Gili Trawangan? Mau wisata ya?" Begitu kira-kira tanggapan sebagian kolega yang mendengar rencana kajian Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Gili Trawangan, yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal itu tentu wajar mengingat begitu populernya pulau ini sebagai destinasi wisata kelas wahid, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah ada masalah sosial dan pendataan penduduk di sana? Pertanyaan

R. G. Erwinsyah & Delfirman
Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: rudy006@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Erwinsyah, R. G. & Delfirman. (2023). Impian pendatang, tantangan pendataan: upaya memahami silang sengkarut kependudukan di episentrum pariwisata Lombok Utara. Dalam M. A. Humaedi, D. K. Imron, & A. Pramono (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 1 Indonesia Tengah-Timur* (59–100). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.775.c696 ISBN: 978-623-8052-94-3 E-ISBN: 978-623-8052-98-1

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ini dijawab rekan BPS Kabupaten Lombok Utara dengan sangat menenangkan, "Gili Trawangan memang tempat paling menarik dan banyak tantangan serta masalah (baik dari pendataan maupun kependudukan)". Tim peneliti kemudian memutuskan untuk fokus melakukan penelusuran kegiatan pendataan penduduk di pulau itu. Kajian pada bab ini menceritakan fenomena yang ada di Lombok Utara, cerita perjuangan pendataan dan permasalahan sosial yang ada di pulau impian wisatawan, dan ditutup dengan sebuah refleksi dari pengalaman singkat bergumul dengan pendataan. Ada pembelajaran dalam proses pendataan di tengah masalah kependudukan.

Kehadiran tim peneliti di lapangan bertujuan memotret secara kualitatif dan menghasilkan narasi emik dari kegiatan Regsosek. Tim peneliti sadar akan pentingnya melepas kacamata negara, atau jika meminjam istilah antropolog James C. Scott, peneliti perlu untuk mengabaikan cara pandang seperti negara (*seeing like a state*), meskipun peneliti memiliki status sebagai Aparatur Sipil Negara. Menurut Scott (1998), negara selalu menjalankan proyeknya dengan simplifikasi, di mana negara berusaha menyederhanakan realitas yang kompleks agar mudah diatur dan dikontrol. Negara dengan ideologi birokrasi *high-modernism* mencoba memaknai kesejahteraan dari pengetahuan yang dianggap "saintifik", seperti data statistik, indeks, indikator, dan bilangan angka yang diharapkan memacu pertumbuhan pembangunan. Pandangan positivistik ini cenderung abai terhadap realitas sosial yang kompleks karena negara memandang masyarakat sebagai target pembangunan laiknya tabula rasa, sebuah kanvas kosong yang dapat ditulis, diciptakan, dan dibangun dari nol sesuai kehendak penyelenggara negara (Ferguson, 1990).

Kontrol demografi masyarakat sebagai determinasi infrastruktur dapat ditelusuri melalui pemikiran Marvin Harris (1979) mengenai materialisme kultural. Ia tidak puas dengan konsep Marx mengenai mode produksi dalam infrastruktur sehingga ia menambahkan konsep mode reproduksi, yakni komponen dan tata-cara reproduksi aspek-aspek produksi. Dalam hal ini, kontrol demografi atau kependudukan sehingga secara garis besar tataran infrastruktur materialisme kultural

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Harris dapat dipahami dalam wujud teknologi, ekologi, dan demografi. Data demografi inilah yang dapat menjadi alat mengonstruksikan identitas dan realitas sosial (Tishkov, 2005).

Masih dengan napas akademis yang senada, Tania Murray Li (2005) mencoba mengaitkan konsep *high-modernism* Scott dengan *governmentality* dari Michel Foucault. Dalam konsep *governmentality*, kekuasaan dan pemerintahan dioperasikan melalui tata cara dan teknologi birokrasi modern berupa standardisasi serta pengukuran dalam segala hal, seperti pemetaan, angket, sensus, dan survei. Foucault (1980) merumuskan bahwa mesin utama *governmentality* dimotori ilmu-ilmu pengetahuan bernuansa etik yang digunakan untuk mendukung logika kekuasaan. Di sini Scott (1998) dan Li (2007) hadir dengan sebuah solusi untuk mengatasi monopoli negara terhadap pembangunan, yakni dengan menghadirkan suara-suara emik untuk mengimbangi pandangan etik negara, dengan memberikan ruang bagi kelompok-kelompok masyarakat yang dimarginalkan untuk bersuara.

Dalam konteks Indonesia modern, wacana yang patut diperbincangkan bukan lagi perkara bagaimana data demografi digunakan dalam implementasi program, melainkan pada tataran yang lebih hulu lagi, yakni bagaimana data tersebut diproduksi. Jika meminjam pandangan Foucault (1980) terhadap pengetahuan, data adalah salah satu unsur pengetahuan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kekuasaan. Sosiolog Elad Segev (2019) lebih lanjut memahami Foucault dengan memandang data mengarah pada pengetahuan, dan pengetahuan mengarah pada kekuasaan untuk bertindak dan menentukan realitas yang dijalani. Dalam hal ini, peneliti juga harus memperlakukan data sebagai yang terhubung langsung dengan kekuasaan, dan bersikap kritis terhadap pengetahuan yang dihasilkan sejak proses produksi hingga implikasinya. Hulu proses bisnis data ialah bagaimana data tersebut dikumpulkan sehingga harus ditelisik sejak dari proses produksinya.

Regsosek sebagai sebuah proyek pendataan nasional dianggap sebagai titik balik implementasi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Presiden RI telah mengamanatkan secara

Buku ini tidak diperjualbelikan.

langsung pelaksanaan Regsosek dalam pidato kenegaraan yang mengindikasikan urgensi pelaksanaannya. Regsosek sendiri adalah upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal. Dengan menggunakan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Data Regsosek dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas berbagai layanan pemerintah, seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, hingga administrasi kependudukan.

BPS Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Utara mengetahui dengan jelas posisi strategis dan urgensi pelaksanaan Regsosek ini, dan berusaha untuk menjalankannya sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati. Namun, fakta di lapangan tentunya ada banyak hambatan dan kendala yang dihadapi. Saat peneliti tiba di BPS Provinsi NTB terlihat kesibukan di dalam kantor karena sedang adanya rilis bulanan statistik provinsi. Di luar *business as usual* yang dilakukan tersebut, BPS Provinsi dan Kabupaten secara paralel tetap dapat menjalankan mandat untuk melaksanakan Regsosek, tentunya butuh komitmen dan konsolidasi yang solid dari pusat ke daerah untuk dapat menjalankannya.

Dalam pelaksanaan Regsosek, pemerintah daerah dan desa memiliki wewenang melakukan pemutakhiran data karena pemerintah setempat yang paling mengerti kondisi komunitasnya. Pemutakhiran dalam Regsosek bersifat *bottom up*, yaitu dari kepala desa yang mendapatkan data secara *door to door*. Hal ini dilakukan agar pemerintah desa mendapatkan data warga mana saja yang harus dibantu di daerahnya. Data ini akan didiskusikan dan diputuskan melalui Badan Permusyawaratan Desa. Tata kelola pemutakhiran data ini perlu dibangun untuk menjamin keberlanjutan data dan harus terstandardisasi di seluruh daerah. Selain itu, perlu peningkatan kapasitas daerah sebagai pelaksana pemutakhiran data. Penyerahan kepercayaan terhadap unit pemerintahan terkecil ini sebenarnya adalah sebuah bentuk dari pengakuan negara mengenai adanya keinginan dari masyarakat untuk maju sesuai dengan harapan dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

potensinya (Li, 2007), walaupun sebenarnya masih banyak rekognisi dan penyerahan mandat lain yang belum terakomodasi.

Data yang dihasilkan dalam Regsosek dapat digunakan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem. Sekitar 5,59 juta jiwa atau 2,04% pada tahun 2022 masih tergolong dalam kategori kemiskinan ekstrem (TNP2K, 2022) dan membutuhkan intervensi segera dari pemerintah. Beberapa wilayah di Indonesia masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan data kemiskinan yang dirilis BPS bahwa persentase penduduk miskin NTB saat ini sebesar 13,68%, masih jauh di atas rata-rata nasional. Persentase kemiskinan tertinggi NTB berada di Kabupaten Lombok Utara dengan 27,04% pada Maret 2021 (BPS Nusa Tenggara Barat, 2022). Dalam konteks sejarah pendataan di Indonesia, Pulau Lombok adalah wilayah yang masih memiliki catatan lengkap sensus penduduk pada jaman pendudukan Jepang (Tukiran, 2000).

Kabupaten Lombok Utara merupakan wilayah yang memiliki beragam potensi, terutama alamnya yang berupa pegunungan dan pesisir pantai. Pulau Gili Trawangan yang begitu tersohor di dunia pun ada di wilayah paling muda di Provinsi NTB ini. Namun, ternyata ada berbagai paradoks pembangunan yang terjadi. Segala potensi alam dan kekayaannya belum dapat digunakan sebagai pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat, terlihat dari persentase kemiskinan yang masih tinggi. Kegelisahan seperti ini disebut Michael L. Ross, seorang pakar ekonomi-politik, sebagai *resource curse* (Ross, 1999), di mana daerah yang memiliki potensi dan kekayaan alam besar tetapi justru masyarakat tidak mampu memperoleh hasilnya untuk peningkatan kesejahteraan. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh dimensi ekonomi dan politik dalam suatu wilayah.

Kehadiran Regsosek diharapkan dapat menjadi landasan dan pemacu bagi penurunan angka kemiskinan dan penghapusan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB, khususnya di Kabupaten Lombok Utara. Pengambilan kebijakan berdasarkan bukti berupa

Buku ini tidak diperjualbelikan.

angka statistik dan data *by name by address* yang akurat serta peran pemerintah daerah dianggap akan menjadi penentu bagaimana data akan menjadi titik pertama penyelesaian berbagai permasalahan sosial. Semoga.

B. Bentang Alam Lombok Utara: Puncak Gunung, Pantai, dan Pulau-Pulau Kecil

Perjalanan menuju Kabupaten Lombok Utara dari Kota Mataram dapat ditempuh sekitar satu hingga dua jam dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Dua jalur yang dapat ditempuh, yaitu melalui Jalan Raya Senggigi yang merupakan pesisir pantai atau melalui jalan baru melewati Gunung Pusuk. Ibu kota kabupaten ada di Kecamatan Tanjung, sekitar satu jam dari ibu kota provinsi. Kabupaten Lombok Utara memiliki lima kecamatan, yaitu Kecamatan Pemenang, Tanjung, dan Gangga, yang sebagian besar wilayahnya berada di pesisir. Lalu, Kecamatan Bayan dan Kayangan yang lebih dominan wilayah pegunungan karena berada di kaki Gunung Rinjani. Puncak Gunung Rinjani dengan Danau Segara Anak yang sangat indah itu pun berada di wilayah Kecamatan Bayan.

Selain wilayah Bayan, Kecamatan Pemenang menjadi salah satu kecamatan yang diunggulkan sebagai daerah pariwisata di Kabupaten Lombok Utara. Di wilayah ini ada objek wisata berupa pesisir pantai yang sangat indah yang melintang sepanjang Jalan Raya Senggigi hingga wilayah Desa Malaka, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Menggala dan yang paling menjadi primadona adalah Desa Gili Indah. Keindahan dan potensi alam wilayah ini membentang mulai dari sisi kiri dengan kilauan pantai dan sisi kanan dengan hamparan hijaunya gunung. Sayangnya, di balik keindahan dan gemerlap pariwisata, ada permukiman warga yang jauh dari kata megah apalagi mewah. Sesuai dengan angka statistik BPS, wilayah ini masih menjadi lokasi dengan masyarakat yang tergolong miskin.

Menyeberang dari Pulau Lombok, ada tiga pulau kecil yang berjejer ke arah barat. Desa Gili Indah merupakan satu-satunya wilayah di Kabupaten Lombok Utara yang berada di luar Pulau Lombok. Ada

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tiga dusun yang terbagi oleh tiga pulau di Desa Gili Indah, yaitu Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan. Ketiga pulau ini dikenal juga dengan nama Gili Tramena. Keindahan Gili Tramena sudah dikenal secara luas, bahkan menjadi destinasi wisata mancanegara di Provinsi NTB, selain kawasan Mandalika, Pesisir Pantai Senggigi, dan Pendakian Gunung Rinjani.

Desa Gili Indah memiliki wilayah terkecil dibanding dengan desa lainnya di Kecamatan Pemenang, dengan luas hanya 6,78 km^2 atau sekitar 6,1% dari luas keseluruhan kecamatan. Gambaran pulau-pulau tersebut terlihat pada peta Kecamatan Pemenang (Gambar 3.1). Desa Gili Indah pada mulanya adalah bagian wilayah Desa Pemenang Barat, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat. Desa Gili Indah dijadikan sebagai desa pemekaran pada tanggal 10 April 1995. Desa Gili Indah kemudian dikukuhkan menjadi Desa Definitif pada tanggal 15 Oktober 1996 dengan SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 146 Tahun 1996.

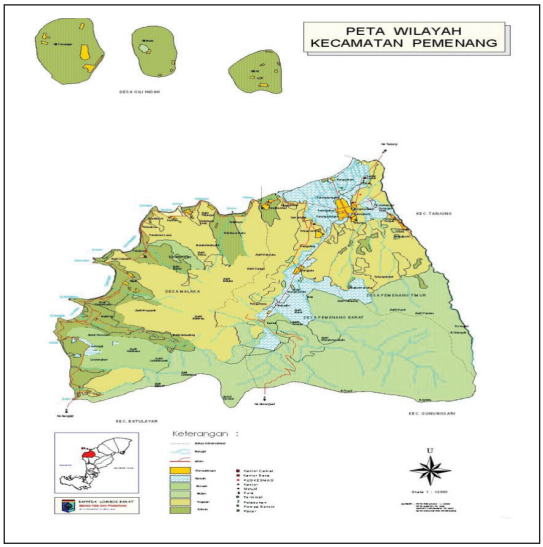

Sumber: BPS (2022)

Gambar 3.1 Peta Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara, NTB

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Jumlah penduduk Desa Gili Indah tercatat 1.463 KK atau 4.865 jiwa, dengan mayoritas berada di Dusun Gili Air, sedangkan di Dusun Gili Trawangan tercatat ada 595 KK. Secara jumlah, penduduk di Desa Gili Indah tergolong sedikit jika dibandingkan dengan penduduk di Kecamatan Pemenang yang pada tahun 2021 berjumlah 40.571 jiwa (BPS Kabupaten Lombok Utara, 2022a), apalagi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Utara, yaitu 247.000 jiwa. Kepala Dusun Gili Trawangan menerangkan, saat ini bahkan hanya sekitar 400 KK yang masih bertempat tinggal di Gili Trawangan, selebihnya sudah menetap dan memiliki tempat tinggal di daratan (Pulau Lombok), terutama Kota Mataram.

Tabel 3.1 Jumlah Penginapan dan Kedai Makanan di Kecamatan Pemenang

No.	Desa	Warung/ Kedai Makanan	Hotel	Hostel/Motel/ Losmen/Wisma
1	Malaka	127	6	2
2	Pemenang Barat	20	0	1
3	Pemenang Timur	36	0	3
4	Gili Indah	120	9	99
5	Menggala	8	0	0
Kec. Pemenang		311	15	105

Sumber: BPS (2021)

Tabel 3.1 menggambarkan sumber ekonomi masyarakat yang terkait dengan aktivitas pariwisata. Kegiatan ekonomi utama Desa Gili Indah adalah sektor jasa dan niaga terutama dalam bidang pariwisata. Hal ini dapat terlihat dari jumlah minimarket, toko, rumah makan, warung, hotel, dan losmen yang sangat banyak. Lokasi usaha penyedia jasa pariwisata Kabupaten Lombok Utara bahkan sebesar 81,35% berada di Desa Gili Indah (BPS Kabupaten Lombok Utara, 2022b). Sektor ekonomi lainnya adalah perkebunan, terutama perkebunan kelapa, sedangkan sektor dan komoditas lainnya tergolong sangat minim. Namun, dengan jumlah penduduk yang sedikit, wilayah Desa Gili Indah merupakan penyumbang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

terbesar di Kecamatan Pemenang, bahkan salah satu yang terbesar di NTB, dengan realisasi PBB mencapai lebih dari Rp1,5 miliar pada tahun 2021.

Gili Trawangan, Pulau Impian Pendatang

Di antara ketiga Gili, Gili Trawangan memang yang dapat dikatakan paling maju secara ekonomi dan menjadi pusat wisata Desa Gili Indah (Dodds dkk., 2010; Partelow, 2021). Pulau ini memperlihatkan jajaran hotel yang sangat atraktif, ditambah restoran dan kafe selayaknya di Pulau Bali. Wisatawan asing berlalu-lalang, mulai dari orang Eropa, Asia Timur, India, Amerika, Australia, dan sedikit wisatawan lokal bercampur di sini, di pulau yang luasnya sekitar 340 ha. Gili Trawangan adalah pulau terluar di Desa Gili Indah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata, tetapi pusat pemerintahan Desa Gili Indah ada di Pulau Gili Air yang merupakan wilayah terdekat dari pulau utama (Pulau Lombok).

Wilayah Gili Trawangan dapat ditempuh dengan menggunakan kapal penumpang dari Pelabuhan Bangsal, Kecamatan Tanjung, dengan waktu tempuh kurang lebih 40 menit. Banyak warga di kapal yang membawa sayuran dan barang-barang kebutuhan sehari-hari, kebanyakan untuk dijual kembali di desa karena makin minimnya lahan yang digunakan untuk bercocok tanam. Kemudian, ada alat transportasi lain antar pulau dari Gili Air yang dikenal dengan nama Island Hopping. Kapal ini hanya memiliki dua kali jadwal keberangkatan tiap harinya, yaitu pagi hari pukul 09.30 dan sore hari pukul 15.00.

Petugas pendata melakukan perjalanan dengan memanfaatkan transportasi antarpulau, baik di Pulau Gili Air maupun Gili Trawangan (Gambar 3.2). Suasana di dalam perahu memperlihatkan bahwa transportasi penyeberangan antarpulau terkait dengan aktivitas keseharian warga (Gambar 3.3). Selain digunakan warga untuk menyeberang antarpulau, *Island Hopping* juga yang biasa digunakan wisatawan untuk berpindah pulau, dari Gili Air-Gili Meno-Gili Trawangan atau sebaliknya. Dengan *Island Hopping*, masyarakat atau

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Rudy (2022)

Gambar 3.2 Pulau Gili Air dan Gili Trawangan

Foto: Rudy (2022)

Gambar 3.3 Perahu Penyeberangan ke Desa Gili Indah

wisatawan dapat berpindah dengan waktu tempuh sekitar 20 menit antarpulau. Jarak antar pulau sebenarnya cukup dekat, tetapi kapal harus mengambil jalan agak memutar karena menghindari gelombang atau ombak yang besar di sekitar pulau. Ombak ini lah yang menjadi salah satu daya tarik Gili Indah dan banyak menjadi objek untuk kegiatan berselancar bagi wisatawan mancanegara.

Menurut kepala Dusun Gili Trawangan, jumlah wisatawan yang datang setiap hari ke Gili Trawangan saat ini (tahun 2022) mencapai kurang lebih 600–800 orang tiap harinya. Namun, jumlah itu masih jauh dari angka tertinggi kunjungan wisatawan Gili Trawangan yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

secara rata-rata pernah mencapai 3.000 orang per hari hingga tahun 2017, sebelum terjadi gempa Lombok tahun 2018 dan pandemi COVID-19 tahun 2020–2021. Dua kejadian tak terduga ini sempat memukul telak para pelaku usaha dan pekerja pariwisata Gili Trawangan (Partelow, 2021). Banyak dari usaha mereka yang harus gulung tikar, masyarakat setempat pun harus kembali meladang dan melaut untuk memenuhi kebutuhan makan tiap hari, sedangkan pendatang memutuskan untuk kembali ke daerah asal. Sekarang, Gili Trawangan sedang berusaha bangkit kembali.

Majunya pariwisata di wilayah Gili Indah, khususnya Gili Trawangan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dengan terbukanya lapangan pekerjaan di bidang pariwisata dengan menjadi staff di hotel, restoran/kafe, *tour guide*, jasa *diving* dan s*norkeling*, penyewaan sepeda, penyewaan kapal dan lainnya. Mayoritas masyarakat bekerja di jasa wisata, tetapi masih ada juga yang berkebun dan menjadi nelayan.

Menurut penuturan Wak Haji Rudik, sesepuh desa sekaligus salah satu penghuni pertama, penduduk pertama di Gili Trawangan sebenarnya adalah petani dan nelayan. Mereka datang ke Gili Trawangan mulai tahun 1970-an tepatnya tahun 1973, di mana pelaut keturunan Bugis dan Mandar menyeberang menuju Gili Indah. Saat itu, ada Perang Praya di Pulau Lombok yang menyebabkan beberapa penduduk di Pulau Lombok harus mengungsi ke Pulau Gili dan bertahan hidup dengan menggarap tanah. Oleh karena itu, mayoritas penduduk di Desa Gili Indah umumnya adalah suku bangsa Sasak dan keturunan suku bangsa Bugis serta Mandar. Kondisi tanah di tiga Gili sebelum berkembangnya sektor pariwisata tergolong subur dan cocok untuk bercocok tanam segala jenis tumbuhan, mulai dari sayur, kelapa, hingga padi tumbuh subur di sini.

Pariwisata di Gili Trawangan mulai berkembang sekitar tahun 1980-an, di mana *homestay* mulai tumbuh satu per satu untuk menjadi akomodasi orang yang sedang berkunjung. Kepala desa menceritakan ketika masa kecil ia mengingat cerita bahwa awalnya orang datang ke Gili Trawangan bukan untuk tujuan berwisata tetapi melakukan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

penelitian, terutama mengenai penyakit demam berdarah yang banyak terjadi di pulau ini pada tahun 1980-an. Selain itu, ada juga penelitian mengenai keanekaragam biota laut yang ada di Gili Trawangan dan dari sana lah orang mulai menyadari adanya potensi alam yang sangat besar (Hampton & Hampton, 1998). Cerita mengenai Gili Trawangan kemudian mulai berkembang dari mulut ke mulut, terutama di luar negeri.

Pariwisata Gili Trawangan mulai meningkat secara drastis sejak tahun 2008. Sekitar 70% wisatawan adalah wisatawan asing, terutama dari Inggris dan Australia (Dodds dkk., 2010). Gili Trawangan saat itu juga diuntungkan dengan peraturan yang memperbolehkan wisatawan dari Bali dapat langsung menuju Gili Trawangan tanpa harus menuju Lombok terlebih dulu. Selain dikenal sebagai pulau pusat hiburan malam, Gili Trawangan terkenal karena wisata baharinya, terutama keindahan pemandangan bawah lautnya, yaitu karang biru (*blue coral*) (Hampton & Hampton, 2009). Karang biru yang hanya ada dua di dunia menjadi daya tarik utama. Mayoritas wisatawan datang untuk *diving* atau *snorkeling* untuk dapat melihat keindahannya secara langsung.

Selain itu, daya tarik yang coba dipertahankan di Gili Trawangan adalah aturan mengenai pelarangan penggunaan kendaraan bermotor, kecuali dalam kondisi darurat yang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara. Gili Trawangan memiliki aturan khusus untuk menjaga keamanan pulau yaitu hukum adat lokal yang disebut *awik-awik*. Aturan ini berfungsi untuk memberikan hukuman secara langsung kepada masyarakat atau turis yang melanggar sehingga tercipta rasa aman bagi para pendatang dan penduduk setempat.

Tantangan Pendataan di Pulau Impian

Desa Gili Indah sebagai wilayah destinasi wisata mancanegara, khususnya di wilayah Gili Trawangan menghadapi fenomena sosial berupa mobilitas penduduknya yang sangat tinggi. Mobilitas penduduk yang tinggi ini menyebabkan sulitnya mendapatkan angka pasti jumlah penduduk yang menetap. Banyaknya pendatang yang bekerja datang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan pergi ke Gili Trawangan menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam pendataan.

Pendatang tersebut biasanya bekerja sebagai staf di hotel atau restoran/kafe dan menyewa tempat tinggal sementara berupa indekos atau kontrakan selama bekerja, tetapi ada juga yang memilih untuk pergi-pulang menggunakan kapal dari perusahaan. Mereka datang dari berbagai tempat menuju pulau kecil bernama Gili Trawangan, tidak hanya dari Pulau Lombok, tetapi juga dari seluruh wilayah di Indonesia. Sekitar 60% pekerja merupakan pendatang dari wilayah di luar Gili Trawangan. Selain itu, rata-rata status pekerja hotel/restoran/kafe di Gili Trawangan adalah karyawan magang atau kontrak/tidak tetap sehingga menyebabkan makin tingginya pendatang yang silih berganti.

Di sisi lain, pekerjaan di luar bidang pariwisata akhirnya menjadi kurang diminati karena nilai ekonomisnya dinilai kurang menjanjikan dibanding pendapatan dan karir yang mereka jalani di bidang pariwisata. Pariwisata di Gili Trawangan seolah menjadi lahan kepemilikan bersama (Hardin, 1968) yang dapat digarap oleh semua orang, dengan apapun wujud dan caranya. Hal itu yang terjadi saat perekrutan Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML) untuk kegiatan Regsosek di Gili Trawangan sehingga BPS harus merekrut tenaga PPL dan PML yang tidak berasal dari masyarakat setempat.

Ada tiga orang yang ditugaskan sebagai PPL untuk kegiatan Regsosek 2022 di Gili Trawangan, yaitu Bang Anto, Bang Redi, dan Bang Wawan, serta satu orang sebagai PML, yaitu Bang Abdul. Ketiga pejuang data ini bukan warga setempat, tetapi didatangkan dari daratan (Pulau Lombok), khususnya Kecamatan Pemenang. Cerita mengenai ketiga PPL akan disajikan pada bagian berikutnya. "Di sini kami lebih sulit ke rumah warga, karena tidak begitu dikenali warga, walaupun sudah menggunakan tanda pengenal Regsosek", ungkap salah satu petugas pendata. Hal ini tentu memberikan banyak tantangan dalam proses pencacahan ke masyarakat, berbeda dengan petugas yang berasal dari SLS setempat, yang akan lebih memudahkan dalam koordinasi dan penerimaan warga.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Salah satu tantangan lain dari petugas pendataan di Gili Trawangan adalah akses menuju pulau yang harus ditempuh menggunakan kapal penumpang, dengan ongkos sebesar Rp20.000,00 untuk sekali jalan atau Rp40.000,00 pergi-pulang (PP). Petugas PPL mengungkapkan bahwa mereka sering kali harus mengakali ongkos transportasi ini dengan menumpang kapal karyawan perusahaan yang menyeberang tiap harinya pada pukul 07.30, dengan bekal kenalan awak kapal. Para PPL Gili Trawangan memutuskan untuk menyewa indekos dengan ukuran sekitar 3 × 3 meter sebagai tempat bermukim mereka bertiga ketika harus melakukan pencacahan. Pilihan ini diambil untuk menghindari kegiatan *commuting* pergi-pulang setiap hari yang menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya. Dengan kontrakan yang hanya cukup untuk merebahkan badan, para PPL beristirahat dan berlindung dari panasnya wilayah pantai di siang hari yang dapat mencapai 36°C dan dinginnya angin laut di malam hari. Namun, sering kali mereka juga harus keluar pada malam hari untuk menemui responden yang hanya dapat ditemui di waktu malam karena sibuk bekerja di pantai dari pagi hingga sore hari.

Selain itu, peraturan lokal di Gili Trawangan tidak memperbolehkan adanya kendaraan bermotor kecuali di saat *urgent* sehingga alat transportasi utama adalah sepeda dan cidomo (kereta kuda). Namun, tingginya harga sewa sepeda, yaitu sekitar Rp50.000,00/hari,

Foto: Rudy (2022)

Gambar 3.4 Berjalan Kaki Mengitari Pulau

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menyebabkan para PPL tidak memiliki pilihan lain selain mengitari pulau yang panas terik ini setiap hari dengan berjalan kaki, dari satu RT ke RT lainnya (Gambar 3.4), di mana ada tujuh RT di Gili Trawangan dengan konsentrasi penduduk di RT 04, 05, dan 07. Sering juga PPL harus kembali dengan tangan hampa karena tidak dapat menemui responden yang masih sibuk bekerja. Akhirnya, para PPL menyesuaikan kondisi masyarakat dengan melakukan pencacahan di malam hari, sejak setelah maghrib hingga maksimal pukul 22.00 Wita.

C. Menelisik Pemahaman Proses Bisnis Awal Registrasi

Pendataan awal Regsosek yang dilakukan secara serempak di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap data yang terintegrasi di Indonesia, khususnya yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program nasional tentunya tidak mudah untuk dijalankan. Publik sudah sering mendengar kegagalan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dalam memberikan data akurat dan tepercaya sebagai landasan pembuatan kebijakan (*evidence based policy*) dan penyaluran program bantuan sosial.

BPS merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab atas penyediaan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Dalam menjalankan tanggung jawab ini, BPS selalu berupaya meningkatkan kemampuan dan menciptakan keunggulan kompetitif dalam menyelenggarakan survei dan sensus penduduk di Indonesia. BPS didukung dengan sistem yang sudah *established,* infrastruktur yang memadai, anggaran yang tepat, dan sumber daya manusia yang sudah terstruktur hingga satuan lingkungan setempat/SLS terkecil (RT/dusun).

Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kantor BPS Provinsi NTB saat ini juga sedang melakukan pelaksanaan pendataan awal Regsosek, serentak dengan provinsi lainnya, mulai dari tanggal 15

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Oktober hingga 14 November 2022. BPS Provinsi NTB dan BPS Kabupaten Lombok Utara sangat memahami urgensi dan posisi BPS sebagai *leading sector* pelaksanaan Regsosek. BPS Provinsi NTB dan BPS Kabupaten Lombok sangat mendukung tujuan utama Regsosek untuk melakukan integrasi data sosial ekonomi penduduk. Selama ini, memang dirasakan ada tumpang tindih data yang sifatnya sektoral, misalnya dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI. Data yang dihasilkan Regsosek ini diharapkan akan menjadi satu-satunya acuan untuk memberikan berbagai macam bantuan sosial atau acuan pembuatan kebijakan bagi kepentingan masyarakat.

Kabupaten Lombok Utara sebagai wilayah paling muda di Provinsi NTB tentu membutuhkan berbagai macam data statistik yang digunakan untuk pengambilan kebijakan oleh pemangku kebijakan di daerah. Kabupaten Lombok Utara saat ini tercatat sebagai daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi di Provinsi NTB, dengan persentase kemiskinan yang masih cukup jauh di atas rata-rata Provinsi NTB serta rata-rata nasional. Persentase kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara memang masih tinggi, tetapi sebenarnya sudah makin membaik karena cenderung turun dari tahun-tahun sebelumnya. Persentase kemiskinan Kabupaten Lombok Utara saat baru berusia dua tahun (2010) mencapai 43,14%.

Menurut Kepala BPS Kabupaten Lombok Utara, ada banyak faktor yang menyebabkan masih tingginya persentase kemiskinan di sana, salah satunya faktor budaya masyarakat di NTB, khususnya Lombok Utara, yang memiliki pola konsumsi makan yang kurang memenuhi standar, misalnya dalam pemenuhan batas asupan kalori harian. Hal ini terkait faktor kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan asupan gizi dalam makanannya. Pengeluaran untuk konsumsi pun tergolong rendah dibandingkan daerah lain, belum lagi masih rendahnya pengetahuan tentang pentingnya makanan sehat dan berkualitas bagi perkembangan anak, yang dapat menjadi pemicu *stunting*. Hal ini perlu menjadi perhatian dan ditangani oleh pemerintah daerah.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BPS Kabupaten Lombok Utara sangat mendukung dan siap melaksanakan segala program pendataan di masyarakat, termasuk Regsosek. Regsosek akan sangat membantu pengambilan keputusan dan kebijakan, serta memberikan gambaran mengenai kondisi masyarakat di Kabupaten Lombok Utara yang membutuhkan bantuan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Perangkat BPS Kabupaten Lombok Utara pun bersiap dengan mengikuti kegiatan pelatihan petugas Regsosek. Kegiatan ini diselenggarakan dalam tiga gelombang, mulai dari 2–8 Oktober 2022 di Kota Mataram.

Kabupaten Lombok Utara dikenal sebagai wilayah tujuan pariwisata di Provinsi NTB, dalam skala nasional hingga internasional. Tentunya menjadi sebuah paradoks apabila pada kenyataannya segala kekayaan dan keindahan alam tersebut belum dapat dinikmati dampaknya secara merata untuk masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Tingginya persentase penduduk yang tergolong miskin dan segala masalah sosial lainnya perlu dipecahkan dalam jangka waktu yang tidak lama. Data statistik yang akurat dan berkesinambungan yang diproduksi oleh BPS menjadi prasyarat utama menuju masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang lebih sejahtera.

Dalam proses pendataan awal, Kabupaten Lombok Utara mengalami beberapa hambatan dan kesulitan di lapangan. Setiap kecamatan memiliki tingkat kesulitannya masing-masing, mulai dari Pemenang, Tanjung dan Gangga di pesisir hingga Bayan dan Kayangan di wilayah pegunungan. Namun, BPS Kabupaten Lombok Utara melalui Seksi Statistik Sosial tetap berusaha menjalankan kegiatan pendataan awal Regsosek 2022 dengan usaha yang maksimal agar menghasilkan data yang berguna bagi pemerintah, baik di pusat maupun daerah.

Regsosek merupakan program terbaru pemerintah dalam hal pendataan penduduk. Karena itu, dapat dimaklumi jika masyarakat, khususnya di Kabupaten Lombok Utara, belum menerima informasi secara keseluruhan mengenai manfaat dan tujuan dari proses pendataan ini. BPS selaku pelaksana program pun membutuhkan upaya dan waktu yang tidak sedikit untuk memberikan pemahaman yang sama dari mulai pimpinan hingga pelaksana pendataan di lapangan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mengenai visi dan misi Regsosek 2022. Hal ini diperlukan agar tidak ada perbedaan persepsi antar pelaksana yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Proses konsolidasi ini terus diupayakan melalui berbagai macam pertemuan dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota.

Salah satu titik awal untuk kelancaran pendataan Regsosek ialah memastikan bagaimana masyarakat mendapat informasi. BPS Kabupaten Lombok Utara sudah melakukan koordinasi secara terstruktur hingga Satuan Lingkungan Setempat (SLS) yang terkecil, yaitu RT/Dusun, melalui para Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka) dan juga Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). Secara umum, sosialisasi Regsosek sudah dilakukan ke masyarakat di Kabupaten Lombok Utara melalui berbagai macam saluran, terutama adalah melalui masjid/musala di desa atau dusun. Cara ini dianggap yang paling efektif, tidak hanya di Kabupaten Lombok Utara, tetapi juga secara umum di Provinsi NTB, mengingat mayoritas masyarakat beragama Islam dan masjid/musala menjadi pusat informasi serta aktivitas bagi warga masyarakat.

Pelaksanaan Regsosek kali ini dirasa berbeda dengan survei BPS yang menggunakan sistem sampel. Pada Regsosek sasaran pendataan adalah 100% penduduk sama seperti sensus. Petugas pendata atau PPL memang diutamakan harus warga setempat, agar lebih mudah dikenali warga dan mengenali medan lapangan. Rekrutmen petugas pun dilakukan dengan mendapatkan rekomendasi dari kepala desa/dusun setempat.

Selain itu, penggunaan sistem informasi berbasis digital sudah digunakan sepenuhnya pada pendataan awal Regsosek ini. Petugas pendata selalu menggunakan gawainya berupa ponsel pintar saat berada di rumah warga. Hal ini ternyata dilakukan untuk menginput beberapa data ke aplikasi yang sudah disiapkan oleh BPS. Data tersebut berupa lokasi, foto dan keterangan lainnya yang akan berguna untuk proses pengolahan data nantinya. Literasi yang tinggi dalam penggunaan teknologi 4.0 memang dibutuhkan dan menjadi syarat petugas di lapangan. Awalnya, petugas mengalami beberapa kendala terutama secara teknis, tetapi sedikit demi sedikit dapat teratasi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

D. Antara Nilai Positif dan Tantangan dalam Mendata

Kondisi alam dan masyarakat di Kecamatan Pemenang cukup beragam dan memberikan tantangannya masing-masing. Di wilayah Desa Malaka terjadi bencana tanah longsor saat pendataan awal Regsosek dilaksanakan sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan proses pencacahan warga. Kemudian, Dusun Teluk Kombal, di Desa Pemenang Barat, merupakan wilayah rawan bencana banjir karena permukaan air laut yang naik. Wilayah ini adalah wilayah yang tergolong kumuh dan padat, walaupun berada di perlintasan daerah wisata Jalan Raya Senggigi dan juga dekat dengan jalur penyeberangan ke Gili Trawangan.

Penduduk di Gili Indah dikenal memiliki mobilitas yang tergolong tinggi. Orang datang dan pergi untuk bekerja dan mencari penghidupan. Masyarakat di desa ini lebih mirip dengan karakter masyarakat perkotaan dibandingkan perdesaan karena sejak pagi sudah pergi bekerja hingga sore atau bahkan malam hari, mungkin hanya dapat ditemui saat istirahat atau pulang kerja. PPL terkadang perlu datang berkali-kali ke rumah warga, tetapi tidak jarang warga tidak ada di rumah (Gambar 3.5). PPL mengalami kesulitan saat berusaha menemui warga pada saat siang hari. Selama menyusuri

Foto: Rudy (2022)

Gambar 3.5 PPL tidak dapat menemui warga yang sudah didatangi berkali-kali.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

gang-gang yang beralaskan tanah berpasir dan debu, beberapa kali PPL harus kecewa karena tidak ada orang yang dapat ditemui di rumah. Kalaupun ada warga yang dapat ditemui, tidak semua bersedia untuk didata.

Pada saat pagi/siang hari memang lebih sulit menemui warga Gili Trawangan karena kebanyakan warga sedang berada di pantai untuk menunggu tamu atau sekadar bersosialisasi dan berbagi informasi. Pencacahan tidak dapat dilakukan ketika warga tidak sedang berada di rumah karena proses administratif dan teknis *tagging* yang harus dilakukan di lokasi. PPL sering kali harus melakukan pencacahan di malam hari ketika warga sudah kembali dari pekerjaan mereka di pantai.

Kendala lain yang dihadapi pendata adalah banyaknya warga yang sudah pindah, terutama ke Kota Mataram atau sekitar Lombok. Kepala Dusun menerangkan bahwa sekitar 30% masyarakat sudah pindah domisili tetapi masih beralamat Gili Trawangan. Hal ini dikarenakan banyak warga yang sudah mapan secara ekonomi dan akhirnya membeli rumah lain dan menetap di Kota Mataram. Warga hanya sesekali saja pulang ke Gili Trawangan. Pola mobilitas penduduk seperti itu sudah banyak terjadi, terutama sekitar 10 tahun terakhir, yang merupakan dampak dari meningkatnya sektor pariwisata di Gili Trawangan.

Atas kondisi tersebut, target pencacahan yang dipatok sekitar 15 orang per hari dirasa sangat sulit untuk dipenuhi. Faktanya, hanya sekitar 4–5 orang per hari yang sanggup didapatkan. Jika sedang beruntung dan ditambah melakukan pencacahan di malam hari, mereka dapat memperoleh sedikit lebih banyak data dari biasanya. Pengalaman dalam melakukan pendataan sangat dibutuhkan untuk melakukan pencacahan Regsosek karena diperlukan keterampilan pendekatan kepada warga. Para PPL mengaku sudah mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan inilah yang menjadi bekal PPL dalam menjalankan tugas, baik dari sisi teknis, seperti cara mengisi kuesioner, menggunakan aplikasi, hingga melakukan wawancara ke

Buku ini tidak diperjualbelikan.

warga, maupun materi yang sifatnya substantif mengenai tujuan dan fungsi pendataan.

Ketika di lapangan, PPL merasakan bahwa data kependudukan yang ada masih dirasa kurang lengkap dan kurang akurat, seperti data warga yang dipakai sebagai *pre-list* adalah data kependudukan tahun 2015 sehingga kondisi masyarakat sudah banyak berubah, baik yang sudah pindah domisili, meninggal, maupun melahirkan. Jadi, Regsosek ini adalah sebuah upaya yang memang harus dilakukan pemerintah untuk mendapatkan data yang lebih nyata, dan PPL sangat siap untuk melaksanakan tugas negara tersebut untuk kepentingan bersama.

Dusun Gili Trawangan memiliki karakteristik masyarakat yang agak berbeda dengan dusun lainnya di Kecamatan Pemenang karena tingkat kesibukan masyarakatnya yang bekerja terutama di sektor pariwisata. Istilah *time is money* sangat berlaku di dusun ini. Masyarakat terfokus untuk "memburu dolar" sehingga dukungan warga untuk kegiatan kemasyarakatan memang dirasa cukup minim. Masyarakat sulit untuk digerakkan agar dapat berpartisipasi, apalagi menjadi bagian dari proses pendataan tersebut.

Pendataan Regsosek dirasa sangat diperlukan oleh desa, khususnya di Gili Trawangan. Dengan lokasi geografis yang tidak berada di pulau utama (Lombok), pendataan di Desa Gili Indah memang dapat dikatakan tidak sering dilakukan, hanya pada saat pemilu atau pilkada saja biasanya diadakan pendataan warga. Itu pun sifatnya hanya data domisili keluarga. Beberapa keluarga masih ada yang tergolong tidak mampu secara ekonomi. Menurut keterangan kepala dusun, ada sekitar 20 keluarga yang masuk kategori miskin. Mereka adalah penduduk awal Gili Trawangan yang sudah tinggal di pulau ini selama puluhan tahun, dan sudah memiliki kartu identitas dengan alamat setempat. Bantuan pun pernah diterima oleh keluarga ini. Oleh karena itu, pemerintah desa melalui kepala dusun memandang perlu untuk selalu mendata warganya, terutama yang membutuhkan penyaluran bantuan sosial dan program jaminan sosial lainnya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Rudy (2022)

Gambar 3.6 Pendataan Masyarakat Kurang Mampu

Selain adanya masyarakat yang tergolong kurang mampu (Gambar 3.6), ada beberapa masalah sosial lainnya di Gili Trawangan, seperti masalah kepemilikan lahan, di mana ada sengketa antara warga dan pemerintah daerah dan perusahaan besar berskala nasional. Dengan banyaknya masalah sosial, diperlukan adanya basis data yang kuat dan akurat sebagai landasan pengambilan keputusan atau kebijakan di desa.

Masyarakat sebagai subjek pendataan tentunya memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang utuh mengenai pendataan yang akan dilakukan. Adanya penipuan dan kejahatan lainnya yang mengatasnamakan survei atau pendataan kerap kali terdengar oleh masyarakat. Namun, ternyata data yang dikumpulkan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, yang mengakibatkan makin rendahnya kepercayaan masyarakat atas kegiatan pendataan. Inilah yang ditemui saat melakukan pendataan di Gili Trawangan. Selain itu, ada persepsi yang kuat dari masyarakat bahwa pendataan sama dengan pemberian bantuan sosial. Banyak dari masyarakat yang mengharapkan bantuan ketika didata. Beberapa masyarakat bahkan menolak untuk didata dengan alasan tidak pernah mendapat bantuan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Hal-hal inilah yang kerap dijumpai ketika melakukan pendataan Regsosek, tidak hanya di Gili Trawangan tetapi pastinya di banyak tempat lain di Indonesia. Literasi masyarakat yang masih belum cukup tinggi untuk memaknai proses pendataan dan tujuannya tentu perlu untuk ditingkatkan. Nenek Kemasin adalah salah satu contoh masyarakat yang sangat awam dengan proses pendataan penduduk. Ibu yang berprofesi sebagai pemulung botol plastik dan beling ini mengaku baru pertama kali didata seperti Regsosek. Nenek Kemasin mengaku sebenarnya tidak tahu untuk apa didata, tetapi tetap bersedia memberikan jawaban sesuai pertanyaan petugas. "Saya lupa apa aja (yang ditanya), baru kali ini rasanya didata seperti ini", ungkap Nenek Kemasin.

Minimnya peran serta masyarakat di Gili Trawangan memang menjadi permasalahan tersendiri. Sikap acuh tak acuh terhadap proses pendataan tidak dapat dipungkiri dan menjadi tugas rumah pemerintah desa. Masalah minimnya peran masyarakat ini tidak hanya terjadi pada saat pendataan, tetapi juga dalam kegiatan kemasyarakatan lainnya, seperti pertemuan warga yang biasanya hanya dihadiri beberapa warga saja. Menurut keterangan salah satu tokoh masyarakat setempat, sikap yang cenderung tertutup dari masyarakat ini memang sudah terjadi sejak dulu, bahkan sebelum pariwisata di Gili Trawangan berkembang. Selain itu, jauhnya kantor pemerintah desa dari Gili Trawangan juga menjadi faktor kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa. Aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan pelayanan dari desa perlu diperhatikan agar pemerintah desa dirasakan kehadirannya dalam kehidupan masyarakat Gili Trawangan.

E. Dukungan Kelembagaan Lokal dalam Pendataan

"Di Gili Trawangan ini, saya kumpulkan warga untuk pertemuan, datang 10–20 orang saja sudah syukur alhamdulillah," ucap kepala dusun menceritakan betapa sukarnya mengumpulkan warganya. Kepala dusun mengungkapkan bahwa kesibukan warga dalam mencari uang dalam sektor pariwisata di pulau ini membuatnya kesulitan jika

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mengadakan pertemuan yang harus dihadiri banyak orang. Kegiatan Regsosek 2022 ini misalnya, meskipun sudah disampaikan kepada para ketua RT dan juga melalui *WhatsApp Group* Warga Dusun Gili Trawangan, tetapi menurut beliau masih banyak warga yang belum menerima informasi apalagi paham mengenai kegiatan pencacahan ini.

Meskipun begitu, tentu tetua wilayah berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung kegiatan pendataan dengan memosisikan diri sebagai "jembatan" antara petugas pendata dan masyarakat. Sosiolog Jan Breman (1980) mengungkapkan bahwa sejak era kolonial, elite desa selalu memainkan perannya sebagai jembatan di desanya dan antardesanya dengan daerah di luar desanya. Dalam posisi ini, kepala dusun dan ketua RT memberi dukungan, seperti mengumumkan ke warga, mengonfirmasi daftar warga, hingga mengantarkan PPL ke rumah-rumah warga. Kepala dusun dan ketua RT pun menyatakan siap menjadi mediator apabila ada warga yang salah paham atau tidak berkenan dikunjungi oleh petugas pendata.

Sementara itu, para PPL mengaku mengapresiasi sepenuhnya dukungan dari para perangkat desa. Namun, mereka sadar bahwa perangkat desa juga mempunyai pekerjaan dan kesibukan masing-masing sehingga mereka tidak dapat bergantung 100%. Dalam beberapa kesempatan, mereka kesulitan meminta banyak waktu dengan ketua RT sehingga akhirnya hanya meminta konfirmasi data warga saja. PPL kemudian berkeliling sendiri untuk melakukan pencacahan. PPL mengaku bahwa akan meminta bantuan ketua RT jika ada warga yang betul-betul sulit ditemui atau menolak diwawancarai saja. Dukungan ketua RT dirasa sudah cukup membantu pekerjaan pendataan di Gili Trawangan.

> Kemarin malam kami tunggu Pak RT belum pulang juga ke rumah karena pergi mancing. Sampai jam 11 malam itu baru dia pulang. Akhirnya kami diskusi dan ngobrol sambil makan ikan bakar, itulah keramahan orang sini. Sebenarnya [mereka] baik asalkan kita berlaku baik dan sopan dengan mereka," ujar Bang Wawan (Wawancara Bang Wawan, 5 November 2022).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Perjuangan para PPL yang tak kenal lelah tentu membuat orang setempat menjadi bersimpati dan memberikan dukungan terbaik dalam menjalankan tugas pendataan. "Yang paling pertama, paling penting, itu tanda tangan dan cap kepala desa di surat tugas kami, itu yang membuat masyarakat yakin bahwa kami ini benar mendata dan bukan penipu," ucap salah seorang PPL sambil memperlihatkan surat tugasnya. Menurutnya, surat dari BPS Kabupaten saja tidak cukup karena warga lebih percaya pada entitas pemerintah yang dekat dengan diri mereka, yakni pemerintah desa. PPL bercerita bahwa warga sering kali didatangi oleh orang yang mengaku melakukan pendataan, tetapi tidak mengantongi surat izin dari desa sehingga warga cukup kritis dan bersikap curiga dalam menerima orang asing yang mengaku sebagai pendata.

Selain meminta bantuan kepada perangkat desa, para PPL juga memanfaatkan jejaring kerabat dan pertemanan mereka di Gili Trawangan untuk memperlancar proses pencacahan. PPL meminta bantuan saudara dan teman mereka untuk diperkenalkan kepada tetangga yang tidak mereka kenal sehingga memperlancar proses perkenalan diri dan program Regsosek ini. Cara ini sangat membantu PPL dalam menghemat waktu dan tenaga sehingga tidak perlu banyak meyakinkan responden untuk bersedia didata. PPL mengakui bahwa meskipun sikap individualisme banyak ditemui di pulau ini, tetapi tak sedikit orang yang ramah dan mau membantu mereka melancarkan pekerjaan. "Kuncinya adalah kita memperbanyak teman dan kenalan karena suatu saat nanti kita akan dibantu, dan kita pun akan membantu mereka. Dan, ini bukan cuma soal uang saja," ujar seorang PPL menutup ceritanya tentang pengalaman masa kerjanya bertahun silam di pulau ini.

F. Kisah Hidup Petugas Pendata

"Kalau di Gili Trawangan, PML dan PPL bukan orang Gili, tetapi dari pinggir (pesisir Lombok Utara) karena ibarat kata mereka di sana kerja dapat dolar, kalau ikut Regsosek dapatnya rupiah. Tidak ada yang mau", ungkap Koseka Kecamatan Pemenang. Gili Trawangan,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pulau kecil yang boleh dikatakan sebagai ujung tombak pariwisata Lombok. Gili Trawangan merupakan salah satu area tersulit dalam melakukan pendataan. Tantangan ini bukan karena alasan klasik seperti akses geografis atau kualitas sumber daya manusia, melainkan hadir dari realitas sosial ribuan manusia yang memilih bergumul pada dunia wisata yang dianggap mendatangkan uang besar ketimbang bekerja sebagai pencari data. Warga sebagai responden saja sangat sukar ditemui, bahkan menolak diwawancara, terlebih jika ingin melibatkan warga sebagai petugas pendata.

Beberapa petugas pendata di Gili Trawangan ialah Bang Abdul (PML), Bang Anto (PPL), Bang Redi (PPL) dan Bang Wawan (PPL). Para PPL melakukan aktivitas sebagai pendata lapangan dengan menyusuri rumah-rumah warga. Setelah tiba waktu istirahat, para PPL dan PML beristirahat di rumah indekos sederhana yang digunakan Bang Anto, Bang Redi, dan Bang Wawan sebagai pondokan. Rumah kost seluas 3 × 3 meter ini sangat sederhana, hanya terdapat dua kasur kecil dan sebuah kipas angin untuk melawan panasnya hawa kepulauan.

"Kami mulai di pendataan rata-rata sejak sensus *long form*, sebelumnya lebih banyak kerja proyek", terang PPL. Usia ketiga PPL

Foto: Rudy (2022)

Gambar 3.7 Bang Anto

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ini sudah menginjak kepala tiga. Bang Anto (37 tahun) (Gambar 3.7) yang paling senior bercerita bahwa ia tertarik bertugas di Regsosek ini karena rasa penasarannya akan pendataan. "Kita kan pernah juga jadi responden, rasanya ingin begitu terlibat pendataan", ungkap Bang Anto. Akan tetapi, hidupnya tentu tidak selalu mengenai perkara pendataan belaka. Bang Anto bercerita bahwa selepas pendidikan Madrasah Aliyah, ia langsung melanglang buana pergi dari kampungnya di Menggala ke berbagai tempat untuk mencari rezeki. Bang Anto pernah mengerjakan proyek bangunan di Bali, pengumpul besi tua di Jombang, hingga kerja kuli tambang batu mangan di Flores. "Saya kabur sebelum ijazah MA saya ambil," kelakarnya.

Rupanya hidup membujang dan merantau ini membuat orang tuanya cemas di kampung halaman. Pria Sasak ini memutuskan pulang kampung untuk kemudian menikah pada awal dekade 2010-an. Pekerjaan di Gili Trawangan pun pernah dilakoni selama dua tahun. Bang Anto berkongsi dengan dua orang temannya membuka loket yang menjual tiket wisata dengan modal Rp100 juta per tahun. Bisnis ini cukup menjanjikan, walau pada akhirnya terpaksa digusur akibat penertiban ruang terbuka. Setelah bertahun-tahun bekerja di jalanan, Bang Anto memutuskan untuk bekerja kantoran menjadi pegawai honorer pada tahun 2014 di Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara. Akan tetapi, bencana gempa Lombok pada tahun 2018 membuatnya terpaksa berhenti dari pekerjaannya untuk lebih fokus pada pemulihan kampungnya yang termasuk wilayah paling parah terdampak gempa.

Pengalaman pertama Bang Anto dalam pendataan adalah saat kegiatan Pemilu 2019. "Data itu masih semrawut, rancu begitu. Datanya kurang lah," keluhnya waktu itu. Rasa penasaran akan pendataan membuatnya ingin makin terlibat sehingga Bang Anto bergabung menjadi petugas lapangan dalam Sensus Penduduk Long Form yang merupakan kegiatan lanjutan Sensus Penduduk 2020. Sementara itu, dalam Regsosek 2022 ini, Bang Anto langsung meminta ditempatkan di Gili Trawangan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

> Selain karena waktu itu di Gili masih kosong petugasnya, saya juga ingin rasanya ikut berkontribusi membenahi pendataan di sana, yang memang sulit orang-orangnya. Saya merasa pendataan ini harusnya begini, seperti Regsosek ini. Karena apa… karena *door to door*, kita melihat langsung, kita foto, kita tandai titik lokasi (Wawancara Bang Anto, 4 November 2022).

Kisah berbeda selanjutnya dialami oleh Bang Redi (34 tahun) (Gambar 3.8). Setelah lulus Madrasah Aliyah, Bang Redi masih di kampungnya di Desa Menggala untuk membantu pekerjaan orang tua. Namun, melihat banyak kawan sekampungnya yang bekerja merantau keluar Bang Redi pun tertarik. Kerja menjadi buruh bangunan selama empat bulan di Bali nampaknya sudah cukup untuk membuatnya pulang. Setelah sempat bekerja sebagai buruh bangunan di Gili Air, Bang Redi mencoba mencari pekerjaan tetap dengan mengikuti pelatihan pariwisata di Balai Latihan Kerja selama satu tahun, termasuk magang di perhotelan selama empat bulan. Ia langsung bekerja di sebuah hotel besar di Gili Trawangan di bagian *housekeeping*. Kontrak pertamanya hanyalah status DW (*daily worker*) atau pekerja harian lepas. Setelah satu tahun, barulah Bang Redi mendapatkan kontrak sebagai karyawan. Baginya, pekerjaan di hotel dan lingkungan Gili Trawangan sempat membuat banyak orang termasuk dirinya menjadi apatis dan hanya mementingkan uang.

> Pernah ada tamu seorang artis terkenal dari ibu kota bilang ke saya, "Kok orang sini sombong-sombong ya, *nggak* ada yang ajak foto". Ya, orang di sini tidak butuh foto dengan artis, yang mereka butuhkan uangnya. Kamu ada uang, kami siap kasih jasa (Wawancara Bang Redi, 4 November 2022).

Kisah Bang Redi ini memperlihatkan bahwa di Gili Trawangan komodifikasi yang dieksploitasi tidak hanya pada wujud fisik, tetapi juga ruang sosial (Hall, 2012). Marx (1867) mengungkapkan bahwa akumulasi-akumulasi modal yang mendatangkan keuntungan terjadi di ruang-ruang fisik, seperti akumulasi lahan. Derek Hall (2012)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Rudy (2022)

Gambar 3.8 Bang Redi

melakukan tinjauan ulang terhadap konsep akumulasi primitif Marx dimana menurutnya pada konteks sekarang ruang-ruang interaksi sosial antar manusia pun dinilai dengan keuntungan langsung, dan ruang nonfisik ini menjadi lahan baru untuk diakumulasi. Interaksi dan relasi sosial bagi banyak orang di Gili Trawangan tidak dirasa menarik jika dianggap tidak mendatangkan keuntungan langsung.

Serupa dengan yang dialami Bang Anto, rupanya gempa Lombok 2018 menjadi titik balik dalam sejarah hidup Bang Redi. Pasca gempa, Bang Redi dirumahkan sembari menunggu pemulihan pariwisata Lombok. Akan tetapi, belum sempat kembali bekerja, bencana pandemi COVID-19 datang melanda. Bang Redi terpaksa kerja serabutan selama empat tahun terakhir. Redi sering kali mendapat tawaran pekerjaan pendataan dari ayahnya yang ketua RT dan saudara iparnya yang kepala dusun, Salah satu pekerjaan yang paling besar adalah Sensus Penduduk Long Form, yang kemudian membawanya ke Regsosek 2022 ini. Awalnya, Bang Redi ditawarkan menjadi petugas ke Gili Air, tetapi pada akhirnya dipindahkan ke Gili Trawangan karena kurangnya petugas di sana. Bang Redi mengaku bahwa orang BPS Kabupaten tidak tahu bahwa beliau pernah bekerja di Gili Trawangan dan akhirnya ditempatkan di sana.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

> Lebih susah warga yang ekstrem (tidak ramah dan menolak wawancara) daripada lingkungan alam yang ekstrem. Kalau lingkungan alam ekstrem cuma *capek* tenaga saja. Kalau warga ekstrem ini sudah *capek* tenaga, *capek* hati pula. Ada warga yang ekonomi menengah ke atas, tetapi menolak diwawancarai, [tetapi] mereka mau kalau terkait bantuan. Yang dipermasalahkan masalah sumbangan, itu alasan mereka tidak mau didata. Kata mereka: "didata atau tidak didata, saya tidak dapat apa-apa kan". Inilah perjuangan kita (Wawancara Bang Redi, 4 November 2022).

Jika Bang Anto dan Bang Redi berasal dari pinggir di Desa Menggala dan bersuku bangsa Sasak, berbeda lagi dengan Bang Wawan (32 tahun) yang masa kecilnya berkali-kali pindah domisili. Bang Wawan (Gambar 3.9) berasal dari Desa Medana di Kecamatan Tanjung, lahir dari ayah keturunan Bugis-Mandar dan ibu asli Sasak. Bang Wawan pertama-tama bersekolah SD di Tanjung, kemudian pindah ke Tembobor, dan pada kelas 3 pindah ke Gili Trawangan mengikuti orang tuanya yang membuka usaha di sana. Memori masa kecilnya lebih banyak ia ingat di Gili Trawangan sehingga masih banyak orang-orang yang ia kenal, tidak terkecuali kerabat dan keluarga jauh. Selepas SMP, Bang Wawan pindah kembali ke *pinggir* untuk menempuh pendidikan Madrasah Aliyah. Setelah me-

Foto: Rudy (2022)

Gambar 3.9 Bang Wawan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

namatkan pendidikan menengah atas, Bang Wawan memutuskan kembali ke Gili Trawangan untuk bekerja. Bang Wawan menjadi Bro atau pekerja lepas di jalanan yang menawarkan berbagai jasa wisata kepada turis, seperti menjadi pemandu wisata, pemandu selam, dan lain sebagainya. Bang Wawan menghabiskan waktu selama setahun di jalanan Gili Trawangan hingga pamannya mengajak untuk bekerja di suatu resort wisata. Bang Wawan kemudian bekerja di resor tersebut pada bagian dapur.

Satu lagi nasib anak manusia yang dihempas oleh gempa Lombok. Bang Wawan kehilangan pekerjaan dan akhirnya kembali ke rumahnya di Medana. Bang Wawan mengerjakan banyak hal, mulai dari kerja di bengkel mobil, las, hingga proyek bangunan. Perjumpaan pertamanya dengan pendataan dimulai dari Sensus Penduduk Long Form sebagai petugas di Desa Malaka, tepatnya di Setangi di bagian gunung yang terpencil. Saat awal perekrutan petugas Regsosek 2022, Bang Wawan sempat diajak salah satu kawannya. Namun, Bang Wawan menolak karena saat itu sedang terikat dengan proyek bangunan di Gili Meno. Selepas proyek, ternyata masih ada slot kosong.

> Awalnya saya minta ditaruh di gunung saja karena saya berkesan di sana. Inilah cara kami supaya warga itu kena pendataan. Biar jauh tetap kami datang. Uang kalau dihitung tidak besar, tetapi namanya pekerjaan tetap kami jalankan, apalagi kalau tujuannya membantu masyarakat yang membutuhkan (Wawancara Wawan, 4 November 2022).

Namun, Bang Wawan pada akhirnya ditempatkan di Gili Trawangan karena pernah berdomisili di sana. Selain itu, Bang Wawan juga menguasai bahasa Bugis-Mandar dan Sasak sehingga mampu melakukan pendekatan secara personal dengan warga Gili Trawangan. Kisah hidup dari tiga orang PPL tadi dapat memberikan gambaran bahwa kepedulian akan pendataan kependudukan bukan sekadar ada pada para pejabat pemerintah, para akademisi, maupun berbagai pemangku kebijakan terkait. Mereka yang mengaku sebagai "orang biasa" dari desa, yang bekerja secara serabutan dan tidak mengenyam

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pendidikan perguruan tinggi, ternyata memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap perkara pendataan kependudukan. "Uang tidak masalah, jauh dari rumah, yang penting niat ikhlas membantu yang membutuhkan dengan mendata secara benar", itulah yang menjadi landasan mereka dalam menjalankan tugas.

G. Kisah Hidup Keluarga Terdata

"Kalau perangkat desa seperti kepala dusun atau ketua RT itu paling gampang untuk dicacah, karena mereka sering ada di tempat, dicari pun tidak sulit", ungkap seorang PPL. Kehadiran perangkat pemerintahan lokal yang tidak sukar ditemui ini pun menjadi harapan bagi para PPL untuk meneruskan pendataan ke warga mereka. Kepala dusun dan ketua RT apabila diperlukan akan menjadi jembatan penghubung antara PPL dan warga yang akan didata.

Setibanya di lokasi pendataan, petugas langsung menuju rumah kepala dusun yang terletak di permukiman belakang Masjid Utara. Berbeda dengan rumah-rumah lain yang sebagian besar berwujud modern dengan bahan bangunan beton, rumah kepala dusun yang masih berbentuk rumah tradisional suku Sasak berupa rumah panggung yang terbuat dari kayu dan bambu. Hanya atap rumah saja yang telah berganti dari anyaman jerami menjadi seng.

Foto: Rudy (2022)

Gambar 3.10 Pak Husni

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kepala dusun ini bernama Bapak Husni (Gambar 3.10) yang ditemui petugas pendata di rumahnya. Perawakannya yang tegap dan raut muka masih nampak sangat muda. Bapak Husni berusia 32 tahun dan terpilih menjabat sebagai Kepala Dusun Gili Trawangan pada usia yang terhitung muda, yakni 29 tahun. Bapak Husni terhitung sebagai generasi kedua "penduduk asli" Gili Trawangan. Ayahnya yang berasal dari Tanjung pertama kali ke pulau kecil ini pada awal dekade 1970-an, bekerja di kebun dan memetik kelapa.

> Awalnya ayah saya berkebun, tetapi pulang-pergi ke pinggir. Pertama kali akhirnya menetap itu tahun 1979, waktu itu belum banyak rumah di sini dan semua warga kerja berkebun. Kakek saya juga akhirnya dibawa ayah saya untuk menetap di sini (Wawancara Pak Husni, 5 November 2022).

Beliau lahir di Gili Trawangan dan menghabiskan masa kecil di pulau ini hingga selesai menempuh pendidikan SD. Bapak Husni dikirimkan orang tuanya untuk menempuh pendidikan di pesantren di Lombok Barat karena belum adanya sekolah menengah saat itu. Selepas pesantren, Bapak Husni berkuliah di Kota Mataram dan menyelesaikan pendidikan sarjana sosial ekonomi pertanian.

Beberapa tahun setelah selesai kuliah pada 2013, Bapak Husni mendapat tawaran dari kakaknya untuk mengelola kafe di pantai Gili Trawangan. Awalnya, beliau ingin melanjutkan pendidikan S2, tetapi timbul keinginan dirinya untuk bekerja sehingga tidak lagi bergantung pada orang tua. Setelah beberapa tahun mengelola kafe tersebut, terjadi penggusuran oleh pemerintah daerah karena kawasan pantai tidak boleh tertutup oleh bangunan. Bapak Husni perlahan mencoba membangun usahanya sendiri dengan mendirikan agen wisata. Bapak Husni mengikuti seleksi pansel pemilihan kepala dusun pada tahun 2019 di Kecamatan Pemenang. Bapak Husni kemudian terpilih dan menjabat hingga saat ini. Bapak Husni mengaku mendapat dukungan dari beberapa tetua kampung untuk maju menjadi kepala dusun. Bapak Husni menjelaskan suka duka menjadi pemimpin muda:

Buku ini tidak diperjualbelikan.

> Luar biasa betul mengurus masyarakat dalam konteks Gili Trawangan ini, kalau masyarakat biasa ya ndak masalah. Ini pengusaha. Belum lagi pengusaha besar ini *backing* orang besar juga, ya sulit lah, banyak yang tidak ikut aturan. Kita sudah buat aturan ini, awik-awik adat ini, tetap kalau berhadapan dengan *backing* orang besar ya kalah kita, apalagi kita masih baru ini (Wawancara Bapak Husni, 4 November 2022).

Bapak Husni mengaku lebih nyaman bermitra dengan Warga Negara Asing (WNA) ketimbang saudara sebangsa sendiri karena, menurutnya, WNA ini lebih taat dengan aturan lokal yang berlaku. Bapak Husni memandang pendataan kependudukan sangat krusial di Gili Trawangan karena betapa carut-marutnya perkara kependudukan di pulau kecil ini.

Berdasarkan jumlah warga yang tercatat, hanya separuh dari jumlah keseluruhan warga yang menetap di pulau ini. Warga yang sudah meninggalkan Gili Trawangan pun ada yang tetap memiliki bisnis di Gili Trawangan. Warga yang menempati Gili Trawangan memang didominasi oleh para pendatang yang terdiri dari pekerja wisata dan wisatawan. Perkaranya ialah banyak pekerja wisata yang tinggal di Gili Trawangan, tetapi tidak melapor kepada ketua RT setempat sehingga tidak terdata. Ketua RT menerangkan bahwa pekerja lepas yang sering pulang-pergi tidak sempat beliau kenali wajahnya karena sebelum mengenal namanya, orang tersebut sudah pergi, dan baru kembali beberapa bulan kemudian. Wisatawan juga banyak yang menetap lama, bahkan ada yang berbulan-bulan hingga menahun. Warga akhirnya ada yang tercatat dan ada yang tidak.

> Tidak semua orang di sini menikmati kekayaan dari pariwisata. Yang tercatat saja paling tidak ada 20 keluarga kurang mampu di sini, itu belum yang tidak saya ketahui atau tercatat. Karena di sini sulit sekali mendapatkan data yang akurat. Orang datang dan pergi, sering berpindah rumah, jarang yang melapor ke

Buku ini tidak diperjualbelikan.

perangkat, ya begitu sudah, semua memikirkan diri sendiri (Wawancara Bapak Husni, 3 November 2022).

Penuturan Bapak Husni, "paling tidak ada 20 keluarga kurang mampu" yang kemudian membawa peneliti pada dua keluarga yang tersisih dan terpinggirkan dari kontestasi berebut kekayaan di pulau impian ini. Kedua perempuan lanjut usia ini telah memasuki usia kepala tujuh, namun masih tetap gigih bekerja untuk menyambung hidup mereka di pulau yang telah mereka tempati selama lebih dari separuh usia mereka.

Siang itu, perjalanan ke arah tengah pulau didampingi oleh Pak Husni dan para PPL. Makin ke tengah pulau, makin sedikit bangunan wisata yang terlihat, makin padat pula perumahan warga. Selepas lapangan, terlihat kawasan yang cukup kumuh. Banyak sampah botol plastik yang menutupi jalan, hingga akhirnya tiba pada satu rumah petak yang dihuni oleh seorang janda tua.

"*Dolar niku jadi dolar, kerjaan saya… tahu nama dolar itu?*", ujar Nenek Kemasin sambil tertawa memperlihatkan gigi-giginya yang sudah tidak lengkap. Ia tidak malu menceritakan pekerjaannya memulung sampah botol yang ia sebut sebagai "dolar". Empat orang duduk berhimpit di teras rumah petaknya yang cukup sempit. Hanya Nenek Kemasin, Pak Husni, dan tim peneliti saja yang muat, sementara para PPL berdiri di depan rumah petak tersebut. Nenek Kemasin hidup bersama anak laki-laki, menantu, dan cucunya di rumah seluas 3 × 5 meter ini selama bertahun-tahun. Namun, beberapa bulan lalu, anaknya sekeluarga memutuskan untuk pindah ke rumah petak lain di bagian selatan pulau sehingga sekarang Nenek Kemasin hidup sendirian di rumah petaknya (Gambar 3.11). Sekarang, ia harus menanggung biaya sewa sebesar Rp500 ribu per bulan. Nominal yang baginya cukup berat karena selama pandemi COVID-19 sampai sekarang penghasilan dari memulung sampah botol turun drastis karena berkurangnya wisatawan. Ia hanya mendapatkan Rp500 ribu untuk satu kali menjual kepada pengepul, dan dalam satu bulan biasanya ia hanya dua kali menjual saja.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Rudy (2022)

Gambar 3.11 Nenek Kemasin

Ia tidak ingat dengan pasti kapan pertama kali ia pindah dan menetap di Gili Trawangan. "Waktu awal pindah, suami sudah lama meninggal, saya pindah jadi pengasuh anak. Sudah ada bule di sini…" ujarnya. Menurut perkiraan Pak Husni, Nenek Kemasin menetap di Gili sekitar dekade 1980-an atau awal 1990-an ketika awal pariwisata menggeliat di pulau ini. Meskipun lupa kapan persisnya pindah ke Gili Trawangan, ia masih ingat kampungnya di Karangnangka di Kecamatan Tanjung, meskipun sudah tidak mempunyai rumah lagi di sana. Selama di Gili Trawangan, ia telah melakoni pekerjaan membantu di kebun orang lain, kemudian dilanjutkan memulung sampah botol selama bertahun-tahun. Penghasilannya hanya cukup untuk mengontrak rumah petak saja sehingga hingga di usia senjanya sekarang ia masih belum memiliki tanah dan rumah sendiri walaupun sudah resmi berstatus sebagai warga Gili Trawangan.

> Saya keluar pagi-pagi keliling, kalau malam tadi ada pesta ya syukur saya dapat banyak botol. Kalau tidak ada seperti sekarang ya dari rumah-rumah saja. Kalau siang saya pulang istirahat, setelah makan saya jalan lagi sampai sore (Wawancara Nenek Kemasin, 4 November 2022).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Nenek Kemasin menjawab semua pertanyaan kami dengan senyum dan tawa, meskipun terdapat bagian sedih seperti ketika ditinggal pergi oleh anak laki-lakinya yang pindah.

"Apakah pernah didata? Apakah pernah mendapat bantuan?", begitu pertanyaan peneliti. Ia mengaku pernah keduanya tetapi ia tidak tahu pendataan apa dan bantuan apa. Pak Husni membantu menjelaskan bahwa Nenek Kemasin pernah mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa ketika pandemi COVID-19 yang lalu. Menurutnya, BLT Dana Desa ini terutama ditujukan kepada mereka yang kurang mampu yang tidak mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pusat karena datanya tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pihak desa sadar bahwa ada ketidaktepatan data yang ada di pusat sehingga mereka melakukan intervensi dari Dana Desa untuk keluarga tidak mampu yang luput dari data di pusat sana.

Foto: Rudy (2022)

Gambar 3.12 Nenek Rupinah dan Keluarga

Tidak hanya Nenek Kemasin, masih banyak warga kurang mampu lain yang luput dari data pusat ini. Nenek Rupinah misalnya (Gambar 3.12) memperlihatkan situasi ruang tempat tinggalnya. Perempuan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

lanjut usia yang tidak dapat berbahasa Indonesia ini tinggal di rumah panggung kumuh berukuran 3 × 5 m yang ironisnya berada di belakang beberapa hotel dan vila mewah. Di sebelah rumahnya, terdapat sebuah rumah berukuran hampir sama yang dihuni oleh anak laki-laki, menantu, dan cucunya. Nenek Rupinah sehari-hari bekerja sebagai buruh tani di kebun milik orang lain, sekadar membantu mengumpulkan panen buah dengan penghasilan Rp25 ribu hingga Rp50 ribu per hari. Itupun tidak dilakukan setiap hari, hanya ketika panen saja.

Peneliti agak kesulitan berkomunikasi dengan Nenek Rupinah karena ia hanya mampu berbahasa Sasak. Komunikasi dibantu oleh Bang Wawan dan Bang Anto yang menjadi penerjemah. "Ina Rupinah ini tidak tahu usia aslinya, tetapi yang tercatat sekitar 70-an tahun, sudah lama sekali di pulau ini, dulu pindah dari Pemenang ke sini dengan keluarganya," ucap Bang Anto menerjemahkan cerita Nenek Rupinah. Ia ingat pertama kali pindah ke sini ketika masih banyak orang berkebun dan belum ada wisatawan, yang kami taksir sekitar dekade 1970-an. Ia dan suaminya bekerja kebun kemudian menjadi buruh pelabuhan. Dulu mereka tinggal di dekat pesisir pantai, tetapi kemudian tergusur ke tengah pulau karena ketidakjelasan status pertanahan di pulau ini. Sekarang, ia mengaku tanah yang ia tempati adalah miliknya, tetapi ia mengaku tidak mempunyai bukti legal. Di tengah obrolan, anak laki-lakinya datang dan membantu untuk bercerita. "Jadi, ini tanah ibu, tetapi memang tidak ada sertifikat. Kemarin ada Menteri Agraria datang menjanjikan bagi-bagi sertifikat, tetapi sampai sekarang belum ada kabar lagi," ujarnya dengan nada yang tidak bersemangat. Jangankan untuk membantu kehidupan ibunya, ia sendiri mengaku kesulitan untuk menafkahi keluarganya dari pekerjaan memulung barang rongsokan.

Kisah kedua perempuan lanjut usia yang boleh dikatakan sebagai "penduduk awal" Gili Trawangan ini menjadi ironi yang sangat terasa pahit. Mereka adalah orang-orang yang datang di awal, tetapi mereka menjadi korban "hutan belantara dolar" di pulau ini. Penyingkiran melalui proses akumulasi primitif ini bukan hal yang baru, Marx

Buku ini tidak diperjualbelikan.

(1867) telah membicarakan ini 1,5 abad silam tatkala revolusi industri berlangsung di Eropa. Mereka tersingkir dan hanya dapat bertahan hidup dari sisa-sisa tetesan rezeki yang membasahi pulau impian. Di rumah sendiri mereka tersingkir, di data pusat pun mereka tidak ditemukan. Mereka tidak tercatat sebagai penerima program nasional BST selama masa pandemi COVID-19. Mereka hanya menerima BLT Dana Desa sebagai rencana cadangan bagi orang-orang yang seolah dilupakan oleh data pusat. Terdatanya mereka dalam Regsosek ini memberikan secercah harapan terhadap perbaikan data nasional yang terintegrasi.

H. Penutup: Sebuah Refleksi

Kompleksitas proses produksi data yang ada di Lombok Utara menggambarkan bahwa imaji desa sebagai suatu entitas yang homogen dan tenteram tidaklah selalu tepat. Banyaknya uang yang beredar, tingginya pendapatan rata-rata, dan kepopuleran nama tidak berarti semua orang sejahtera. Di balik gemerlapnya pesona pariwisata, ada mereka yang tersisih, hidup "tak terlihat" di pedalaman pulau. Di antara mereka yang meraup untung, banyak yang tersebar tak sesuai dengan apa yang tercatat. Gili Trawangan ada pada sebuah kawasan perdesaan yang penuh dinamika, konflik, dan mobilitas yang seakan tak pernah berhenti. Diferensiasi ekonomi dan etos kerja individualisme yang mewarnai keseharian penduduk menyebabkan proses pencacahan tidak sesederhana yang diajarkan saat pelatihan. Sulitnya menemui dan meminta kesediaan responden untuk diwawancarai adalah tantangan terbesar dalam mewujudkan keakuratan data.

Tantangan pendataan seperti di atas membutuhkan sentuhan "lokal" sebagai modal awal untuk mengatasinya. Lokalitas ini tidak berarti petugas lapangan harus berasal dari wilayah tersebut, namun paling tidak menguasai medan lapangan, mengenal banyak orang setempat terutama tokoh masyarakat, hingga menguasai bahasa tempatan. Posisi petugas lapangan yang ada di antara (*in-between*), bukan merupakan penduduk tempatan dan bukan pula orang yang benar-benar asing, membuat mereka berada pada posisi ideal. Petugas

Buku ini tidak diperjualbelikan.

lapangan tidak rawan terjebak pada bias lokalitas dan tetap profesional dalam menjalankan tugas.

Sebagai sebuah refleksi, pengalaman dan pembelajaran yang didapatkan di Gili Trawangan, sebuah pulau impian nan gemerlap ini, menyadarkan bahwa berbagai proyek besar, entah itu proyek pembangunan atau pendataan seperti Regsosek 2022 ini, baiknya tidak hanya terjebak pada angka-angka statistik saja. Bilangan yang berjejer di dalam grafik dan tabel harus diberi "roh kemanusiaan", berupa narasi emik dari orang-orang lemah—jika boleh meminjam istilah Scott (1985). Narasi-narasi ini yang ujar Holloway (2010) dapat menjadi salah satu wujud terbangunnya kesadaran mereka yang lemah, yang bangkit dengan segala kelokalan masing-masing membuat retakan-retakan kecil pada tembok besar yang membelenggu mereka. Pemangku kebijakan tidak seharusnya memosisikan diri sebagai ahli yang tahu bagaimana orang lain harus hidup (Easterly, 2014), pun tidak semestinya mengumpulkan dan mengatur data dengan proses penyederhanaan realitas (Scott, 1998) laiknya ucapan Stalin, "*kematian satu orang adalah tragedi, kematian jutaan orang hanyalah statistik*". Satu atau sejuta kematian, semua adalah tragedi, semua memiliki makna, suara, dan kisah tersendiri di baliknya.

Kerja keras semua pihak yang terlibat mulai dari BPS dari berbagai tingkat, para petugas lapangan, para perangkat desa, para warga masyarakat yang turut membantu, hingga para responden yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai memberikan pelajaran bahwasanya Regsosek ini bukanlah hanya hajatan pemerintah saja. Regsosek merupakan hajatan besar semua elemen manusia Indonesia, baik yang merasa ada di "atas" maupun di "bawah" dengan segala cerita uniknya masing-masing. Pencacahan jiwa penting dilakukan sebagai salah satu dasar kebijakan. Ketepatan data perlu dicapai demi mewujudkan kesejahteraan. Namun kemudian, tentu "roh kemanusiaan" harus hadir agar angka-angka ini dapat berbicara demi keberpihakan pada mereka yang membutuhkan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Daftar Pustaka

BPS Kabupaten Lombok Utara. (2022a). *Kecamatan Pemenang dalam angka 2022*. BPS Kabupaten Lombok Utara.

BPS Kabupaten Lombok Utara. (2022b). *Potret pariwisata Kabupaten Lombok Utara 2022.* BPS Kabupaten Lombok Utara.

BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2022). *Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam angka 2022*. BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Breman, J. (1980). *The Village on Java and early-colonial state*. CASP at Erasmus University.

Dodds, R., Graci, S. R., & Holmes, M. (2010). Does the tourist care? A comparison of tourists in Koh Phi Phi, Thailand and Gili Trawangan, Indonesia. *Journal of Sustainable Tourism, 18*(2), 207–222. https://doi.org/10.1080/09669580903215162

Easterly, W. (2014). *The tyranny of experts: Economists, dictators, and the forgotten rights of the poor*. Basic Books.

Ferguson, J. (1990). *The anti-politics machine: Development, depoliticization and bureaucratic power in Lesotho*. Cambridge University Press.

Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977*. Knopf Doubleday Publishing Group.

Hall, D. (2012). Rethinking primitive accumulation: Theoretical tensions and rural Southeast Asian complexities. *Antipode, 44*(4), 1188–1208. https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.2011.00978.x

Hampton, M. P., & Hampton, J. M. (1998). *Tourism and the environment in small islands: a case study of Gili Trawangan, Lombok, Indonesia* [Discussion Paper]. Department of Economics, University of Portsmouth

Hampton, M. P., & Hampton, J. M. (2009). Is the beach party over? Tourism and the environment in small islands: A case study of Gili Trawangan, Lombok, Indonesia. In M. Hitchcock, V. T. King, & M. Parnwell (Eds.). *Tourism in Southeast Asia: Challenges and New Directions* (286–308). NIAS Press.

Hardin, G. (1968). The tragedy of the Commons. *Science, 162*(3859), 1243–1248. http://www.jstor.org/stable/1724745

Harris, M. (1979). *Cultural materialism: The struggle for a science of culture.* Random House.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Holloway, J. (2010). *Crack capitalism*. Pluto Press.

Li, T. M. (2005). Beyond "the State" and failed schemes. *American Anthropologist, 107*(3), 383–394. https://doi.org/10.1525/aa.2005.107.3.383

Li, T. M. (2007). *The will to improve: Governmentality, development, and the practice of politics*. Duke University Press. https://doi.org/10.1215/9780822389781

Marx, K. (1867). So-Called Primitive Accumulation. In Capital Volume I. Penguin Books.

Partelow, S. (2021). Social capital and community disaster resilience: post-earthquake tourism recovery on Gili Trawangan, Indonesia. *Sustainability Science, 16*(1), 203–220. https://doi.org/10.1007/s11625-020-00854-2

Ross, M. L. (1999). The political economy of the resource curse. *World Politics, 51*(2), 297–322. https://doi.org/10.1017/S0043887100008200

Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press. https://www.jstor.org/stable/j.ctt1nq836

Scott, J. C. (1998). Seeing like a State: How certain schemes to improve the human condition have failed. Yale University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctvxkn7ds

Segev, E. (2019). Volume and control: The transition from information to power. *Journal of Multicultural Discourses, 14*(3), 240–257. https://doi.org/10.1080/17447143.2019.1662028

Tishkov, V. (2005). The population census and the construction of identity. *Anthropology & Archeology of Eurasia, 44*(2), 10–40. https://doi.org/10.1080/10611959.2005.11029024

TNP2K. (2022). Direction of the President of the Republic of Indonesia Regarding Targeted Data for the Acceleration of the Elimination of Extreme Poverty (P3KE). https://www.tnp2k.go.id/articles/direction-of-the-president-of-the-republic-of-indonesia-regarding-targeted-data-for-the-acceleration-of-the-elimination-of-extreme-poverty-p3ke#:~:text=Luhut menyampaikan kemiskinan dan kemiskinan,atau 27%2C57 juta jiwa

Tukiran, T. (2000). Sensus penduduk di Indonesia. *Populasi, 11*(1), 17–34. https://doi.org/10.22146/jp.12328

Buku ini tidak diperjualbelikan.

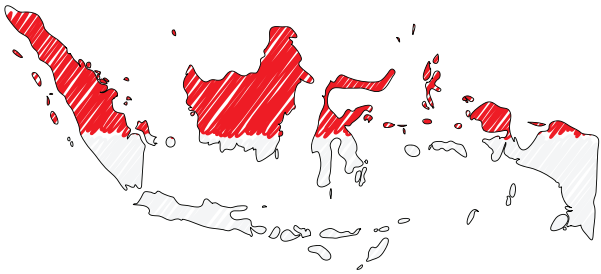

4

Mencatat Wajo dalam Regsosek, Menghadirkan Wajah Indonesia

M. Alie Humaedi & Fatwa Nurul Hakim

A. Menengahi Dilema dan Tujuan Negara: Pengantar

"Pengalaman sangat bermakna", adalah kesan pertama kali yang perlu disampaikan dalam keterlibatan bersama program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Sekalipun dunia penelitian, khususnya etnografi, yang berusaha mengungkap fakta-fakta sosial secara mendalam adalah identik dan terbiasa dengan pengumpulan data di lapangan, namun proses pengumpulan data yang dilakukan oleh BPS beserta jaringan mitra pelaksananya tidaklah dapat dianggap sepele. Memang benar bahwa setiap pelaksana pengumpulan data dalam kegiatan tersebut disertai dengan lembar kuesioner, namun dalam pelaksanaannya, baik secara teknis maupun substansi, memiliki tantangan tersendiri.

M. A. Humaedi & F. N. Hakim
Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: mali002@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Humaedi, M. A. & Hakim, F. N. (2023). Mencatat Wajo dalam regsosek, menghadirkan wajah Indonesia. Dalam M. A. Humaedi., D. K. Imron, & A. Pramono (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 1 Indonesia Tengah-Timur* (101–163). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.775.c697 ISBN: 978-623-8052-94-3 E-ISBN: 978-623-8052-98-1

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Salah satu tantangan terbesar dan tersulit adalah pada kesediaan responden untuk ditanyai oleh Petugas Pendataan Lapangan (PPL). Setiap responden memiliki karakter personal yang sering kali terhubung pada "jiwa zaman" dari kelahirannya, orientasi kepentingan, dan lingkungan budayanya. Tampak jelas ketika responden seorang berusia lanjut, tingkat kesulitan pendataan akan makin tinggi. Demikian juga ketika seorang responden memiliki orientasi kepentingan yang bertolak belakang dengan tujuan Regsosek BPS, jawaban-jawaban yang ada pun akan berselarasan dengan kepentingan dirinya.

Salah satu bentuk orientasi kepentingan yang paling sering dijumpai adalah kuatnya anggapan bahwa setiap program survei, sensus, dan registrasi yang ada pasti terhubung dengan bantuan sosial yang akan diterimanya. Anggapan hadirnya bantuan sosial ini bisa dalam bentuk pencantuman nama dirinya ke *database* penerima bantuan, ataupun adanya perubahan nama-nama pihak lain dalam penerimaan bantuan, sangat kental dalam proses pendataan. Akibat paling nyata dari orientasi kepentingan ini adalah "penyembunyian informasi" poin penting terkait tingkat kekayaan, pekerjaan, dan akses terhadap produktivitas ekonomi. Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat akar rumput secara umum telah terjebak pada "psikologi maladaptif", suatu keadaan atau upaya memanipulasi diri untuk tujuan kepentingan tertentu. Ia menafikan kesejatian dirinya, dengan merubah dirinya menjadi sosok-sosok yang diharapkan dapat memenuhi berbagai indikator dari skema pemerintah yang berhubungan dengan program perlindungan dan jaminan sosial.

Keadaan maladaptif seperti inilah yang akan menyulitkan para petugas pendata untuk menghadirkan data yang valid dan tepat, terlebih ketika beberapa poin pertanyaan mengarah pada ruang-ruang privasi yang tidak ada unsur paksaan dalam prosesnya. Hal ini akan mudah ketika para responden berupaya mewujudkan aktualisasi diri sehingga keadaan yang sebenarnya dapat terekam dengan baik. Salah satu teknik mitigasi untuk menghindari keterjebakan psikologi *maladaptive* dan menghadirkan data yang sahih itu adalah adanya teknik *tagging* yang disertakan secara bersamaan dengan proses peng-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

inputan data secara manual. Metode *tagging* yang mengedepankan rekam gambar pada empat dimensi utama, yaitu model rumah, lantai, atap, dan toilet, menjadi skenario pemerintah untuk mencegah pemalsuan data. Asumsi bahwa tidak semua keterangan dinyatakan benar jika tidak diiringi dengan pembuktian gambar menjadi lansiran utama pengembangan metode *tagging*. Metode ini relatif baru dan hanya digunakan pada skema program nasional Registrasi Sosial Ekonomi di tahun 2022. (Pedoman Regsosek 2022). Oleh karena itulah, penggunaan metode *tagging* seperti ini dapat dinyatakan sebagai salah satu keunggulan dari program Regsosek BPS.

Adapun kesulitan pendataan lebih disebabkan oleh lingkungan budaya masyarakat setempat yang bersifat tertutup, di mana tidak semua yang dimiliki dapat disampaikan kepada pihak lain. Ketertutupan ini tentu dilandasi pada dua aspek budaya, yaitu (1) aspek kesopanan. Bagi sebagian kelompok masyarakat di Indonesia, seperti Bugis dan Makassar, untuk mempertanyakan, membicarakan, atau ingin tahu tentang seseorang, khususnya pada aspek kekayaan dan hal privasi lainnya, akan dianggap "*saru*" (sesuatu yang tabu). Aspek moral ini dilandaskan pada nilai budaya terkait *sirri*, yaitu suatu sikap untuk tidak mengganggu orang lain; dan (2) aspek keamanan diri. Setiap keluarga tentu memiliki rahasianya masing-masing, baik dalam kehidupan pribadinya, urusan ekonominya, maupun tingkat kekayaannya (Saleh, 2022).

Mereka akan berusaha menjaga diri dari incaran dan omongan orang lain dengan berbagai cara. Banyak cerita yang menyebutkan bahwa uang-uang hasil panen ataupun emas yang dimilikinya sering kali ditaruh di karung beras atau ditaruh di atas para-para rumah bersama jagung dan hasil panen lainnya untuk menghindari ancaman keamanan dari pihak lain. Mereka pun berusaha tidak membicarakan soal-soal privasinya ke sembarang orang.

Dua nilai budaya tersebut tentu bertolak belakang dengan tujuan dari Regsosek yang memungkinkan setiap orang yang dipercayai atau kepala keluarga dapat menceritakan dan menyampaikan aspek-aspek yang selama ini dirahasiakan. Dalam program Regsosek inilah sesuatu

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang sebenarnya tertutup dan menjadi konsumsi internal lingkungan keluarga harus dibuka dan disampaikan kepada para pendata. Pernikahan kedua, sekalipun *siri* (nikah agama), yang menjadi rahasia dalam keluarga harus disampaikan. Demikian juga jumlah dan asal anak, kualitas kesehatan anggota keluarga, kepemilikan lahan dan ternak, pekerjaan, dan lainnya dari suatu keluarga serta merta akan diketahui oleh setidaknya pencatat, dan kemudian didokumentasikan dalam lembar-lembar kertas negara (dengan petanda adanya logo burung garuda di atas nama kegiatan "Registrasi Sosial Ekonomi Tahun 2022").

Para responden yang merupakan warga negara mau tidak mau dipaksa untuk menyatakan keadaan yang sebenarnya. Meskipun pada praktiknya proses pemaksaan itu tidak mungkin dilakukan karena para petugas pendata memang tidak memiliki kekuatan hukum untuk "memaksa" warga negara untuk menyatakan hal yang sebenarnya. Bahkan, perilaku psikologi *maladaptive* juga masih banyak dianut oleh warga negara untuk menutupi rasa sungkannya, dan termasuk untuk pencapaian orientasi kepentingannya. Aspek-aspek teknis pendataan seperti itulah yang menjadi tantangan tersendiri dari para Petugas Pendataan Lapangan (PPL), Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML), dan Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka) dalam program Regsosek.

Kendala teknis sebagaimana disebutkan sebelumnya tidak kalah sulit dari seorang etnografer saat membangun hubungan baik (*rapport*) untuk mengumpulkan data dan memahaminya secara mendalam. Perbedaannya, seorang etnografer bisa melakukan tugasnya dengan tempo waktu yang lama, sementara seorang pendata lapangan dituntut dengan waktu yang cepat. Ibaratnya, baru kenal dengan responden (dan banyak warga yang belum mengerti atau tergagap-gagap dengan nama Regsosek), seorang pendata harus mendapatkan jawaban dari seseorang terkait berbagai aspek yang privat. Keadaan ini tentu menuntut keahlian, keterampilan, dan kemampuan membangun pendekatan dari para pendata lapangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Selain alasan teknis, alasan substantif juga cukup menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan Regsosek tahun 2022. Alasan substantif berada pada lini yang berhubungan dengan konsep yang dibangun dan diterjemahkan dalam beragam pertanyaan. Sekalipun pertanyaan beserta kerangka pikir di kuesioner ini telah melalui penggodokan secara mendalam oleh tim tersendiri, namun pemahaman tersebut sering kali belum satu kesatuan dengan para pelaksana pencatat di lapangannya. Perbedaan pemahaman atas konsep akan membuahkan dampak terjadinya bias pertanyaan atau penjelasan saat responden mempertanyakan kembali maksud dan tujuan dari pertanyaan yang diberikan. Pemahaman berbeda sangat besar terjadi jika dihadapkan dengan keanekaragaman tingkat pendidikan dan status sosial dari para pelaksana lapangan (PPL). Sekalipun bimbingan teknis atau pelatihan bagi para PPL, PML, dan Koseka telah dilakukan oleh BPS di tingkat kabupaten dengan melibatkan instruktur daerah (Inda), pada praktiknya kekeliruan dalam konsep yang melatarbelakangi beberapa pertanyaan juga sering terjadi.

Dua kendala di atas menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan program Regsosek tahun 2022 secara nasional. Dalam konteks lokal, para pelaksana kegiatan Regsosek di Wajo, Sulawesi Selatan, mengalami keadaan serupa. Keanekaragaman tingkat pendidikan, keterampilan, dan lingkungan sosial budaya dari para pelaksana pencatat lapangan, dan kentalnya nilai-nilai moral *sirri* dalam perilaku masyarakat yang dicatatnya menjadi tantangan nyata dari pelaksanaan kegiatan Regsosek di Kabupaten Wajo.

Persoalan teknis dan substansi, ditambah tujuan utama dari kegiatan pencacahan dengan berbagai namanya merupakan warna dinamika yang terjadi sejak pencacahan jiwa itu terjadi pada lintasan sejarahnya. Saat pencacahan jiwa pertama kali dilakukan, terdapat pertanyaan terkait apa tujuan utama pencatatan jiwa itu? Apakah ia terhubung dengan kolonisasi atau penguasaan sumber produksi? Apakah ada hubungannya dengan upaya pengentasan kelaparan, dan lainnya. Pertanyaan-pertanyaan itu merupakan respons dari masya-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

rakat umum dan kaum ilmuwan terkait kepentingan pencacahan jiwa yang sering kali dihadapkan pada kepentingan kekuasaan politik dan ekonomi.

Di masa lalu, ada dugaan kuat bahwa pencacahan berkorelasi dengan kutipan pajak untuk negara, dan termasuk alokasi tenaga kerja untuk kepentingan industri dan lahan-lahan pertanian yang dimiliki kaum bangsawan (kelompok borjuis). Dalam konteks keindonesiaan, pencacahan jiwa di tahun 1930-an dianggap sebagai upaya Belanda dalam memetakan kekuatan kelompok-kelompok masyarakat, dan memilahnya berdasarkan kelompok sosial tertentu dengan ukuran *highlander* dan *inlander* (Aranda, 2022). Pemilahan sosial seperti inilah yang dianggap oleh Belanda sebagai objek utama dari pajak, tenaga kerja, dan kelompok-kelompok yang harus diwaspadai secara sosial. Artinya, pencacahan jiwa, dan termasuk di dalamnya registrasi sosial ekonomi, pastinya memiliki landasan ideologis dan motif-motif tertentu dari negara.

Salah satu motif utama tentu berkaitan pada upaya pencapaian empat tujuan negara yang dituangkan dalam berbagai kebijakan dan program perlindungan sosial bagi warga negaranya. Harapannya, setiap pengambilan keputusan terkait kebijakan dan program itu didasarkan pada data yang akurat, valid, dan tepat sehingga implementasinya akan tepat dan tidak salah sasaran. Basis satu data Indonesia menjadi kepentingan politik kebijakan yang melatarbelakangi pelaksanaan Regsosek tahun 2022.

Untuk menyukseskan visi satu data Indonesia, BPS Kabupaten Wajo sebagai organ vertikal dari BPS RI pun melaksanakan kegiatan Regsosek tersebut berdasarkan ketentuan, pedoman, dan standar yang ada. Semua proses, mulai dari persiapan, rekrutmen, hingga seleksi para pelaksana (PPL dan PML), pematangan konsep, pelatihan, aktivitas turun ke lapangan, penginputan data, pemeriksaan, verifikasi, dan pelaporan, didasarkan pada logika dan aturan umum yang ditetapkan. Meskipun demikian, permasalahan dan karakter sosial yang dihadapi oleh para pencacah atau petugas pencatat juga sangat berbeda dari wilayah lainnya. Karakter sosial masyarakat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bugis yang cukup tertutup dalam persoalan tingkat kekayaan, dan ditambah merebaknya fenomena perkawinan dini (muda ataupun di bawah umur) yang berada pada peringkat pertama di Sulawesi Selatan menyebabkan proses pencacahan tentu akan menghadapi problemnya sendiri. Strategi pendataan pada berbagai karakter khusus di lingkungan masyarakat Bajo inilah yang direkam secara emik dalam tulisan ini.

B. Dari "Manusia Darat" Menjadi "Manusia Perairan"

Awal dikira wilayah Kabupaten Wajo adalah bentangan alam pegunungan yang subur. Selain berada di tengah persis gugusan Pulau Sulawesi atau khususnya Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah tiga serangkai dari Bosowa (Bone, Soppeng, dan Wajo) ini memiliki danau terbesar di wilayah Sulawesi. Sebagian besar wilayah perairan Danau Tempe membentang di wilayah Kabupaten Wajo dan sebagian kecilnya berada di wilayah Soppeng dengan nama danau yang berbeda. Rupanya keberadaan Danau Tempe di wilayah Wajo tidak berkorelasi kuat dengan luasan sawah irigasi yang ada. Sekitar 65% sawah di Kabupaten Wajo merupakan sawah tadah hujan. Hanya sekitar 25% adalah sawah dengan irigasi. Sawah jenis ini kebanyakan berada di wilayah yang berada di bawah permukaan dari tiga sungai besar yang mengalir atau melalui wilayah Wajo. Saluran irigasi itu pada umumnya adalah saluran-saluran lama yang dibangun pada masa Orde Baru. Saluran ini akan terhubung langsung dengan pintu-pintu utama dari aliran sungai yang dibendung.

Pusat-pusat pertemuan aliran sungai di atas kemudian dikembangkan oleh pemerintah di masa Presiden Joko Widodo dengan membangun waduk Paselloreng di Desa Arajang, Gilireng, Kabupaten Wajo yang diresmikan September 2019 lalu. Ada enam manfaat yang diharapkan dari pembangunan waduk ini, seperti yang tertera pada gambaran model bendungan (Gambar 4.1), yaitu (1) Pelayanan air untuk irigasi dengan luas 7.000 ha; (2) Penyediaan Air Baku untuk empatkecamatan di Kab. Wajo sebesar 305 lt/detik; (3) Konservasi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sumber Daya Air; (4) Pengendalian Banjir Sungai Gilireng; (5) Perikanan Air Tawar; dan (vi) Pengembangan Pariwisata (PUPR RI, 2020).

Gambaran lokasi Kabupaten Wajo memperlihatkan cakupan wilayah geografis masyarakat di wilayah daratan (Gambaran 4.2). Pada perjalanannya, perubahan penghidupan masyarakat berubah seiring pengembangan pembangunan waduk. Beberapa manfaat dari waduk memang telah dirasakan oleh masyarakat Wajo. Sayangnya, ditengah harapan besar kemanfaatan itu, pembangunan waduk Paselloreng rupanya memiliki dampak memilukan bagi sebagian masyarakat yang tinggal di beberapa desa di wilayah kecamatan Sabbang Paru, seperti Pallimae, Salotenga, Petta Worongnge, Bolae, dan desa lainnya. Sebelum pembangunan waduk, masyarakat di desa-desa ini pada umumnya dapat mengembangkan pertanian tadah hujan di wilayah pinggiran danau sebagai bagian dari *livelihood system*-nya. Mereka juga memanfaatkan danau sebagai wilayah tangkapan ikan perairan daratnya. Rumah-rumah panggung mereka akan tetap berada di atas tanah, dan sesekali memang terjadi banjir yang akan surut dalam hitungan hari. Namun, pasca-pembangunan waduk Paselloreng itu, masyarakat yang pada awalnya berada di atas daratan, serta merta terus berada "di atas perairan".

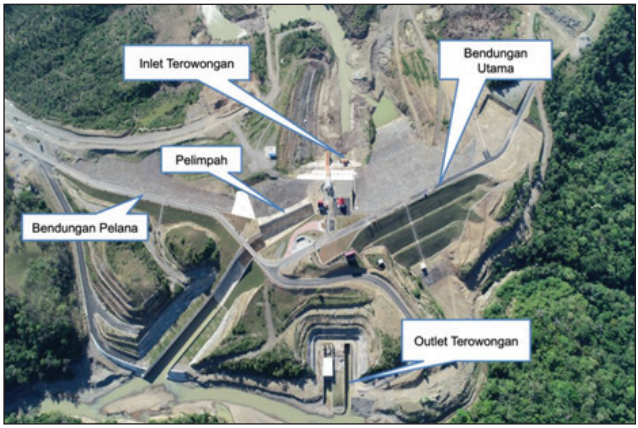

Sumber: PUPR RI (2020)

Gambar 4.1 Model Bendungan Passelloreng

Buku ini tidak diperjualbelikan.

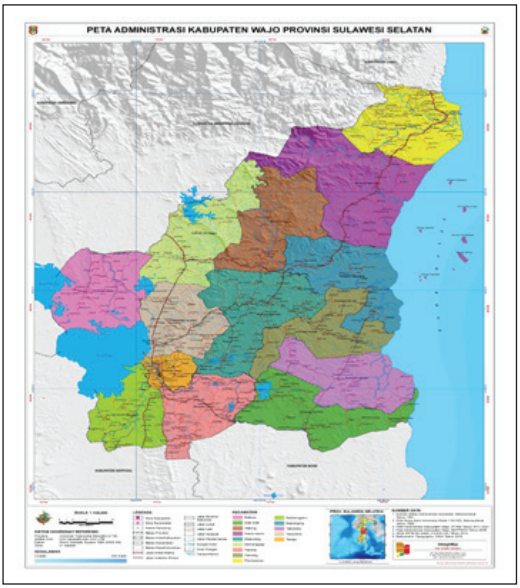

Sumber: Peta Tematik Indonesia (t.t.)

Gambar 4.2 Peta Administratif Kabupaten Wajo

Tiga tahun lamanya mereka telah berada pada kondisi seperti itu. Anak-anak tidak lagi bisa bermain di tanah daratan tempat berpijak. Orang tua tidak lagi bisa menanam padi ataupun jagung di atas lahan-lahan pertaniannya. Ribuan hektare sawah telah tenggelam oleh air yang tidak bisa mengalir ke sungai-sungai atau ke Danau Tempe yang menjadi muara pertemuan aliran sungai yang ada. *Livelihood system* masyarakat pun mulai berubah, dari petani sawah menjadi nelayan tangkap ikan perairan. Untuk keperluan transportasinya, motor berganti menjadi perahu. Setiap rumah hampir memiliki perahu. Demikian juga dengan sistem sosial dan perilaku sosial masyarakat mulai menyesuaikan, dari kehidupan normal wilayah daratan menjadi belajar untuk hidup bersama di atas air. Mereka benar-benar menjadi 'manusia air' yang penuh keterbatasan dan mulai belajar bagaimana berkehidupan di atas air.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: M. Alie (2022)

Gambar 4.3 Kampung Air Pasca-pembangunan Bendungan

Kehidupan kelompok masyarakat "di wilayah perairan" itu menjadi salah satu dari fenomena baru dari karakter bentangan alam di wilayah Wajo. Pemukiman penduduk berkembang di atas wilayah perairan (Gambar 4.2). Secara umum, wilayah Kabupaten Wajo terbagi pada tiga kategori bentang alam. *Pertama*, wilayah tinggi atau pegunungan. Karakter wilayah ini terlihat jelas pada Kecamatan Tempe, Singkang, Maniangpajo, dan Pampanua. Fenomena wilayah perairan baru terjadi di wilayah yang memiliki karakter wilayah tinggi. Setidaknya ada sekitar 1.000 hektare pada tiga desa "tenggelam" sebagai akibat dari pembangunan waduk di tahun 2019 itu. *Kedua*, wilayah pertengahan antara pegunungan dan pantai, yaitu Kecamatan Majauleng, Sajoanging, Takalalla, Bola, Gilireng, dan lainnya. *Ketiga*, wilayah pesisir atau pantai, mencakup wilayah Siwa-Pitumpauna, Keera, Cenrana, Penrang, dan lainnya. Tiga karakter wilayah itu tentu memberikan pengaruh besar terhadap mata pencarian, sistem ekonomi, perilaku sosial, dan budaya lingkungan dari masyarakatnya masing-masing. Pengaruh itu juga akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari tantangan para enumerator atau PPL dalam pelaksanaan pencatatan Regsosek di Kabupaten Wajo.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pada tahun 2020, Kabupaten Wajo secara statistik berpenduduk 379.079 jiwa. Jumlah keseluruhan ini berbeda dengan data yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mencapai angka 407.076 jiwa. (BPS Kabupaten Wajo, 2022). Selisih angka yang cukup tajam ini didasarkan pada perbedaan pencatatan. BPS menggunakan metode sensus penduduk, dan Dinas Catatan Sipil menggunakan sirkulasi dan sistem pelaporan terhadap angka kelahiran dan perpindahan penduduk yang ada. Selisih jumlah penduduk ini sebenarnya sangat problematik, karena berhubungan dengan jumlah kursi keanggotaan di DPRD secara politik dan penetapan jumlah akses layanan terhadap jaminan dan perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, BPS sendiri tidak mau berdebat. Persoalan perbedaan data sering kali sarat dengan berbagai kepentingan ekonomi dan politik yang memungkinkan BPS akan terjebak dalam permainan politik lokal. Dengan kenyataan itu, BPS akan bersifat netral dengan menghadirkan data sebagaimana hasil sensus penduduk yang dilaksanakan pada tahun 2020 itu.

Perbedaan jumlah penduduk di atas juga menunjukkan adanya ketidakmerataan akses dan sistem dalam pendataan jumlah penduduk. Selain persoalan ketelitian data dan sistem pencatatan, persoalan kewilayahan dengan tiga karakter yang ada sebenarnya cukup menyulitkan dalam pendataannya. Wilayah-wilayah yang berada di kawasan perairan baru misalnya akan sulit diakses pada saat pendataan. Rumah-rumah yang berada di atas air dan menyebar antara satu rumah dengan rumah lain telah menyulitkan pencatatan jiwa dilakukan. Terbayang sulitnya para PPL saat melakukan sensus penduduk di tahun 2020 dahulu, di mana saat itu, masyarakat di wilayah perairan baru akibat pembangunan waduk masih benar-benar belum beradaptasi dengan keadaan.

Perkembangan data penduduk Kabupaten Wajo terlihat dari tahun 2018 hingga 2020 (Tabel 4.1). Ada cerita bahwa saat sensus penduduk, para petugas pendata itu mengalami kesulitan untuk mengakses rumah penduduk yang tenggelam di wilayah Desa

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 4.1 Perkembangan Data Penduduk Kab. Wajo

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2018	2019	2020
Sabbangparu	26 294	26 326	24 365
Tempe	65 914	66 461	64 320
Pammana	31 821	31 860	30 712
Bola	19 768	19 792	19 435
Takkalalla	21 019	21 044	19 981
Sajoanging	19 047	19 070	17 525
Penrang	15 837	15 856	14 799
Majauleng	31 823	31 862	30 713
Tanasitolo	40 035	40 081	39 324
Belawa	32 554	32 594	30 153
Maniangpajo	16 328	16 348	15 762
Gilireng	11 410	11 444	10 875
Keera	22 464	22 529	20 237
Pitumpanua	42 496	42 547	40 878
Kabupaten Wajo	396 810	397 814	379 079

Sumber: Data BPS Kabupaten Wajo Tahun 2020

Pallimae'. Saat itu, penduduk belum banyak memiliki perahu. Mereka masih mengandalkan perahu dari tetangganya atau masyarakat yang memberikan pelayanan khusus dalam jasa penyebarangannya.

Di tengah keterbatasan perahu, para petugas pendata melakukan tugas pencacahan jiwanya. Mereka sering menggunakan perahu keluarganya ataupun meminjam perahu tetangga dengan biaya sewa ala kadarnya. Saat sensus penduduk, perhitungan penggunaan perahu di wilayah tenggelam belum dapat diakomodasi oleh BPS Wajo. Keadaan ini cukup berbeda ketika program Regsosek. Di tahun 2022 ini, banyak penduduk telah memiliki perahu. Hampir setiap rumah di wilayah tenggelam tersebut memiliki satu atau dua perahu. Pada umumnya, perahu itu berukuran 80 cm × 400 cm. Ada juga perahu kayu yang berukuran 60 cm × 200 cm, dan ukuran lain. Perahu seolah menjadi pengganti motor di masa sebelumnya.

Sementara itu, pada karakter wilayah pertama yang pegunungan, banyak sekali penduduk yang menyebar atau bertempat tinggal di rumah kebun. Mereka meninggalkan rumah di kampungnya untuk sementara dan kemudian tinggal di kebun selama proses pena-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

naman. Jika ia menanam palawija dan padi tadah hujan, umumnya mereka akan tinggal disana selama satu musim panen itu. Pilihan ini dilakukan untuk menghindarkan tanamannya dari serangan hama dan babi. Kebiasaan masyarakat di wilayah pegunungan seperti itulah yang menyulitkan para petugas pendataan dalam mendata kondisi nyata rumah beserta keluarga yang tinggal di dalamnya. Masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan atau dataran tinggi di Kabupaten Wajo setidaknya mencapai 35% dari jumlah penduduknya.

Adapun wilayah terpadat berada di kategori kedua, yaitu masyarakat yang berada di wilayah tengah dengan bentangan alam paling luas. Ada sekitar 40% penduduk bermukim di wilayah ini. Wilayah karakter kedua ini merupakan wilayah perkotaan Sengkang atau di Kecamatan Tempe, dan kecamatan sekitarnya hingga perbatasan kecamatan yang berada pada garis wilayah pantai. Secara topografis, Kecamatan Tempe sebenarnya berada di daerah tinggi, namun tidak setinggi wilayah di Maniangpajo, Belawa, Sabbangparu, dan kecamatan lainnya. Pada wilayah kedua ini, pertumbuhan ekonomi dan perluasan wilayah permukiman cukup tinggi. Data BPS menunjukkan bahwa beberapa wilayah di jalur tengah itu merupakan wilayah-wilayah pertemuan bisnis atau perdagangan berbagai jenis barang, seperti pakaian, peralatan elektronik, emas, peralatan pertanian, dan kendaraan bermotor.

Kecamatan Tempe di Wajo disebut-sebut sebagai pusat bisnis dari kota-kota sekitarnya, seperti Luwu, Palopo, Soppeng, dan Bone. Di Kecamatan Tempe inilah berbagai komoditas diperdagangkan secara intensif. Transaksi ekonomi yang tinggi di Tempe memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakatnya dan kecamatan sekitarnya. Pertanda dari tingginya interaksi sosial ekonomi di antara mereka pun diwujudkan dengan banyaknya rumah makan dan kafe yang bukan sekadar rumah makan harian, melainkan juga rumah makan untuk bersantai dan menghabiskan waktu luangnya. Beberapa bangunan hotel, wisma, dan *mansion* menjadi petunjuk bahwa interaksi sosial ekonomi di Wajo relatif tinggi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Wilayah Tempe tidak tergantung sepenuhnya pada perputaran ekonomi pertanian padi. Sebagai salah satu wilayah lumbung padi di Provinsi Sulawesi Selatan yang menyumbang sekitar 18% kebutuhan beras provinsi, perdagangan pertanian padi tidak terlihat jelas di pasar-pasar. Keadaan ini terjadi sebagai akibat kebiasaan masyarakat menjual padi secara langsung di sawahnya. Setiap panen, dari 1 hektare sawah, pada umumnya mereka akan mendapatkan hasil sekitar 50 karung beras berukuran 100 kg. Dengan "motor taksi", 10 karung padi akan disisihkan dan dibawa pulang ke rumah. Jumlah ini dialokasikan untuk kebutuhan hidup selama satu musim, dan persiapan bibit untuk musim tanam berikutnya. Sementara itu, 40 karung padi lainnya akan dijual secara langsung di sawah kepada para pedagang padi atau penggilingan padi. Hasil penjualannya akan digunakan untuk pembayaran utang biaya modal awal untuk pembaruan lahan, bibit, pupuk, dan tenaga. Jumlah lebihnya akan digunakan untuk biaya kebutuhan pelengkap, seperti motor ataupun tabungan dalam bentuk emas. Tabungan ini akan disimpan oleh pihak istri, sebagai langkah antisipatif jika terjadi keadaan darurat.

Tabungan dalam bentuk emas seperti itulah yang menjadi kebiasaan masyarakat Bugis di Wajo. Aspek tabungan emas, baik yang terpakai ataupun yang tersimpan inilah yang menjadi salah satu dari poin penting pertanyaan di dalam kuesioner Regsosek. Pertanyaan ini seolah sedang mengasumsikan bahwa sulit kiranya kalau perempuan Bugis Wajo ataupun keluarga Bugis Wajo menyatakan diri tidak memiliki emas di rumahnya. Oleh karena itu, dalam tradisi kehidupan masyarakat Bugis nyaris tidak pernah bisa dilepaskan dari emas, sebagai tabungan ataupun sebagai petunjuk eksistensi (*esteem needs*). Emas menjadi syarat perkawinan, sebagai barang hantaran atau bawaan calon suami kepada calon istrinya. Emas dalam bentuk ini akan menjadi "tabungan atau pegangan hidup" kaum perempuan sepanjang kehidupannya. Emas juga menjadi syarat dari mas kawin yang diberikan calon suami ke calon istrinya. Emas dalam bentuk ini pada umumnya akan menjadi hiasan yang digunakan oleh istri dalam kesehariannya. Demikian juga emas juga akan sering diberikan oleh

Buku ini tidak diperjualbelikan.

orang tua kepada anak-anaknya, khususnya anak perempuan. Koin-koin atau keping-keping emas secara turun temurun sering menjadi tabungan hari tua ataupun sebagai harta pusaka yang diturunkan lintas generasi.

Menabung dalam bentuk emas menjadi kebiasaan masyarakat Bugis di Wajo dan daerah lainnya. Pernah ada seorang informan menyatakan bahwa

> Satu orang perempuan Bugis, setidaknya memiliki 10 gram emas. Itu adalah angka paling kecil. Sementara angka sedang, rata-rata orang Bugis akan memiliki emas sekitar 20 sd 50 gram. Angka tertinggi, ya tergantung penghasilan keluarganya. Bisa jadi seseorang memiliki berons-ons atau bahkan berkilo-kilo emas batangan di dalam rumahnya. Orang Bugis itu tidak begitu suka dengan menabung uang di bank. Mereka lebih suka mengalihkan uangnya ke dalam bentuk emas ataupun tanah (Wawancara dengan AA, 5 November 2022).

Fenomena menabung emas di dalam rumah juga terjadi pada kelompok masyarakat di wilayah ketiga yang berkarakter pantai dengan orientasi pada penangkapan ikan. *Livelihood system* di dunia perikanan sebenarnya lebih tidak pasti dibandingkan pada sektor pertanian. Penangkapan ikan tergantung pada musim dan situasi laut yang sering kali tidak menentu, terlebih nelayan tradisional yang hanya menggunakan alat tangkap apa adanya dan tidak memanfaatkan teknologi yang memadai. Suatu kali, seorang nelayan bisa menghasilkan banyak ikan dengan harga jual yang tinggi. Namun, suatu kali, ia tidak mendapatkan apa pun, bahkan merugi untuk biaya bahan bakarnya. Keadaan tidak menentu seperti itulah yang disiasati oleh kaum perempuan untuk menabung emas dari hasil tangkapan pada saat melimpah. Emas itu akan dijual saat mereka membutuhkannya, khususnya saat suaminya dalam keadaan sepi tangkapan ikannya. Para nelayan juga kadang menyiasati situasi yang tidak menentu ini dengan pekerjaan lain, semisal menjadi buruh bangunan atau pekerjaan lain yang dianggap bisa dimasukinya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Selain nelayan, fenomena sosial yang cukup kentara di wilayah ketiga Wajo ini adalah tingginya tingkat migrasi atau perubahan penduduk. Banyak anggota masyarakat di desa-desa pesisir memilih menjadi perantau di pulau lain. Mereka akan menjadi pedagang, buruh bangunan, buruh sawit di Malaysia dan Kalimantan, ataupun menjadi pelaut di kapal-kapal domestik dan internasional. Tingkat perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain cukup tinggi. Keadaan ini juga dinyatakan oleh beberapa orang PPL Regsosek yang memiliki tugas pencatatan di desa-desa wilayah pesisir. Mereka sering kali tidak menjumpai kepala keluarga ataupun keluarga inti ada di dalam rumah. Hampir sebagian besar keluarga-keluarga di sana umumnya memiliki anggota keluarga yang terpisah atau merantau di luar wilayahnya.

Keadaan ini tentu menyulitkan pendataan karena otomatis akan berpengaruh terhadap pertanyaan-pertanyaan lain, misalnya terkait kualitas kesehatan, kepemilikan lahan, akses pekerjaan, dan kepemilikan harta bergerak ataupun non-bergerak. Pada akhirnya, data yang diperoleh akan jauh dari realitas yang ada, dan akan berdampak pada hasil akhir sebagai perangkat utama dari perumusan kebijakan terkait perlindungan sosial.

Fenomena sosial yang cukup mencengangkan dari masyarakat pada tiga karakter wilayah yang ada adalah tingkat perkawinan muda (perkawinan dini dan di bawah umur) yang sangat tinggi. Diksi perkawinan muda, dini, dan di bawah umur itu adalah definisi yang dikenalkan oleh beragam kelembagaan dan peraturan yang ada. Singkat kata, perkawinan muda adalah pernikahan yang terjadi sebelum umur dari satu atau dua pasangan itu memenuhi persyaratan yang ada. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 memberi batasan minimal 16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun bagi laki-laki untuk dapat menikah secara resmi berdasarkan hukum negara. Sementara itu, UU No. 2 Tahun 2019 sebagai revisi UU Perkawinan sebelumnya telah mengubah Batasan usia pasangan pernikahan menjadi 19 tahun. Di dalamnya tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki ataupun perempuan. Jika

Buku ini tidak diperjualbelikan.

didasarkan pada dua aturan perundangan itu, fenomena perkawinan muda di Kabupaten Wajo tetaplah tinggi.

Sebelum tahun 2022 akhir, Kabupaten Wajo selalu berada pada peringkat pertama terkait jumlah perkawinan muda di Sulawesi Selatan, dan *big five* secara nasional. Sepanjang tahun 2020 telah terjadi pernikahan muda (di bawah umur) sebanyak 562 kasus, dan di tahun 2021 jumlah meningkat menjadi 694 kasus. Sementara itu, pada tahun 2022 dinyatakan ada sekitar 159 kasus perkawinan muda yang terjadi (KUA Kabupaten Wajo, 2022). Sayangnya, data perkawinan muda ini hanya berada pada rentang tiga tahun terakhir saja. Data terkait ini menjadi penting ketika ada pemberitaan yang viral di media massa, dan salah satu dampaknya tentu memojokkan pemerintah Kabupaten Wajo. Salah satu isu yang berkembang bahwa pemerintah tidak mampu melakukan deteksi dini, mencegah ataupun melarang masyarakatnya untuk tidak melakukan perkawinan muda.

Data tiga tahun terakhir pun dianggap sebagai "data permukaan" saja. Nyatanya, kasus perkawinan muda tanpa proses dispensasi menikah di Pengadilan Agama di tahun-tahun sebelumnya sangat sering terjadi. Jumlahnya bisa mencapai 20–30% dari jumlah keseluruhan pernikahan pada satu tahun di setiap desanya (KUA Kabupaten Wajo, 2022). Kebiasaan mengawinkan anak pada usia sekolah tentu dilandasi oleh berbagai keinginan dan kepentingan keluarga. Salah satu kepentingan keluarga adalah berusaha menghindarkan anak-anaknya dari perilaku yang tidak baik (di luar norma agama). Hal lainnya, keluarga besar sering menghubungkan bahwa perkawinan muda akan lebih baik dilakukan, agar keluarga yang ada terjamin dengan adanya keturunan, dan mampu meneruskan usaha orang tua dan sekaligus membangun ikatan lebih kuat dengan keluarga lainnya. Berdasarkan berbagai fenomena yang ada, dapat dinyatakan bahwa perkawinan muda pada tahun-tahun sebelumnya dapat dianggap sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat yang distimulasi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor itu mencakup aspek sosial tradisi, ekonomi, dan pendidikan. Faktor ini akan digambarkan berdasarkan berbagai contoh kasus sebagaimana ditulis pada subbab E.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Keadaan bentang alam dan fenomena sosial budaya masyarakat Wajo sangat beragam. Dalam konteks Regsosek, keadaan seperti ini tentu menyodorkan berbagai tantangan dan kendala yang cukup krusial dan substantif dalam proses pencatatan atau pencacahan terkait jiwa, harta, benda, dan kualitas kesehatan yang ada, beserta jaminan dan perlindungan sosial yang pernah atau sedang diterima oleh anggota masyarakat yang dicacah. Berbagai strategi dan teknik khusus tentu harus dilakukan oleh para pencacah atau petugas pendata lapangan agar data yang didapatkan benar-benar memiliki tingkat akurasi tinggi dan valid. Seandainya terjadi kesalahan atau kekurangan data pun, jumlahnya tidak melampaui margin *error* yang ditetapkan. Strategi khusus ini tentu akan berbeda di antara para petugas pendataan, terlebih ketika menghadapi individu-individu tertentu dalam konteks ruang dan waktu yang berbeda. Proses *coping adaptation* dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menjadi poin istimewa kelebihan para PPL ketika dibandingkan dengan upaya membangun *rapport* (hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan) dalam tradisi penelitian etnografi.

C. Menelisik Awal Pemahaman Proses Bisnis Registrasi

Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) merupakan upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal, atau satu data. Regsosek merupakan program pendataan yang bersifat survei yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ruang lingkup Regsosek, yakni seluruh penduduk di 514 kabupaten/kota dengan menggunakan pendekatan keluarga. Regsosek bertujuan menyediakan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan, termasuk basis data untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Data yang tercakup pada Regsosek meliputi kondisi sosio ekonomi demografis, kepemilikan aset, kondisi sanitasi bersih, kondisi perumahan, kondisi kerentanan penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan, dan informasi sosial ekonomi lain-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

nya. Basis data sosial ekonomi tersebut diharapkan dapat menunjang program kesehatan, program kewirausahaan, program investasi, dan program pasar kerja. Pelaksanaan Regsosek melalui beberapa tahapan yaitu melalui koordinasi, persiapan, pelatihan instruktur dan petugas Regsosek, pendataan lapangan, dan malam Regsosek.

Pada tahap koordinasi dan persiapan dilakukan sosialisasi baik dengan *banner*/spanduk maupun melalui media sosial dan juga meminta dukungan dari semua pihak untuk kelancaran kegiatan Regsosek. Sebelum dilakukan pelatihan instruktur terlebih dahulu dilakukan rekrutmen melalui aplikasi SOBAT yang digunakan untuk pendaftaran, seleksi, dan *assignment* petugas dan aplikasi SIPMEN yang digunakan untuk pengawasan arus dokumen. Tahap pendataan dilaksanakan pada 15 Oktober–14 November 2022 di seluruh wilayah. Saat kami ke Kabupaten Wajo pada tanggal 1–7 November 2022 masih tahap pendataan, dan pada rentang waktu tersebut ada jadwal pendataan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, dan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Wajo. Tahapan pelaksanaan juga melakukan malam Regsosek pada tanggal 29 Oktober 2022 yang merupakan pendataan bagi para Anak Buah Kapal (ABK) dan tunawisma. Pada malam Regsosek, BPS Kabupaten Wajo berhasil mendata 10 ABK yang sedang bersandar di pelabuhan. Oleh karena malam Regsosek begitu mencekam, BPS Kabupaten Wajo saat melakukan pendataan berkolaborasi dan meminta dukungan kepada dinas sosial, dinas perhubungan, kepolisian, dan tentara agar kegiatan berjalan lancar dan aman.

Terkait proses Regsosek, Bapak Rustan selaku Kepala BPS Kabupaten Wajo menyatakan bahwa "Kegiatan Regsosek ini sudah diuji coba oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)". Pernyataan tersebut merepresentasikan bahwa Regsosek telah melalui proses perencanaan dan uji coba yang komprehensif untuk bisa diimplementasikan di lapangan. Komponen pelaksana dalam pendataan Regsosek, yakni melalui perekrutan (Koordinator Sensus Kecamatan [Koseka], biasanya pegawai organik di BPS), Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML), dan Petugas Pendataan Lapangan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

(PPL) yang sebagian mereka bekerja di pemerintahan desa, untuk melakukan pencacahan. PML pun demikian adanya. Mereka bertugas memantau dan memeriksa pencacahan maupun dokumen hasil pencacahan.

Badan Pusat Statistik merupakan instansi vertikal dan keberadaannya di tiap kota/kabupaten tentunya ada pembagian wewenang dan tugas di tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan juga kota/kabupaten terkait Regsosek. Peran BPS pusat dalam Regsosek ini adalah melakukan koordinasi dan dukungan kepada beberapa kementerian/lembaga misalnya Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam kapasitas ini, BPS akan memimpin pendataan awal, melakukan standarisasi metodologi, tata kelola pendataan dan pemutakhiran Regsosek, serta pembinaan statistik sebagai Instruktur Nasional. BPS pusat juga merumuskan kebutuhan petugas di seluruh Indonesia dengan hasil sebagai berikut, yaitu jumlah kota/kabupaten sebanyak 514, jumlah kecamatan 7274, dan jumlah desa 84.096. Dari data awal tersebut maka ditetapkan jumlah beban rata-rata petugas secara berjenjang adalah Koseka mengkoordinir 4 PML, PML mengoordinir empat PPL dan setiap PPL mendata 250 keluarga, meskipun kenyataan di lapangan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pertimbangan geografis dan topografis wilayah dan kepadatan penduduk.

Pelaksanaan Regsosek juga memerlukan legalitas dalam implementasinya. Legalitas tersebut diwujudkan dalam Surat Keputusan (SK). Pada tingkat pusat dibuat SK tim pelaksana Regsosek, dan surat edaran dukungan terkait sosialisasi pelaksanaan Regsosek, dan juga pembentukan tim korwil untuk memperkuat komunikasi antar-BPS pusat, provinsi, dan daerah. BPS pusat berkoordinasi untuk menjaring dukungan dari kementerian/lembaga terkait penyusunan logo, *tagline*, dan materi publisitas lainnya, rangkaian webinar series, penetapan duta

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Regsosek, dan dukungan sosialisasi di berbagai media cetak maupun elektronik. Dalam pelaksanaan pendataan, BPS pusat mengidentifikasi kebutuhan jumlah kuesioner baik yang dicetak maupun yang tidak dicetak. BPS juga membuat perangkat bilik *question & answer (*Q&A) terkait Regsosek.

Berkaitan dengan penyiapan dan pelaksanaan petugas, BPS pusat menyiapkan aplikasi SOBAT untuk seleksi dan aplikasi SIPMEN untuk *monitoring*. Pelaksanaan pelatihan BPS pusat sebagai instruktur nasional ini bertugas menyusun buku ajar dan menyampaikan hal-hal teknis ke instruktur daerah di tingkat provinsi, dalam hal ini 34 provinsi. Dari hasil informasi teknis pelaksanaan Regsosek maka akan muncul sebuah mekanisme perencanaan program di masing-masing wilayah provinsi yang diturunkan lagi di wilayah kota/kabupaten. Informasi teknis tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran, tahapan, dan waktu pelaksanaan yang ditetapkan. BPS pusat juga sebagai supervisor dalam pelaksanaan Regsosek, dan di dalam proses supervisi itu dapat mengetahui hambatan dan kendala maupun persoalan terkait anggaran dalam implementasi di lapangan. Tujuannya agar kekurangan-kekurangan yang ada dapat terselesaikan secara tepat.

Peran BPS kabupaten dalam kegiatan Regsosek adalah sebagai pelaksana di tingkat kabupaten. Sebelum melaksanakan Regsosek, dilakukan pelatihan secara berjenjang oleh BPS. Instruktur utama (intama) akan melatih instruktur nasional (innas), selanjutnya innas melatih instruktur daerah (inda). Kemudian inda ini melatih SDM yang akan turun ke lapangan, baik itu Koseka (selaku koordinator kecamatan), PML, maupun PPL, mengenai hal-hal teknis dalam pencacahan Regsosek. Sebagai contoh, pemahaman berkaitan dengan instrumen, bagaimana melakukan *probing* saat wawancara, bagaimana melakukan *geotagging* rumah tangga, baik yang tergolong miskin maupun tidak.

Data dari BPS Kabupaten Wajo menyebutkan bahwa jumlah PML sebanyak 127 dan jumlah PPL sebanyak 484. Bimbingan teknis diselenggarakan dengan beberapa tahap mengingat keterbatasan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sarana-prasarana (ruang *meeting*). Bimbingan teknis dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Wajo dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode ceramah dimana narasumber (pada waktu itu Kepala Bapelitbangda Kabupaten Wajo dan juga Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wajo) dan instruktur memberikan pengetahuan terkait maksud dan tujuan dari program Regsosek ini. Setelah melalui metode ceramah, peserta bimtek yang terdiri dari PML dan PPL maka mereka mencoba untuk melakukan *role playing* yang berisi tentang uji coba melakukan wawancara antara satu dengan yang lain, bagaimana melihat kreativitas PPL terutama dalam melakukan wawancara dengan responden. Dalam kesempatan itu, poin-poin pertanyaan juga dapat dikreasikan sebagai sebuah pernyataan yang menarik untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kondisi dari responden yang dicacah.

Registrasi sosial ekonomi (Regsosek) merupakan upaya mentransformasikan data yang tersebar di beberapa kementerian/lembaga menjadi satu kesatuan data. Data tersebut meliputi kondisi sosial ekonomi dari masyarakat. Dengan adanya satu data, pemerintah baik pusat maupun daerah dapat melakukan perencanaan pembangunan berbasis data, seperti hasil wawancara dengan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Wajo. Beliau menjelaskan bahwa:

> Saya berharap hasil Regsosek ini dapat segera kami akses datanya, karena bagi kami di Bapelitbangda, data tersebut sangat berguna untuk perencanaan dan evaluasi program tiap tahunnya. Sebagai contoh, apabila pada tahun mendatang ada program pembangunan sekolah maka harus dipastikan bahwa di daerah tersebut terdapat data anak usia sekolah sehingga pembangunan sarana sekolah dapat termanfaatkan oleh masyarakat (Wawancara dengan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Wajo, 4 November 2022).

Regsosek menjadi titik awal yang baik untuk mewujudkan satu data. Setiap lembaga mempunyai basis data, sebagai contoh Kementerian Kesehatan mempunyai data profil kesehatan, Kementerian

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sosial mempunyai mekanisme Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Kementerian Desa mempunyai data sistem informasi desa, dan Kementerian Pertanian mempunyai data terkait bentang alam wilayah pertanian produksinya. Sebagai contoh, di Kabupaten Wajo masih ditemukan data bansos yang tidak tepat sasaran dan warga yang sudah meninggal masih mendapatkan bantuan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Patila, Kecamatan Pammana, yaitu

> Data ini sangat penting bagi kami (pemerintah desa) sebagai pedoman kepada kami untuk melayani masyarakat. Sebagai contoh, apabila ada bantuan sosial yang tidak tepat sasaran maka kami yang ada di desa menjadi yang pertama diprotes oleh masyarakat (Wawancara 4 November 2022).

Pemerintah Kabupaten Wajo dengan keterbatasan anggaran dari APBD untuk melakukan pendataan masyarakat tentu cukup kesulitan. Dengan keterbatasan anggaran daerah tersebut, pernah dilakukan rencana kolaborasi antara BPS dengan Bapelitbangda untuk melakukan pendataan tetapi hal tersebut belum terealisasi karena beberapa hal. Bupati Kabupaten Wajo juga sangat mendukung Regsosek. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau bahwa "Kebijakan yang diputuskan di pemerintah Kabupaten Wajo harus berdasarkan data". Pernyataan bapak Bupati Kabupaten Wajo tersebut merepresentasikan bahwa pemerintah Kabupaten Wajo agar diberi kemudahan dalam mengakses data secara *real time* sehingga harapannya satu data ini bisa segera terwujud dan dapat segera diakses pemerintah Kabupaten Wajo.

Aksesibilitas dan kemudahan dalam mengakses data ini menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan Regsosek. Hasil wawancara dengan Kepala BPS menyebutkan

> Pada tahun ini dilakukan survei, kemudian *entry* data dan pengolahan data, meskipun ada beberapa daerah (kecamatan dan desa) yang dilakukan percepatan agar supaya pada Desember dapat selesai di wilayah percepatan tersebut, dan untuk proses

Buku ini tidak diperjualbelikan.

> *publish* dari hasil Regsosek tersebut melalui mekanisme dari pusat dulu yang kemudian akan turun-temurun pada tingkat kabupaten/kota, jadi mekanisme berjenjang (Wawancara Kepala BPS, 2022).

Dengan semangat yang sama untuk mendapatkan satu data tersebut, peneliti mengamati bahwa pemerintah daerah Kabupaten Wajo sangat mendukung kegiatan Regsosek. Hal tersebut dapat terlihat dari dukungan bapak Bupati, Wakil Bupati dan pejabat pemerintah di Kabupaten Wajo yang bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara oleh PPL. Mereka menganggap bahwa pejabat harus menjadi contoh bagi masyarakat agar mau dan jujur dalam memberikan informasi terkait Regsosek ini. Penegasan ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Wajo,

> Kita sebagai pejabat di pemerintah daerah harus menjadi contoh yang baik untuk menyukseskan kegiatan Regsosek ini agar masyarakat tahu dan dapat mencontoh apa yang kita lakukan terkait kegiatan Regsosek ini" (Wawancara 3 November 2022).

Pernyataan Bapak Wakil Bupati tersebut sebagai representasi dukungan terhadap survei yang dilakukan oleh BPS. Oleh karena itu, masyarakat juga harus melakukan hal yang sama, yaitu mendukung kegiatan Regsosek tersebut.

Kegiatan Regsosek dimulai pada 15 Oktober–14 November 2022. PPL akan melakukan verifikasi dengan mencocokkan data awal yang diterima dari pemerintah pusat melalui BPS. Verifikasi dilakukan melalui tingkat terbawah atau RT/RW. Verifikasi data awal dilakukan di tingkat RT, untuk memastikan apakah keluarga yang tercatat di data awal itu sudah sesuai. Petugas dan pengelola memahami bahwa Regsosek ini sudah memiliki pedoman pelaksanaan yang ada sehingga implementasi kegiatan dilakukan berdasarkan pedoman tersebut. Petugas baik PML maupun PPL sudah melalui bimtek yang diselenggarakan di hotel dan setelah bimtek harus sanggup untuk

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menandatangani kontrak dan harus sanggup menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang sudah ditentukan.

Perekrutan petugas dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi wawancara, kemudian pengumuman lulus atau tidaknya. Petugas sudah memahami bahwa nantinya petugas yang diterima akan melakukan pendataan di wilayah domisili dan yang perlu ditekankan ketika nanti melakukan pendataan adalah kegiatan ini belum ada kaitannya dengan bantuan sosial. Hasil wawancara dengan beberapa PPL mengatakan

> Awalnya saya mengira bahwa Regsosek ini nanti akan berkaitan dengan bantuan sosial. Jadi, setelah dilakukan pendataan kemudian ditindaklanjuti dengan bantuan sosial, ternyata setelah mengikuti pelatihan tidak demikian (Wawancara PPL, 2022).

Pernyataan ini menjadi tantangan bagi pendata bahwa perlu menyakinkan kepada responden agar tidak mengharapkan bantuan setelah dilakukan pendataan. Dalam kaitan keamanan kerja, PML dan PPL diberikan asuransi selama 1 bulan, yaitu Oktober–November. Keputusan BPS pusat ini menjadi ikhtiar untuk memberikan ketenangan dalam melakukan pendataan karena situasi dan kondisi yang tidak menentu.

D. Mendata di Tengah Kerentanan: Posisi dan Kendala

Berbicara tentang pendataan, pasti ada petugas pengumpul data. Pada Regsosek, mekanisme pelaksanaan pendataan dilakukan oleh PPL, didampingi oleh PML, dan dikoordinatori di tingkat kecamatan oleh Koseka. Rata-rata Koseka mengkoordinatori 4 PML dan 20 PPL. Angka tersebut bukan nilai yang mutlak karena ada beberapa pertimbangan dalam penentuan jumlah Koseka, PML, PPL, dan juga responden yang akan dicacah. Salah satu pertimbangannya adalah persoalan aksesibilitas wilayah.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Persepsi petugas terhadap kegiatan Regsosek bahwa keikutsertaan sebagai petugas Regsosek menjadi bagian atau kesempatan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Pembangunan bangsa yang dimaksud adalah menghasilkan data yang akurat. Peran Koseka dalam Regsosek ini sangat penting, yaitu mereka harus mengomunikasikan dengan PPL dan PML berkaitan capaian yang telah dicacah (didata). Beberapa Koseka memberikan catatan kepada PML dan PPL bahwa target capaian sehari adalah 15 responden dengan asumsi bahwa pelaksanaan Regsosek selama satu bulan dapat selesai sesuai target. Koseka membangun komunikasi dengan PML dan PPL dengan berbagai strategi.

Hasil wawancara dengan salah satu Koseka di Kecamatan Belawa bernama Grandis,

> Saya membuat aplikasi sendiri untuk memantau hasil capaian pengumpulan data dari teman-teman PPL, apakah capaian harian (15 responden) sudah tercapai apa belum, selain itu kami membuat *whatsapp group* untuk memudahkan komunikasi, apabila mereka ada kendala maka mereka menjapri saya untuk bisa segera kami beri solusinya (Wawancara 3 November 2022).

Koseka mempunyai kreativitas tersendiri dalam melakukan tugasnya. Hal ini dilakukan supaya Regsosek bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Saya teringat dengan teori Habermas tentang komunikasi efektif, bahwa bahasa sebagai manifestasi kebutuhan manusia untuk berkomunikasi. Bahasa adalah sarana integrasi sosial antara berbagai subjek komunikasi dan sarana sosialisasi kebutuhan, serta kepentingan yang melatarbelakangi komunikasi. Habermas mengembangkan gagasan tentang manusia sebagai komunikator yang rasional dalam kehidupan. Bagi Habermas, inti persoalan manusia adalah bagaimana memperoleh rasionalitas komunikatif, yaitu syarat-syarat yang memungkinkan komunikasi rasional antarindividu dan budaya yang berbeda. Ia mengharapkan adanya suatu rasionalitas yang sama bagi semua peserta dialog sebagai syarat komunikasi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Jika merunut pada teori komunikasi efektif dari Habermas tersebut, fakta di lapangan masih ditemukan kendala yang cukup serius terkait komunikasi para pelaksana. Menurut salah satu Koseka bernama Rian, disebutkan bahwa kendala yang dihadapi oleh PPL saat melakukan pengumpulan data adalah pada persoalan menerjemahkan bahasa kuesioner ke dalam bahasa pertanyaan atau obrolan yang mudah dipahami oleh para responden, termasuk komunikasi antara PPL dan PML. Hal lainnya lebih ke faktor wilayah yang sulit terjangkau sebagai contoh ada wilayah yang sedang mengalami banjir karena pendangkalan Danau Tempe sehingga untuk menjangkau ke pemukiman warga harus menggunakan perahu.

Keberadaan Danau Tempe di Kabupaten Wajo, di satu sisi memiliki nilai positif, yaitu sebagai tempat untuk mendapatkan penghidupan karena terdapat ikan yang melimpah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terutama nelayan di wilayah danau Tempe. Namun, di sisi lain, masyarakat yang berada di pemukiman wilayah sekitar Danau Tempe sering kali mengalami banjir. Keadaan ini disebabkan oleh abrasi yang terus-menerus terjadi sehingga air menggenangi wilayah pemukiman bahkan genangan air tersebut sudah ada hampir selama tiga tahun. Pembangunan waduk sebagaimana disebutkan juga menjadi salah satu penyebabnya. Dalam kondisi ini, masyarakat harus berubah *livelihood*-nya, dari yang semula di sektor pertanian, berubah menjadi sektor perikanan/nelayan. Ibaratnya, dulu wilayahnya menjadi wilayah daratan untuk pertanian, sekarang berubah menjadi wilayah perairan karena genangan luapan Danau Tempe.

Selain itu, kendala yang dihadapi oleh tim survei adalah masih ada wilayah yang memiliki kesulitan dalam jaringan atau sinyal internet. Padahal, proses pelaksanaan Regsosek, khususnya penggunaan *geotagging*, juga bergantung pada akses jaringan internet. Ketika di wilayah pendataan ada masyarakat yang tergolong miskin maka petugas harus melakukan *tagging* di rumah tersebut pada bagian dinding, lantai, atap dan kamar mandi. Jadi, apabila sinyal internet tidak kuat, metode geotagging tersebut juga kurang akurat. Untuk

Buku ini tidak diperjualbelikan.

masyarakat yang tergolong tidak miskin, proses tagging hanya dilakukan cukup di depan rumah saja yang dapat menggambarkan kondisi rumah dari depan. Hal lainnya, PPL di wilayah Sengkang juga mengeluhkan terkait sulitnya bertemu dengan warga karena pada siang hari mereka tidak di rumah. Untuk keadaan demikian, para PPL akan menyiasatinya dengan melakukan pendataan pada malam hari.

Pandangan Pemerintah Terkait Kepentingan Regsosek

Pada siang hari yang terik kami menuju Desa Patila di wilayah Kecamatan Pammana. Desa Patila berjarak sekitar 20 km dari Kota Sengkang. Begitu sampai di tempat tujuan, kami ditunggu oleh seorang pria paruh baya dengan memegang rokok dan kemudian menyapa kami "Silahkan masuk, Pak". Kami datang bersama Kepala BPS, Koordinator Teknis Regsosek, dan salah satu Koseka. Kemudian kami memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan kami datang dan bertemu dengan Kepala Desa Patila yang kebetulan seorang ibu. Setelah mendengar kata perkenalan dan maksud dan tujuan kami, Kades yang pada saat itu terlihat gugup kemudian bergantian berbicara dan mulai menjelaskan beberapa hal terkait kegiatan Regsosek di Kabupaten Wajo terutama di wilayah Desa Patila.

Kepala Desa pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pammana berkaitan Regsosek ini. Inti sosialisasi adalah permohonan dukungan dan kerja sama apabila didatangi petugas pendata ke wilayah Desa Patila. Selain itu juga permohonan untuk menyosialisasikan ke RT, RW, dan warga masyarakat, agar masyarakat mengetahui kegiatan Regsosek. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Patila bahwa "saya telah mengumpulkan dan menyampaikan informasi tentang kegiatan Regsosek ini kepada para ketua RT untuk dapat diteruskan ke warga masyarakatnya".

Sosialisasi harus dilakukan secara terus menerus. Dalam konteks ini, sosialisasi merupakan mata rantai paling penting di antara sistem-sistem sosial lainnya. Di dalam sosialisasi, ada keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem tertentu untuk berpartisipasi. Sosialisasi bisa melalui spanduk, poster,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

media sosial (Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter) dan melalui pertemuan-pertemuan kelompok. Pada konteks di wilayah Wajo, ada beberapa desa yang memberikan sosialisasi melalui penyampaian informasi dilakukan secara terus-menerus melalui majelis taklim dan penyampaian informasi dengan pengeras suara di masjid. Sayangnya, masih banyak desa yang tidak melakukan hal ini.

Dalam kegiatan Regsosek, ada juga beberapa staf Desa Patila yang menjadi petugas pengumpul data. Keuntungan pengumpulan data yang dilakukan oleh staf di desa adalah RT, RW, dan warga sudah kenal dan mengetahui petugas tersebut. Di sisi lain, petugas sudah mengetahui wilayah dan mengenal kondisi sosial budaya masyarakat yang menjadi sasaran survei Regsosek. Staf desa yang menjadi petugas Regsosek untuk sementara pekerjaannya diambil alih oleh staf yang lain. Warga Desa Patila sangat menyegani kepemimpinan dari kepala desa yang sekarang. Beliau (kepala desa) selalu menyempatkan hadir apabila di masyarakat ada acara hajatan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancaranya, yaitu "jadi kepala desa itu harus menjadi contoh yang baik bagi warganya, saya selalu berusaha datang apabila warga saya ada hajatan" Kehadiran pemimpin pada suatu acara di lingkup desa merupakan suatu kebanggaan tersendiri oleh warganya. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan di wilayah Desa Patila adalah berkaitan dengan infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan, sanitasi dan jembatan yang beberapa sudah rusak.

Selain persoalan infrastruktur, fenomena perkawinan anak di Desa Patila juga cukup tinggi. Kepala desa selaku yang memberi surat pengantar kepada warganya yang mengajukan juga mengalami kesulitan untuk mencegahnya. Terkait perkawinan anak, pemerintah desa pada umumnya mengalami kesulitan dalam mencegahnya. Perkawinan anak biasanya juga sudah disiapkan jauh-jauh hari. Pada umumnya, proses pengajuan surat pengantar akan dilakukan tatkala sudah mendekati hari pelaksanaan. Di saat itu, kedua mempelai baru mengajukan surat pengantarnya. Berdasarkan standar operasional prosedur, kepala desa dapat memberikan surat pengantar kepada calon mempelai yang memenuhi syarat usia. Ketika mereka tidak

Buku ini tidak diperjualbelikan.

memenuhi persyaratan itu, keputusan sah/tidak perkawinan anak tersebut kemudian dibawa ke pihak KUA dan Pengadilan Agama.

Di tengah dilema terkait perkawinan anak, kepala desa juga tidak berani untuk tidak mengeluarkan surat pengantar. Ia bisa saja diprotes oleh warganya apabila tidak mengeluarkan surat tersebut. Informasi yang diterima dari kepala desa terkait maraknya perkawinan anak adalah adanya adat istiadat yang bernama *Mapasitaro* (tunangan). Maraknya perkawinan dini ini disebabkan oleh keinginan masyarakat yang cenderung tidak mau menghilangkan kekerabatan dan di dalamnya juga ada upaya melepaskan beban orang tua. Fenomena perkawinan anak ini juga akan terekam pada instrumen Regsosek.

Di tengah berbagai fenomena sosial, dan termasuk ketidak-maksimalan kepala desa menyosialisasikan program Regsosek, terbesit harapan besar dari kepala desa terhadap Regsosek. Mereka sering menyatakan bahwa apabila hasil pendataannya sudah keluar maka perlu segera disosialisasikan ke pemerintah desa. Bahkan, sebelum menjadi data publik, pihak pemerintah desa juga perlu dilibatkan dalam proses verifikasi hasil pendataannya. Tujuannya, agar data yang akan dipublik benar-benar telah sesuai dengan keadaan nyata di desa tersebut.

Pandangan dan Peran Masyarakat terhadap Pendataan

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang belum mengetahui Regsosek. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang tidak sampai ke masyarakat, seperti yang diungkap oleh salah seorang warga di Desa Patila bahwa "saya belum pernah dengar diumumkan di masjid kalau ada pendataan". Pernyataan itu bermakna bahwa informasi atau pengumuman biasanya disiarkan melalui pengeras suara di masjid sebagai media informasi. Ada kecenderungan masyarakat jenuh dengan berbagai pendataan yang telah banyak dilakukan. Selain itu, ada kecenderungan pula di tingkat masyarakat bahwa jika dilakukan pendataan, berarti akan mendapatkan bantuan. Berdasarkan dua kecenderungan ini, PPL sebelum melakukan pendataan terlebih dahulu menjelaskan kepada responden (warga) maksud dan tujuan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dari Regsosek ini. Tujuannya agar masyarakat tidak menyalahartikan hasil pendataan yang ada. Warga sebenarnya berharap dengan adanya pendataan ini dapat menjelaskan kondisi masyarakat, terkait apakah masyarakat ini tergolong miskin atau tidak. Apabila tergolong miskin, sebaiknya perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Peran serta masyarakat dalam proses Regsosek, terutama di Kabupaten Wajo, terlihat pada partisipasi mereka untuk didata. Jumlah masyarakat yang menolak sangat sedikit sekali. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mendukung kegiatan Regsosek sehingga dapat memberikan data yang lengkap. Di beberapa desa di Kabupaten Wajo, ada beberapa anggota masyarakat yang menginformasikan bahwa kegiatan Regsosek juga pernah disampaikan dalam forum-forum majelis taklim. Informasi seperti ini menjadi sangat penting sebagai upaya mendukung kelancaran kegiatan Regsosek.

E. Disfungsi Kelembagaan Sosial Adat dalam Pendataan: Membaca Kekhawatiran

Sebagai salah satu program pemerintah, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) diskenariokan demikian rupa oleh BPS dengan mengatur alur bisnisnya dengan baik. Secara substansi, kerangka pikir dan pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner registrasi tentu dipersiapkan secara matang oleh tim teknis di BPS pusat. Cakupannya akan disesuaikan dengan tujuan utama dari registrasi tersebut. Demikian juga, konsep-konsep yang dibangun pun ditegaskan dalam buku panduan dan ditransmisikan secara detail dalam berbagai kegiatan sosialisasi. Panduan teknis dibuat oleh tim tersendiri agar memudahkan proses pelaksanaan registrasi, mulai dari persiapan tenaga pendata lapangan hingga proses verifikasi dan unggah data menjadi data publik secara nasional.

Jika persoalan substansi Regsosek banyak dipegang atau dikendalikan oleh BPS pusat dengan pelibatan para pakar dari berbagai pihak atau pemangku kepentingan, implementasi teknis tentu dilakukan oleh BPS kabupaten/kota dengan dukungan pendam-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pingan dari BPS provinsi. Sistem kelembagaan BPS secara vertikal dari pusat-provinsi-kabupaten/kota telah memudahkan proses koordinasi dan penetapan tupoksi masing-masing dalam proses pelaksanaan Regsosek ataupun berbagai survei dan sensus lainnya. Dalam konteks ini, BPS kabupaten/kota menjadi penanggung jawab teknis pelaksanaan Regsosek. Keniscayaan seperti ini terjadi karena pelaksanaan Regsosek bertumpu pada sumber data pada tingkat satuan lingkungan setempat (SLS) yang terkecil, yaitu setingkat RT, RW, rukun lingkungan, ataupun dusun pada konteks pedesaan. Artinya, di tangan BPS kabupaten/kota inilah tanggung jawab pelaksanaan teknis dari kegiatan nasional Regsosek berada.

Sebagai penanggung jawab pelaksanaan, BPS kabupaten/kota akan menyiapkan dan mengeksekusi proses rekrutmen petugas, sosialisasi, dan strategi pelaksanaan kegiatan Regsoseknya. Dalam proses rekrutmen petugas pendata, pemeriksa, dan petugas *entry data*, BPS Kabupaten Wajo menggunakan sistem semi-*open recruitment*. Setidaknya ada dua pertimbangan dalam penggunaan sistem ini. *Pertama*, memenuhi alur bisnis sebagaimana pedoman yang telah ditetapkan BPS pusat terkait proses seleksi para pendataan lapangan, pemeriksa, dan petugas *entry data*. Di dalam proses itu setidaknya ada "orang-orang baru" yang dikenalkan dan disiapkan untuk menjadi petugas survei BPS. Para calon dipersilakan mendaftarkan diri pada tautan *open recruitment* yang sistemnya telah dibuat oleh BPS pusat. Proses seleksinya akan dilakukan BPS kabupaten/kota. Salah satu persyaratan utamanya, para calon harus berasal dari domisili setempat di Kabupaten Wajo. Tujuannya agar proses pelaksanaan benar-benar aktual di SLS, dan hubungan personal telah terbangun sebelumnya.

Kedua, BPS Kabupaten Wajo menganggap bahwa pelaksanaan Regsosek tidak akan berjalan lancar dan sesuai target jika semua petugas lapangan adalah orang baru hasil seleksi pra-Regsosek. Oleh karena itu, BPS Wajo mengambil kebijakan khusus bahwa para mitra yang pernah bekerja lama untuk sensus dan survei dapat dilibatkan kembali pada kegiatan Regsosek ini. Ibu Bina sebagai penanggung jawab kegiatan Regsosek Kabupaten Wajo akan membuka *database*,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

memeriksa, dan memberikan pertimbangan atas nama-nama mitra pencatat dan pemeriksa yang dianggap memiliki komitmen, serta terampil dalam pendataan. Para mitra ini diminta segera mendaftarkan diri secara sistem agar namanya tercatat dalam *database* seleksi petugas registrasi secara nasional. Mereka akan tetap mengikuti seleksi sebagaimana prosedur yang ada, tetapi mendapatkan prioritas utama menjadi bagian dari para pelaksana Regsosek. Setelah itu, semua calon yang dinyatakan lulus sebagai petugas pendataan lapangan akan diberikan pelatihan atau bimbingan teknis terkait sistem dan prosedur pelaksanaan Regsosek.

Seiring persiapan para petugas pendataan lapangan dengan berbagai kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan, BPS Kabupaten Wajo pun mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi Regsosek. BPS Wajo memilih dua langkah sosialisasi, yaitu sosialisasi dengan cara pemasangan *banner* dan spanduk di ruang publik di tingkat kecamatan, dan sosialisasi langsung para perangkat desa di tingkat kecamatan. Ruang lingkup sosialisasi itu dilakukan di tingkat kecamatan yang melibatkan seluruh kepala desa atau lurah dan perwakilan tokoh masyarakat yang ada di satuan wilayahnya. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan beberapa hal, seperti (1) Pelaksanaan Regsosek akan dilakukan pada tanggal 15 Oktober–14 November; (2) Para petugas pendataan berasal dari orang setempat sehingga telah memiliki hubungan yang baik; (3) Pendataan Regsosek tidak terkait pada perubahan atau verifikasi data terkait penerima bantuan sosial dalam berbagai bentuknya; dan (4) Permohonan pihak BPS agar pihak desa dan tokoh masyarakat dapat menyebarkan kembali informasi tersebut kepada perangkat desa, para tokoh, dan seluruh anggota masyarakat di wilayahnya.

Pada konteks permohonan bantuan penyebaran informasi atau sosialisasi itu, BPS Kabupaten Wajo mengasumsikan bahwa para kepala desa yang hadir pada pertemuan sosialisasi itu akan mendistribusikan informasi Regsosek ke masyarakatnya, baik melalui pesan berantai dari perangkat dan tokoh masyarakat maupun secara langsung ke tingkat masyarakatnya. Asumsi ini sebenarnya didasarkan pada

Buku ini tidak diperjualbelikan.

adanya dukungan dan partisipasi perangkat desa untuk menyukseskan kegiatan Regsosek. Partisipasi masyarakat sebenarnya telah terlihat pada beberapa hal, seperti (1) kesediaan pihak desa menyerahkan nama untuk perangkat desanya sebagai "petugas pemeriksa" (PML); (2) memberikan izin kepada petugas pendataan (PPL) yang akan berkeliling dari satu rumah ke rumah berdasarkan pembagian SLS nya; dan (3) adanya kerelaan masyarakat sebagai sumber data untuk menjawab semua pertanyaan kuesioner Regsosek. Tiga partisipasi dari kelompok masyarakat itu sangat penting sehingga akan memudahkan proses pendataan yang ada.

Sayangnya, tidak semua anggota masyarakat mengetahui adanya kegiatan Regsosek. Keadaan ini terjadi karena kurang adanya sosialisasi yang dilakukan kepala desa, perangkat desa, ataupun tokoh masyarakat yang sebelumnya menghadiri kegiatan sosialisasi Regsosek di tingkat kecamatan. Masyarakat lebih banyak mengetahui adanya Regsosek dari para tetangga yang pernah didata oleh PPL. Informasi "*gethok tular*" seperti itu yang terjadi dalam sistem sosialisasi yang berkembang di wilayah Wajo. Artinya, harapan dan kepentingan sosialisasi yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Wajo dengan cara mengumpulkan seluruh kepala desa di setiap kecamatan kurang memberikan manfaat bagi distribusi dan transmisi informasi terkait Regsosek di tingkat masyarakat. Harapan itu akan terwujud jika kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat dapat mendistribusikan informasi Regsosek dengan berbagai saluran informasi yang ada.

Saluran informasi itu dapat berupa penggunaan forum-forum keagamaan di masjid, musala, dan majelis taklim untuk mengenalkan dan memberitahukan adanya Regsosek. Saluran informasi juga dapat disampaikan kepala desa, perangkat desa ataupun tokoh masyarakat pada forum pertemuan rutin di tingkat desa ataupun RT/RW dan perjumpaan sosial lainnya. Nyatanya, forum-forum keagamaan, formal dan informal itu tidak sering digunakan untuk kepentingan sosialisasi tersebut. Ketiadaan komitmen kepala desa, perangkat desa dan tokoh sosial dianggap sebagai penyebab utama dari lemahnya dukungan kelembagaan sosial tradisi dalam pelaksanaan Regsosek

Buku ini tidak diperjualbelikan.

2022. Keadaan ini makin ditambah ketika ruang sosial bersama, seperti gotong royong, kerja bakti, dan ronda di tingkat masyarakat Wajo mulai redup. Meredupnya aktivitas pada ruang sosial bersama itu telah membuat saluran informasi penting tidak segera berjalan atau merembes ke berbagai individu.

Pertanyaannya, apa yang melatarbelakangi ketiadaan komitmen para kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat dalam penyebaran informasi atau sosialisasi Regsosek? Jawaban pertanyaan ini dapat terungkap dari obrolan dengan kepala desa di Wajo sebagai berikut:

> "Apa itu Regsosek, seorang kepala desa terdiam sesaat ditanya tentang pengetahuan mengenai perkembangan kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi di desanya. Seolah ia sedang mengingat sesuatu. Sesaat kemudian ia mengingat, "oh iya, kegiatan sosialisasi di kecamatan pada bulan Oktober kemarin ya? Saya jawab, iya. Lebih lanjut, soal itu, kan tugas petugas pendataannya, bukan oleh kepala desa atau perangkat desa. Saya hanya membenarkan, bahwa tugas pencatatan itu memang ranahnya petugas PPL, tetapi saya hanya mau nanya, bagaimana terkait sosialisasi Regsosek ini di tingkat masyarakat, karena saya dengar-dengar, masih banyak warga yang tidak tahu tentang kegiatan ini di desa ini.
>
> Spontan kepala desa menjawab, loh kan itu tugas PPL, bukan tugas kepala desa atau perangkat desa. Kami sudah memberikan izin kepada mereka untuk bekerja, dan silahkan lakukan saja sosialisasinya. Kami tidak mungkin melakukan sosialisasi langsung terkait pendataan, apalagi yang berhubungan dengan "perlindungan sosial" sebagaimana tujuan dari Regsosek ini. Kami khawatir, bahwa kepala desa dan perangkat desa yang dituduh akan melakukan perubahan data terkait penerima bantuan atau lainnya. Kami tidak mau menjadi aktor yang terlibat langsung dalam Regsosek ini, karena masyarakat tahunya kalau di data, berarti akan mendapat bantuan. Jika kepala desa atau perangkat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

desa yang turun, seandainya nanti ada perubahan data penerima bantuan, kami kembali akan terkena tuduh dan caci maki dari warga desa.

Tokoh masyarakat juga banyak memilih diam, untuk tidak terlibat dalam penyampaian informasi ini. Sekalipun saya sudah berusaha menyampaikan kepada mereka terkait adanya kegiatan Regsosek ini. Mereka lebih memilih diam, dan tidak menyampaikan informasi itu di forum pengajian, pengumuman di masjid atau mushala atau pertemuan informal lain. Mereka juga takut, sama dengan kekhawatiran kami. Oleh karena itu, sosialisasi sekalipun, biar menjadi tugas PPL atau BPS saja sekalian. Kami toh sudah memberikan izin juga kepada BPS dan para pelaksana lapangannya (Wawancara dengan Kepala Desa di Wajo, 4 November 2022).

Pernyataan tersebut cukup mencengangkan bahwa kegiatan Regsosek pada akhirnya bertumpu pada BPS di tingkat kabupaten. Secara formal, BPS Wajo seolah tentu mendapatkan jaminan dari kepala desa dan perangkat desa, sebagaimana dinyatakan oleh sebagian besar kepala desa saat di pertemuan sosialisasi. Apa yang dinyatakan rupanya berbeda dengan kenyataan. Kepala desa beserta perangkat desanya memiliki kekhawatiran besar bahwa keterlibatan dirinya pada kegiatan sosialisasi Regsosek membuahkan dampak buruk bagi posisi, tugas, dan statusnya sebagai kepala desa. Sekalipun tidak memiliki hubungan antara Regsosek dan daftar penerima bantuan, kepala desa khawatir bahwa pendataan tersebut akan mengubah status penerima bantuan saat ini, ataupun mereka yang tidak terdata untuk masuk sebagai penerima bantuan. Keadaan ini tentu akan mengancam "masa depan politik" kepala desa. Mereka bisa jadi tidak terpilih lagi pada periode berikutnya, ataupun juga akan mengancam pelaksanaan tugas pada tahun-tahun saat ia menjabat.

Seiring kekhawatiran kepala desa, seiring itu pula para perangkat desa dan tokoh masyarakat memiliki perasaan yang sama. Mereka

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tidak mau terlibat pada proses sosialisasi Regsosek dengan asumsi yang sama. Mereka tidak ingin bertanggungjawab atas keadaan yang akan mungkin terjadi pasca pendataan itu. Masyarakat di Wajo, dengan struktur Pendidikan Dasar yang masih tinggi (mencapai angka 34%), tentu memiliki tingkat pengetahuan dan literasi yang tidak seragam. Ada kecenderungan kuat mereka akan membangun opini atau asumsi bahwa "setiap pendataan apa pun" akan berhubungan erat dengan penerimaan bantuan sosial. Ketika mereka didata, sekalipun posisinya saat ini adalah orang kaya, juga akan ada anggapan bahwa mereka berhak mendapatkan akses bantuan sosial tersebut. Opini seperti ini berkembang liar di masyarakat sehingga akan menimbulkan konflik laten saat ada daftar penerima bantuan yang berbeda dari daftar penerima bantuan sebelumnya. Ruang sosial bersama makin redup, dan akhirnya menghilang akibat terlalu tingginya gesekan sosial yang disebabkan oleh opini terkait "pendataan dan kelayakan masuk dalam daftar penerima bantuan".

Desa sebagai lingkup pemerintahan paling kecil memang berada pada posisi dilematis. Desa menjadi ruang tujuan dari semua kebijakan, program, dan keputusan politik dari pemerintah pusat. Apapun kebijakan terkait perlindungan sosial, kependudukan, sosial ekonomi, dan lainnya pasti akan menjadikan "masyarakat desa" sebagai "obyek kebijakan dan program". Dampak positifnya adalah "uang yang beredar di tingkat desa" sebenarnya sangat besar. Uang itu diasumsikan oleh pemerintah sebagai stimulan penting peningkatan kesejahteraan sosial. Namun, dengan uang yang beredar atas nama berbagai kebijakan dan program nasional, ruang-ruang sosial bersama dan kelembagaan sosial tradisi di tingkat masyarakat terancam hilang. Kohesivitas erat yang terbangun dengan dasar kekeluargaan, kebersamaan, dan hubungan baik di masa sebelumnya terancam hilang sebagai akibat dari pemilahan kelompok-kelompok sosial dalam posisi layak dan tidak layak sebagai penerima bantuan sosial dan ekonomi dari pemerintah. Indikasi kelayakan yang berbasiskan pada data etik (kebijakan) seperti itulah yang membangun segregasi sosial sangat besar di tengah kehidupan masyarakatnya. Kepala desa dan perangkat desa akhirnya dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas

Buku ini tidak diperjualbelikan.

segregasi sosial. Sekalipun bukan sebagai pihak penanggung jawab, mereka menjadi pihak yang menerima dampak langsung dari keresahan dan kegelisahan masyarakat dalam merespons kebijakan dan program yang ada.

Pada tataran sosial, segregasi sosial yang ada sebagai dampak negatif dari kebijakan dan program perlindungan sosial lambat laun mengancam peran kelembagaan sosial tradisi. Pada awalnya, kelembagaan sosial tradisi ini menjadi mekanisme internal dan informal yang memungkinkan resiliensi dan produktivitas masyarakat dapat terjaga dengan baik. Hubungan antara petani penggarap dan pemilik sawah, antara petani dan pedagang (penggilingan) sekalipun di dalamnya sarat dengan penghisapan keuntungan hasil, hubungan antara kelompok masyarakat biasa dan kelompok bangsawan ataupun orang kaya menjadi bagian tidak terpisahkan dari definisi kelembagaan sosial tradisi yang ada. Secara substansi, kelembagaan sosial tradisi umumnya berada pada sebuah mekanisme organisasi yang dibuat oleh masyarakat untuk menjadi media penghubung informasi dan aspirasi, media pemantik pemberdayaan masyarakat, dan media penjamin kehidupan sosial ekonomi yang rentan.

Pembangunan kelembagaan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), paguyuban petani dan penerima air, arisan bapak-bapak dan ibu-ibu, ikatan remaja masjid, karang taruna, majelis taklim, dewan adat, kerukunan keluarga Bugis, ikatan keluarga Wajo, dan lain sebagainya menjadi kelembagaan sosial tradisi yang tercipta seiring dengan kehidupan sosial masyarakat Wajo. Pada masa Orde Baru, kelembagaan sosial tradisi ini sering digunakan oleh pemerintah sebagai "promosi dan sosialisasi program", khususnya yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Pada masa itu, anggota masyarakat digerakkan menjadi pendukung dari program-program pembangunan yang diluncurkan pemerintah. Pada saat itu pula, pemerintah tidak mengupayakan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau sejenisnya, tetapi lebih berorientasi pada dukungan pembangunan infrastruktur yang bersifat lokal dan fasilitas umum.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Keadaan dan peran kelembagaan sosial tradisi mulai berubah ketika pemantikan dan pemberdayaan masyarakat dikenalkan dengan kompensasi dana padat karya atau dana pemberdayaan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada periode awal meluncurkan keputusan adanya alokasi dana khusus untuk pembangunan infrastruktur dengan kompensasi biaya padat karya bagi anggota masyarakat yang terlibat atau bekerja dalam kegiatan pembangunannya. Pengendalian atas prosesnya kemudian diserahkan kepada "lembaga baru" yang bersifat organik, yaitu Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan. Keputusan apapun akhirnya digerakkan oleh UPK tersebut. Kelembagaan sosial tradisi hanya menjadi semacam "mediator dan corong" rencana UPK dan masyarakat. Sekalipun PNPM Mandiri selalu mendeklarasikan dirinya sebagai program pemberdayaan masyarakat berbasiskan pada aspirasi masyarakat beserta penguatan masyarakat, namun pada kenyataannya UPK sering meninggalkan kelembagaan sosial tradisi yang berperan sebelumnya dalam mengurus dan membantu proses pembangunan apapun di masyarakat desa.

Keadaan tersebut makin diperparah dengan adanya keputusan bantuan langsung tunai yang memicu segregasi sosial di masyarakat makin tajam. Tanpa ada keterlibatan dari kelembagaan sosial tradisi, keputusan daftar penerima bantuan makin memicu konflik internal di dalam masyarakat. Proses berkepanjangan itu mengamputasi atau mengerdilkan peran kelembagaan tradisi yang awalnya sangat berperan dalam pembangunan sosial masyarakat. Bukti mandulnya peran kelembagaan sosial tradisi itu juga terlihat jelas pada tidak adanya dukungan sosialisasi Regsosek di tingkat masyarakat lokal di Kabupaten Wajo. Sekalipun ada kabar bahwa beberapa masjid di beberapa desa memberikan informasi terkait adanya kegiatan Regsosek, namun secara umum dukungan "rumah ibadat beserta kelembagaan sosial agama" di dalamnya tidak menjadi fenomena umum. Tiadanya dukungan dari kelembagaan sosial seperti itu selaras dengan fenomena lepasnya tanggung jawab atau kurangnya komitmen banyak kepala desa untuk ikut serta dalam menyosialisasikan Regsosek walaupun dalam berbagai rapat pimpinan di tingkat pemerintah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kabupaten dan perangkat wilayah pak bupati dan wakil bupati selalu mengimbau dan menginstruksikan para pejabat di wilayahnya untuk ikut membantu BPS dalam menyosialisasikan kegiatan Regsosek ini secara maksimal. Saat wawancara dengan bupati dan wakil bupati ini terekam beberapa pernyataan penting:

> Bupati: "Bagi kami, data sangat penting. Manfaatnya sangat penting, karena dapat digunakan untuk merumuskan kegiatan ataupun kebijakan. Saya berharap data ini akurat, valid, dan obyektif berdasarkan fakta sosial yang ada. Pemerintah kabupaten tentu sangat mendukung BPS untuk kegiatan registrasi sosial ekonomi ini. Setiap rapat pimpinan, kami menginstruksikan agar sosialisasi Regsosek dilakukan, dan pemerintah di tingkat kecamatan dan desa wajib mendukung kegiatan tersebut. Untuk persoalan "bantuan sosial", sepanjang kepala desa dan PPL bisa menjelaskan dengan baik, saya yakin masalah itu akan dimengerti oleh warga masyarakat (Wawancara dengan Bupati Wajo, 3 November 2022).

> Wakil Bupati: setiap ada pendataan di tingkat masyarakat, saya akan memahami perasaan khawatir kepala desa. Pendataan sering dihubungkan oleh masyarakat pada pembaharuan data penerima bantuan. Keadaan inilah yang menyulitkan para kepala desa dan petugas pendata. Sebelum ada kebiasaan bantuan langsung, dahulu masjid dan mushola akan selalu mengumumkan informasi apapun terkait kegiatan pemerintah, termasuk sensus dan survei. Namun, seiring adanya daftar penerima BLT yang diperdebatkan maka tokoh masyarakat dan kepala desa mengambil jarak untuk membantu segala sesuatu yang berhubungan dengan pendataan (Wawancara dengan Wakil Bupati Wajo, 3 November 2022).

Dua pernyataan pemangku wilayah di Kabupaten Wajo ini jelas-jelas memberikan gambaran bahwa ada kekhawatiran perangkat wilayah dan tokoh sosial agama dalam mendistribusikan informasi terkait pendataan. Mereka tidak mau menjadi "pihak tertuduh" dari

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pembaharuan data yang menyebabkan seorang atau banyak warga tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Sekalipun jelas Regsosek tidak memiliki hubungan langsung dengan daftar penerima BLT, namun dalam ingatan dan opini kolektif masyarakat, setiap data yang didapatkan akan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, termasuk pembaharuan data penerima BLT. *Mindset* yang berkembang seperti itulah yang membuat kelembagaan sosial dan tradisi menjadi disfungsi atau tidak lagi menjadi corong utama pemerintah desa dalam menyosialisasikan atau mendistribusikan informasi terkait program pemerintah, terlebih program yang berhubungan dengan pendataan warga desanya.

Pilihan "disfungsi atas sosialisasi Regsosek" tentu harus dipahami oleh BPS dan pemerintah pusat pada umumnya. Pemahaman atas suasana batin masyarakat, perangkat wilayah dan tokoh-tokoh sosial keagamaan dapat menjadi landasan utama merumuskan kembali strategi baru sosialisasi dan saluran informasi untuk mengenalkan kegiatan Regsosek ataupun kegiatan sensus lainnya. Tokoh daerah perlu menjadi pionir dalam proses pendataan dan menjadi contoh bahwa proses pendataan patut diterima sebagai bagian dari proses pembangunan. Pendataan kepada Bupati dan Wakil Bupati juga dilakukan (Gambar 4.4) memperlihatkan contoh representasi tokoh daerah dalam proses pendataan. Kemudian, pendataan terhadap Kepala Bappeda turut menjadi gambaran bahwa proses pendataan menyertakan berbagai pihak dalam lini masyarakat (Gambar 4.5).

Di tengah kurangnya dukungan kelembagaan sosial tradisi itu maka strategi penyebaran informasi melalui media sosial dengan berbagai *template, flyer,* dan poster dapat dilakukan oleh BPS di tingkat kabupaten. Melalui jejaring Koseka, PML, dan PPL, mereka dapat mendistribusikan informasi penting ke tingkat masyarakat. Cara ini menjadi penting, khususnya bagi kelompok masyarakat yang memiliki *smartphone*. Sementara itu, bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki *smartphone*, sosialisasi dapat dilakukan dengan pelibatan generasi muda dalam berbagai kegiatan BPS. Setidaknya ada perwakilan satu sekolah ataupun satu desa yang dapat dikirim untuk kegiatan sosialisasi BPS. Artinya, saluran informasi dan sosialisasi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Fatwa (2022)

Gambar 4.4 Pendataan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Wajo

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Fatwa (2022)

Gambar 4.5 Pendataan terhadap Kepala Bappeda

tidak hanya pada tataran formal dan tertuju pada kelompok elit masyarakatnya, tetapi juga pada kelompok orang muda. Harapannya, mereka dapat mendistribusikan informasi terkait Regsosek kepada lingkungan wilayahnya dengan berbagai cara yang biasa dilakukan anak-anak muda itu.

F. Fivianti Mendata Keluarga: Kisah Seorang PPL

Suatu hari di bawah terik matahari yang menyengat kulit, kami mendatangi sebuah desa. Desa itu bernama Desa Palimae di Kecamatan Sabangparu. Desa ini kondisinya memprihatinkan karena sebagian wilayah desa ini tergenang air. Untuk mewawancarai petugas dan keluarga yang akan didata, diperlukan perahu untuk menghantarkan. Menurut informasi, wilayah tersebut tiga tahun lalu adalah wilayah daratan. Seiring dengan adanya proyek pembangunan waduk di Danau Tempe, dampaknya air menggenangi wilayah pemukiman warga.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sekalipun pada musim kemarau, genangan tersebut setinggi paha orang dewasa. Pada saat musim hujan, genangan tersebut bisa setinggi atap rumah warga. Di wilayah inilah seorang PPL perempuan berada. Ia adalah sosok perempuan yang ceria, semangat, dan penuh optimisme untuk melakukan pendataan. Mengapa demikian, karena PPL tersebut selalu melepaskan senyum dan tawa yang penuh keceriaan, dan terlihat sangat bersemangat untuk melakukan pendataan, meskipun pada saat itu langit mulai berganti warna dari yang semula biru berganti menjadi gelap keabu-abuan yang menandakan bahwa hujan besar akan segera turun.

Perempuan itu bernama Fivianti, perempuan kedua dari enam bersaudara yang terlahir dari orangtua yang bekerja sebagai nelayan ikan di wilayah Danau Tempe. Perempuan yang menamatkan pendidikan sarjananya di Universitas Puangrimaggalatung dengan spesifikasi jurusan pendidikan biologi. Orang tua Fivianti merupakan sosok yang luar biasa karena dari 6 anak, 5 di antaranya sudah menamatkan jenjang sarjana. Orang tua Fivianti menganggap pendidikan adalah sesuatu hal yang penting. Berbagai macam cara dilakukan agar anak-anaknya dapat menyelesaikan sekolahnya. Hasil wawancara dengan Fivianti menyebutkan demikian.

> Orang tua saya menganggap pendidikan itu sangat penting, bapak rela bekerja dan menjual tanah warisannya untuk membiayai anak-anaknya agar menjadi seorang sarjana (Wawancara, 4 November 2022).

Dengan pendidikan yang tinggi maka diharapkan dapat menjadi bekal untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang.

Fivi, nama panggilan yang biasa disapa oleh teman-temannya, menjadi petugas pendataan lapangan (PPL) sedang melakukan pendataan pada salah seorang responden (Gambar 4.6). Pekerjaan sebagai pendata bukan pekerjaan yang baru baginya. Sebelumnya, ia pernah bekerja sebagai staf desa di bidang administrasi sehingga pekerjaan sebagai pendata, mengurus administrasi warga, dan berkomunikasi dengan warga merupakan hal yang biasa baginya. Ketika BPS mem-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Fatwa (2022)

Gambar 4.6 Pendata Fivi sedang Mendata Keluarga

buka lowongan sebagai PPL, ia serta merta mendaftarkan diri dalam proses seleksinya. Ia berkomitmen akan menjalankan tugas pendataan dari 15 Oktober sampai 14 November 2022, sebagaimana kontrak yang ditandatanganinya sebagai Petugas Pendataan Lapangan. Dengan kontrak ini, pekerjaan di kantor desa yang dibebankan pada dirinya diambil alih untuk sementara oleh staf lain sampai batas selesainya pelaksanaan Regsosek.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, penyediaan sumber daya manusia yang dilibatkan oleh BPS terbagi dalam dua kategori, yaitu SDM yang telah masuk pada *database* SDM sebagai petugas pendataan lapangan dan SDM yang belum ada sama sekali di *database* BPS. Fivi merupakan salah satu SDM yang baru alias belum ada sebelumnya di *database* BPS. Awal mulanya, ketika ada pengumuman rekrutmen Petugas Pendataan Lapangan (PPL) yang diumumkan di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram dan *Whatsapp Group*, perempuan itu diberi info oleh temannya yang notabene sebagai PML dan sudah masuk di *database* petugas survei BPS karena memang berulang kali mengikuti kegiatan BPS. Informasi itu langsung direspons oleh FIvi yang lalu mempersiapkan berkas-berkas

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang diminta, dan pada akhirnya setelah melalui berbagai tahap, perempuan tersebut akhirnya lolos dan menjadi Petugas Pendataan Lapangan (PPL).

Dengan medan perairan baru akibat dampak pembangunan waduk, proses pendataan di Desa Palimae tidaklah mudah. Wilayah Desa Palimae ini merupakan wilayah yang sekitar tiga tahun lalu merupakan wilayah daratan, dan karena terjadi sesuatu hal maka wilayah tersebut berubah menjadi wilayah perairan. Hampir seluruh wilayah Desa Palimae menjadi wilayah yang tergenang air. Mata pencaharian masyarakat yang dulunya sebagai petani kini berubah menjadi pencari ikan. Lahan yang mereka garap dahulu sudah tidak bisa karena tergenang air. Hal tersebut juga terjadi pada suami Fivi. Bapak dari satu orang anak ini dulu bekerja sebagai petani, tetapi sekarang berubah menjadi nelayan pencari ikan di wilayah desanya. Ikan yang didapat kemudian dikeringkan dan dapat dijual di pasar. Untuk melakukan pendataan, perempuan tersebut memerlukan transportasi berupa perahu sewa. Sekalipun berat, Fivi tetap sangat antusias dan bersemangat untuk melakukan pendataan. Ia adalah sosok yang sangat tegar di lapangan.

Bagi Fivi, ia telah mendapatkan pengalaman yang berharga dalam kegiatan Regsosek ini, terlebih ini adalah kegiatan pengumpulan data pertama kali yang ia ikuti. Regsosek menurut Fivi merupakan kegiatan pendataan yang luar biasa karena dapat mengetahui kondisi sosial ekonomi warga, baik yang kaya maupun miskin, secara lengkap. Awalnya, ia menduga bahwa Regsosek ini dilakukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, tetapi setelah mengikuti bimtek yang diselenggarakan BPS, perempuan tersebut baru memahami bahwa Regsosek ini tidak berkaitan dengan bantuan yang diterima oleh masyarakat. Niat yang sangat tinggi agar terlibat dalam Regsosek ini adalah untuk mendapatkan pengalaman yang sangat berharga baginya. Keterlibatan ini juga didukung oleh keluarganya untuk menjadi Petugas Pendata Lapangan (PPL). Pengalaman yang berharga juga dapat diperolehnya saat mengikuti Bimtek. Ia mendapatkan materi dan *sharing* pengalaman dari berbagai

Buku ini tidak diperjualbelikan.

narasumber yang sangat kompeten dalam pendataan. Ia juga dapat memahami instrumen kuesioner Regsosek dari awal sampai akhir beserta teknik-teknik wawancara untuk mendapatkan dan memancing data agar dapat tersampaikan dari responden ke petugas. Pengalaman sebagai pendata seperti ini tidak ditemukan saat dirinya menempuh pendidikan di jurusan Pendidikan Biologi.

Bagi Fivi yang menjadi PPL, pendataan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan. Semua kebijakan pemerintah yang ditetapkan sebaiknya harus berdasarkan data. Proses pendataan harus dilakukan secara jujur dan benar, tidak boleh diisi sendiri sehingga jawaban responden sangat objektif kebenarannya. Kementerian dan lembaga lain selain BPS juga melakukan pendataan, sebagai contoh Kementerian Sosial mempunyai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Kemendesa mempunyai pendataan terkait recana pembangunan, Kementerian Tenaga kerja mempunyai data tentang jumlah pekerja di Indonesia. Sayangnya, ketika masing-masing memiliki basis pendataan sendiri, produk data menjadi sangat beragam dan jauh dari semangat pembangunan satu data yang terstruktur. Oleh karena itu, menurutnya, dari berbagai macam lembaga dan kementerian perlu ada upaya untuk duduk bersama agar dapat menghasilkan kebijakan satu data. Upaya ini menjadi penting agar dapat memudahkan berbagai macam kebijakan yang akan ditetapkan.

Pendata seperti Fivi akan memaknai pekerjaan yang dilakukan adalah tidak semata-mata hanya berdasarkan *output* target yang ditetapkan. Beberapa PPL dan PML yang diwawancarai, seperti Fivi memaknainya sebagai bentuk dukungan untuk membangun bangsa dan negara. Apalagi pendataan dilakukan di tempat domisili mereka tinggal. Dalam seleksi petugas pendata dilakukan wawancara untuk mengetahui komitmen diri mereka. Komitmen ini merupakan sebuah penanda bahwa yang bersangkutan akan melaksanakan pekerjaan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Proses pendataan yang dilakukan petugas memiliki alur. Alur pertama tentu memperkenalkan diri kepada informan/responden. Ada pepatah yang mengatakan bahwa "Tak kenal maka tak sayang".

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Hal tersebut mengandung makna apabila kita tidak mengenal seseorang, kita tidak memiliki perhatian kepada orang tersebut. Bagi Fivi, pepatah tak kenal maka tak sayang ini memiliki dua mata pisau. Satu sisi pepatah tersebut mengajarkannya untuk berusaha dan mencoba menjadi manusia yang bersosialisasi, mengenal orang lain, dan berinteraksi hingga bekerja sama. Sisi ini adalah sisi manusiawi, yaitu mengenai rasa humanisme seorang manusia terhadap manusia lainnya. Apabila antara pendata dan responden sudah saling kenal maka komunikasi akan terbangun sendirinya, sedangkan apabila pendata dan responden belum terjalin hubungan maka bagaimana mungkin responden akan mengeluarkan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, perkenalan akan memunculkan sebuah interaksi yang baik.

Proses wawancara sebagai bentuk interaksi dan kejujuran baik dari pendata yang menanyakan sesuai dengan isi instrumen serta memberikan tanda jawaban sesuai dengan apa yang disampaikan oleh responden. Relasi ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pendataan. Responden pun juga demikian. Untuk menjamin data berkualitas maka kejujuran responden dalam memberikan jawaban sesuai dengan kondisi yang dialami oleh responden tersebut adalah sebuah keniscayaan. Wawancara merupakan sebuah seni. Mengapa demikian? Karena dalam wawancara perlu ada inisiatif-inisiatif tertentu agar pokok pertanyaan dapat tersampaikan, dipahami, dan dimengerti dengan baik oleh responden. Teknik tersebut biasanya disebut dengan *probing*, yaitu teknik yang digunakan oleh pewawancara untuk merangsang pikiran responden sehingga dapat diperoleh informasi lebih banyak.

Dalam konteks ini, pewawancara harus mampu menjadi komunikatif, rileks, interaktif, akrab, dan kritis, tetapi tidak memojokkan responden dan tidak bernada interogasi. Apabila proses wawancara telah selesai, tentunya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Hal tersebut sebagai upaya bahwa pendata sudah mengambil sedikit waktu responden untuk menyempatkan diri diwawancarai, terlebih

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ketika responden pada umumnya sedang beraktivitas melakukan pekerjaannya. Inti pemaknaan pendataan Regsosek ini adalah rasa empati dari petugas pengumpul data kepada responden. Apabila responden memiliki permasalahan yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi, keadaan itu diharapkan dapat terinformasikan ke dalam instrumen yang ada. Harapannya, ada dampak penting dari implementasi kebijakan dan program pemerintah, baik daerah maupun pusat, untuk dapat segera menangani permasalahan tersebut.

Dalam soal pendataan di lapangan, PPL selalu menghadapi berbagai tantangan. Fivi mengisahkan tentang bagaimana sulitnya dan lamanya proses wawancara ketika responden kurang terbuka terhadap petugas. Salah satu contohnya, pertanyaan tentang pekerjaan utama dimana responden belum sepenuhnya mengetahui terkait pekerjaan utama dan aktivitas yang dilakukannya sendiri beserta lama waktu dalam bekerja. Menurut hasil wawancara dengan Fivi, pertanyaan tersebut meskipun terkesan mudah untuk disampaikan tetapi untuk memahamkan responden terkait konsep tersebut cukup sulit. Salah satu strategi yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang komprehensif adalah dengan cara menghitung waktu lama bekerja di setiap harinya.

Demikian juga, dengan pertanyaan terkait aset dan ternak yang dimiliki. Menurut Fivi, pertanyaan tersebut harus disampaikan secara hati-hati. Bagi beberapa orang responden, pertanyaan tentang aset dikira berhubungan pada upaya pemerintah untuk menarik pungutan pajak atas aset tersebut. Strategi yang dilakukan adalah dengan *probing* yang mengarah pada kepemilikan aset. Pendata mewawancarai responden dengan terlebih dahulu melihat kondisi yang sedang terjadi pada keluarga tersebut. Cara seperti ini juga dilakukan oleh Rian, sebagai salah satu Koseka di Kecamatan Tempe. Menurutnya, pendataan terkait asset juga harus dilakukan secara hati-hati karena hal itu berhubungan dengan tingkat kekayaan seseorang.

Bagi Rian, pendataan di wilayah perkotaan juga sama sulitnya dengan pendataan di desa. Tim PPL yang dikoordinatorinya sering kali melakukan wawancara di malam hari. Pilihan waktu ini dila-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kukan karena beberapa warga banyak yang bekerja sebagai pedagang sehingga ketika diwawancarai saat berdagang, informasi yang dibutuhkan sering kali tidak akan didapatkan. Saat itu, responden lebih konsentrasi terhadap barang dagangannya ataupun kepada konsumennya dibandingkan melayani PPL saat melakukan wawancara. Selama di lapangan, Fivi belum pernah mendapatkan penolakan.

Apa yang dilakukan oleh Fivi terhadap masyarakat tentu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh PPL yang secara kebetulan harus mewawancarai para pejabat di daerahnya. Dalam hal itu, strategi yang dilakukan adalah dengan menghadirkan Kepala BPS Kabupaten Wajo untuk turun bersama mendampingi PPL yang akan melakukan pendataan. Pilihan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap pejabat atau pemangku wilayah di Kabupaten Wajo. Salah satu contohnya, ketika seorang PPL mendata Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, di saat itulah Kepala BPS berupaya menjadwal terlebih dahulu waktu pendataan yang dimungkinkan bisa melibatkan kedua pejabat daerah tersebut. Strategi ini ditempuh agar pendataan yang dilakukan PPL dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang menggembirakan.

G. Bertahan Terhimpit Tradisi: *Life Story* Keluarga

Pencatatan atau pendataan bukanlah suatu aktivitas teknis tanpa jiwa. Di dalamnya sarat dengan berbagai pendekatan dan penghargaan terhadap responden yang menjadi subjek pencatatannya. Selain itu juga, sarat dengan upaya beserta tantangan dan kelelahan tanpa terkira dari para PPL untuk mengejar dan mendapatkan responden yang ditujunya sehingga mendapatkan data yang valid dan akurat. Masing-masing petugas pendataan tentu memiliki banyak pengalaman. Ada saatnya mereka menghadapi orang yang nyaman untuk menjawab semua pertanyaan yang ada, dan terkadang ada juga menemukan responden yang membuat emosi dan sulit menggali data yang ada. Kadang kala mereka menemukan responden yang enggan berbicara

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan bahkan "jutek" sehingga membuat proses pendataan mengalami kesulitan. Ragam suka dan duka pastinya ada, sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya.

Relasi kedua belah pihak, antara petugas pendataan dan responden, sesungguhnya adalah relasi atas dasar kepercayaan. Responden percaya bahwa data yang berhubungan dengan kehidupan personal dan keluarganya, yang seharusnya adalah sebuah privasi atau rahasia dan tertutup, ingin diberikan kepada orang lain yang bukan menjadi bagian dari lingkaran diri dan keluarganya. Mereka percaya bahwa data tersebut bersifat tertutup dan akan termanfaatkan dengan baik untuk kepentingan yang menyangkut diri, masyarakat, ataupun bangsanya. *Kerelaan berbagi data, sesungguhnya adalah partisipasi komunitas yang tidak ternilai harganya.*

Potret berbagi data ini menjadi sangat penting dalam program nasional Registrasi Sosial Ekonomi. Oleh karena itu, menelisik sosok-sosok individu atau suatu keluarga akan menjadi sangat menarik dalam mengungkap berbagai fenomena pada mata rantai kegiatan registrasi sosial ekonomi berskala nasional. Sebuah kasus tentu tidak akan bisa memberikan gambaran umum dari "kebaikan" atau "ketertutupan" ataupun "kemarahan" responden saat didata.

Adalah Supiyah, seorang ibu rumah tangga muda yang baru berumur 19 tahun. Profil wajah yang ditampakkan masih kanak-kanak. Sekalipun ada kantung mata yang menunjukkan kelelahan, ia tetap bersemangat dan memancarkan kegembiraan di dalamnya. Ia baru memiliki seorang bayi yang berumur 3 bulan setelah pernikahannya yang berselang 2 tahun sebelumnya. Artinya, ia menikah pada umur 17 tahun, atau bahkan kurang dari umur tersebut. Ia menyatakan bahwa ia menikah setelah tiga bulan lulus dari SMP. Supiyah sepertinya menjadi salah satu pelaku perkawinan muda sebagaimana umumnya yang terjadi di masyarakat Kabupaten Wajo (Gambar 4.7).

Setidaknya ada dua bukti yang memperkuat dugaan perkawinan muda ini. *Pertama*, ia dan keluarganya harus mengajukan permohonan dispensasi menikah ke Pengadilan Agama. Keadaan ini tentu karena salah satu pasangannya belum memenuhi persyaratan yang ada, khu-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Fatwa (2022)

Gambar 4.7 Supiyah, Ibu Rumah Tangga Perkawinan Muda

susnya pada soal umur berdasarkan UU yang ditetapkan. *Kedua*, ia harus melakukan KB suntik sebelum akad pernikahannya. Tujuannya, agar kehamilannya dapat direncanakan dengan baik, setidaknya saat Supiyah berada pada usia yang ideal untuk mengandung dan melahirkan. Terlebih ketika kedua orang tuanya sering kali menasihatinya agar segera memiliki "momongan" (bayi).

Kedua hal itu menunjukkan bahwa Supiyah diduga kuat menjadi pelaku dari tradisi perkawinan muda. Seandainya merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974, di mana usia minimal perempuan 16 tahun yang berlaku hingga tahun 2020, Supiyah sebenarnya masih di bawah usia tersebut. Terlebih ketika dihadapkan dengan UU No. 2 Tahun 2020 yang membuat standar minimal usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun, Supiyah tentu terkena delik hukum tersebut. Baik aturan tahun 1974 maupun 2020, Supiyah menjadi korban dari tradisi perkawinan yang berkembang di masyarakat.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Suami Supiyah saat pernikahan telah berumur 20 tahun sehingga ia dikategorikan tidak terlibat dalam perkawinan muda.

Saat itu, Supiyah memang tidak memiliki pilihan untuk tidak menerima permintaan orang tuanya agar segera menikah. Beberapa bulan sebelum tanggal perkawinan, Rohim, calon suaminya menyatakan niat untuk menikahi Supiyah. Hal ini pun disampaikan ke orang tuanya. Setelah itu, orang tua dari Rohim datang melamar Supiyah, dengan kesepakatan uang panai sebesar Rp25 juta di luar dari mas kawin dan bawaan lainnya. Waktu perkawinan pun disepakati. Rupanya, sekitar satu bulan sebelum perkawinan tersebut, ketika Rohim hendak meminta surat pengantar pernikahan dan mendaftarkan diri ke KUA, kepala desa berkeberatan untuk memberikannya. Hal ini terjadi karena usia Supiyah masih berada di bawah usia persyaratan perkawinan yang ditetapkan undang-undang. Meskipun demikian, kepala desa tetap memberikan pengantar ke KUA, dan pihak KUA lah yang akan memutuskan. Artinya, "bola liarnya" dibawa oleh KUA.

Senada dengan prinsip dasar "bola liar" dari kepala desa itu, KUA pun kemudian menolak dan menyampaikan saran agar pasangan tersebut mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama sekiranya akan tetap melakukan perkawinan. Namun, sebelum ke Pengadilan Agama, keduanya harus mendapatkan surat kelayakan dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Wajo, sebagai salah satu persyaratan permohonan pengajuan kasus dispensasi perkawinan mudanya. Saran itu ditindaklanjuti keduanya. Mereka mengajukan permohonan kelayakan pernikahan itu kepada Dinas Perlindungan Anak. Dengan terbitnya "Surat Kelayakan", walaupun isi di dalam surat itu juga banyak yang ditulis "Tidak Layak," Supiyah dan Rohim kemudian mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Sekitar dua minggu pengajuan, mereka kemudian disidangkan oleh Pengadilan Agama. Saat itu muncul pertanyaan terkait umur, keinginan, kesiapan, kesanggupan, dan pernyataan dukungan dari kedua belah pihak dalam rencana perkawinan mudanya. Sehubungan Rohim memang sudah berusia 20-an tahun, serta telah memiliki

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kesiapan lahir dan batin, dan ditambah bahwa Supiyah juga terlihat dewasa dan siap secara lahir dan batin, terlebih ketika ada dukungan besar dari kedua orang tua pasangan tersebut maka dispensasi nikah dari Pengadilan Agama pun dikeluarkan. Meskipun demikian, dalam keputusan itu terdapat satu syarat, yaitu agar Supiyah harus menunda kehamilan terlebih dahulu dengan mengikuti program Keluarga Berencana yang dianggap cocok dengan tubuhnya.

Berdasarkan rekomendasi Pengadilan Agama, Supiyah pun mengikuti persyaratan itu. Setelah itu, mereka mengajukan diri ke KUA, untuk mendapatkan kepastian jadwal pernikahan. Beberapa hari sebelum pernikahan, Supiyah pergi ke Puskesmas untuk mendapatkan program KB. Berdasarkan hasil pemeriksaan bidan, Supiyah mendapatkan program KB berupa alat kontrasepsi dalam bentuk suntik KB berjangka waktu tiga bulanan. Setelah itu, Supiyah dan Rohim pun menikah. Rohim sebenarnya adalah "keluarga" dari Supiyah. Nenek mereka adalah kakak beradik. Kedua nenek ini kemudian ikut suaminya masing-masing dan tinggal di dusun yang berbeda walaupun tetap pada satu desa yang sama. Nenek Rohim tinggal di pinggir jalan besar trans-Wajo-Bone. Di tanah nenek Rohim itulah mereka kemudian tinggal menetap. Orang tua Rohim berada di bagian depan atau *mangku* jalan, dan Rohim beserta Supiyah tinggal di rumah belakangnya. Sementara itu, nenek Supiyah tinggal di dalam kampung dan berdekatan dengan kebun-kebun mereka. Di sana orang tua Supiyah juga tinggal bersama dua saudara lainnya. Kedua pasangan ini benar-benar menikmati hidup dengan keadaan apa adanya. Suami bekerja sebagai petani yang mengelola sawah orang tuanya, dan istri menunggu dan mengurus rumah bersama bayinya.

Saat pendataan Regsosek, secara jujur Supiyah mengatakan bahwa setiap panen, suaminya mendapatkan sekitar 50 karung. Sebanyak 10 karung akan dibawa ke rumah, dan 40 karung selebihnya akan langsung dijual. Hasilnya, ia gunakan untuk (1) memperbaiki motor; (2) membayar utang pembajakan sawah; (3) pembelian pupuk; (4) penyediaan popok dan makanan tambahan bayi; (5) biaya hidup keseharian; dan (6) menabung dengan cara membelikan emas beberapa

Buku ini tidak diperjualbelikan.

gram. Tabungan ini menjadi sangat penting untuk dapat digunakan ketika dirinya atau suaminya membutuhkan uang di masa darurat. Sekalipun Supiyah terlihat masih kecil, namun ia memiliki pemikiran yang sangat dewasa. Ia mampu merencanakan keuangan keluarga demi pemenuhan kebutuhan keluarga dengan baik. Ia juga mengerti atas keadaan suami dan keluarganya.

Selain diri dan bayinya, di rumah tersebut ada nenek dari suaminya yang tidak lagi bisa beraktivitas apa pun. Ia hanya terbaring lemas di atas kasur. Supiyah dan adik iparnya berusaha mengurusi kehidupan neneknya, dari persoalan makan hingga kebersihan diri. Status kesehatannya pun ia ceritakan dengan baik saat Regsosek itu. Demikian juga dengan kepemilikan emasnya, ia ceritakan secara jujur. Ia mengakui bahwa dirinya memiliki emas sekitar 35 gram. Emas itu berasal dari mahar atau mas kawin yang diberikan suaminya, sebanyak 10 gram; pemberian ibunya sebanyak 5 gram; pemberian neneknya sebanyak 5 gram; pembelian emas untuk tabungan sendiri sebanyak 15 gram pasca-dua tahun menjalani rumah tangga dengan hasil tiga kali panen.

Sekalipun tingkat ekonomi pelaku perkawinan muda ini tidak tinggi, tetapi Supiyah dan Rohim telah menunjukkan komitmen kuat bahwa mereka dapat hidup secara mandiri dan tertata. Mereka dapat mengatur keuangan dengan baik. Mereka juga dapat mengurus bayinya dengan baik, tanpa campur tangan dari orang tuanya. Bahkan mereka juga mampu mengurus nenek yang tidak berdaya. Mereka juga memiliki kesadaran bahwa pernikahan muda menjadi solusi terbaik di tengah ketidakmampuan diri dan keluarganya dalam mengakses pendidikan. Sekolah itu bukan sekadar uang SPP atau uang gedung saja, melainkan di dalamnya juga ada tuntutan pembiayaan lain, misalnya ongkos kendaraan, uang saku, uang kegiatan, uang buku, dan biaya lainnya.

Perkawinan muda bagi Supiyah telah menyelamatkan dirinya dari pergaulan bebas yang beresiko sebagaimana yang banyak dialami oleh teman-temannya, mengurangi beban kehidupan keluarga karena bagaimanapun adiknya yang masih sekolah memerlukan biaya besar,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan dapat memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya terkait "tenaga baru" dalam pengelolaan sawah ataupun hadirnya sang cucu. Menurutnya, "hidup mau bagaimana lagi. Manusia lahir dan pasti akan mati. Di antara itu, pasti dia akan menikah. Kalau bagi yang mampu, wajar dapat menunda pernikahan. Mereka bisa sekolah dan kuliah tinggi. Akan tetapi, bagi kami yang tidak mampu dan kesulitan kerja di luar kampung, mau bagaimana lagi? Pernikahan, sekalipun pernikahan muda, sepanjang ada komitmen bersama dan adanya dukungan dari banyak pihak, adalah jalan baik dalam menjalani kehidupan" (Supiyah, 5 November 2022).

Supiyah adalah pelaku perkawinan muda yang dapat dianggap beruntung dalam bahtera rumah tangganya. Ia tidak mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ia mendapatkan perlakuan baik dari keluarga besarnya, baik dari suami maupun keluarganya. Ia pun mendapatkan jaminan kehidupan sosial yang memadai. Ia juga mendapatkan dukungan dari keluarga besar terkait pengasuhan bayinya, dan sekaligus segala sesuatu yang dianggap penting dalam bahtera rumah tangganya. Namun, tidak semua pelaku perkawinan muda seberuntung Supiyah. Ada tiga orang pasangan perkawinan muda yang merupakan tiga bersaudara yang tinggal di sebuah rumah yang sama, yaitu rumah orang tuanya di Desa Mappele Wajo. Rumah keluarga besar ini berada di wilayah yang tenggelam akibat pembangunan waduk di Wajo sebagaimana diceritakan sebelumnya.

Di dalam rumah orang tua yang bernama Selimin setidaknya ada tiga pasangan muda. *Pertama*, Seling (anak laki-laki nomor kelima, menikah di tahun 2018 dan saat itu berusia 16 tahun). Ia menikah dengan perempuan tetangganya yang saat itu berusia 15 tahun. Pasangan ini telah dikaruniai dua orang anak, yang berumur empat tahun dan dua tahun. *Kedua*, Husniyah, anak perempuan tengah, menikah di tahun 2020, dan saat menikah, ia masih berumur 16 tahun. Menikah dengan seorang supir truk yang bekerja di pertambangan Morowali Sulawesi Tengah. Dikaruniai satu orang anak berumur 1 tahun. *Ketiga*, Hasmah, anak perempuan terakhir, menikah pada usia 14 tahun dan mengadakan pesta pernikahan secara bersama dengan pernikahan kakak kandungnya (Husniyah) di tahun 2020. Hasmah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menikah dengan seorang pria tetangganya yang saat ini bekerja di Konawe, Sulawesi Tenggara. Pasangan muda ini telah dikaruniai satu orang anak berumur satu tahun. Ia baru enam bulan tinggal bersama di rumah orang tuanya, dan suaminya tetap berada di Kendari. Ia meninggalkan suami karena alasan kerepotan mengurus anak seorang diri.

Perkawinan muda tiga orang anak itu sebenarnya mengikuti jejak perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya dahulu. Saat itu, ayah mereka masih berusia 16 tahun, dan ibu mereka baru berusia 14 tahun. Mereka dijodohkan oleh orang tuanya dan harus ikut orang tuanya setelah pernikahan dilakukan. Saat berusia 15 tahun, sang ibu telah melahirkan anak pertamanya. Setiap satu atau dua tahun, sang ibu melahirkan anak-anaknya. Jumlah anaknya mencapai 9 orang, dan dalam perjalanannya, ada satu orang anak yang meninggal akibat sakit. Bagi ibunya, menikah muda adalah solusi ditengah keterbatasan orang tuanya dahulu. Saat itu, orang tuanya berada dalam kemiskinan, tetapi memiliki banyak anak. Ia hanya memiliki satu petak sawah garapan, dan setengah petak sawah milik. Secara ekonomi, keluarga tersebut tidak begitu mampu membiayai anak-anaknya ke sekolah. Ibunya Seling hanya bisa menempuh pendidikan hingga kelas 3 SD saja. Demikian juga saudara-saudaranya, banyak yang tidak lulus sekolah. Dalam kesehariannya, mereka hanya membantu orang tuanya di sawah, ladang, ataupun mencari ikan di danau. Keadaan ini terus terjadi hingga mereka berusia rata-rata 12 tahun.

Dengan mempertimbangkan banyak hal, khususnya ekonomi dan keamanan anak perempuan, mereka pun mengizinkan pernikahan dilakukan ketika ada orang yang datang melamar. Sepanjang orang itu bisa membayar *panai*, memberikan mahar yang wajar, dan bersedia bertanggung jawab mengurus anaknya maka lamaran pasti akan diterima. Kasus Seling sebagai anak laki-laki tentu berbeda dengan Husniyah dan Hasmah. Sebagai anak laki-laki, tentu orang tuanya yang menyiapkan *panai* untuk keluarga perempuannya. Uang *panai* ini disiapkan orang tua Seling dari beberapa kali hasil panen garapannya dan bekerja di luar dunia pertaniannya. Tambahan lainnya dari uang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sisa *panai* yang diberikan keluarga lain saat melamar kakak-kakak perempuan Seling. Adapun bagi Husniyah dan Hasmah maka kedua orang tua pihak laki-laki lah yang akan memberikan *panai* bagi orang tua Husniyah dan Hasmah. Artinya, pembiayaan pernikahan keduanya ditanggung oleh pihak laki-laki.

Sehubungan kemiskinan yang cukup ekstrem yang menerpa keluarga Selimin maka saat Husniyah yang berumur 16 tahun dilamar orang, dan saat Hasmah baru berusia 14 tahun telah memiliki pacar maka tanpa banyak pertimbangan keduanya pun dinikahkan secara bersama-sama dalam satu kali acara. Husniyah dan Hasmah didudukkan di pelaminan bersama pasangannya masing-masing, dan pesta pernikahan sederhana pun dilakukan dengan seadanya. Saat itu, nyaris keduanya tidak menghadirkan petugas KUA karena mereka juga tidak ingin ke Pengadilan Agama untuk urusan permohonan dispensasi nikah. Mereka lebih memilih menikah secara agama dan ber-KB terlebih dahulu. Hingga pada usia ke-18, di mana saat itu aturan masih berada pada persyaratan 17 tahun maka permohonan pernikahan secara negara pun dilakukan. Setelah permohonan itu disetujui, Hasmah hamil dan melahirkan anaknya (Gambar 4.8). Kelahiran anak pasca pengaktaan nikah itu telah "menyelamatkan" anaknya dari kesulitan pengakuan orang tuanya secara hukum. Artinya, anak Hasmah yang baru berumur tiga bulan ini berhak mendapatkan akta lahir dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena keduanya telah mengantongi akta nikah dari KUA.

Husniyah dan Hasmah berkata bahwa pernikahan muda memang penuh kelabilan, baik secara ekonomi, mental, dan fisik. Namun, sepanjang pasangan berusaha saling memahami, keadaan itu tidak akan membuahkan ancaman perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Namun, apabila keduanya tidak saling memahami, keadaannya akan terbalik, kekerasan dalam rumah tangga akan sering terjadi. Keadaan ini juga terjadi pada para tetangganya yang menikah muda dan sering kali ribut dengan persoalan sepele saja. Cara untuk memahami adalah bahwa dirinya "terselamatkan" oleh pasangannya dari beratnya kehidupan keluarganya. Ia akan berusaha

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menerima keadaan penghasilan suaminya ataupun omongan yang kurang mengenakkan bila ada sesuatu yang dianggap kurang. Pilihan ini menjadi pilihan paling bijak dibandingkan ia harus membanding-bandingkan dirinya dengan pasangan ideal secara ekonomi, umur, dan status sosial orang lain.

Foto: M. Alie (2022)

Gambar 4.8 Korban Perkawinan Muda

Saat pendataan Registrasi Sosial Ekonomi, tiga pasangan dan ditambah dengan pasangan orang tuanya itu berkumpul atau tinggal bersama-sama di satu rumah di atas air tersebut. Padahal rumah tersebut tidak memiliki kamar-kamar sehingga tidak ada ruang privasi yang memadai. Bagi Husniyah dan Hasmah, mereka memaklumi keadaan rumah orang tuanya. Mereka juga terpaksa tinggal di sana, terlebih ketika anak atau bayinya masih kecil dan membutuhkan pengasuhan dari orang tuanya. Seandainya suaminya datang dari Morowali maka Husniyah akan berusaha melayani suaminya dengan baik. Ia akan berusaha memasang kelambu atau kain memutar pada bidang tertentu sehingga ada ruang privasi untuk mereka berdua. Demikian juga dengan Hasmah, ketika suaminya datang dari Konawe. Ia pun akan berusaha melayani suaminya dengan baik. Ia akan mengambil ruas

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dari rumah tersebut, dan memasanginya dengan kelambu ataupun kain yang dilingkarkan.

Keadaan rumah yang tidak menyediakan ruang privasi bagi anak-anaknya yang sudah berumah tangga ini merupakan fenomena umum bagi keluarga-keluarga miskin. Oleh karena itulah, pendataan Regsosek pada keluarga-keluarga seperti ini harus berusaha menjaga perasaan mereka. Para pendata tidak sembarang menanyakan sesuatu yang sifatnya terlalu vulgar, sebagaimana pertanyaan terkait kepemilikan emas, lahan dan ternak, serta kepemilikan akta pernikahan, akta kelahiran, dan dokumen lainnya. Empati dari para pendata Regsosek sering kali diwujudkan dengan penyampaian pertanyaan secara hati-hati tanpa menyinggung perasaan mereka. Bahkan, para pendata sering kali membiarkan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang dianggap sensitif dan mempertanyakan keadaan hidup, sampai mereka sendiri lah yang menyatakan jawaban, pandangan, persepsi, dan lainnya. Ketika hal itu dilakukan oleh mereka sebagai responden, tugas pendata Regsosek akan sangat mudah dan tidak terbebani oleh perasaan kesedihan, keprihatinan, ataupun ketidaknyamanan.

Cerita hidup keluarga yang dicatat dalam program Regsosek ini sengaja ditampilkan dalam bagian tulisan untuk memberikan gambaran tentang kerumitan pendataan ketika berhadapan pada kasus-kasus sebagaimana yang dialami oleh Supiyah, Husniyah, Hasmah, Seling, dan Selimin. Apa yang terjadi pada keluarga-keluarga tersebut tentu diwarnai oleh aspek kemiskinan ekstrem, fenomena pernikahan muda, keterbatasan akses, kurangnya pendidikan, kegagalan pembangunan nasional, *mindset* dan cara pandang orang dalam menghadapi keadaan sekitar ataupun menyiasati situasi kedaruratannya, dan lain sebagainya. Artinya, seorang pendata Regsosek bukan sekadar memburu angka-angka yang dinyatakan oleh seseorang atau keluarga yang didata, tetapi juga berupaya membangun kepercayaan orang lain terhadap dirinya, agar angka-angka yang valid dan akurat, atau setidaknya mendekati kebenaran, yang didapatinya. Upaya *rapport* dan membangun kepercayaan dalam waktu yang sangat singkat adalah kelebihan dan menjadi tantangan tersendiri bagi para

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PPL pada program nasional Registrasi Sosial Ekonomi BPS tahun 2022 ini.

H. Mengikat Tugas dalam Kepentingan Negara: Penutup

Registrasi Sosial Ekonomi adalah mandat negara yang diberikan kepada BPS untuk mendapatkan data tingkat kualitas kehidupan masyarakat Indonesia yang kemudian akan menjadi kontribusi terhadap skema kebijakan dan program perlindungan sosial. Sebagai sebuah mandat yang di dalamnya terdapat penggunaan dana publik, BPS menskenariokan kegiatan tersebut dengan baik dan tepat. Penguatan substansi dan teknis dilakukan secara bersamaan, dan hasilnya ditransmisikan, disosialisasikan, dan didistribusikan secara vertikal ke BPS tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Penetapan sistem kendali mutu dilakukan dengan cara penyebaran dan sosialisasi standar operasional ataupun panduan yang memadai pada semua lini kelembagaan yang dimilikinya.

Dalam melaksanakan mandat nasional ini, BPS tidak melakukannya hanya untuk kalangan internalnya sendiri. Hal ini dikarenakan Regsosek berskala nasional dan penggunaan metodenya adalah sensus dengan memperhatikan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) berbasiskan keluarga atau rumah tangga maka mandat itu serta merta tidak hanya menjadi tugas BPS secara organik. BPS mau tidak mau harus melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Proses rekrutmen para petugas, pemeriksa data, dan input data adalah skenario "partisipasi komunitas berbayar". Pasca-rekrutmen petugas yang berkomitmen dan bertanggung jawab, pelatihan pendataan dilakukan untuk menyamakan persepsi, teknik, dan target tujuan yang ditetapkan. Meskipun demikian, peningkatan kualitas para petugas pendata Regsosek tidak akan berarti apa-apa ketika masyarakat sebagai "subjek pendataan" tidak mau berbagi informasi. Di dalamnya ada tuntutan "partisipasi komunitas yang tidak berbayar" dari masyarakat yang tidak kalah sulitnya untuk didapatkan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sosialisasi dan peningkatan kesadaran akan pentingnya data menjadi bagian dari strateginya. Melalui jejaring perangkat pemerintah dari tingkat provinsi hingga desa, upaya ini harus dilakukan secara maksimal. Hal lainnya, kelembagaan sosial tradisi pun sebenarnya dapat berfungsi untuk mendukung sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat itu. Sayangnya, kelembagaan formal dan informal ini sering kali mengalami disfungsi karena dilingkupi dengan rasa khawatir atas "pertanggungjawaban pendataan" yang berhubungan langsung dengan program bantuan dari pemerintah. Mereka takut menjadi "orang yang dipersalahkan" ketika ada tuntutan dari masyarakat yang salah paham atas pendataan dan termasuk saat pembagian bantuan di masa berikutnya. Kelembagaan sosial tradisi yang seharusnya aktif dan menguatkan kesadaran lebih memilih untuk "diam dan menjaga jarak", sama pilihannya dengan para perangkat desa untuk tidak ikut serta dalam proses sosialisasi.

Kenyataan inilah yang menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program Regsosek di Kabupaten Wajo, selain tantangan substansi yang melekat pada persoalan hidup masyarakatnya sendiri. Kemiskinan ekstrem, dampak pembangunan, dan perkawinan muda merupakan tiga problema akut yang menghantui kehidupan masyarakat Wajo. Tiga aspek ini pula yang menjadi "batas-batas" yang harus dijaga ketika proses pendataan dilakukan. Kesalahan menanyakan sesuatu yang berada pada tiga aspek itu, sama saja menghadirkan ketidakpercayaan, ketidaknyamanan, dan ketidakakuratan data yang diperoleh. Membawa alam kesadaran subjek masyarakat yang dicatat dalam pendataan dengan diiringi keikhlasan berbagi informasi yang akurat dan valid pada akhirnya menjadi tantangan tersendiri. Tantangan ini sebagian besarnya telah mampu diatasi oleh para Petugas Pendataan Lapangan (PPL), para Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML), dan termasuk Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka) yang merupakan organik dari BPS di Kabupaten Wajo. Dalam rangkaian pelaksanaan Regsosek, BPS Kabupaten Wajo telah membuktikan dirinya sebagai pelaksana mandat negara yang baik dan bertanggungjawab. Proses pelaksanaannya pun menjadi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

suatu pelajaran yang baik bagi kelembagaan negara lainnya dalam mengoordinasikan suatu kegiatan berskala nasional.

Daftar Pustaka

BPS Kabupaten Wajo. (2022). *Kabupaten Wajo dalam angka tahun 2022*. BPS Kabupaten Wajo.

BPS Provinsi Sulawesi Selatan. (2023). *Sulawesi Selatan dalam angka tahun 2023.* BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. (2022). *Buku 3 Pedoman Pendataan Lapangan Registrasi Sosial Ekonomi 2022*. Badan Pusat Statistik.

Aranda, J. P. (2022) Taming the Infallible People: Sensus Fidei, Democracy, and Populism, Political Theology. *Political Theology*. https://doi.org/10.1080/1462317X.2022.2157578

Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo. (2022). *Data Penikahan Usia Dini Kabupaten Wajo*. Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo.

Peta Tematik Indonesia. (t.t.). [Administrasi Kabupaten Wajo]. Diakses pada 11 Maret, 2023, dari peta kab wajo - Google Search

Saleh, N. S., Rosli, M.S., Syamsuri, A. S. (2022). Budaya masyarakat Bugis dalam aspek perkahwinan, komunikasi dan makanan warisan. *Kajian Malaysia, 40*(2), 227–253. https://doi.org/10.21315/km2022.40.2.10

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

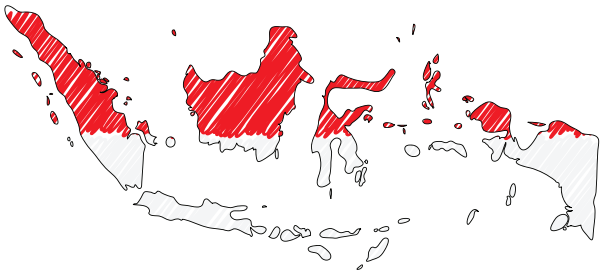

5

Narasi Emik Proses Regsosek di Provinsi Gorontalo

Sahajuddin & Risyanto

A. Membuka Tabir Lama Daerah Pemekaran: Pengantar

Kebutuhan satu data (Data Terpadu) untuk implementasi program-program perlindungan sosial secara nasional tentu sangat penting, mendesak, dan menjadi keharusan. Dilatarbelakangi oleh masih terjadinya tumpang tindih antarprogram perlindungan sosial, BPS RI mendapatkan mandat melaksanakan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). *Output* dari kegiatan Regsosek diharapkan mampu menjadi basis data (rujukan) untuk implementasi program-program perlindungan sosial ke depannya yang lebih tepat sasaran.

Program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat sudah sering kita dengar dan ketahui melalui berbagai macam media. Implementasi dari kedua program intervensi pemerintah itu

Sahajuddin & Risyanto
Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: saha004@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Sahajuddin & Risyanto. (2023). Narasi emik proses regsosek di Provinsi Gorontalo. Dalam M. A. Humaedi., D. K. Imron, & A. Pramono (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 1 Indonesia Tengah-Timur* (165–213). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.775.c698 ISBN: 978-623-8052-94-3 E-ISBN: 978-623-8052-98-1

Buku ini tidak diperjualbelikan.

juga sering didengar informasinya, baik informasi keberhasilannya maupun informasi kegagalannya, baik di tingkat pusat secara nasional maupun di tingkat lokal di daerah yang memiliki kerentanan sosial ekonomi dan *subsistensi* kemiskinan. Sementara itu, kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat terhitung sangat banyak.

> Program intervensi dari berbagai kementerian dan lembaga sama-sama mengeklaim dirinya bahwa lembaganya cukup berhasil dalam program tersebut. Tetapi mereka tidak sadar bahwa program itu secara tidak langsung menciptakan ego sektoral yang selama ini akut. Sama-sama melakukan pendataan, sama-sama melakukan intervensi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat sehingga terjadi tumpang tindih kebijakan program intervensi dan tumpang tindih penggunaan anggaran negara. Menurut salah seorang yang sempat diwawancarai, pelaksanaan pendataan atau pencacahan penduduk seluruh Indonesia bisa menghabiskan uang negara hingga triliunan rupiah (Wawancara dengan Kepala BPS Kab. Gorontalo, 2 November 2022).

Jika ada beberapa kementerian dan lembaga melakukan hal yang sama, berapa triliun uang negara habis hanya untuk pendataan saja? Akibatnya, hampir setiap tahun program-program intervensi ini mendapat kritikan dari berbagai pihak karena dianggap banyak yang tidak tepat sasaran. Kemudian, muncul ide Regsosek yang bertujuan untuk membangun data sosial ekonomi tunggal atau Satu Data. Dengan menggunakan data tunggal, pemerintah melalui kementerian dan lembaganya dapat melaksanakan berbagai program secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Ide ini adalah ide yang luar biasa. Namun, muncul pertanyaan lainnya, ide ini muncul apakah bukan ide sektoral dan bukan sekadar pencacahan belaka untuk mengucurkan anggaran negara hingga puluhan triliun?

Pada tahun 2023 dilakukan integrasi pengolahan dan pemeringkatan pendataan, pemanfaatan data oleh pemda, integrasi data

Buku ini tidak diperjualbelikan.

lintas sektor secara bertahap, dan pembaruan data melalui Digital Monografi Desa/Kelurahan. Dengan demikian, akan segera terwujud stabilitas sistem pada tahun 2024 untuk terbentuknya pusat data nasional, terbangunnya mekanisme kontrol kualitas dan penargetan, serta aktivitas *monitoring* dan evaluasi yang terintegrasi. Hasil Regsosek akan menyajikan peringkat kesejahteraan tiap penduduk. Pengelolaan data hasil Regsosek dilakukan dengan prinsip integritas dan interoperabilitas sehingga hasilnya diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh para pengambil kebijakan (Hasil olahan data wawancara kepada Kepala BPS Provinsi Gorontalo dan Kepala BPS Kabupaten Gorontalo, serta data *online* BPS, dan data *online* Antara Gorontalo, 2022).

Foto: Sahajuddin, 2022

Gambar 5.1 Wawancara dengan Kepala BPS Provinsi Gorontalo

Pendataan Regsosek di Provinsi Gorontalo, pada umumnya, dan Kabupaten Gorontalo, pada khususnya, dilihat dari dukungan pemerintah dan masyarakat; dilihat dari cerita emik keunikan salah satu desa yang menjadi sasaran Regsosek; cerita dan pengalaman para petugas lapangan Regsosek; dan kisah salah satu keluarga yang berhasil didata dalam kegiatan Regsosek. BPS RI bekerja sama dengan BRIN mencoba melihat dari sisi lain kegiatan awal pendataan Regsosek. Kegiatan ini dilaksanakan di 16 provinsi, dengan maksud mendokumentasikan kegiatan Regsosek (proses dan dinamika di lapangan) dalam bentuk narasi emik.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Sahajuddin, 2022

Gambar 5.2 Wawancara dengan Kepala BPS Kabupaten Gorontalo

B. Bentang Alam Tersulit, Tanpa Menyerah

Provinsi Gorontalo dengan lima kabupaten dan satu kota adalah provinsi pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara. Gorontalo adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi. Provinsi Gorontalo lahir pada tanggal 5 Desember 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000. Kota Gorontalo ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo, sekaligus menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, dan pusat perdagangan terbesar di kawasan Teluk Tomini. Adapun jumlah penduduk Provinsi Gorontalo sebanyak 1.171.681 jiwa (BPS, 2020), dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,16% setiap tahunnya.

Pada awalnya, daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut *Pohala'a*. Menurut Haga (1931), di daerah Gorontalo ada lima *Pohala'a*. Apabila dilihat dari struktur fisik orang Gorontalo, suku Gorontalo termasuk ke dalam ras mongoloid, hanya saja mungkin sejak beberapa abad yang lalu telah terjadi percampuran ras dengan bangsa-bangsa lain. Provinsi Gorontalo dihuni oleh ragam etnis yang berbentuk *Pohala'a* (Keluarga), di antaranya *Pohala'a* Gorontalo (etnis Hulontalo), *Pohala'a* Suwawa (etnis Suwawa/Tuwawa), *Pohala'a*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Limboto (etnis Limutu), *Pohala'a* Bolango (etnis Bulango/Bolango) dan *Pohala'a* Atinggola (etnis Atinggola).

Jika Aceh memiliki julukan kota Serambi Mekkah, Provinsi Gorontalo memiliki julukan Serambi Madina. Julukan tersebut terkait dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Gorontalo. Sebutan Gorontalo sebagai Kota Serambi Madinah tidak lain karena sebagian besar masyarakat di Provinsi Gorontalo memeluk agama Islam. Nilai-nilai keislaman juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat serta budaya setempat. Kearifan lokal nilai-nilai itu telah tertanam sejak zaman kerajaan. Dilansir dari karya ilmiah "Islam, Budaya, dan Lokalitas Gorontalo", karya Basri Amin, disebutkan bahwa Raja Amai (1523–1550) adalah peletak dasar Islam di Gorontalo.

Menteri LHK, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc, menyebutkan beberapa catatan penting tentang posisi strategis Gorontalo dalam basis sumber daya alam dan mempertegas langkah dalam konservasi alam (Biro Humas KLHK, 2016). Beliau mengatakan, Gorontalo adalah contoh sebuah negeri maritim dan agraris yang bertemu dalam satu ruang. Daerah ini juga menjadi rumah bagi jantung keanekaragaman hayati serta menyimpan cadangan air tanah yang luar biasa besar.

Beberapa kondisi terlihat akibat perubahan iklim, seperti berkurangnya wilayah daratan, rusaknya ekosistem pesisir akibat gelombang pasang, dan berkurangnya areal persawahan dataran rendah di dekat pantai. Semuanya akan berdampak pada hilangnya mata pencaharian dan ketahanan pangan.

Menteri Siti juga menegaskan perwujudan Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi. Terdapat beberapa areal konservasi, seperti Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohuto, Cagar Alam Panua, dan Cagar Alam Tanjung Panjang. Selain itu ada Cagar Alam Mas Popaya Raja dan Cagar Alam Tangale. ''Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi. Pembangunan dan konservasi bisa berdampingan untuk keperluan generasi akan datang," ujarnya. Dengan pendekatan konservasi guna menjaga kekayaan alam,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Gorontalo diproyeksikan akan maju pada sektor pariwisata, energi, dan pelestarian budaya.

Menurunkan pengetahuan dan wawasan seperti ini, kata Menteri Siti, sangat perlu dari generasi ke generasi. Tujuannya agar terpelihara komponen dan interaksi pembentuk bentang alam, pembentuk ekosistem. ‘’Manusia menjadi bagian penting dalam proses pembentukan bentang alam atau sebagai *land forming factors*,” katanya.

Sumber: Google Maps (2022)

Gambar 5.3 Peta Wilayah Provinsi Gorontalo

Desa Pinogu secara administratif masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Luas wilayah Kecamatan Pinogu 406,78 km^2 yang terbagi ke dalam lima desa, yaitu Pinogu Induk, Bangiyo, Pinogu Permai, Dataran Hijau, dan Tilongkabila. Masyarakat Pinogu hidup secara sederhana dan jauh dari kota. Akses ke Desa Pinogu yang terbilang sulit, dapat ditempuh dengan berjalan kaki melewati kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) selama lebih kurang 10 jam atau menggunakan kendaraan bermotor dengan jarak tempuh sekitar 40 km dari Desa Tulabolo.

Isdomo Yuliantoro, salah satu peneliti sosiologi kehutanan di Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Manado, dalam penelitiannya di tahun 2020 menyebutkan bahwa masyarakat Pinogu sebagian besar menggantungkan hidup

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sumber: Arini & Yuliantoro (2019)

Gambar 5.4 Bentang Alam Desa Pinogu Kabupaten Bone Bolango

dari pertanian dan pengolahan hasil hutan. "Keterbatasan akses terhadap dunia luar menjadi alasan kuat mengapa masyarakat Pinogu memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya hutan," ujar Isdomo. Bentang alam Desa Pinogu terdiri dari bentangan lahan dengan pepohonan dan ruang terbuka hijau terlihat pada Gambar 5.4. Meskipun Desa Pinogu tergolong daerah sulit, pendataan awal Regsosek tetap dilaksanakan. Bagi pendata Regsosek, mendata di daerah sulit adalah bagian dari tugas sekaligus tantangan tersendiri, serta menorehkan pengalaman yang tidak terlupakan.

C. Proses Kegiatan Regsosek dan Dukungan Pemerintah di Gorontalo

Berdasarkan data Kominfotik Gorontalo (Kominfotik, 2022), pendataan awal Regsosek di Gorontalo dilakukan secara serentak di 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Di Gorontalo sendiri pendataannya dimulai dari Penjabat Gubernur, Hamka Hendra Noer. Testimoni penjabat gubernur ini menyampaikan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2022 pagi, beliau kedatangan petugas pendata Regsosek yang didampingi langsung oleh Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Mukhamad Mukhanif. Beliau mengimbau agar masyarakat menerima kedatangan petugas dan memberikan data yang valid sebab pendataan Regsosek

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sangat penting untuk menjadi dasar dalam perencanaan program kegiatan pembangunan. Kemudian di tempat yang sama, Kepala BPS Provinsi Gorontalo menimpali pernyataan dan imbauan Gubernur Gorontalo yang mengatakan bahwa BPS Provinsi Gorontalo telah menyiapkan 2.110 petugas yang disebar di kabupaten/kota untuk mendata 379.442 keluarga. Ia berharap imbauan gubernur dapat terwujud dalam masyarakat, dan Kepala BPS juga dapat mengajak petugas untuk menjaga kualitas data.

Selain dukungan dan imbauan dari Gubernur Gorontalo, pendataan Regsosek juga mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan negara. Juga melalui surat edaran instruksi pemerintah kabupaten/kota ke berbagai instansi daerah, termasuk kepada seluruh camat dan kelurahan/desa yang ada di bawahnya. Kegiatan Regsosek BPS Gorontalo juga mendapat dukungan penuh dari Dinas Kominfo dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Gorontalo yang disampaikan pada rapat koordinasi media massa terkait Regsosek pada hari Selasa 11 Oktober 2022. Kemudian di tempat yang sama, Kepala BPS Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa Regsosek sebagai bagian dari transformasi data secara nasional diharapkan menjadi data tunggal yang lebih akurat untuk dimanfaatkan kementerian/lembaga mengintervensi berbagai program. Untuk itu, Kepala BPS berharap agar masyarakat menerima kedatangan petugas dengan baik dan paling penting memberikan jawaban yang benar. Membantu petugas berarti kita sudah membantu mencatat Indonesia. Kepala BPS menambahkan bahwa khusus di Provinsi Gorontalo data estimasi awal ada 379.442 keluarga yang akan disensus. Tersebar di enam kabupaten/kota, 77 kecamatan, dan 734 desa/kelurahan. BPS Gorontalo menyiapkan 2.110 petugas terdiri dari 1.601 petugas lapangan, 418 petugas pemeriksa lapangan, 91 koordinator sensus kecamatan serta 52 instruktur (Kominfotik, 2022)

BPS Gorontalo juga melakukan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo. Seiring dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo dan BPS Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tentang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi petugas pendataan aregsosek tahun 2022 dilaksanakan pada 3 Oktober 2022.

Regsosek BPS terlaksana dengan lancar didukung adanya kerja sama dan koordinasi para pihak. Lalu bagaimana proses pelaksanaan Regsosek di tingkat BPS kabupaten? Untuk kegiatan Regsosek tingkat kabupaten, peneliti memilih salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo, yaitu BPS Kabupaten Gorontalo. Kegiatan Regsosek BPS di kabupaten ini diarahkan pada narasi pelaksanaan Regsosek menurut pandangan BPS, mulai dari kerja sama dan koordinasinya kepada berbagai pihak, juga proses pelaksanaannya yang melibatkan ratusan mitra dalam proses pendataan.

Proses Regsosek itu dianggap menarik jika disorot proses keterlibatannya. Progres pendataan Regsosek BPS Kabupaten Gorontalo per 31 Oktober 2022 sudah mencapai 50% dan tercatat sebagai BPS kabupaten yang paling tinggi tingkat persentase capaian pendataannya. Jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo paling tinggi tercatat di Provinsi Gorontalo. Kabupaten lain hanya berjumlah 1/3 penduduk Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan data sebelumnya, tercatat 125.000 lebih kepala keluarga (KK), jadi ada kemungkinan bertambah sekian persen, sementara kabupaten lain hanya sekitar 50.000 yang paling tinggi KK-nya.

Kepala BPS Provinsi Gorontalo menjelaskan jalannya proses sosialisasi Regsosek. Berbagai masukan dari pemerintah daerah disampaikan Kepala BPS Provinsi Gorontalo kepada tim BRIN (Gambar 5.5). Respons masyarakat pada saat pelaksanaan Regsosek selama setengah bulan ini sangat bagus. Kalaupun ada satu atau dua orang KK yang protes, itu merupakan hal yang biasa dalam kehidupan bermasyarakat dengan berbagai macam karakter dan etnis. Namun, sampai saat ini di Kabupaten Gorontalo belum ada yang protes karena pendataan yang dilakukan oleh BPS. Masyarakat sudah tahu karena BPS sudah sering melakukan pendataan dan sensus. Jadi, kalau ada pendata yang datang ke rumah penduduk dengan mengatasnamakan BPS biasanya tidak dipersulit karena sudah saling mengenal.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sumber: Humas BPS Provinsi Gorontalo (2022)

Gambar 5.5 Kepala BPS Provinsi Gorontalo menerangkan proses sosialisasi Regsosek kepada Penjabat Gubernur Gorontalo.

Pendataan Regsosek juga dilaksanakan kepada Gubernur Gorontalo. Gambaran ini menjadi contoh dan bentuk sosialisasi bagi masyarakat umum (Gambar 5.6). BPS dipandang sudah sering melakukan pendataan sehingga terbangun koordinasi antara BPS dan pemerintah setempat, mulai dari pejabat kabupaten dan lintas dinas, hingga koordinasinya di tingkat desa dan dusun-dusunnya. Sebelum para petugas melakukan pendataan, biasanya dilakukan verifikasi terlebih dahulu, kemudian sehari sebelum turun lapangan dilakukan koordinasi kepada desa dan kepala-kepala dusunnya. Pada tingkat pemerintah atau pejabat bupati, juga ada surat edaran yang ditujukan kepada semua dinas-dinas terkait, camat, lurah/desa hingga sampai kepada kepala-kepala dusun. Bahkan terdapat testimoni para pejabat-pejabat tersebut terkait dukungannya terhadap kegiatan regsosek.

Bentuk sosialisasi terlihat pada ruang publik berupa spanduk di ruas jalan utama (Gambar 5.7). Salah satu kegiatan Regsosek adalah memfoto rumah dan bagian-bagiannya, tetapi tidak semua rumah yang difoto, hanya keluarga yang masuk kategori atau teridentifikasi miskin atau miskin sekali. Hal ini ditetapkan berdasarkan SOP yang sudah ada. Walaupun suatu keluarga berdasarkan SOP teridentifikasi miskin atau sangat miskin, hal ini dapat berubah karena akan ada Forum Konsultasi Publik (FKP). FKP ini sebagai bentuk pengujian

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sumber: Humas BPS Provinsi Gorontalo (2022)

Gambar 5.6 Pendataan Awal Regsosek dengan Penjabat Gubernur Gorontalo

Foto: Sahajuddin (2022)

Gambar 5.7 Sosialisasi dan Dukungan Regsosek 2022

hasil pendataan berdasarkan peringkat sementara yang teridentifikasi miskin atau sangat miskin. Di forum itu akan dilakukan pembuktian, apalagi dalam pelaksanaannya dilakukan per desa pada tiap kecamatan dan kabupaten.

Setiap desa akan dipaparkan dan dihadiri langsung oleh kepala desa masing-masing dan disaksikan oleh tim verifikator sehingga

Buku ini tidak diperjualbelikan.

peringkat-peringkat itu terverifikasi. Apakah hasil kegiatan Regsosek dengan penentuan peringkatnya sesuai dengan kenyataan lapangan atau tidak. Dalam proses ini, pentingnya disediakan bukti fisik dan yang bersifat umum. Termasuk pembuktian masyarakat karena yang diundang termasuk tokoh-tokoh masyarakat. FKP rencananya akan dilaksanakan di awal tahun depan. Hasil FKP diolah dan dilakukan pemeringkatan. Artinya, bahwa semua isian dan pernyataan akan diverifikasi agar penetapan datanya makin valid dan dapat dipergunakan sebagai data tunggal untuk diintegrasikan kepada semua kementerian dan lembaga yang berkepentingan.

Foto: Sahajuddin (2022)

Gambar 5.8 Salah Satu Kondisi Rumah Responden Regsosek 2022

Foto: Sahajuddin (2022)

Gambar 5.9 Salah satu kegiatan Regsosek adalah memfoto rumah dan bagian rumah.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PPL melaksanakan SOP pendataan dengan mengambil foto rumah warga terdata (Gambar 5.8). Hasil gambaran di sekitar rumah didapatkan dengan izin pemilik rumah (Gambar 5.9). Beberapa warga ada pula yang tidak bersedia difoto rumahnya karena dipandang sensitif. Tindak lanjut pendataanakan di cek kembali melalui kegiatan FKP. FKP menjadi pendekatan untuk melakukan pemeringkatan kesejahteraan. BPS menyediakan data, sedangkan kegiatan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat akan diintervensi oleh kementerian dan lembaga yang berkepentingan. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi berdasarkan program intervensi pemerintah selama ini kaitannya dengan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat akan terpolarisasi antara yang mendapat bantuan dan yang mendapat pemberdayaan. Jika ada anggota masyarakat yang tidak jujur menyampaikan data keluarga dan data usahanya, jangan salahkan pendata jika tidak mendapat bantuan dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan dan pemberdayaan sangat ditentukan oleh validitas datanya. Misalnya, ada beberapa keluarga dalam satu dusun yang memiliki sapi, tetapi ada di antara mereka yang tidak jujur dan mengatakan tidak punya sapi. Ketika pemerintah melakukan program intervensi pemberdayaan bagi pemilik sapi maka rugilah yang tidak jujur menyampaikan atas kepemilikan sapinya karena tidak dilibatkan dalam pemberdayaan. Di sinilah pentingnya Regsosek ini. Salah satu tujuannya adalah memperbarui data-data yang selama ini diragukan dan diperdebatkan. Bahkan ada desa-desa yang mengatakan bahwa datanya sudah diperbaharui. Namun, ketika ada bantuan yang datang, ternyata masih data-data yang lama. Hal itu terjadi karena perubahannya tidak sesuai dengan prosedur dan variabel-variabel yang tepat. Kegiatan Regsosek ini menjadi momen yang paling tepat untuk menyatukan data sebagai data tunggal yang dapat diintegrasikan kepada semua kementerian dan lembaga.

Kegiatan Regsosek ini didukung oleh pemerintah kabupaten melalui dinas-dinasnya dan camat-camat se-Kabupaten Gorontalo. Di tingkat kecamatan, BPS juga melakukan koordinasi, dan bahkan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

hampir semua kecamatan di Kabupaten Gorontalo melakukan seremonial *briefing* dengan petugas-petugas lapangan sebelum melakukan pendataan secara langsung kepada masyarakat. Pada kegiatan ini sekaligus dilakukan pelepasan semua petugas lapangan Regsosek di tingkat kecamatan oleh masing-masing camat. Kegiatan seremonial seperti itu sebenarnya tidak ada dalam SOP, tetapi inisiatif masing-masing BPS untuk melakukan kerja sama dan koordinasi di tingkat kecamatan. BPS Gorontalo memiliki 26 Koseka sehingga dibentuk juga 26 posko sebagai tempat untuk berkumpul, berdiskusi, koordinasi, dan menyelesaikan masalah jika menemukan persoalan di lapangan. Tujuannya, agar pelaksanaan Regsosek dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana dan tercapainya target data yang lengkap dan valid. Hal ini juga menandakan bahwa harapan masyarakat dan pemerintah setempat terhadap Regsosek cukup besar.

Proses pelepasan petugas dilakukan secara serempak oleh Kepala BPS Kabupaten Gorontalo (Gambar 5.10). Petugas pendata memperlihatkan antusiasme yang tinggi. Selain petugas pendata. Para petugas lapangan juga berkontribusi aktif menyosialisasikan pentingnya kegiatan Regsosek untuk kepentingan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Gambar 5.11). Antusias masyarakat juga terlihat dan menjadi petunjuk bahwa mereka menaruh harapan yang besar pada kegiatan ini. Regsosek bukan hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu, tetapi semua orang didata, mulai dari orang yang paling miskin sampai dengan orang yang paling kaya; dari pejabat, mulai dari presiden, sampai kepada rakyat biasa. Sebenarnya tidak ada paksaan kalau tidak mau didata, tetapi sebaiknya mau dan mendukung kegiatan Regsosek. Setidaknya membantu pemerintah dalam rangka perencanaan pembangunan. Bahkan, mereka akan menyesal sendiri jika tidak diikutsertakan saat ada bantuan dan pemberdayaan. Jadi, dengan keikutsertaan dalam pendataan secara lengkap, secara tidak langsung membantu pemerintah dan negara membangun masyarakat melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, untuk memperbaiki data yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat karena banyak yang salah sasaran bagi penerima bantuan (hasil wawancara dengan beberapa PPL, PML, dan Koseka).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Humas BPS Kabupaten Gorontalo (2022)

Gambar 5.10 Kepala BPS Kab. Gorontalo dan Camat Melepas Petugas

Foto: Sahajuddin (2022)

Gambar 5.11 Tim Regsosek Bersama Responden

Inisiatif dan trik-trik para petugas memang sangat diperlukan untuk memperoleh data yang valid. BPS juga selama ini telah bermitra dengan banyak petugas lapangan yang tersebar di berbagai kecamatan, kelurahan, dan desa-desa. Salah satu pendekatan BPS yang bersifat vertikal dan menyeluruh adalah pendekatan kekeluargaan dalam proses pendataan. Pendekatan ini menjadi salah satu bagian penting

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang dibekalkan kepada petugas lapangan pada saat pelatihan dan pembekalan (Kepala BPS Kabupaten Gorontalo, komunikasi pribadi, tanggal 2 November 2022).

Salah satu wujud pendekatan kekeluargaan BPS adalah rekrutmen petugas lapangan. Peraturan rekrutmen (mitra) petugas lapangan BPS di samping melalui mekanisme perekrutan terbuka, juga diperbolehkan rekrutmen atas rekomendasi dari pak lurah dan kepala desa. Koordinator Regsosek Kabupaten Gorontalo menyampaikan bahwa rekrutmen atas rekomendasi dari kepala desa dianggap penting karena yang direkomendasikan adalah orang-orang yang mengetahui banyak tentang sosial ekonomi masyarakat desa. Masyarakat yang mau didata tidak perlu disurvei lagi oleh petugas yang direkomendasikan kepala desa. Harapannya dengan petugas lapangan yang berasal dari daerahnya sendiri akan mempermudah kegiatan Regsosek karena adanya kedekatan emosional antara masyarakat dan pendata. Jika petugas pendatanya orang luar desa atau luar dusun, biasanya masyarakat ragu-ragu memberi informasi secara terbuka dan jujur. Jika tidak becus menjalankan tugas, pihak BPS tidak perlu repot menegur petugas yang bersangkutan secara langsung, tetapi cukup menelepon kepala desa dan melaporkan kinerja petugas lapangan yang kepala desa rekomendasikan.

Pentingnya melibatkan kepala desa dengan lurah karena dulu sering ada komplain dan menyalahkan BPS, antara lain tidak mengenal petugas BPS dan tidak pernah koordinasi. Dari pengalaman itulah, BPS melibatkan kepala desa dan lurah melalui pendekatan dan inisiatif masing-masing BPS. Bukan hanya sekadar melibatkan secara lisan, tetapi melalui surat yang ditandatangani oleh kepala desa dan lurah. Tanda tangan itu sekaligus menjawab dua persoalan, terkait dengan tidak mengenal petugas dan BPS tidak melakukan koordinasi. Menurut Kepala BPS, koordinasi selalu dilakukan, bisa saja kepala desanya mengatakan seperti itu karena kepala desa baru diangkat. Keterlibatan mereka sangat diperlukan bukan hanya sekadar kepentingan BPS, tetapi juga kepentingan desa dan kepala desanya sendiri. Lurah Kayubulan menceritakan bahwa proses sosialisasi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

telah dilakukan dengan menyertakan berbagai pihak (Gambar 5.12). Secara adat dan kultur lokal, melibatkan seseorang dalam kegiatan sosial secara tidak langsung membuat mereka merasa dihargai dan dihormati. Melibatkan kepala desa banyak manfaatnya, selain merasa dihargai dan dihormati, juga senang bisa terlibat karena apa yang dilakukan oleh BPS adalah tugas negara sehingga mereka sebagai abdi negara juga harus ikut bertanggung jawab.

Prioritas pertama adalah mitra yang ada di *database* BPS. Selanjutnya, kader-kader desa melalui rekomendasi masing masing kepala desa dan lurah. Dalam peta kebutuhan petugas, BPS sudah punya data awal bahwa di desa A, misalnya membutuhkan sekian PPL. Jumlah itulah yang disampaikan kepada kepala desa beserta tugas dan tanggung jawabnya. Proses rekrutmen ini memiliki aturan dan SOP dari pusat, tetapi BPS kabupaten/kota diberi hak, wewenang, dan inisiatif sendiri dalam proses rekrutmen tanpa harus menyalahi aturan yang ada.

Kabupaten Gorontalo membutuhkan 717 petugas, dengan perincian PPL 549 orang, PML 142 orang, dan Koseka 26 orang untuk menangani sekitar 400.000 kepala keluarga. Terdapat 19 kecamatan,

Foto: Sahajuddin (2022)

Gambar 5.12 Diskusi dengan Lurah Kayubulan Kec. Limboto

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tetapi pada kecamatan yang penduduknya sangat banyak akan disesuaikan dengan kebutuhan koordinatornya. Ada yang butuh satu koordinator, ada yang butuh dua, dan ada yang butuh tiga koordinator kecamatan atau Koseka. Sementara itu, pegawai organik BPS Kabupaten Gorontalo, termasuk Kepala BPS, hanya 25 orang dan yang bisa bertugas sebagai Koseka hanya 18 orang, berarti BPS butuh 8 orang Koseka lagi untuk memenuhi 26 orang tersebut. Oleh karena itu, Kepala BPS Kabupaten harus menyurat ke BPS provinsi meminta bantuan. Jika BPS provinsi hanya bisa memenuhi 5 orang, secara aturan bisa mengambil Koseka dari mitra yang dianggap senior dan tepercaya. Itulah sebabnya ada Koseka yang nonorganik BPS.

Setelah pendaftar calon petugas lapangan dinyatakan lulus untuk menjadi mitra BPS dalam kegiatan Regsosek, mereka di-*briefing* dan diberikan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab, termasuk hak-haknya. Namun, pemahaman baru sebatas penjelasan bersifat kisi-kisi atau bayangan tugas mereka masing-masing jika sudah menjadi mitra BPS (PPL, PML, dan Koseka mitra), termasuk dijelaskan mengenai honor, hak, dan kewajiban mereka. Jika setuju dengan substansi *briefing*-nya, mereka langsung tanda tangan kontrak. Kemudian, setelah tanda tangan kontrak, barulah dilakukan pelatihan selama 3 hari 2 malam. Di sini cukup menarik, para calon petugas lapangan disodorkan penandatanganan kontrak terlebih dahulu sebelum dilakukan pelatihan. Tujuannya adalah untuk mengikat mereka dalam satu tanggung jawab besar.

Hal itu dilakukan oleh BPS karena tugas dan tanggung jawab para petugas lapangan sangat menentukan atas keberhasilan kegiatan pencacahan. Tugas dan tanggung jawab besar itu, baru mereka ketahui secara gamblang pada saat pelatihan selama 3 hari tersebut. Jika dilakukan pelatihan terlebih dahulu baru tanda tangan kontrak, ditakutkan ada yang mengundurkan diri. Lagi pula, anggaran pelatihannya mengeluarkan dana yang besar sehingga sistem bisnis BPS tidak tercapai jika banyak yang mengundurkan diri. Syukurnya, selama ini belum pernah ada kasus calon mitra yang mengundurkan diri karena soal tugas dan tanggung jawabnya (Kepala BPS Kabupaten Gorontalo, komunikasi pribadi, tanggal 2 November 2022). Pernyataan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

di atas dilontarkan setelah di-*cross check* kepada para petugas mitra BPS, baik yang baru bermitra maupun yang sudah puluhan tahun bermitra dengan BPS. Tidak ada yang keberatan akan tugas dan tanggung jawabnya, apa lagi mau mengundurkan diri, itu tidak ada. Kalau *capek* dan lelah, itu sudah pasti, tetapi berbanding lurus dengan honor yang mereka peroleh sehingga mereka senang bermitra dengan BPS (Pendata Regsosek BPS, komunikasi pribadi, 6 November 2022).

Usaha dan upaya yang dilakukan oleh BPS untuk menyukseskan kegiatan Regsosek sudah maksimal terlihat dari upaya melintasi berbagai medan dalam perjalanan menuju lokasi rumah penduduk (Gambar 5.13). Berdasarkan pengamatan di lokasi, pada umumnya masyarakat tidak terlalu banyak yang tahu apa itu Regsosek, tetapi yang mereka hanya ingin mengetahui tujuan dilaksanakan pendataan, bukan pemahaman Regsoseknya. Petugas pun menjelaskan arti dan manfaat dari Regsosek dan keterkaitannya dengan kehidupan masyarakat yang terkait dengan kebijakan pembangunan (Gambar 5.14). Selain informasi pemahaman masyarakat terkait Regsosek, petugas pendata juga mengumpulkan data mengenai kondisi rumah warga (Gambar 5.15). Petugas pendata melaksanakan amanah untuk memotret kondisi sosial dan ekonomi warga hingga ke lokasi banjir (Gambar 5.16).

D. Sisi Lain Penelitian Regsosek di Provinsi Gorontalo Dilema Kemiskinan: Keunikan dan Keindahan Desa Torosiaje (Suku Bajo)

Berdasarkan data awal yang dimiliki peneliti, disebutkan bahwa Desa Torosiaje adalah desa unik dan indah atau desa wisata, tetapi hampir 80% penduduknya miskin. Pernyataan inilah sebagai alasan peneliti untuk menjadikan desa ini sebagai fokus desa yang ingin dielaborasi dalam pendataan Regsosek. Hal ini dianggap penting karena salah satu tujuan Regsosek adalah perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Jika sasaran perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada desa-desa yang dianggap miskin dan memiliki sumber daya alam dan potensi pengembangan ekonomi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Sahajuddin (2022)

Gambar 5.13 Petugas menuju lokasi keluarga pendataan awal Regsosek 2022.

Foto: Sahajuddin (2022)

Gambar 5.14 Petugas mewawancarai responden.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Sahajuddin (2022)

Gambar 5.15 Bagian Atap Rumah yang Difoto

Foto: Sahajuddin (2022)

Gambar 5.16 Pendataan pada Tempat Pengungsian akibat Banjir

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kreatif, Desa Torosiajelah yang dianggap tepat. Akhirnya kami pun sampai di Desa Torosiaje didampingi oleh Kepala BPS Kabupaten Pohuwato dan Koordinator Regsosek BPS Provinsi Gorontalo. Sampai di sana, kami disambut dengan Koseka, PML, PPL, dan mantan Kepala Desa Torosiaje. Di situlah ada perbincangan dengan mereka, termasuk anggota masyarakat Desa Torosiaje. Syukurlah kesan pertama cukup menyenangkan, terlebih masyarakat di sana ramah dan terbuka untuk diwawancarai, tidak eksklusif sebagaimana pemahaman tentang suku Bajo zaman lampau.

Tim pada awalnya hendak mengambil lokus desa di Kabupaten Gorontalo dan memilih etnis suku Polahi dengan berbagai keunikannya. Suku Polahi berada di perbatasan antara Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo. Perjalanan menuju suku Polahi sangat susah dan jauh jaraknya dengan tantangan alam yang luar biasa. Dari Kabupaten Gorontalo, untuk menuju ke sana, memerlukan waktu sekitar 4–5 jam naik kendaraan roda empat. Saat sampai di lokasi tujuan masih memerlukan waktu sekitar 2 jam jalan kaki karena akses jalan tidak memungkinkan untuk naik motor apa lagi mobil. Dalam rangka kegiatan Regsosek ini, beberapa anggota suku Polahi belum terdata, tetapi beberapa bulan yang lalu ada beberapa KK yang berhasil didata berdasarkan formulir K. Sekarang tetap diusahakan terdata melalui kepala dusun mereka yang berada pada bagian terluar wilayah suku Polahi. Pendekatan dengan suku Polahi sangat susah karena mereka tidak memiliki rumah, tetapi selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam hutan, bahkan kadang pindah hutan. Sementara itu, suku Anak Dalam (SAD) di Sumatra, tepatnya di Jambi, permukimannya masih mempergunakan tenda-tenda khusus sebagai tanda bahwa mereka tinggal di tempat itu. Oleh karena itu, ada jejak yang ditinggalkan saat mereka berpindah dari tempat itu. Namun, suku Polahi tidak ada jejaknya sehingga sangat susah dideteksi pergerakannya.

Suku Polahi sangat susah untuk ditemukan. Berdasarkan pengalaman orang, kalau kita ke sana belum tentu ketemu karena pergerakan nomadennya sangat cepat. Kalaupun berhasil dideteksi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

jejaknya dan berhasil ditemukan, ada dua kemungkinan yang akan dihadapi, pertama adalah orang suku Polahi akan lari sekencang-kencangnya untuk menghindari orang yang datang atau kedua adalah suku Polahi menyerang kita tanpa ampun. Oleh sebab itu, kita tidak bisa langsung menemui mereka, harus ada perantara yang sudah dikenal baik sebelumnya. Dengan tantangan seperti itu, akhirnya kami tidak memilih suku Polahi, tetapi memilih Desa Torosiaje (suku Bajo), walaupun lokasinya bukan terletak di Kabupaten Gorontalo, melainkan di Pohuwato.

Desa Torosiaje, dilihat dari letak geografisnya, merupakan permukiman di sekitar laut yang unik dan indah. Jalan masuk menuju desa ditandai dengan adanya gapura yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak berkunjung (Gambar 5.17). Jalan pada awalnya terlihat tanpa rumah-rumah penduduk, tetapi saat tiba ke lokasi dalam akan terlihat rumah khas warga desa yang unik. Unik karena semua rumah yang ada di desa ini terletak di atas perairan laut sebagai suku Bajo. Selain memiliki sejarah dan cerita yang unik, masyarakat suku Bajo juga tetap menjunjung tinggi adat istiadat sebagai warisan leluhur mereka. Seperti tradisi upacara pernikahan, kelahiran anak, ritual pengobatan tradisional, pantangan, dan mantra-mantra masih melekat dalam kehidupan masyarakat suku Bajo. Tradisi budaya dan kearifan lokalnya memiliki keunikan tersendiri. Walaupun mengalami perubahan yang cukup signifikan dari keunikannya yang eksklusif, kini tidak lagi se-eksklusif sejak awal keberadaannya di awal abad ke-20, tepatnya tahun 1901.

Asal-usul nama tempat atau toponimi Desa Torosiaje menurut *menti fact* yang berkembang dalam masyarakatnya atau cerita yang turun-temurun di sana disebutkan bahwa desa ini didirikan sekitar tahun 1901 oleh Pata Sompa. Kemudian, setelah kemerdekaan dan Pata Sompa sudah naik haji, sebutan nama Pata Sompa tidak lagi populer, tetapi yang populer panggilan haji-nya. Pata Sompa sebagai suku Bajo yang tinggal di perairan Torosiaje mendirikan permukiman walaupun hanya terdiri dari beberapa kepala keluarga. Lama kelamaan daerah itu makin ramai, orang-orang lalu-lalang dan menyeberang melalui

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Sahajuddin (2022)

Gambar 5.17 Gapura Menuju Desa Torosiaje, Kab. Pohuwato

pelabuhan tersebut. Orang yang selalu lalu-lalang atau menyeberang ke sana (Torosiaje) ketika ditanya mau ke mana, mereka bingung karena tidak tahu apa nama tempat itu. Mereka hanya mengingat seseorang yang terkenal di sana, yaitu haji dengan menyebut "Siaje". Sementara itu, nama tempat atau wilayah yang ditempati Pak Haji juga belum ada namanya. Namun, tempat itu berbentuk tanjung maka disebutlah tempatnya Pak Haji dengan "Toro" (nama lokal untuk menyebut tanjung). Dalam perkembangannnya, kalau orang yang lalu-lalang ke sana (ke tempatnya Pak Haji) ditanya, mau kemana? Mereka menjawab "mau ke Tanjung (toro) Haji (siaje)", akhirnya populerlah nama Torosiaje (Tanjung Haji). Untuk menuju Torosiaje yang dikenal dengan perumahan terapung,, warga perlu melewati jalan penyebrangan dan menaiki perahu (Gambar 5.18). Setelah tiba di perumahan terapung, akan terlihat lorong jalan dengan atap yang terbuat dari kayu (Gambar 5.19).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Sahajuddin (2022)

Gambar 5.18 Jalan Menuju Penyeberangan ke Perumahan Terapung

Foto: Sahajuddin (2022)

Gambar 5.19 Salah Satu Lorong di Perkampungan Torosiaje

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Penjelasan tersebut menunjukkan sisi keunikan Desa Torosiaje, walaupun masih bersifat umum. Sementara itu, sisi keindahan lingkungan lautnya seperti apa? Kebiasaan orang selama ini kalau ke laut atau ke pantai menyebut keindahan ketika sudah berada di lokasi. Di sana, suasananya berada dalam lingkungan rumah terapung dan strategis karena berada di Teluk Tomini ujung barat Provinsi Gorontalo. Panorama laut yang indah disajikan dengan *sunrise* dan *sunset*-nya, beserta hilir mudiknya perahu nelayan suku Bajo. Tentu indah dan menarik bagi para wisatawan dan incaran para penikmat fotografi. Itulah sebabnya Desa Torosiaje ditetapkan sebagai desa wisata oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pohuwato sejak 2007.

Dulu orang Bajo Torosiaje hidup di atas perahu dan melakukan segala aktivitasnya di atas perahu. Untuk menghindari teriknya matahari dan derasnya air hujan, orang suku Bajo Torosiaje mengatapi perahunya dengan daun kelapa dan rumbia. Penutup itu bersifat darurat karena terkadang dilepas dan kemudian dipasang kembali pada saat dibutuhkan. Hal itu (bongkar pasang) dilakukan karena kalau tetap dipasang, sementara berada di tengah laut dan tiba-tiba ada ombak besar dan angin kencang, perahunya bisa terbalik sehingga atapnya sering dibongkar pasang. Kebiasaan lain suku Bajo Torosiaje adalah menepi di pinggir pantai untuk melengkapi kebutuhan hidupnya, termasuk mencari sungai sumber air tawar untuk dikonsumsi. Menurut keterangan dari Pak Jek (mantan Kepala Desa Torosiaje), sampai saat ini masih ada sekitar 20 KK dari masyarakat Desa Torosiaje yang pergi ke sungai mengambil air.

Suku Bajo, sebelum mengenal uang, memiliki kebiasaan menepi dan naik ke darat untuk menukarkan atau melakukan barter antara ikan tangkapannya dan barang-barang kebutuhan pokok. Namun, lama-kelamaan orang suku Bajo yang ada di atas perairan Torosiaje makin kerasan dan merasa cocok berada di sekitar Torosiaje, akhirnya mereka tinggal dan menetap di sana.

Awalnya, mereka hanya tinggal di atas perahunya yang sudah diatapi. Lama-kelamaan perahu yang sudah diatapi ini tidak dipakai

Buku ini tidak diperjualbelikan.

lagi melaut, tetapi khusus untuk ditinggali. Oleh sebab itu, mereka terpaksa membuat perahu baru yang dipakai untuk mencari ikan dan beraktivitas. Sementara itu, perahu yang mereka tinggali diikat dengan sebatang kayu besar yang ditancapkan ke dasar laut agar perahu tidak terombang-ambing oleh tiupan angin. Perahu-perahu tempat tinggal seperti itulah yang kemudian hari dikenal oleh masyarakat luar sebagai rumah terapung karena memang terapung. Dalam perkembangannya, suku Bajo Torosiaje ini bukannya membuat perahu, tetapi malah membuat rumah ala Bajo di perairan Torosiaje, kira-kira 1 kilometer dari bibir pantai. Namun, dalam perkembangannya, jarak antara darat dan titik rumah terdekat Desa Torosiaje dan pantai menurut data yang ada tinggal 600 meter karena ada pengembangan permukiman.

Rumah yang mereka buat bukan lagi rumah terapung, melainkan rumah yang menyerupai rumah-rumah panggung etnis Gorontalo yang terbuat dari kayu. Akan tetapi, letaknya tetap di atas laut, bukan di pinggir pantai. Kekokohan rumah itu tergantung dari kekuatan tiang-tiang rumahnya yang ditanam di dalam dasar laut kira-kira sedalam 50 hingga 100 cm. Tergantung pula besar dan jenis kayunya serta banyaknya tiang-tiang yang mereka tanam untuk satu rumah. Rumah dengan ukuran 4 × 5 meter misalnya, minimal dibutuhkan 12 batang tiang. Rumah-rumah seperti itulah yang terwariskan sampai saat ini walaupun dari waktu ke waktu rumah suku Bajo Torosiaje selalu mengalami perubahan dari semua sisi dan bentuknya. Jadi, saat rumah asli suku Bajo Torosiaje sudah sangat susah ditemukan, bahkan atap yang dulunya terbuat dari daun sebagai salah satu ciri khasnya kini sudah tidak ditemukan lagi, sudah tergantikan dengan atap dari seng spandek.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Sahajuddin (2022)

Gambar 5.20 Nelayan dan Perumahan di Desa Torosiaje

Awal permukiman suku Bajo terdiri hanya dari beberapa keluarga, tetapi lama-kelamaan mereka beranak pinak dengan membentuk keluarga baru melalui pernikahan saudara sepupu. Alasan-alasan mereka sampai tinggal menetap di situ, selain alasan yang telah dijelaskan sebelumnya, juga karena keamanan di lingkungan laut dari segala gangguan dan ancaman. Kini masyarakat suku Bajo sudah mendiami tiga desa, dua desa di darat dan satu desa di laut, yaitu Desa Torosiaje. Desa Torosiaje sebagai desa laut menyuguhkan pemandangan warna biru laut (Gambar 5.20), kini penduduknya sudah mencapai hampir 2.000 jiwa dengan 400 hingga 500 KK (PPL Regsosek, komunikasi pribadi, tanggal 5 November 2022).

Pada awal tahun 1980-an, khususnya tahun 1982, pemerintah melakukan program relokasi penduduk suku Bajo Torosiaje untuk pindah dari laut atau tinggal di darat. Di darat mereka dibuatkan rumah sederhana dan diberi tanah untuk Bertani, tetapi program itu tidak berjalan dengan baik. Awalnya ada beberapa keluarga yang berhasil direlokasi oleh pemerintah dan sebagian besar tidak mau sama sekali direlokasi dengan berbagai macam alasan. Adapun yang berhasil direlokasi, pada perkembangan berikutnya, sebagian besar di antaranya tetap kembali melaut di Desa Torosiaje dengan alasan tidak

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pintar bertani, walaupun sudah dicoba tetapi tidak berhasil. Mereka hanya pintar dan terampil melaut dan mencari ikan di laut, baginya "laut adalah hidup dan kehidupannya". Namun, seiring perkembangan zaman, mereka yang pernah direlokasi lama-kelamaan hidup dan tinggal di dua tempat antara darat dan laut. Itulah sebabnya suku Bajo Torosiaje darat juga berkembang pesat menjadi permukiman hingga menjadi dua desa karena di samping keluarga suku Bajo Torosiaje, mereka juga berdampingan dengan masyarakat suku-suku lainnya di darat. Permukiman warga Torosiaje yang hidup di laut digambarkan pada Gambar 5.21.

Foto: Risyanto (2022)

Gambar 5.21 Kondisi Permukiman Masyarakat Torosiaje

Untuk mendukung pembangunan Desa Torosiaje, pemerintah fokus pada isu pendidikan. Masalah pendidikan sudah mulai membaik sejak tahun 2000-an karena di desa ini sudah ada SD. Beberapa tahun kemudian didirikan SMP, termasuk sekolah menengah kejuruan (SMK) yang didirikan di darat dekat pintu gerbang masuk dermaga penyeberangan ke Desa Torosiaje. Putra dan putri masyarakat Desa Torosiaje sudah banyak yang sarjana, bahkan ada yang sudah menjadi ASN, dosen pada salah satu perguruan tinggi di Kota Gorontalo, termasuk aparat Desa Torosiaje yang rata-rata sudah sarjana, walaupun juga tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak Desa Torosiaje sangat banyak yang putus sekolah, bahkan buta huruf. Padahal biaya sekolah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

digratiskan sampai tingkat SMK, tetapi masih banyak yang putus sekolah atau tidak tertarik sekolah.

Salah satu peluang besar dan potensi perekonomian bagi Desa Torosiaje yang terkait langsung dengan profesinya sebagai nelayan atau pencari ikan di laut adalah pemanfaatan lingkungan lautnya. Menurut Pak Jek, sekitar 85% penduduk berprofesi sebagai nelayan, 5% berprofesi sebagai petani dan ojek perahu (tukang antar jemput penumpang antara desa laut (Torosiaje) dan darat dengan mempergunakan perahu), 5% berprofesi sebagai pegawai negeri dan swasta, kemudian sisanya yang 5% lagi adalah wirausaha, dan lain-lain. Menurut pengamatan, peluang yang dimaksud adalah peluang pemberdayaan dan mengoptimalkan serta memaksimalkan potensi lingkungan lautnya. Desa Torosiaje adalah desa yang semua rumahnya berada di atas permukaan air laut antara 2 dan 6 meter kedalaman airnya. Kemudian secara kultural, mereka akrab dan menyatu dengan laut, memiliki kearifan dan keterampilan menangkap dan memelihara ikan laut maka pemberdayaan yang paling cocok adalah budi daya ikan laut.

Semua rumah penduduk Desa Torosiaje memiliki kolam dan pekarangan perairan yang mestinya dimanfaatkan secara maksimal untuk budi daya ikan laut. Walaupun sudah ada sebagian kecil yang telah memiliki keramba, jika hal ini dapat dimaksimalkan dan dapat dijadikan program pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat, tidak menutup kemungkinan menjadi peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat Desa Torosiaje. Hanya yang menjadi tantangan terbesar adalah masalah kebersihan lingkungan dan halaman rumah masyarakat yang ingin dijadikan lokasi pembuatan dan tempat budi daya ikan laut berupa keramba. Kebersihan dari sampah-sampah laut, baik berupa daun, kayu, plastik, dan sampah-sampah lainnya masih tergolong baik karena adanya tradisi kerja bakti dan gotong royong.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

E. Kelembagaan Adat: Pemantik dan Partisipasinya

Tata kelola Desa Torosiaje selain lembaga pemerintahan desa, juga ada lembaga adat. Dua lembaga itu menjadi motor penggerak Desa Torosiaje, bahkan menjadi simpul dan tempat penyelesaian berbagai macam persoalan. Jadi, lembaga tersebut harus dipimpin oleh orang-orang pilihan secara kultural dan dipilih secara kolektif oleh masyarakat. Orang yang dapat menjadi kepala desa adalah warga Desa Torosiaje yang memiliki rekam jejak yang baik. Setelah itu, ikut aturan pemerintah melalui pemilihan langsung calon kepala desa. Siapapun yang menang dalam pemilihan harus dihargai, dihormati, dan didukung. Bukan hanya dukungan dalam wujud verbal atau kata-kata, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan.

Desa Torosiaje merupakan salah desa yang memiliki fungsi-fungsi kelembagaan adat yang bersifat sosial. Lembaga adat di Desa Torosiaje lebih khusus menangani masalah tradisi dan adat istiadat yang ada di Desa Torosiaje suku Bajo. Adat istiadat yang dimaksud cukup banyak sebagaimana diuraikan sebelumnya. Sebagai contoh adalah adat perkawinan. Sebenarnya adat perkawinan suku Bajo Torosiaje hampir sama dengan adat perkawinan suku-suku lainnya, tetapi banyak perbedaan dalam proses pelaksanaannya. Misalnya, etnis Gorontalo mengenal pesta jamuan dua pihak (pihak laki-laki dan pihak perempuan), sedangkan suku Bajo Torosiaje hanya mengenal satu jamuan, yaitu pihak perempuan yang melakukan jamuan pesta.

Pada saat lamaran, ada acara lempar jawab pantun antara pihak laki-laki dan perempuan. Jika pihak laki-laki yang melamar kalah dalam lempar jawab pantun, kemungkinan besar lamarannya ditolak. Walaupun sesungguhnya telah ada musyawarah pendahuluan sebelum lamaran resmi atau sudah melakukan kesepakatan. Misalnya, pada waktu musyawarah awal, pihak keluarga laki-laki sudah disetujui dan diterima oleh pihak keluarga perempuan. Jumlah uang pesta yang disediakan oleh pihak laki-laki juga sudah disepakati nominalnya, tetapi jika kalah dalam lempar jawab pantun, semua kesepakatan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

itu bisa saja gugur. Makanya di Desa Torosiaje suku Bajo kalau mau pergi melamar, harus cakap mencari pelamar yang memiliki kehebatan berpantun. Sebisa-bisanya carilah orang hebat itu tidak jauh dari pihak perempuan supaya gampang diterima lamarannya. Sementara itu, nominal uang pestanya tidak memberatkan dan yang umum sering ditemukan di suku Bajo Desa Torosiaje hanya berkisar dari Rp10 juta hingga Rp20 juta, sangat jauh berbeda dengan uang pesta (uang panai) suku Bugis Makassar yang bisa mencapai miliaran rupiah.

Syarat menjadi kepala adat di Desa Torosiaje adalah mereka yang dituakan, tidak mesti tua secara umur, tetapi tua dalam arti pengalaman dan pengetahuan. Syarat penting lainnya adalah pewarisan adat suku Bajo Torosiaje yang ada pada diri calon. Syarat yang dimaksud adalah syarat tentang pengetahuan adat dan pemahaman sejarah adat Bajo Torosiaje. Alasan pentingnya atau wajib mengetahui dan memahami adat dan sejarah adat suku Bajo adalah karena hal ini berbanding lurus dengan tanggung jawab yang diembannya. Tanggung jawab yang dimasud adalah tanggung jawab dalam memutuskan perkara-perkara adat. Terkadang ada masalah-masalah yang cukup rumit diselesaikan oleh kepala desa, tetapi karena ada kaitannya dengan persoalan adat, persoalan-persoalan seperti itu akan diserahkan dan menjadi tanggung jawab kepala adat. Lalu bagaimana caranya kepala adat mampu memutuskan perkara tersebut jika kepala adat tidak mengerti dan paham adat itu sendiri.

Kelembagaan adat suku Bajo Torosiaje juga menangani masalah kepemilikan rumah dan pembangunan rumah di Desa Torosiaje. Menurut Pak Jek, siapa saja warga Desa Torosiaje yang mau membangun rumah baru diperbolehkan asal seizin dengan lembaga adat. Juga harus mengikuti tata ruang desa yang diatur oleh lembaga adat dan pemerintah desa. Hal ini terkait dengan pembangunan rumah baru di lokasi yang baru. Namun, ada juga pembangunan rumah yang sebelumnya sudah ada, tiba-tiba rumah itu rusak dan tidak dibangun lagi oleh pemiliknya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Lokasi kosong itu tetap dianggap ada pemiliknya secara adat sehingga jika ada warga yang mau membangun rumah di lokasi itu harus seizin pemilik lamanya dan harus mendapat persetujuan dari lembaga adat. Jika pemilik lamanya tidak mengizinkan dengan alasan akan membangun kembali, pihak yang ingin membangun baru tidak diperbolehkan secara adat. Walaupun secara legalitas tidak ada bukti kepemilikan, tetapi secara adat Desa Torosiaje kepemilikan tersebut diakui. Lalu bagaimana dengan persoalan jual beli rumah atau lokasi permukiman di Desa Torosiaje? Selama ia adalah warga Desa Torosiaje maka secara adat diperbolehkan untuk melakukan jual beli rumah dan jual beli lokasi bekas rumah, meskipun harus melalui lembaga adat. Akan tetapi, rumah yang ada di Desa Torosiaje tidak dapat dijadikan agunan di bank karena rumah itu tidak memiliki sertifikat kepemilikan.

Lembaga sosial Desa Torosiaje juga menangani masalah kebersihan lingkungan. Pada Desa Torosiaje ada program pemerintah desa yang dikenal dengan Jumat bersih yang lama-kelamaan dijadikan tradisi dengan melibatkan masyarakat desa. Awalnya diumumkan di masjid, tetapi dalam perkembangannya, sudah menjadi kebiasaan dan ditradisikan. Saat ini, masyarakat sangat patuh jika ada gotong royong, jika orang tuanya berhalangan, pasti ada perwakilannya. Minimal menyediakan makanan dan minuman ringan jika mereka tidak bisa hadir karena alasan penting. Agar anggota masyarakat terlibat dalam kegiatan adat dan tradisi, biasanya dibantu oleh Karang Taruna. Apalagi lembaga adat dan pemerintah Desa Torosiaje sangat dihormati dan dipatuhi seruan dan perintahnya.

Bahkan, dulu kalau tidak bisa datang, akan mendapat hukuman cambuk dari lembaga adat, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi hukuman seperti itu. Hukuman yang ada sekarang adalah akan dikucilkan oleh anggota masyarakat desa. Misalnya, jika ia melakukan pesta pernikahan anaknya, lembaga adat dan pemerintah desa akan mempersulit pengurusan administrasi, tidak diberi izin menggunakan gedung desa di saat jamuan pernikahan, dan anggota masyarakat tidak berani hadir jika lembaga adat dan pemerintah desa tidak merestuinya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Masyarakat Desa Torosiaje termasuk masyarakat yang patuh dan ikut dengan aturan pemerintah. Hal itu terlihat sejak tahun 1980-an saat mereka akan direlokasi secara bertahap. Akan tetapi, tahap pertama tidak berjalan baik dengan alasan sebagaimana diuraikan sebelumnya maka wajar jika tahap-tahap berikutnya tidak berjalan sesuai dengan harapan dan aturan. Kepatuhan itu juga terlihat pada saat COVID-19 yang ditunjukkan dengan partisipasi mereka ikut program vaksin, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Asal kepatutan itu tidak melukai adat istiadat orang suku Bajo Torosiaje, artinya bahwa seruan dan aturan pemerintah harus disesuaikan dengan adat dan kearifan lokal masyarakat Desa Torosiaje. Atas kepatutan itulah, pemerintah membangun infrastruktur dan sarana prasarana Desa Torosiaje, termasuk fasilitas aliran listrik PLN, aliran air bersih, dan bantuan gas elpiji 3 kg. Bukan hanya itu, program bantuan lainnya juga masuk di Desa Torosiaje, misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan sembako, termasuk bantuan pemberdayaan. Walaupun demikian, Desa Torosiaje masih tergolong desa miskin dengan sekitar 80% penduduknya berpendapatan rendah menurut PPL Regsosek BPS 2022. Uraian tersebut mencerminkan bahwa masyarakat Desa Torosiaje adalah desa yang memiliki kepatuhan yang cukup tinggi kepada kelembagaan adat desa dan kepatuhan kepada pemerintah desa hingga pemerintah pusat. Hal itu juga terlihat pada partisipasi dan dukungan yang cukup tinggi terhadap proses pendataan Regsosek.

F. Pengalaman para Pendata Regsosek: Perspektif Koseka, PML, dan PPL

Ujung tombak Regsosek BPS 2022 adalah para petugas lapangan, tanpa mengesampingkan staf BPS, mulai dari kepala, koordinator, supervisor, penginput data, Koseka, dan petugas lainnya. Kerja sama semua pihak itulah yang akan menentukan berhasil tidaknya proses Regsosek. Namun, petugas yang dibahas secara singkat dalam

Buku ini tidak diperjualbelikan.

subbagian ini adalah petugas mitra BPS dalam kegiatan Regsosek, khususnya PPL, PML, dan Koseka. Berdasarkan temuan lapangan di Provinsi Gorontalo, Koseka sebaiknya dari pegawai organik BPS, tetapi tidak menutup kemungkinan Koseka diambil dari mitra BPS. Mitra yang diutamakan ialah yang memiliki rekam jejak yang bagus dan telah lama bekerja sama dengan BPS. Mengambil dan memilih Koseka dari pihak mitra karena biasanya pegawai organik BPS cukup terbatas di wilayah tersebut. Oleh karena itu, responden yang mau dicacah jumlahnya cukup banyak, mau tidak mau merekrut Koseka dari pihak mitra. Kerja Koseka ini juga menarik untuk dibincangkan bersama PML dan PPL. Dengan demikian, tiga tingkatan mitra BPS ini dianggap penting untuk dieksplorasi, khususnya kisah dan pengalamannya terlibat dalam proses Regsosek, sebab tiga ujung tombak lapangan inilah sebagai garda terdepan. Darinyalah data Regsosek bermula dan darinya pula lah akan menjadi data tunggal untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Banyak cerita dan pengalaman tentang tiga petugas (PPL, PML , dan Koseka) lapangan pada kegiatan Regsosek BPS 2022. PPL sebagai petugas pendata di lapangan merupakan petugas paling banyak memperoleh pengalaman dan cerita antara dirinya dan responden atau anggota masyarakat yang didata, mulai dari cerita pengalaman kerja yang cukup menantang dan melelahkan karena harus naik-turun rumah (rumah panggung) hingga masuk-keluar rumah responden sejak pagi hari hingga sore hari dengan menghadapi berbagai macam karakter responden. Kegiatan PPL dan petugas lainnya berlangsung selama satu bulan, sejak 15 Oktober–14 November 2022 atau mendata kepala keluarga dari 250 hingga 300 KK. Syukur-syukur jika rumah penduduk berdekatan, tetapi banyak desa yang rumah penduduknya cukup berjauhan. Terkadang juga harus mendatangi sampai tiga kali baru dapat bertemu pemilik rumah dengan berbagai penyebab. Jarak tempuh, medan, dan topografi wilayah juga bervariasi. Bukan hanya berhadapan dengan orang yang berbeda karakter, tantangan alam, tetapi juga harus berhadapan dengan binatang yang tidak familier bagi PPL, baik di jalan maupun dalam pekarangan rumah responden.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Binatang yang dianggap menantang dan membuat para petugas agak ketakutan adalah ular, biawak, babi, dan anjing.

Namun, di balik cerita pengalaman yang menantang, melelahkan, dan memacu adrenalin, kegiatan Regsosek juga sarat dengan cerita lucu dan menyenangkan. Tidak sedikit anggota keluarga yang kegirangan kalau BPS melakukan pencacahan. Banyak di antara mereka bersemangat untuk didata. Bahkan saking bersemangatnya, ia pergi mendatangi tetangganya yang sedang didata, sekadar ingin mendengar tujuan pendataan, apakah akan mendapatkan bantuan atau tidak. Namun, karena terlalu serius mendengar, ia tidak ingat sedang memasak nasi sampai nasinya gosong dan tercium di tempat pencacahan. Mereka tersentak, kaget, dan ketakutan karena dikira rumahnya juga ikut terbakar. Untunglah rumahnya tidak terbakar dan suaminya tidak marah ketika pulang bekerja dari kebun.

Ada juga responden yang menolak untuk dicacah, tidak jujur memberi keterangan, dan banyak lagi cerita-cerita lainnya. Berdasarkan SOP, jalan keluar dari persoalan itu biasanya PPL membujuk, merayu dengan memberi pemahaman, atau melakukan *probing*. Kalau langkah itu tidak berhasil maka biasanya PPL menghubungi kepala dusun dan menghubungi/menelepon PML untuk datang ke lokasi kejadian. Cerita dan pengalaman yang paling banyak dialami oleh PPL adalah pertanyaan dari responden "kenapa didata?", "ada bantuan apa?" karena rata-rata responden ialah golongan menengah ke bawah yang selalu berharap mendapatkan bantuan kalau ada pendataan dari BPS. Dengan demikian, banyak di antara mereka yang tidak jujur memberi jawaban ketika ditanya oleh PPL. Akan tetapi, untunglah kebanyakan PPL, berdasarkan temuan di lapangan, dapat melakukan *probing* dan menemukan cara bijak tanpa menggurui jika menemukan gejala ketidakjujuran responden.

Cerita pengalaman seperti itulah yang membuat PPL merasa beruntung terlibat dalam proses Regsosek BPS 2022 karena mendapat banyak pelajaran yang sangat berharga selama melakukan pendataan. Mereka juga merasa beruntung karena mendapat banyak teman baru dan keluarga baru yang cukup menyenangkan. Selain itu, para PPL

Buku ini tidak diperjualbelikan.

selalu berharap agar pada pencacahan-pencacahan selanjutnya mereka terpilih lagi menjadi mitra BPS. Di samping pengalaman tersebut, juga karena mendapatkan honor yang cukup kompetitif dengan honor-honor pekerjaan lainnya, bahkan dianggap lebih menguntungkan. Terkait harapan para PPL dalam kegiatan Regsosek 2022, mereka berharap agar data yang mereka peroleh betul-betul menjadi *database* atau data tunggal untuk semua kementerian dan lembaga pemerintah. Hal ini perlu ditindaklanjuti, berdasarkan temuan kami di lapangan, dari dua kasus, yaitu kasus salah sasaran bantuan dan kasus ketidakjangkauan pendataan sebelumnya.

Kasus salah sasaran dalam program bantuan pemerintah bukan rahasia lagi, hampir terjadi di seluruh desa-desa atau kelurahan di Indonesia. Lucu dan mengherankan karena terjadi berulang-ulang sehingga warga melakukan protes. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan Regsosek BPS ini, kasus salah sasaran bantuan pemerintah tidak terulang kembali, atau setidak-tidaknya dapat berkurang secara signifikan.

Sementara kasus jangkauan pendataan sebelumnya menjadi sangat penting dalam kegiatan Regsosek ini, bahkan menjadi pembeda dari pencacahan yang sudah ada sebelumnya. Pencacahan selama ini tidak terlalu fokus pada persoalan kemiskinan secara ekonomi dan secara sosial-kultural, sementara pencacahan Regsosek fokus dalam bingkai itu. Temuan kami dalam mendampingi PPL di lapangan menunjukkan bahwa banyak golongan keluarga miskin yang belum terdata pada pencacahan sebelumnya, yakni di Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato dan di sekitar Danau Limboto, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Sebagian dari PPL adalah orang yang sudah berpengalaman dan bermitra dengan BPS. Para PPL juga kebanyakan bertugas pada daerah di mana mereka berasal sehingga para PPL dan calon respondennya secara emosional sudah saling mengenal atau setidak-tidaknya PPL paham daerah yang menjadi tugasnya. Banyak juga PPL berasal dari aparat desa, misalnya staf pegawai desa, kepala

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dusun, ibu PKK desa, dan lain-lain. Para PPL memiliki kedekatan sosial dan budaya dengan masyarakat setempat. Dari segi tingkat pendidikan para PPL juga bervariasi, mulai dari tamatan SMA dan sederajat, tetapi juga banyak di antaranya sudah sarjana. Dalam hal ini, secara teknis dan segala persoalan yang dihadapi dalam kegiatan Regsosek, PPL telah punya trik dan cara untuk menyelesaikannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan mereka, ditemukan bahwa kesulitan terbesar PPL dalam proses pendataan adalah kemampuan dan keterampilan berkomunikasi dengan responden. Jadi, PPL harus memiliki keterampilan berkomunikasi dengan baik dan lancar, santun dan ramah, serta memiliki keterampilan berbahasa lokal dengan responden sebab banyak responden yang tidak lancar, bahkan tidak pintar berbahasa Indonesia.

Lalu bagaimana cerita dan pengalaman PML. PML sebagai petugas pengawas dan pemeriksa hasil pencacahan PPL dalam kegiatan Regsosek BPS 2022, juga memiliki cerita dan pengalaman tersendiri. Cerita pengalaman PML memang tidak sebanyak cerita pengalaman PPL karena PML tidak langsung berhadapan dengan responden, PML hanya berhadapan dengan PPL. Lagi pula, setiap PML hanya memiliki 4 orang PPL. Namun, dari segi kekayaan pengetahuan dan cerita pengalaman, mungkin PML lebih kaya karena seluruh cerita pengalaman 4 orang PPL-nya sampai juga di telinga PML. Sejatinya PML juga adalah mitra BPS yang dianggap sudah tepercaya karena yang dijadikan PML adalah mitra BPS yang sudah sering terlibat dalam kegiatan pencacahan BPS di wilayah tersebut. Bahkan terkadang, mereka adalah aparat desa, kepala dusun, atau anggota masyarakat yang banyak mengetahui seluk beluk masyarakat setempat. Setidaknya jangkauan pergaulannya cukup luas dan dikenal banyak oleh masyarakat setempat. Menurut beberapa staf organik BPS, termasuk kepala BPS, perekrutan seperti itu memiliki banyak keuntungan. Utamanya alasan kedekatan emosional emik masyarakat terhadap PML dan PPL, termasuk persoalan *probing* dengan pemahaman bahasa setempat. Misalnya, di Desa Torosiaje, tidak mungkin pendataan dapat berjalan lancar jika mempergunakan PPL

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan PML yang bukan anggota masyarakat setempat dan tidak bisa berbahasa suku Bajo. Masyarakat di sana yang mau didata hanya pintar dan lancar berbahasa ibunya, yaitu bahasa suku Bajo.

Cerita pengalaman PML terhadap PPL tidak banyak ditemukan, kecuali cerita-cerita tentang PPL yang menelepon PML ketika PPL menemui responden yang susah didata. Ada juga cerita tentang rumah yang selalu kosong dan cerita tentang adanya temuan PML terkait kurang validnya hasil pendataan PPL sehingga harus didata ulang dengan cara mendatangi langsung atau dengan cara jitu lainnya tanpa harus melanggar SOP. Salah satu cerita menarik tentang hubungan antara PML dan PPL adalah cerita kedekatannya di luar kegiatan Regsosek. Salah seorang PPL yang sempat diwawancarai bercerita bahwa dia berasal dari keluarga miskin, hanya punya rumah yang sangat sederhana dari warisan orang tuanya, punya anak tiga orang yang masih kecil, dan suaminya hanya kerja serabutan. Oleh karena itu, ibu PPL ini, selain menjadi petugas PPL Regsosek, juga bekerja di tempat *laundry*. Beruntungnya, pemilik usaha *laundry* adalah orang baik hati dan pengertian. Pernah ada kejadian berulang, yaitu pakaian pelanggan rusak dan harus diganti dengan pakaian dan kualitas yang sama, tetapi pemilik usaha *laundry* tidak memarahinya, termasuk tidak menyuruhnya mengganti pakaian yang rusak tersebut.

Pemilik usaha *laundry* malah memberinya semangat, bahkan dia yang mengganti pakaian pelanggan yang rusak. Dari pengalaman itulah, PPL alias buruh *laundry* ini merasa beruntung dan membuatnya makin serius dan fokus dalam bekerja. Namun, setelah dilakukan pendalaman tentang siapa pemilik *laundry* tersebut, ternyata beliau adalah seorang ibu yang bertugas sebagai PML dan bermitra dengan sang ibu PPL atau buruh kerja usaha *laundry* tersebut. Setelah dikonfirmasi kepada PML tersebut, "kenapa begitu baik sama ibu PPL itu?", ia menjawab bahwa ia (ibu PML) kasihan pada keadaannya (ibu PPL). Selain itu, ia juga mengatakan bahwa menolong orang adalah amal dan tidak membuatnya takut jatuh miskin (cukup menginspiratif).

Salah satu temuan lain terkait dengan PML sempat membuat kami berpikir dan termenung. Setelah kami diskusikan kepada tim

Buku ini tidak diperjualbelikan.

(BRIN), juga berdiskusi dengan salah satu koordinator Regsosek, kami memutuskan untuk menyampaikannya kepada Kepala BPS Provinsi Gorontalo di sela-sela jamuan makan malam. Awalnya beliau kaget mendengar cerita itu, tetapi setelah didiskusikan secara santai kejadian itu kami anggap lumrah, terutama pada bagian tertentu dari kejadian itu karena sudah beberapa kali terjadi. Namun, dengan kejadian tersebut, seharusnya kegiatan Regsosek awal 2022 ini menjadi peluang dan momen yang paling tepat untuk menghasilkan *database* dan menjadikannya data tunggal untuk semua. Temuan yang dimaksud adalah ada salah seorang PML yang sedang berjalan kontraknya dalam kegiatan Regsosek BPS 2022. Namun, PML yang dimaksud juga terlibat menjadi petugas pendata lembaga pemerintah lainnya di kelurahan yang sama dengan tugas PML-nya pada jadwal waktu yang hampir bersamaan. Setelah didiskusikan, kami berkesimpulan bahwa PML ini tidak dianggap melanggar karena tidak ada klausul kontrak terkait larangan terlibat pencacahan pada lembaga lain. Kecuali, jika dia tidak menyelesaikan atau lalai dari tugasnya sebagai PML, barulah akan diproses oleh pihak BPS.

Meskipun demikian, kejadian tersebut dapat berimbas dan memengaruhi tujuan Regsosek untuk menjadikannya *database* atau data tunggal untuk semua kementerian dan lembaga. Pada saat yang bersamaan dengan kegiatan Regsosek BPS 2022 ini, juga ada lembaga pemerintah lain yang sedang melakukan pendataan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan kegiatan Regsosek. Inilah PR besar pemerintah pusat untuk membenahi setiap kementerian dan lembaga supaya tidak terjadi *overlapping* pencacahan. Hal ini juga menunjukkan bahwa ego sektoral di setiap kementerian dan lembaga masih terjadi dan kuat. Kenyataan ini harus dikoordinasikan oleh kementerian dan lembaga yang berkepentingan pada data-data pencacahan. Mungkin juga perlu didiskusikan dan dicari jalan keluarnya agar data-data BPS yang makro bisa dimikrokan dan dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga lainnya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Lain cerita pengalaman PPL dan PML, lain pula cerita pengalaman Koseka mitra BPS. Salah seorang Koseka nonorganik BPS yang sempat kami temui dan wawancarai memiliki segudang cerita pengalaman bersama BPS karena dia adalah mitra BPS sejak tahun 2008. Pencapaiannya menduduki jabatan Koseka nonorganik BPS tentu tidak gampang, prosesnya dimulai dari bawah. "Alhamdulillah", katanya, dia dipercaya oleh BPS Kabupaten Gorontalo menjadi Koseka dalam kegiatan Regsosek BPS 2022 ini. Ia belum banyak bisa membagi cerita pengalaman terkait dengan kegiatan Regsosek, tetapi cerita pengalaman selama menjadi mitra BPS sudah tidak terhitung lagi. Cara bicara dan pemilihan diksi-diksi dalam menyampaikan sesuatu membuat kami yakin bahwa dia sudah berpengalaman sampai bisa menjadi mitra BPS. Di lain kesempatan, kami juga mendapat informasi bahwa istri Koseka tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan Regsosek sebagai PML. Di situlah membuat kami lebih yakin bahwa Koseka ini cukup berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang baik selama bermitra dengan BPS.

Cerita pertama yang dapat kami tangkap dari Koseka ini selama bermitra dengan BPS adalah terkait dengan tempat penugasan. Dia tidak pernah memilih-milih desa yang ditugaskan padanya dalam proses pencacahan. Baginya, setiap desa memiliki cerita tersendiri dan membuat dirinya makin banyak keluarga karena salah satu motivasinya menjadi petugas BPS adalah memperbanyak keluarga dan senantiasa menjalin silaturahmi. Cerita kedua adalah tentang trik-trik *probing* pada sasaran pencacahan untuk memperoleh data yang valid dari responden. Salah satu yang menarik adalah trik untuk membuktikan responden memiliki aset. Hindarilah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya hanya dua pilihan, ada atau tidak ada. Misalnya, apakah bapak memiliki sapi? Selain rumah ini, ada lagi rumah bapak? Apa ibu punya kulkas? Jika responden ditanya seperti itu dan dia ingin mendapatkan bantuan, kemungkinan besar akan memberi jawaban "tidak memiliki, tidak ada, dan tidak punya". Namun, jika mengejarnya dengan pertanyaan jebakan terkait dengan jumlah atau satuan, sulit untuk tidak jujur. Misalnya, "berapa ekor sapi yang dimiliki bapak?

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Selain rumah ini, di mana lagi alamat rumah bapak? Apa-apa saja yang ada dalam kulkas ibu?

Sebagai Koseka yang bertugas dan bertanggung jawab atas kinerja PPL dan PML; melakukan koordinasi dan pengawasan lapangan; memeriksa hasil dan membuat laporan lapangan; serta tugas dan tanggung jawab lainnya, keberhasilannya akan ditentukan oleh keberhasilan PPL dan PML-nya. Oleh karena itu, menurut Koseka, mereka selalu melakukan koordinasi dan melakukan *briefing* terhadap PPL dan PML-nya sebelum mengerjakan tugas di lapangan.

Menurutnya, melakukan koordinasi dan *briefing* sangat penting karena kita berusaha memecahkan persoalan sebelum menemui masalah. Langkah-langkah yang diambil ini mungkin juga sering dilakukan oleh Koseka di tempat lain, tetapi terkhusus untuk timnya, *briefing* adalah kewajiban. Menurut Koseka, ia beruntung karena telah lama dijadikan mitra oleh BPS sehingga pengalaman itu menjadi pelajaran dan bekal besar yang sangat berharga. Pengalaman itulah yang ia bagikan kepada para PPL dan PML di saat mereka bertemu, berdiskusi, koordinasi, dan pada saat *briefing* dengan harapan tugas dan tanggung jawab bersama dapat diselesaikan dengan baik.

Selain cerita pengalaman sebagaimana disampaikan oleh Koseka tersebut, juga ada cerita tradisi dan adat istiadat unik yang pernah ia temui dan rasakan selama bertugas dan bermitra dengan BPS. Tradisi dan adat istiadat yang dimaksud itu adalah tradisi Jaton (Jawa Tondano). Dari namanya saja sudah menunjukkan adanya asimilasi antara Jawa dan Tondano. Pertanyaannya demikian "apakah betul terjadi asimilasi antara Jawa dengan Tondano, dan bagaimana asimilasi itu terjadi?". Dalam beberapa sumber (Arbie & Kalangi, 2011; Arbie & Mantau, 2012; Paramita & Sari, 2016) disebutkan bahwa adanya Jawa Tondano (Jaton) di Sulawesi Utara karena ada kaitannya dengan pengasingan atau pembuangan Pangeran Diponegoro dekade ketiga abad ke-19 pada masa pemerintahan Hindia Belanda (Indonesia pada masa penjajahan Belanda).

Ketika beliau (Pangeran Diponegoro) diasingkan di Manado, Sulawesi Utara, Pangeran Diponegoro telah memiliki pasukan yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

hebat. Kyai Modjo menjadi kepercayaan Pangeran Diponegoro sehingga ketika beliau diasingkan maka Kyai Modjo harus ikut. Ketika Kyai Modjo diminta untuk ikut ke tempat pengasingan di Sulawesi Utara, Kyai Modjo memilih-milih pasukannya yang dapat diikutkan ke sana. Antara pengikut Pangeran Diponegoro dan Kyai Modjo dengan masyarakat setempat saling mengadaptasikan diri masing-masing. Lama-kelamaan di antara mereka terjadi asimilasi dalam bentuk pernikahan antara pasukan Kyai Modjo dan seorang putri yang ada di Tondano tersebut.

Kemudian keturunan merekalah yang dikenal dengan Jaton (Jawa Tondano), bukan lagi Jawa dan bukan juga Tondano, melainkan campuran gen asimilasi perkawinan. Sebanyak 50 sampai 60 orang pasukan Kyai Modjo dikabarkan menikah dengan perempuan Tondano. Dalam perkembangannya, mereka tersebar di mana-mana, termasuk banyak yang pindah ke Gorontalo sebagai wilayah yang memiliki lahan pertanian luas. Mereka (Jawa dan Tondano) juga saling memengaruhi, termasuk masalah marga atau fam sehingga Jaton juga memiliki marga atau fam, salah satunya adalah fam Kyai Demak sebagaimana fam Koseka nonorganik BPS yang sempat diwawancarai.

Lalu apa keunikan Jaton di Desa Yosonegoro, Gorontalo? Menurut Koseka yang diwawancarai, di Jaton ada dua tradisi yang paling menonjol dan unik karena tidak ada di tempat lain di Gorontalo, yaitu tradisi pemakaman orang yang meninggal dan tradisi Maulid Nabi. Tradisi pemakaman orang meninggal di Jaton Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat dianggap unik karena adanya tugas menggali kubur secara bergiliran berdasarkan posisi rumah dari Masjid Al-Muttaqin. Jika posisi rumah orang yang meninggal berada di sebelah kanan Masjid Al-Muttaqin, anggota masyarakat yang melakukan penggalian dan proses pemakaman adalah mereka yang posisi rumahnya berada di sebelah kiri Masjid Al-Muttaqin.

Menariknya, secara tradisi masyarakat di sana berbondong-bondong datang di tempat penggalian kuburan tanpa harus ada komando atau yang menyuruhnya. Sebagai tanda adanya orang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang meninggal, biasanya diumumkan di masjid dan adanya bunyi kentongan yang menandakan posisi rumah yang meninggal. Jika anggota masyarakat berada di desa dan tidak terlibat dalam kegiatan pemakaman, hal itu dianggap memalukan dan menjadi aib seumur hidup. Tradisi ini sudah berlangsung sampai saat ini. Sementara itu, tradisi kedua adalah tradisi Maulid Nabi Muhammad saw. Jika tradisi perayaan Maulid Nabi di tempat lain hanya dilakukan satu kali pada setiap tahun, di Desa Yosonegoro dilakukan selama 7 hari 7 malam dengan berbagai macam rangkaian acara. Namun, yang paling populer adalah acara makan-makannya yang terbuka untuk semua orang yang datang bertamu di desa tersebut. Bukan hanya sekadar makan, tetapi tamu juga wajib membawa pulang makanan yang disajikan oleh tuan rumah yang didatangi.

G. Kisah Ibu Hare: Profil Peserta Regsosek

Kisah ini tentang salah satu rumah tangga yang terletak di Dusun Sengkang, Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Ibu rumah tangga ini adalah *single parent* yang tinggal di tengah laut sebagai suku Bajo. Suaminya telah meninggal dunia kira-kira 15 tahun yang lalu dengan 5 orang anak, 3 perempuan dan 2 laki-laki. Ibu Hare hanya mendapat warisan dari suaminya berupa sebuah rumah yang sangat sederhana sebagai tempat pelipur lara. Sekadar bisa berteduh dari terik matahari, derasnya air hujan, dan kencangnya angin laut di malam hari. Rumahnya berdinding papan yang sudah bolong-bolong dimakan usia, diberi sekat kayu berbentuk dua buah kamar, dan sisanya sebagai ruang tengah serta balai angin di depan rumahnya untuk dijadikan tempat bermain anak-anaknya. Perabot rumahnya pun ala kadarnya, hanya berupa peralatan dapur dan tiga buah kursi plastik. Warisan harta lain yang paling berharga dari suaminya adalah sebuah perahu kecil. Perahu inilah yang dipakai oleh Ibu Hare untuk mencari nafkah sehari-hari. Sebagai ibu *single parent* dan sebagai orang suku Bajo, mau tidak mau ia harus mampu menghidupi lima orang anaknya yang masih kecil dari hasil melaut. Kondisi anak-anaknya yang masih kecil memaksanya pergi melaut

Buku ini tidak diperjualbelikan.

seorang diri. Ketika anak laki-lakinya berumur 5 hingga 7 tahun, ia terkadang ditemani oleh anaknya yang masih kecil itu. Hal itu penting dilakukan sebagai proses adaptasi pembelajaran lingkungan dan bentuk pewarisan ilmu melaut melalui praktik lapangan tanpa harus mendikte.

Dengan bertambahnya tahun, anaknya makin besar dan memerlukan biaya untuk hidup. Namun, apa yang mau dikata dan diperbuat oleh ibu *single parent* ini, kecuali melaut setiap hari. Hanya ada dua pilihan waktu melaut bagi sang Ibu Hare, sore atau pagi hari dengan beberapa pertimbangan, termasuk cuaca. Kalau pergi melaut sore hari atau menjelang malam, ia pulang pagi hari. Jika pergi pada pagi hari, ia bisa pulang sore hari. Demikian rutinitas pekerjaan yang dilakukan oleh ibu ini setiap hari untuk dapat menghidupi lima orang anaknya. Saat ia tidak melaut satu hari, berarti keluarganya tidak bisa makan hari itu karena tidak ada penghasilan lain, tabungan, atau pangan yang bisa dimanfaatkan, kecuali hasil melaut pada hari itu.

Kehidupan yang memprihatinkan itu juga berimbas kepada pendidikan anak-anaknya. Dari lima orang anaknya, tidak satu pun yang mengenyam pendidikan formal. Pentingnya pendidikan formal bagi orang suku Bajo Torosiaje pada masa itu belum begitu masif disuarakan. Akan tetapi, tidak berarti semua anak-anak suku Bajo Torosiaje buta huruf. Banyak juga anak-anak suku Bajo mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi dan memiliki profesi yang berbeda-beda. Mereka yang dapat mengenyam pendidikan pada umumnya adalah orang-orang yang sudah tercerahkan dengan keadaan. Khususnya anak-anak yang orang tuanya kaya berdasarkan ukuran setempat. Lagi pula, saat ini, di Desa Laut (Torosiaje) sudah tersedia sekolah formal, yaitu satu buah sekolah dasar dan satu buah sekolah menengah pertama. Ditambah lagi satu buah sekolah kejuruan (SMK), walaupun bukan terletak di suku Bajo Laut (Desa Torosiaje) tetapi terletak di suku Bajo Darat. Namun, keberadaan sekolah-sekolah tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh anak-anak Ibu Hare karena yang ada di pikirannya hanya berusaha untuk dapat makan dan hidup hari itu. Oleh sebab itu, anak-anak dari Ibu Hare kebanyakan buta huruf, padahal mereka sudah berumur 17 tahun ke atas pada saat ini.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pemerintah telah melakukan pembinaan dan program relokasi permukiman. Ada yang berhasil dipindahkan ke darat dan menyatu dengan masyarakat yang ada di sekitar pantai, tetapi banyak di antara mereka lebih memilih tinggal di laut. Ia mengatakan bahwa laut adalah habitatnya, tempat mereka mencari hidup, beraktivitas tanpa berpikir panjang, dan tanpa beban jika tinggal di laut. Mereka juga tidak punya keterampilan lain kecuali mengarungi dan menangkap ikan di laut. Termasuk keluarga Ibu Hare, sama sekali tidak tebersit dalam hati dan pikirannya untuk tinggal di darat, lebih-lebih di kota karena ia menganggap bahwa mencari penghidupan di darat dan kota lebih susah daripada tinggal di laut.

Namun, jika membandingkan beberapa tahun lalu waktu suaminya baru meninggal dengan keadaannya sekarang, Ia mengakui bahwa kehidupannya lebih baik saat ini karena anaknya sudah besar dan dapat menggantikan dirinya melaut mencari ikan. Terutama anak ketiganya yang laki-laki, sementara anak pertama dan keduanya sudah menikah. Anak pertamanya perempuan, menikah dengan kerabatnya yang juga tinggal di Torosiaje dan sekarang tinggal serumah dengannya. Keluarga anaknya ini tidak bisa membantunya karena penghasilannya pas-pasan. Demikian juga anak keduanya yang laki-laki, sudah berkeluarga, tetapi tidak bisa juga membantunya karena penghasilannya juga pas-pasan dari kerja serabutan dan bahkan menganggur. Jadi, saat ini hanya anak ketiganyalah yang menopang kehidupan keluarga besarnya.

Anak ketiganya itulah yang setiap hari melaut seorang diri, pergi setiap sore atau menjelang magrib dan pulang pada subuh hari. Ia pergi melaut dengan perahu mungilnya membelah laut dan melawan badai seorang diri. Ia hanya membawa alat tangkap pancing seadanya. Dengan perahu yang sangat kecil dan alat tangkap pancing sederhana maka sudah bisa ditebak hasil tangkap yang akan diperoleh. Benar adanya, hasil tangkap yang ia peroleh hanya sekitar 1 sampai dengan 3 kilogram dan hanya sesekali bisa memperoleh lebih dari 3 kilogram. Harga ikan ketika ia jual hanya Rp20.000,00 per kilogram jadi kalau dirata-ratakan 3 kilogram maka ia memperoleh penghasilan kotor

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Rp60.000,00 per hari. Sementara itu, per hari, ia harus membeli bensin antara 2 sampai 3 liter setiap kali melaut dengan harga Rp13.000,00 per liter. Kalau dirata-rata, 2,5 liter per hari, penghasilannya setiap hari hanya Rp27.500,00. Sungguh sangat tidak cukup untuk membiayai keluarga besarnya yang berjumlah empat orang (tiga adik yang belum berkeluarga dan seorang ibu), bahkan menghidupi dua orang kakaknya dan dua orang ipar.

Kondisi keluarga ibu Hare itu akhirnya terdata oleh pemerintah dan mendapat bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan demikian, setiap dua bulan, keluarga Ibu ini mendapat Rp500 ribu menurut keterangan salah seorang aparat Desa Torosiaje dan diakui sendiri oleh Ibu Hare. Bu Hare merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah, mulai pemerintah desa hingga pemerintah pusat. Walaupun mendapat bantuan dari pemerintah, ia merasa masih tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan dan keperluan hidup keluarganya. Di samping biaya hidup pokok sehari-hari 8 orang keluarganya, juga ada pembayaran listrik yang harus terpenuhi setiap bulan, minimal Rp60.000,00 per bulan, kebutuhan papan dan sandang lainnya, termasuk biaya sosial kekeluargaan. Itulah sebabnya, Ibu Hare ikut menjadi buruh pembelah dan pembersih ikan, upahnya Rp3.000,00 per seratus ekor ikan yang berhasil dibelah dan dibersihkan. Sangat beruntung kalau dapat Rp9.000,00 per hari, tetapi itu pun tidak setiap hari ada pekerjaan membelah dan membersihkan ikan.

Keluarga Bu Hare memiliki banyak harapan walaupun tidak memaksakan dirinya, itu tampak ketika ditanya tentang harapan Bu Hare bersama anak-anaknya terhadap kegiatan Regsosek. Ia hanya berharap agar selalu mendapat bantuan BLT dan PKH sebab tanpa bantuan akan makin mempersulit keluarganya untuk menyambung hidup. Ia juga berharap dengan adanya pendataan keluarganya dalam Regsosek, makin memperkuat bahwa keluarganya layak mendapat bantuan. Keluarga Bu Hare layak mendapatkan jaminan sosial sembari mengedukasi dan memberi pemberdayaan secara langsung agar dapat keluar dari subsistensi kemiskinan. Sebagian besar waktunya habis

Buku ini tidak diperjualbelikan.

percuma, sebanyak delapan orang dalam satu keluarga besar, tetapi hanya dua orang yang produktif, khususnya anak laki-laki, dan itu pun tidak maksimal. Sementara itu, mereka tidak begitu tertarik pemberdayaan dan bantuan berupa alat tangkap lain selain pancing, kecuali alat tangkap pancing yang bagus dan banyak mata pancingnya. Itu berarti bahwa keluarga ini memang perlu pendampingan dan edukasi terlebih dahulu sebelum diberdayakan. Di Desa Torosiaje, bukan hanya keluarga Bu Hare yang memiliki kondisi seperti itu, tetapi banyak di antaranya yang memerlukan perhatian dari pemerintah. Dengan demikian, pendataan Regsosek BPS secara serius, menyeluruh, dan nyata secara empiris dapat menjadi *database* dan data tunggal untuk semua kementerian dan lembaga pemerintah dalam proses pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan. Walaupun di sana sini masih ada celah dan kekurangan dari kegiatan Regsosek, tetapi dengan Regsosek pendahuluan ini menjadi dasar untuk pendataan berikutnya sebagai langkah-langkah penyempurnaan.

Daftar Pustaka

Arbie, R., & Kalangi, L. (2011, 9–12 Oktober). *Hadrah dalam multikultur masyarakat Jaton di Minahasa Sulawesi Utara sebagai pembentukan karakter bangsa* [Presentasi makalah]. Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI) 2011, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Arbie, R., & Kalangi, L. (2012, 27–28 April). *Apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra Jaton di Sulawesi Utara dan Gorontalo sebagai wahana pembentukan karakter* [Presentasi makalah]. Seminar Nasional Bulan Sastra 2012, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo.

Arini, D. I. D., & Yuliantoro, I. (2019). Persepsi masyarakat pinogu terhadap hutan dan pemanfaatannya. *Jurnal WASIAN, 6*(2), 111–123. https://doi.org/10.20886/jwas.v6i2.5251.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Hasil sensus penduduk 2020*. https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html

Badan Pusat Statistik. (2022). https://majalengkakab.bps.go.id/backend/fileMenu/Buku-Pedoman-Pendataan-Lapangan-Regsosek.pdf

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Biro Humas Kominfotik Gorontalo. (2022). https://gorontaloprov.go.id/diskominfotik-gorontalo-siap-sukseskan-regsosek-2022/

Paramita, S., & Sari, W.P. (2016). Komunikasi lintas budaya dalam menjaga kerukunan antara umat beragama di Kampung Jaton Minahasa. *Jurnal Pekommas, 1*(2), 153–166. https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommas/article/view/2010205

Yuliantoro, I, & Wahyuni, N. I. (2020). Persepsi dan adaptasi masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim di Desa Sarawet Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Wasian, 6*(2), 89–99. https://doi.org/10.20886/jwas.v6i2.4728

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

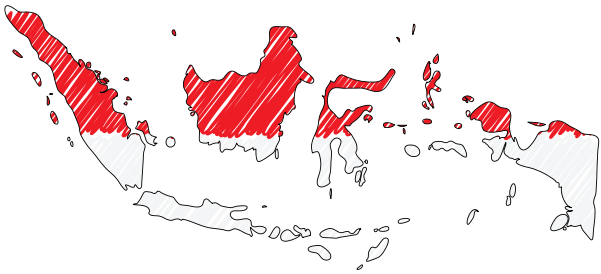

6

Narasi Emik Regsosek Dusun Lima Apumpae, Desa Limboro, Donggala

Arditya Wicaksono & Tedi Gunawan

A. Merekam Realita: Pendataan Regsosek di Bumi Sulawesi Tengah

Pembaruan data untuk perlindungan sosial secara periodik mutlak perlu dilakukan karena setiap *stakeholder*, baik itu pemerintah maupun NGO, memiliki program-program sosial yang membutuhkan data terkini agar program yang mereka kerjakan tepat sasaran (Randall dkk., 2015). Pemutakhiran data perlindungan sosial terakhir kali dilakukan pada tahun 2015, dan hingga saat ini data tersebut masih digunakan oleh Kementerian Sosial dan beberapa kementerian lainnya dalam menyalurkan bantuannya. *Updating* data tahun 2015 sudah berulang kali dilakukan oleh kementerian terkait, tetapi hasil evaluasi menunjukkan bahwa program bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah sering kali tidak tepat sasaran karena dinamika penduduk Indonesia yang sangat tinggi. Data yang ada pada setiap kementerian

A. Wicaksono & T. Gunawan
Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: ardi013@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Wicaksono, A. & Gunawan, T. (2023). Narasi emik regsosek Dusun Lima Apumpae, Desa Limboro, Donggala. Dalam M. A. Humaedi., D. K. Imron, & A. Pramono (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 1 Indonesia Tengah-Timur* (215–259). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.775.c699 ISBN: 978-623-8052-94-3 E-ISBN: 978-623-8052-98-1

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tidak berasal dari sumber data yang sama sehingga ketika terjadi bencana alam atau pandemi seperti COVID-19, pemerintah tidak bisa fokus untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dikarenakan setiap penduduk memiliki level kesejahteraan yang berbeda-beda berdasarkan data kementerian dan lembaga masing-masing. Data yang berasal dari pendataan Regsosek 2022 ini diharapkan dua tujuan negara dapat tercapai. *Pertama*, tersedianya data perlindungan sosial untuk seluruh penduduk Indonesia; dan *kedua,* tersedianya satu data untuk data perlindungan sosial yang bisa digunakan oleh seluruh *stakeholder*.

Seperti yang telah diketahui, pada rentang waktu 15 Oktober hingga 14 November 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di seluruh provinsi Indonesia, termasuk Sulawesi Tengah. Tujuan dari pendataan Regsosek adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan seluruh penduduk. Dalam hal ini, Regsosek bertujuan untuk membentuk satu data kependudukan tunggal yang dapat diintegrasikan dengan berbagai program pemerintah untuk meningkatkan efisiensi (BPS, 2022). Data Regsosek di masa depan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah, seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, dan administrasi kependudukan.

Pelaksanaan Regsosek di Sulawesi Tengah secara umum berjalan dengan lancar. Sebelum dimulai, pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) pelaksanaan pendataan awal Regsosek tahun 2022 yang dimaksudkan menyatukan langkah dalam mendukung proses pendataan profil kependudukan di Sulawesi Tengah. *Support* Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah upaya mendukung, mengawal, dan mengapresiasi pelaksanaan Regsosek tahun 2022. Dukungan terhadap kegiatan Regsosek ini menjadi penting sebab permasalahan validasi dan akurasi data sering kali ditemukan dan menjadi persoalan dalam perencanaan pembangunan serta penyaluran bantuan sosial. Setiap program pemberdayaan serta perlindungan sosial bagi masyarakat tidak berjalan secara optimal

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bila data yang tersedia tidak akurat. Oleh karena itu, dukungan untuk kelancaran pelaksanaan pendataan sosial ekonomi masyarakat ini penting dan bernilai strategis. Regsosek merupakan pendataan seluruh penduduk yang mencerminkan profil keluarga secara menyeluruh dan diharapkan dapat menghasilkan data terpadu yang menjadi panduan dalam program pemerintah.

Proses kegiatan pendataan awal Regsosek di Sulawesi Tengah, terutama di daerah-daerah pinggiran dan komunitas suku di dalam hutan menimbulkan tantangan yang signifikan karena daerah-daerah tersebut sering kali sulit diakses dan kekurangan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan jaringan komunikasi. Salah satu tantangan utama dalam melakukan pendataan Regsosek di daerah ini adalah kurangnya data kependudukan yang akurat dan terkini. Banyak dari wilayah ini belum disurvei atau dicatat secara menyeluruh dan akibatnya sulit untuk memperkirakan populasinya secara akurat, terutama di daerah pinggiran dan komunitas suku-suku yang tinggal di hutan. Hal ini dapat menyebabkan penghitungan yang kurang atau berlebihan yang dapat berdampak serius pada alokasi dan perencanaan sumber daya. Tantangan besar lainnya adalah kurangnya tenaga terlatih dan sumber daya untuk melakukan pendataan di daerah terpencil. Banyak dari daerah ini yang sulit dijangkau dan logistik untuk mendirikan pusat pencacahan Regsosek dan penempatan petugas Regsosek (PPL dan PML) dapat menjadi rumit dan mahal.

Penulis juga menemui beberapa hambatan sosial dan budaya yang mempersulit pelaksanaan Regsosek yang akurat. Banyak dari wilayah ini adalah rumah bagi kelompok etnis dan bahasa yang beragam (keturunan Arab, keturunan Tionghoa, suku pedalaman), masing-masing dengan adat dan tradisinya sendiri. Hal ini dapat mempersulit petugas untuk berkomunikasi secara efektif dengan penduduk setempat dan mengumpulkan data yang akurat. Selain itu, mungkin ada tabu budaya atau kepekaan seputar pertanyaan atau topik tertentu yang dapat menyebabkan ketidakakuratan data, misalnya beberapa kelompok komunitas mungkin ragu untuk membuka informasi tentang pendapatan rumah tangga mereka.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

B. Limboro: Sebuah Dusun di Antara Kota dan Pinggiran

Provinsi Sulawesi Tengah terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi, Indonesia. Kedudukan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah berada di Kota Palu. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 61.841,29 km^2 (Basaria dkk., 2018). Merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 terbentuklah Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah yang meliputi empat kabupaten, yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Buol Toli-toli. Pada masa perkembangannya, beberapa kabupaten itu dimekarkan menjadi lebih banyak kabupaten. Sebagai kota tertua dan memiliki histori yang panjang di Sulawesi Tengah, tentu Kabupaten Donggala memiliki potensi pelabuhan dan perdagangan yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, kabupaten yang berpusat di Kecamatan Banawa ini, potensi pelabuhan dan perdagangannya justru kalah bersaing dengan ibu kota provinsi, yakni Kota Palu, yang merupakan bekas pemekaran wilayahnya.

Perubahan administrasi pertama merujuk Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi Tengah sekaligus pemekaran pertama saat sebagian wilayah daerah Kabupaten Donggala dibagi menjadi Kabupaten Donggala dan Toli-toli. Pemecahan wilayah kedua terjadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999, ibu kota Kabupaten Donggala resmi dipindahkan dari Kota Palu dikembalikan ke Kota Donggala sendiri yang berjarak sekitar satu jam perjalanan darat dari Kota Palu. Terakhir, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah membentuk pemekaran ketiga dari Kabupaten Donggala. Perubahan administrasi wilayah telah berlangsung tiga kali. Peta Kabupaten Donggala memperlihatkan ragam situasi geografis setempat (Gambar 6.1).

Kondisi Donggala yang minim perubahan tecermin dari persentase penduduk miskin di wilayah ini yang menempatkan Donggala sebagai daerah penyumbang tingkat kemiskinan tertinggi di Sulawesi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

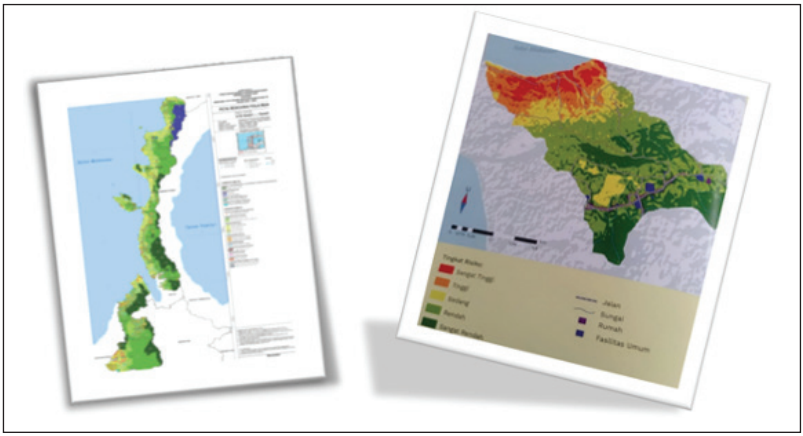

Sumber: Perda Nomor 2 (2022)

Gambar 6.1 Peta Pola Ruang Kab. Donggala Desa Limboro

Tengah (BPS, 2020). Mayoritas warga Donggala yang berdomisili di Kota Palu sangat bergantung dengan perputaran ekonomi kota di sekitarnya. Kondisi seperti ini terlihat nyata di pusat pemerintahan, yakni Kecamatan Banawa yang relatif sepi sebab hilir mudik orang Donggala-Palu dilakukan saat pagi dan sore hari. Kurangnya akses penerangan jalan di jalur utama ruas jalan Donggala–Palu dan minimnya angkutan umum membawa cerita sepinya Donggala sebagai pusat aktivitas yang pernah menggeliat di masa lalu. Sepanjang jalur trans-Sulawesi banyak debu di sepanjang jalan akibat penambangan pasir menambah keengganan warga melintas jalur Palu dan Donggala. Upaya manual mengatasi kendala tersebut sudah dilakukan, yakni dengan pembersihan dan penyiraman setiap hari. Namun, hal ini dirasa belum optimal mengatasi kendala di jalan tersebut.

Pertanian menjadi sumber utama pendapatan penduduk Donggala. Hasil pertanian daerah terdiri dari kelapa, kakao, dan cengkih (Kaunang dkk., 2016). Ketiganya merupakan tanaman perdagangan unggulan daerah ini. Sumber pendapatan petani lainnya berasal dari hasil hutan, seperti rotan serta berbagai macam kayu, yaitu agatis, eboni, dan meranti (Abubakar dkk., 2013). Penggembalaan ternak sapi, kerbau, dan kambing yang dipelihara lepas (tanpa kan-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dang) menjadi ciri khas masyarakat di sana. Peternakan dengan pola ini menyebabkan banyak persoalan baru terkait kebersihan dan kenyamanan. Berbagai pengaturan terkait pola penggembalaan ternak sudah diupayakan oleh pemerintah. Namun, hal ini dirasa belum efektif akibat pemahaman dan kesadaran masyarakat yang minim. Persoalan mendasar adalah minimnya kepemilikan kandang dan luas kepemilikan tanah yang terbatas membuat pemandangan hewan ternak berkeliaran di sekitar menjadi sangat lazim dan biasa.

Menyusuri belasan kilometer ke arah selatan dari Kota Donggala, penulis sampai pada Kecamatan Banawa Tengah yang memiliki delapan desa, yang salah satu di antaranya Desa Limboro. Topografi desa ini sangat bervariasi, mulai dari dataran tinggi di sebelah selatan hingga dataran rendah yang berbatasan langsung dengan lautan di pesisir utara. Berdasarkan data administrasi desa tahun 2020 yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Desa Limboro adalah 661,2 hektare (Pemerintah Desa Limboro, 2022). Desa ini berada di ujung Kabupaten Donggala dan dapat ditempuh melalui jalan darat sepanjang 12,5 km dari ibu kota Kabupaten Donggala atau 40 km jika berangkat dari pusat Kota Palu. Transportasi yang dapat digunakan adalah kendaraan roda dua dan mobil dengan kondisi jalan sempit, berliku, serta menanjak.

Sepanjang perjalanan, pengendara akan disuguhi pemandangan birunya Teluk Palu dan Selat Makassar pada sisi sebelah kanan. Pemandangan tidak kalah menarik juga ditampilkan di sisi kiri karena terdapat hamparan perbukitan hijau yang memanjang. Namun sayangnya, di beberapa lokasi perbukitan, saat ini sudah berubah menjadi lahan gersang dikarenakan terdapat beberapa perusahaan pertambangan galian C yang aktivitasnya tidak hanya merusak alam, tetapi juga menyebabkan pasir dan kerikil sisa tambang berserakan di jalanan utama. Aktivitas pertambangan menyebabkan debu beterbangan di udara dan mengakibatkan beberapa ruas jalan menjadi rusak. Pengemudi yang melintasi jalan ini perlu lebih waspada dalam perjalanan. Jika tidak hati-hati, para pengendara, terutama roda dua, mungkin jatuh tergelincir karena pasir dan akan berhadapan langsung dengan truk-truk besar pengangkut material tambang.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dengan hiruk pikuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di seberang lautan, aktivitas pertambangan di sepanjang jalan Palu–Donggala menuju Desa Limboro makin hari makin meningkat. Ada baiknya jika orang yang memang tidak familier dengan kondisi jalan di sini, disarankan untuk menyewa mobil sekaligus sopirnya dari Kota Palu. Hal ini disebabkan sarana transportasi umum yang melayani dari dan ke Desa Limboro sendiri hanyalah angkutan umum yang jumlahnya sedikit. Transportasi umum ini juga hanya beroperasi pada siang hari, sedangkan malam hari tidak ada angkutan umum yang beroperasi dikarenakan tidak ada supir yang berani mengambil risiko.

Pada umumnya, seperti wilayah perdesaan lain di Indonesia, nuansa kehidupan agraris masih sangat terasa di Desa Limboro. Sebagian besar kegiatan pertanian Desa Limboro dilakukan di lahan kering. Tanah ini selain dapat digunakan untuk persawahan, juga dapat digunakan untuk pekarangan, bangunan rumah maupun kandang, kebun, ladang atau huma, padang penggembalaan, dan berbagai manfaat lainnya. Penggunaan lahan untuk ladang menyumbang sebagian besar dari total pemanfaatan lahan kering. Tanaman pangan seperti beras serta tanaman hortikultura dan palawija merupakan hasil pertanian utama di desa ini. Tanaman pangan seperti jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian, dan tidak lupa beras, secara lugas turut menggerakkan perekonomian desa ini di samping sektor perikanan. Selain pertanian, beberapa warga juga memelihara ternak. Ternak utama masyarakat adalah unggas, baik ayam kampung maupun ras, serta ternak lainnya seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba.

Berbicara mengenai demografi, berdasarkan data basis Desa Limboro tahun 2022, desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.089 orang yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 1.054 orang dan perempuan 1.035 orang (Pemerintah Desa Limboro, 2022). Keseluruhan jumlah penduduk di desa ini terdiri atas 598 kepala keluarga. Mayoritas suku yang mendiami desa ini adalah suku Kaili Unde dan suku Kaili Unde Puu. Masyarakat Unde sendiri dapat ditemui di wilayah Kecamatan Ulujadi Kota Palu, masing-masing di Kelurahan Watusampu, Buluri. Masyarakat sebagian besar menyebar

Buku ini tidak diperjualbelikan.

di wilayah Kabupaten Donggala, termasuk Desa Limboro. Bahasa lokal yang digunakan adalah bahasa Kaili Unde dan Unde Puu.

Desa Limboro terdiri dari lima dusun, yaitu Dusun Satu, Dua, Tiga, Empat, dan Lima. Di beberapa dusun, seperti Dusun Lima Apumpae, beberapa warga suku Kaili masih tinggal di rumah-rumah tradisional yang disebut sapo dan sou. Rumah sapo merupakan rumah yang berdiri di tengah permukiman warga, sedangkan rumah sou adalah sebutan rumah yang berada di dalam areal perkebunan. Kedua rumah ini adalah sejenis rumah panggung yang sebagian besar rangkanya menggunakan kayu. Sementara itu, untuk dinding menggunakan papan kayu dari pohon kelapa yang banyak ditemui di desa ini. Untuk atapnya sendiri, rumah jenis ini masih menggunakan jerami.

Untuk sektor pendidikan, fasilitas pendidikan terdiri dari dua jenjang Pendidikan, yaitu SDN 5 Banawa Tengah di Dusun Dua, SDN 11 Banawa Tengah di Dusun Lima, SMPN 1 Banawa Tengah di Dusun Satu, dan MTs Muhammadiyah Desa Limboro di Dusun Tiga (Pemerintah Desa Limboro, 2022). Para penduduk desa ini harus merantau ke Kota Palu dan sekitarnya apabila ingin melanjutkan ke tingkat pendidikan SMA atau perguruan tinggi. Namun, hanya sebagian kecil dari para siswa ini yang dapat dan ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi karena rata-rata orang tua tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk membiayai pendidikan anak-anaknya.

Selain fasilitas pendidikan, desa ini juga memiliki fasilitas kesehatan berupa satu poskesdes dan dua posyandu. Posyandu di Desa Limboro memiliki empat kelompok. Nama kelompok posyandu di Desa Limboro adalah Kelompok Kenanga Satu terdiri dari Dusun Satu, Kenanga Dua terdiri dari Dusun Dua, Kenanga Tiga terdiri dari Dusun Tiga dan Dusun Empat, dan Kenanga Empat terdiri dari Dusun Lima. Dua gedung posyandu milik desa dimanfaatkan oleh dua kelompok saja, yaitu Kenanga Satu yang terletak di Dusun Satu dan Kenanga Empat yang terletak di Dusun Lima.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kegiatan posyandu Kenanga Dua dilaksanakan di Banggoya dan posyandu Kenanga Tiga dilaksanakan di rumah Kepala Dusun Empat. Poskesdes terletak di Dusun Dua yang juga terdapat tempat tinggal bidan desa. Untuk aliran listrik, PLN sudah merambah ke sebagian besar rumah di Desa Limboro, tetapi penggunaan utamanya hanya untuk penerangan saja. Hanya sedikit orang yang memiliki akses listrik untuk digunakan dalam menghidupkan peralatan elektronik, seperti lemari es dan mesin cuci. Alat-alat tersebut masih dianggap sebagai barang mewah di desa ini, terutama di beberapa dusun seperti Dusun Lima Apumpae.

Penduduk Desa Limboro sendiri mayoritas beragama Islam. Kehidupan beragama di desa ini tidak lepas dari peranan penting dari ulama yang sudah aktif berdakwah sejak sebelum penjajahan Belanda, masa pemerintahan kolonial hingga pada masa pascakolonial. Tercatat pada abad ke-16, Islam mulai menancapkan pengaruhnya ke kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Tengah (Syawal, 2019). Perkembangan pesat kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi Selatan menyebabkan penyebaran ajaran ini meluas hingga di provinsi ini. Daerah pesisir adalah tempat di mana Islam pertama kali mulai memengaruhi budaya lokal di Sulawesi Tengah, terutama di Donggala. Untuk fasilitas keagamaan, terdapat tiga masjid dan satu musala di Desa Limboro. Masjid besar Desa Limboro terletak di Dusun Tiga dengan nama Masjid Al-Munawarah. Di Dusun Lima terdapat Masjid Ar-Rahman dan di Dusun Satu ada Masjid Jabal Nur yang sampai saat ini masih dalam tahap pembangunan. Satu Musala terletak di Dusun Lima yang berada di pesisir pantai Kaluku. Desa Limboro sendiri tidak memiliki sarana dan prasarana ibadah agama yang lain karena menurut data yang ada, semua penduduknya beragama Islam.

Salah satu alasan memilih desa ini menjadi fokus penelitian adalah Desa Limboro merupakan daerah rawan bencana alam di mana pada 28 September 2018 pukul 08.00 Wita gempa bumi berkekuatan 7,4 SR mengguncang daerah Donggala, Palu, dan sekitarnya. Desa ini termasuk lokasi yang porak poranda dilanda gempa. Selain itu juga, merujuk data BPS setiap tahun, Desa Limboro, khususnya Dusun Lima

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Apumpae, selalu masuk dalam kategori miskin dan dikenal memiliki aksesibilitas wilayah yang kurang baik di mana untuk menuju ke dusun ini diperlukan perjuangan karena medan yang berat dan tidak adanya penerangan jalan pada malam hari. Dusun Lima merupakan salah satu dusun yang tertinggal, di mana 130 kepala keluarga yang mendiami dusun tersebut didominasi penduduk mayoritas dengan rentang usia antara 25 sampai 30 tahun dan mayoritas kedua dengan rentang usia 50–55 tahun.

Menurut Kepala Dusun Lima Apumpae, Bapak Eman Juman, banyak hal yang harus dicarikan solusinya di dusun ini secara bersama-sama sebab mayoritas warga hanya berpendidikan SD sehingga sumber daya manusia yang ada dirasa kurang memadai. Minat anak usia sekolah untuk menamatkan sekolah minimal SMP juga tergolong rendah sebab, bukan karena biaya sekolah, tetapi karena biaya transportasi yang membebani dan harus ditanggung setiap hari untuk naik angkot karena jarak sekolah SMP membutuhkan biaya transportasi Rp10.000,00 per anak, sementara untuk sekolah SMA relatif lebih mahal lagi karena lebih jauh jaraknya dari desa. Menurut kepala dusun, mayoritas penduduk di sini memiliki pengeluaran setiap hari berkisar antara Rp25.000,00–Rp30.000,00 per hari. Kondisi ini yang membuat orang tua enggan menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Rata-rata masyarakat menginginkan anak-anak bekerja membantu orang tua untuk menambah penghasilan keluarga sebagai tukang pungut hasil ikan, pemetik kelapa, dan pengumpul kayu.

Kondisi kehidupan masyarakat di Dusun Lima Apumpae memang memerlukan perhatian khusus. Kondisi rumah warga beberapa masih beratapkan daun kelapa, berdinding kayu, dan berlantaikan tanah. Pascagempa 2018 telah tersalurkan bantuan rehabilitasi rumah dari dinas setempat sejumlah 50 unit sehingga beberapa rumah sudah berlantaikan ubin, bertembok dinding, dan beratap galvanis. Banyak yang menilai bantuan ini hanya mencakup sebagian warga saja, mengingat kondisi di lapang banyak warga yang sangat membutuhkan rehabilitasi rumah. Berdasarkan keterangan Bapak Kepala Dusun,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

rehabilitasi rumah bantuan gempa diprioritaskan kepada warga yang sudah memiliki pondasi rumah sehingga program ini hanya dapat dinikmati sebagian kecil masyarakat karena rumah warga masih banyak yang belum berpondasi beton. Rata-rata rumah warga memiliki luas tanah kurang dari 60 meter persegi bahkan secara ekstrem rata-rata hanya 20–30 meter persegi saja. Di dusun ini juga diketahui masih jarang ditemui masyarakat yang memiliki kendaraan roda dua sehingga mobilitas masyarakat juga sangat terbatas dan memerlukan perbaikan di sektor transportasi umum.

Dusun Lima Apumpae sesungguhnya sangat kaya akan potensi alam. Dusun ini banyak ditumbuhi oleh pohon kelapa yang menurut penelusuran informasi ke warga, banyak pohon kelapa yang ditanam oleh warga ini bukan milik mereka lagi karena sudah dijual kepada orang luar dusun. Informasi ini terverifikasi oleh istri kepala desa, Suwartiningsing. Beliau mengatakan bahwa rata-rata penduduk telah menjual pohon kelapanya ke para tengkulak untuk dapat diproses menjadi bahan yang lebih bernilai ekonomi tinggi. Informasi terkait praktik penjualan pohon kepala kepada tengkulak sudah lama terjadi sehingga masyarakat tidak dapat mengatasi masalah tersebut dan hanya menerima keadaan.

Sangat disayangkan pohon kelapa yang jumlahnya luar biasa banyak ini ternyata bukan milik warga, tetapi pohon tersebut sudah tergadaikan kepada orang lain yang bukan berasal dari dusun tersebut. Saat penulis ingin menelusuri kondisi ini lebih jauh, penulis terkendala harus mengintervi siapa sebab banyak orang yang menyatakan praktik semacam ini sudah terjadi sejak generasi sebelumnya. Apabila ditanyakan kontribusi terhadap para pemilik pohon kelapa, berapa lama dapat memiliki pohon ini sampai kepada kondisi seperti apa praktik ini berakhir, tidak ada yang dapat menjawab termasuk Bapak Mohammad Kifli selaku kepala desa. Namun, yang bersangkutan mencoba melakukan penelusuran siapa pemilik pohon kelapa ini sesungguhnya.

Terkait instalasi listrik, tempat ini terkendala oleh jaringan dan medan yang sulit sehingga saat malam hari Dusun Apumpae sering

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mati lampu, begitu juga halnya dengan aliran air. Aliran air PDAM di dusun ini memiliki banyak hambatan dikarenakan kondisi geografis yang cukup ekstrem. Tempat penampungan air yang dibangun oleh PDAM juga tidak optimal karena posisinya lebih tinggi dari pipa saluran air. Oleh karena itu, jaringan yang terbangun dengan kondisi yang ada tandon penampung air akan sulit untuk terisi penuh. Hal ini selain karena ketinggian, didapati juga tidak ada pompa pendorong air. Dari tiga tandon yang ada, hanya satu yang optimal sehingga kebutuhan MCK warga setiap hari juga bergantung pada persediaan air harian. Problem ini sudah diutarakan oleh warga dan perangkat desa sampai ke kecamatan, tetapi instalasi yang terbangun tidak sesuai harapan sehingga problem sanitasi MCK dan kebersihan di Dusun Lima Apumpae harus menjadi prioritas penanganan, setidaknya kehidupan keseharian masyarakat dapat berubah lebih baik, lebih sehat, dan lebih beradab.

Pengeluaran warga dari hasil pendataan ini terverifikasi rata-rata Rp30.000,00 per hari. Kondisi seperti itu biasanya digunakan untuk menyambung hidup saja. Warga hanya membeli beras saja, sedangkan sayur dan ikan biasanya didapatkan dari hasil sisa nelayan yang tidak terjual sehingga harganya murah. Sayur diperoleh dari tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar rumah. Perhatian untuk kondisi kesehatan juga dirasakan masih sangat kurang bila rujukannya adalah pengeluaran sebesar Rp30.000,00 per hari, akibatnya banyak warga yang tidak sanggup memperoleh fasilitas BPJS. BPJS di sini ada yang diperoleh dari program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kesadaran akan kesehatan masyarakat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang berkunjung ke posyandu yang jaraknya sekitar 2 km. Persoalan kesehatan ini akan mencuat apabila warga memerlukan penanganan yang bersifat lebih dan harus dirujuk. Sayangnya, banyak di antara warga yang tidak aktif membayar iuran BPJS. Demikian juga, lokasi puskesmas yang ada fasilitas rawat inapnya cukup jauh sehingga memerlukan biaya tambahan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

C. Membumikan Standar Nasional ke Donggala

Pada tahun 2020–2021, pembangunan menghadapi kendala yang berat karena pandemi COVID-19. Dampaknya adalah ekonomi mengalami kontraksi, tingkat pengangguran meningkat, dan kemiskinan makin tinggi. Tantangan ini kemungkinan masih akan berlanjut hingga tahun 2022. Meskipun pengangguran dan kemiskinan menunjukkan sedikit penurunan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, namun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi COVID-19 (BPS, 2022). Selain itu, tantangan di tahun 2022 juga meliputi kondisi global dampak perang Ukraina-Rusia terhadap kenaikan harga komoditas dunia. Kenaikan harga atau inflasi yang signifikan dapat berdampak pada peningkatan kemiskinan, terutama jika tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga pada kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah.

Dalam upaya mengatasi konsekuensi yang timbul akibat pandemi COVID-19, pemerintah telah merancang tiga reformasi struktural dalam Rencana Kerja tahun 2021 dan 2022. Reformasi tersebut meliputi sistem kesehatan, sistem kebencanaan, dan perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh penduduk. Tujuan reformasi sistem perlindungan sosial adalah meningkatkan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial sehingga dapat memberikan manfaat secara tepat sasaran, tepat waktu, mudah, akuntabel, dan responsif dalam menghadapi bencana, terutama bagi mereka yang rentan (BPS, 2022).

Untuk mereformasi sistem perlindungan sosial yang ada, ada enam prasyarat yang harus dipenuhi. Prasyarat utama adalah melakukan transformasi data menuju satu data Regsosek untuk seluruh penduduk. Transformasi data ini dilakukan untuk mengubah penyediaan data sosial ekonomi yang awalnya bersifat sektoral menjadi data yang terintegrasi dan akurat. Hal ini akan melibatkan beberapa perubahan dalam penyediaan data sosial ekonomi (BPS, 2022), termasuk (1) mencakup seluruh penduduk Indonesia; (2) menggunakan standar dan metodologi yang sama; (3) melakukan pemutakhiran secara rutin; (4) memudahkan akses; dan (5)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

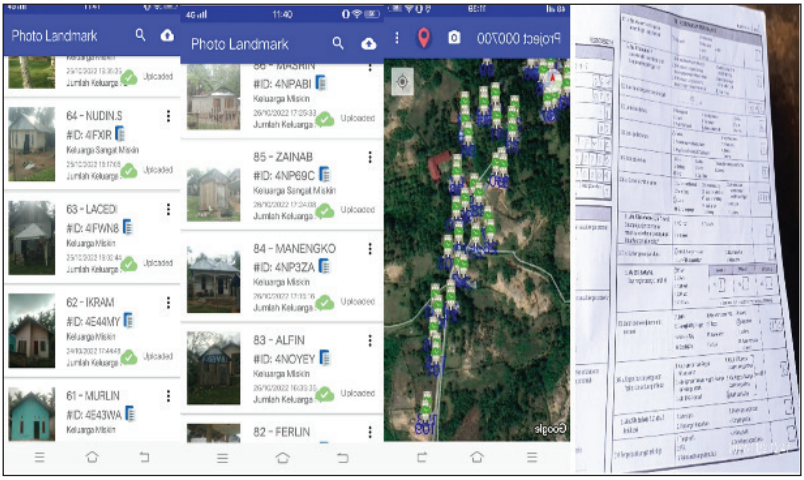

Foto: Arditya (2022)

Gambar 6.2 Verifikasi Faktual

membagikan data kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Oleh karena itu, transformasi data menuju Regsosek adalah kunci utama dalam mereformasi sistem perlindungan sosial karena hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas dan akurasi data sosial ekonomi yang digunakan untuk membangun kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam memberikan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia.

Secara sederhana, dalam proses bisnis kegiatan pendataan awal Regsosek 2022 dilakukan melalui beberapa tahapan dan level. Secara substansi, verifikasi secara faktual menjadi dasar dalam menjaga validitas data. Verifikasi data tergambar dari *tagging* spasial lokasi rumah warga (Gambar 6.2). Selanjutnya, koordinasi dan komunikasi dilakukan secara berjenjang dimulai dari petugas pendataan lapangan (PPL) ke petugas pemeriksa lapangan (PML), koordinator sensus kecamatan (Koseka) ke BPS Kabupaten Kota, ke BPS Provinsi hingga Pusat, dan begitu pula sebaliknya. Dalam koordinasinya juga terdapat sistem pengawasan berbasis aplikasi dan website untuk evaluasi kinerja pekerja lapangan sehingga kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat dapat melihat progres kinerja secara *real time*. Oleh karena itu, proses

Buku ini tidak diperjualbelikan.

perekrutan mitra dan petugas lapangan diserahkan ke kabupaten/kota masing-masing, termasuk dalam menentukan syarat dan kriteria petugas. Selain itu, untuk memudahkan proses koordinasi dan komunikasi, terdapat syarat khusus bagi enumerator, yaitu memiliki ponsel yang kompatibel dengan aplikasi Regsosek sehingga proses komunikasi dan pengawasan (validasi) diharapkan dapat terjaga.

Pengumpulan data awal dari Regsosek akan menghasilkan data yang terintegrasi tidak hanya untuk program perlindungan sosial, tetapi juga untuk semua program yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka kebijakan pemerintah yang lebih terarah. Selain itu, data tersebut juga dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Regsosek berfungsi untuk memfasilitasi koordinasi dan pertukaran data antardaerah untuk memastikan penggunaan data yang konsisten. Tujuan dari pengumpulan data awal Regsosek adalah untuk menyediakan sistem dan basis data yang mencakup seluruh penduduk, termasuk profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan dan basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan. Regsosek mencakup informasi tentang kondisi sosial ekonomi, termasuk demografi, kondisi perumahan dan sanitasi air bersih, kepemilikan aset, kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan, dan informasi sosial ekonomi lainnya (BPS, 2022).

Foto: Arditya (2022)

Gambar 6.3 Diskusi Bersama BPS Kab. Donggala dan BPS Provinsi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Simon Sapary (Gambar 6.3) mengatakan bahwa Regsosek merupakan bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial yang salah satu prasyarat utamanya ialah transformasi data sosial ekonomi yang terintegrasi dan akurat. Pendataan Regsosek ini diharapkan mampu memutakhirkan data sosial ekonomi sehingga dapat menangkap perubahan dinamika kesejahteraan masyarakat. Diharapkan data Regsosek yang dihasilkan dapat menjadi rujukan guna mengintegrasikan program perlindungan sosial dan juga pemberdayaan masyarakat.

Fase implementasi awal terdapat ketidakjelasan dan keterlambatan informasi dari pemerintah pusat terkait dengan kegiatan Regsosek ini. Akibatnya, BPS Provinsi Sulawesi Tengah sempat mengira bahwa kegiatan Regsosek dibatalkan mengingat waktu yang sempit dan praktis tersisa 2–4 bulan. Proses perekrutan mitra dan petugas lapangan diserahkan ke kabupaten/kota masing-masing dalam menentukan syarat petugas dan proses perekrutannya. Hanya saja ada syarat khusus, yaitu memiliki ponsel yang kompatibel dengan aplikasi Regsosek sehingga proses *upload* data ke aplikasi dapat berjalan baik. Perekrutan biasanya diutamakan bagi yang telah atau pernah mengikuti program sensus atau pencacahan oleh BPS semisal sensus penduduk, sensus pertanian, atau sensus ekonomi.

Apabila seleksi para petugas dirasa kurang maka proses rekrutmen dapat mempertimbangkan keterlibatan para perangkat desa/dusun dan warga setempat yang dinilai dan dirasa oleh kantor BPS memadai dan memiliki kecakapan serta amanah dalam menjalankan tugas pendataan di lapangan. Prasyarat ini menjadi sangat penting karena Regsosek ini benar-benar menyentuh sisi-sisi humanis manusia dan perlu kejelian dalam menggali informasi yang bersifat privasi dan terbatas. Partisipasi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah relatif tinggi, terutama di daerah perdesaan, sedangkan untuk daerah perkotaan justru kurang antusias karena faktor waktu dan kesibukan warga. Kegiatan Regsosek merupakan kegiatan kolaborasi antara beberapa kementerian dan BPS. BPS, baik itu pusat maupun daerah, pada kegiatan Regsosek ini hanya bertugas untuk melakukan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pengumpulan data dan penginputan. Data hasil entri kemudian akan disimpan dalam database. Pada masa mendatang harapannya ada satu data nasional yang terkonfirmasi, tervalidasi secara faktual, dan dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan isu kemiskinan dan kerentanan sosial.

Masyarakat, terutama kelompok rentan, secara umum mengira program ini hanya mengenai seputar masyarakat yang mendapat bantuan dan tidak sehingga masyarakat banyak yang berkeinginan untuk dikategorikan ke dalam kelompok rentan miskin sebagai akibat pandemi datau hanya dikarenakan warga ingin mendapatkan bantuan pemerintah secara berkelanjutan. Pada fase ini segenap jajaran BPS, Pemda, kecamatan, sampai pemerintahan desa dan petugas PPL dan PML diuji dalam penguasaan konsep dan pemahaman program secara langsung di lapangan, apakah benar datanya datau proses input di aplikasi sudah benar, seperti yang terlihat di Dusun Lima Apumpae, Desa Limboro, Donggala.

Fase ini boleh dibilang sangat krusial sebab tidak segelintir warga yang berharap bantuan, sementara kondisi warga sebenarnya tidak perlu bantuan. Di sisi lain, keterbatasan yang dimiliki warga Dusun Lima Apumpae sebagai lokasi penelitian memang memerlukan uluran tangan pemerintah atau selama ini hidupnya menggantungkan diri dari uluran program pemerintah. Di dusun inilah tergambar secara jelas bahwa proses registrasi ini dirasa membawa manfaat yang signifikan. Terlebih ketika latar belakang Dusun Lima sendiri memang rentan kemiskinan, rawan bencana gempa bumi dan tsunami, serta bencana alam lainnya seperti longsor dan banjir.

Apresiasi terhadap Kepala Desa Limboro dan Kepala Dusun Lima, PML yakni Ibu Suharyanti dan PPL Ibu Maslian yang mendukung penuh proses ini. Jembatan keberhasilan Regsosek ini berjalan dan berhasil sebab penduduk dusun yang terjaring dalam waktu singkat sejumlah 130 KK dengan estimasi total 500-an jiwa dengan pendekatan (sampai penulis mengunjungi desa) yang humanis. Mendata nama, tahun dan tempat lahir, luas lantai bangunan, luas tanah, jenis lantai, jenis dinding, sumber air utama, totalnya bila melihat kuesioner,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

termasuk dalam 80-an pertanyaan yang menyangkut keadaan sosial dan ekonomi setiap satuan kepala rumah tangga yang sangat beragam keadaannya. Tergabung dalam empat kelompok besar, yakni keterangan tempat, petugas, perumahan, dan sosial ekonomi. Setiap survei harus diperlihatkan titik koordinat pendataan, yakni *geotagging* dan foto empat penjuru sisi rumah beserta atap, lantai, dan dinding. Penggunaan aplikasi *geotagging* ini membawa sedikit kendala, sebab di Dusun Lima, sinyal Telkomsel, XL, dan Indosat tidak terlampau kuat membuat petugas pasti bertemu di pusat desa/balai desa/wilayah dengan sinyal ponsel yang stabil.

Teknologi di satu sisi mempermudah penggalian informasi dengan foto empat penjuru rumah maka akan terlihat secara jelas kondisi faktual sosial ekonomi masyarakat. Salah satu contoh kejadian atau hal yang bila tidak ada teknologi akan bermasalah di lapangan, yaitu mengategorikan kondisi rumah responden, misalnya warga memiliki rumah berdinding dan berlantaikan batu, tetapi warga menjadi pengangguran yang dikarenakan faktor usia dan tenaga. Rumah keluarga ini seperti itu pun karena bantuan bedah rumah sebesar Rp50-an juta dari Pemerintah Kabupaten Donggala. Rumah keluarga ini hancur akibat gempa dan tsunami tahun 2018 lalu. Peran PPL dan PML serta ketua satuan lingkungan setempat (SLS) menjadi sangat vital. Kebijaksanaan petugas menilai, mengamati, dan mendalami keadaan sosial warga yang dijadikan argumen dasar untuk menggolongkan seseorang masuk ke dalam kelompok mana, menjadi sangat krusial.

Apabila merujuk pada keterangan Bapak Eman Juman, Kepala Dusun Lima, sering kali masyarakat enggan bicara kepemilikan ternak dan pohon kelapa. Apabila seseorang punya ternak, dianggap tidak perlu lagi mendapatkan bantuan. Pemahaman semacam itu tentu tidak memiliki dasar sebab dalam survei ini masih banyak hal yang harus tergambarkan dalam sensus. Untungnya, di tempat yang penulis datangi, penulis merasakan ketulusan dan sikap pantang menyerah yang dilakukan oleh seluruh petugas PPL dan PML dalam memberikan data dan melakukan penilaian. Saat penulis mengonfirmasi dengan Koseka di Dusun Lima, yakni Hidayat, kunci dari keakuratan data

Buku ini tidak diperjualbelikan.

adalah kemauan, kejujuran, dan komunikasi yang baik. Hal ini, dalam tataran kontrol, sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Kantor BPS saat berkonsultasi dengan Bupati. Saat itu, Bupati menginstruksikan agar camat selaku kepala pemerintahan sesuai dengan penjenjangannya tidak boleh melakukan ketidakjujuran soal data. Pemerintah harus berusaha mendorong warganya untuk mengatakan apa pun secara jujur dan tulus.

Dengan data yang valid, kegiatan Regsosek ini pastinya akan membawa manfaat bagi pembangunan Kabupaten Donggala, terutama di Desa Limboro. Misalnya, BPJS yang sumber pembiayaan datanya dari daerah, banyak yang tidak dapat digunakan karena data yang tidak tepat sasaran. Pelajaran yang dapat dipetik dalam program Regsosek tahun 2022 ini adalah sebuah proses pencacahan menembus batas geografi yang bertujuan menyediakan satu data tentang masyarakat yang belum sejahtera.

D. Berharap di Antara Setiap Kesempatan Pendataan

Pendataan Awal Regsosek secara khusus adalah untuk mewujudkan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat (BPS, 2022). Artinya, kebijakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dimulai dari tangan para petugas pendata. Berdasarkan informasi Bapak Agus Kepala Kantor BPS Kabupaten Donggala, sebelumnya terdapat ketidakjelasan dan keterlambatan informasi dari pemerintah pusat terkait dengan kegiatan Regsosek ini. Akibatnya, BPS Provinsi Sulawesi Tengah sempat mengira bahwa kegiatan Regsosek ini dibatalkan mengingat waktu yang sempit. Dengan kondisi demikian, proses perekrutan mitra dan petugas lapangan diserahkan ke BPS kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPS sendiri tidak memiliki wewenang untuk menyimpan dan mendiseminasikan data tersebut karena wewenang tersebut menjadi milik Bappenas. BPS hanya berharap *output* dari hasil pencacahan ini digunakan sebagai

Buku ini tidak diperjualbelikan.

acuan dalam pengambilan keputusan terkait program-program perlindungan sosial. Pada dasarnya, kegiatan ini secara umum dikoordinasikan oleh fungsi sosial BPS, tetapi besarnya kebutuhan dalam kegiatan Regsosek mengakibatkan semua pegawai diwajibkan terlibat dalam kegiatan ini.

Tantangan utama dalam kegiatan Regsosek ini adalah pendeknya waktu dan minimnya persiapan sehingga dalam perjalanannya terjadi beberapa perubahan, baik itu konsep dan definisi maupun beban tugas lapangan. Terdapat aplikasi baru yang harus diunduh petugas lapangan di tengah-tengah proses pendataan untuk mendukung laporan sehingga hal tersebut membuat petugas PPL mengunjungi kembali beberapa kepala keluarga dan mengulangi pendataan. Proses rekrutmen pekerja lapangan sebagian besar mengandalkan mitra yang pernah bekerja sama dengan kegiatan BPS sebelumnya mengingat waktu persiapan kegiatan yang hanya sebulan. Secara keseluruhan, ada 509 petugas lapangan yang terpilih, terdiri dari Koseka, PML, dan PPL. Kendala di lapangan sebagian besar merupakan tantangan yang berasal dari alam, seperti pegunungan, tempat terpencil, dan cuaca yang tidak menentu. Adapun kendala dalam Regsosek ini juga datang dari penduduk, yaitu waktu pelaksanaan sebab para penduduk sebagian besar berada di kebun di siang hari. Oleh karena itu, survei dilakukan pada malam hari.

Dalam proses persiapan dan pelaksanaannya, koordinasi dan komunikasi dilakukan secara berjenjang di mulai dari SLS, di mana data orang yang dicacah minimal 1 SLS yang mencapai 250 keluarga. Selanjutnya, PPL memberi laporan ke PML, Koseka ke BPS Kabupaten Kota, ke BPS Provinsi hingga Pusat.

Sebelum kegiatan Regsosek 2022, menurut penuturan Kepala Desa Limboro, instruksi telah diberikan oleh Bupati Donggala ke seluruh camat untuk hadir dalam sosialisasi kegiatan ini. Selain itu, Bupati juga mengeluarkan surat edaran untuk kelancaran kegiatan Regsosek sebagai tanda bukti dukungan pemerintah daerah. Di dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti. Namun, pada proses pendataan, ada beberapa warga masyarakat yang enggan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menjawab jujur terkait dengan kepemilikan, seperti ternak, kebun, dan kendaraan bermotor. Persoalan ini dapat terselesaikan ketika PPL dan PML serta kepala dusun telah terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik. Petugas dapat menyimpulkan status warga terdata secara akurat, jujur, dan terverifikasi berjenjang sehingga penilaian data status warga tersebut akan bersifat objektif. Ketidakjujuran warga rata-rata didorong oleh harapan bahwa dengan pendataan Regsosek nantinya berbagai bantuan dapat diterima oleh warga. Masyarakat pada akhirnya akan berpura-pura miskin sebagaimana kelompok sasaran yang ditarget.

Salah satu tantangan ataupun permasalahan krusial di Dusun Lima sebagai lokasi penelitian, yaitu sulitnya sinyal internet. Keadaan ini disikapi dengan opsi mengganti *provider* jaringan, meskipun bukan jaminan sinyal akan tersedia. Foto, pengunggahan dokumen, dan *geotagging* yang dilakukan sering kali ter-*delay* karena jaringan yang tersedia sangat terbatas. Menurut pantauan Bapak Hidayat selaku Koseka, kondisi kurang baiknya sinyal tersebut dapat diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi antara PPL, PML, dan Koseka dengan pertemuan tatap muka. Sulitnya sinyal akan menyebabkan proses unggah dan *geotagging* akan bermasalah.

Secara faktual, permasalahan yang menarik untuk dicermati terjadi saat menentukan keluarga yang masuk kategori 1 (sangat miskin) dan kategori 2 (miskin). Beberapa petugas lapangan dibantu kepala dusun beberapa kali melakukan verifikasi ulang dan pengecekan langsung ke lapangan untuk menentukan kategori secara adil dan benar. Sebagian besar penduduk di Apumpae memiliki pekerjaan sebagai buruh panjat kelapa, buruh perkebunan, kuli, dan pekerjaan kasar lainnya. Tidak ditemui pekerja kantoran dan PNS di dusun ini. Pendidikan bukanlah prioritas bagi warga, meskipun sudah digratiskan oleh pemerintah. Sebagian besar penduduk memiliki tingkat pendidikan yang rendah, setara SD (bahkan tidak lulus). Tidak ada moda transportasi umum yang menghubungkan Donggala dan desa sampai ke dusun sehingga warga memiliki mobilitasnya terbatas, termasuk dalam mencari kerja dan mencari ilmu (sekolah). Sarana dan prasarana umum masih

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sangat minim, hanya terdapat satu posyandu, sementara sekolah SD dan SMP terdekat berjarak 2 km.

Kecamatan Banawa Tengah menghadapi berbagai permasalahan sosial, khususnya kemiskinan yang masih tinggi. Keadaan ini tersirat jelas di Desa Limboro, di mana tiga dari lima dusun masih perlu mendapatkan perhatian khusus terkait upaya pengentasan kemiskinan. Tiga dusun itu ialah Dusun Satu, Dusun Empat, dan Dusun Lima. Tingkat pendidikan penduduk rendah (terutama di pelosok perdesaan). Masyarakat yang sebagian dikategorikan rawan miskin, mudah sekali jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem dikarenakan masalah-masalah sosial dan bencana, seperti pandemi, krisis ekonomi, bencana gempa, dan tsunami. Pada diskusi dengan Kepala Desa Limboro, yakni Mohammad Kifli tergambar bahwa proses kegiatan Regsosek dapat dibilang lancar karena "didukung" oleh keadaan penduduknya.

Saat pengamatan ini dilakukan, progres yang didapat petugas di lapangan sudah mencapai 60–70%. Hambatan yang dihadapi tidak ada yang besar, hanya beberapa PPL yang memiliki progres pendataan yang lamban. Selain itu, beberapa petugas mengalami masalah kesehatan sehingga tidak maksimal dalam bekerja. Kemiskinan sangat sulit untuk diatasi karena menurut Kepala Desa, kemiskinan yang ada di Desa Limboro ini merupakan kemiskinan kultural dan struktural sehingga perlu strategi pengentasan kemiskinan yang tidak biasa.

Selain persoalan substansi pendataan, perlu disadari bahwa kegiatan Regsosek merupakan kegiatan kolaborasi antara beberapa kementerian dan BPS. Sekalipun demikian, BPS, baik itu pusat maupun daerah, pada kegiatan Regsosek hanya bertugas dalam melakukan pengumpulan data dan penginputan. Data hasil entri kemudian akan disimpan dalam *database* Bappenas untuk dilakukan tahapan selanjutnya. Keadaan ini tentu menjadi kendala karena BPS tidak menjadi pemangku data utamanya. Harapan ke depannya, ada satu data nasional yang terkonfirmasi, tentunya setelah mendapatkan validasi secara faktual dan dijadikan referensi utama dalam pengambilan kebijakan terkait isu-isu kemiskinan dan kerentanan sosial.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

E. Menjadi Dia yang Berperan atas Nama Lembaga

Mulai 15 Oktober hingga 14 November 2022, BPS melakukan kegiatan Pendataan Awal Regsosek tahun 2022 di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini sendiri bertujuan membangun sistem *database* seluruh penduduk Indonesia yang terdiri dari profil, kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan yang akan dihubungkan dengan data induk kependudukan maupun *database* lainnya (BPS, 2022), baik itu di tingkat desa/kelurahan hingga pada tingkat nasional. Secara keseluruhan, model pendataan awal Regsosek 2022 dilakukan dengan metode sensus. Artinya, petugas pendataan (PPL) dan petugas pemeriksa (PML) langsung mengunjungi rumah per rumah tanpa memandang status ekonomi dan sosial.

BPS meminta kepada seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah untuk mendukung program ini. Menindaklanjuti hal tersebut, jajaran pemerintah daerah tidak tinggal diam. Mulai dari gubernur, bupati, walikota, camat, kepala desa, dan lurah hingga ketua RT, secara serentak ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendataan awal Regsosek. Sebagai upaya sosialisasi awal, Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan surat edaran (SE) untuk mendukung kegiatan Regsosek 2022, yang dilanjutkan dengan SE dari seluruh bupati dan wali kota, yang bunyinya adalah perintah dari bupati untuk mengumpulkan camat di masing-masing wilayahnya. Setelah itu, para camat kemudian meneruskan kepada lembaga dan unit pemerintahan yang lebih kecil di bawahnya, seperti kepala desa dan kepala dusun, untuk turut serta berpartisipasi menyukseskan dan mengawal kegiatan Regsosek 2022.

Berbicara mengenai program sosialisasi yang dilakukan dalam rangka menyukseskan Regsosek, sejauh ini program sosialisasi dilakukan secara satu arah dengan sistem *top down* melalui surat edaran ini dapat dikatakan berhasil, setidaknya hal itulah yang terjadi di Desa Limboro, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala. Seperti yang kepala desa tuturkan, sosialisasi oleh perangkat pemerintah desa tersebut dilakukan hingga SLS di dusun-dusun dan berjalan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Arditya (2022)

Gambar 6.4 Kegiatan Koordinasi di Desa Limboro

dengan lancar dengan tidak adanya penolakan yang berarti dari warga masyarakat.

Selain model sosialisasi, desa ini juga melakukan berbagai upaya lain untuk memperlancar jalannya proses pendataan awal Regsosek 2022. Acara pengajian merupakan salah satu cara yang digunakan untuk sosialisasi dalam program yang dikoordinatori oleh BPS ini. Para petugas enumerator yang telah ditunjuk selanjutnya dipanggil untuk ikut berpartisipasi sebagai narasumber dalam rangkaian acara sosialisasi. Kegiatan koordinasi dilakukan secara rutin oleh para petugas pendata (Gambar 6.4). Secara umum, materi sosialisasi program Regsosek ke masyarakat adalah dengan memberikan penjelasan yang komprehensif kepada warga, mulai dari tujuan program hingga bagaimana tata cara pengumpulan datanya di lapangan. Masyarakat diimbau untuk bersedia dan mendukung program ini dengan menjawab pertanyaan survei secara jujur. Kejujuran memang ditekankan sebagai salah satu topik di sini karena berdasarkan pengalaman terdahulu, yaitu banyak warga yang enggan memberikan jawaban yang jujur, terutama terkait dengan kepemilikan harta benda dan pengeluaran. Lebih lanjut lagi, sosialisasi yang dilakukan pihak Desa Limboro tidak hanya terbatas kepada kegiatan keagamaan semata, tetapi juga merambah kepada kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang ada di masyarakat, seperti melalui kegiatan posyandu.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Selain itu, pendekatan kultural juga dilakukan untuk melanggengkan kegiatan Regsosek tahun 2022 ini. Secara umum, seperti yang telah diketahui khalayak ramai bahwa dalam implementasi sebuah kebijakan maupun pelaksanaan program pemerintah di tingkat masyarakat, sosialisasi tidak cukup hanya didukung dari sisi pemerintah saja. Dibutuhkan elemen lain untuk mendukung sebuah kebijakan atau program, seperti halnya kegiatan Regsosek ini. Peran tokoh desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program pendataan dinilai sangat penting untuk wilayah perdesaan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional terkait senioritas dan penokohan. Hal inilah yang terjadi pada Dusun Lima Apumpae, di mana pelibatan kepala dusun dalam kegiatan Regsosek dinilai sangat krusial.

Usaha Bapak Eman Juman sebagai Kepala Dusun (kadus) turut serta dalam menyukseskan program Regsosek di dusunnya, sangat besar. Betapa tidak, meskipun kondisi fisiknya tidak terlalu prima dikarenakan masih dalam proses penyembuhan pascaoperasi kandung kemih, dia tetap begitu rajin mendampingi petugas lapangan untuk melakukan verifikasi pendataan penduduk, terutama baik itu yang tergolong miskin maupun yang sangat miskin. Verifikasi ulang beberapa kali beliau lakukan agar mendapatkan hasil pendataan yang seakurat dan seadil mungkin.

Seorang pemimpin seperti Eman sering kali memainkan peranan yang penting dalam melancarkan sebuah program kebijakan. Sudah sangat jelas bahwa kepemimpinan yang berdasarkan komitmen tinggi, melibatkan masyarakat secara menyeluruh, disertai dengan aturan yang dibuat melalui konsensus dan partisipasi aktif masyarakat, merupakan komponen penting dari suksesnya sebuah program dan kebijakan, di sini dicontohkan adalah kegiatan pendataan Regsosek. Sebelum kegiatan Regsosek dimulai, Eman beserta kepala dusun lainnya sudah terlebih dahulu di-*briefing* terkait dengan kegiatan ini. Pemetaan sederhana pun juga dilakukan untuk melihat data awal penduduk untuk memudahkan pendataan. Verifikasi pengategorian

Buku ini tidak diperjualbelikan.

masyarakat juga dilakukan secara terbuka dan *bottom up* dengan melibatkan kadus dan petugas lapangan.

Secara keseluruhan, upaya Eman Juman boleh dikatakan telah berhasil mengawal Regsosek di dusunnya dikarenakan proses pendataan berjalan dengan cepat dan lancar, tanpa hambatan apapun kecuali cuaca dan medan yang cukup berat. Bahkan, saking lancarnya, proses pendataan Regsosek di dusunnya sudah selesai dalam kurun waktu kurang dari 15 hari pelaksanaan. Kesuksesan ini tentu saja tidak dilakukan oleh dirinya sendiri. Keberhasilan ini dilakukan bersama PPL setempat yang bernama Maslian. Penunjukan Maslian, seorang wanita tangguh asli Dusun Apumpae, tidak lepas dari peran Eman sebagai Kadus. Dia bersama perangkat desa, menaruh harapan tinggi seiring dengan diberikannya posisi petugas lapangan kepada seorang wanita. Dia merasa petugas wanita sebagai PPL akan lebih dimudahkan dalam proses pendataan dan lebih diterima oleh masyarakat. Ditambah lagi, dalam dirinya sebagai wanita, juga akan membawa serta isu-isu sensitif, seperti kepedulian terhadap lingkungan maupun kesetaraan gender.

Salah satu akar kemiskinan di dusun ini secara khusus dan di perdesaan di Indonesia secara umum, menurut penulis, adalah masyarakat di perdesaan sering kali sangat tergantung kepada laki-laki dalam mencari nafkah. Wanita biasanya hanya bertugas mengurus urusan domestik rumah tangga tanpa memberikan kontribusi keuangan yang berarti untuk keluarganya. Dalam banyak kasus, penghasilan suami sangat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup. Jika hal ini diteruskan, susah sekali untuk sebuah keluarga dapat keluar dari garis kemiskinan. Beberapa program pemerintah terkait dengan pemberdayaan wanita melalui usaha industri rumahan dan kegiatan produktif lainnya sudah dilakukan di beberapa tempat, namun untuk Dusun Apumpae, tidak ditemukan program tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu hambatan dalam kemajuan di masyarakat desa ini. Maka dari itu, perlu perspektif gender untuk mengurai permasalahan kemiskinan di Dusun Apumpae maupun daerah lainnya. Dipilihnya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

seorang wanita sebagai petugas PPL di sini merupakan keputusan Eman yang sangat tepat.

Sebagai tokoh yang dihormati masyarakat sekitar, Eman Juman sangat mendukung kegiatan pendataan awal Regsosek tahun 2022 ini. Pada dasarnya, memperbaiki daerah perdesaan sangat penting untuk kemajuan sebuah bangsa di mana pun desa itu berada. Dia menyadari bahwa dusun di mana dirinya tinggal memiliki kondisi yang memprihatinkan, terutama di sektor pendidikan. Banyaknya anak putus sekolah dan bernasib kurang lebih sama mirisnya dengan generasi pendahulunya dalam mencari penghidupan, membuat Eman merasa harus ada perubahan di dusun ini agar dapat keluar dari lingkaran setan yang bernama kemiskinan.

Eman berkaca pada dirinya sendiri bahwa dia memiliki pendidikan yang rendah dan hanya bekerja sebagai buruh kasar, seperti buruh bangunan, perkebunan, pelabuhan, hingga pemanjat kelapa. Oleh karena itu, dari kegiatan Regsosek ini, dia mengharapkan pemerintah di masa depan memiliki solusi yang tepat bagi dusunnya agar dapat keluar dari lembah hitam yang bernama pendidikan rendah, masyarakatnya menjadi pekerja murah, dan kemiskinan yang tinggi. Sebagai pemimpin dusun, Eman berusaha mencari jalan keluar agar masyarakat sadar arti pentingnya pendidikan dan kesehatan. Meskipun sampai sekarang masih belum mendapatkan titik terang untuk mendorong orang-orang di sekitarnya agar lebih memahami tentang arti pentingnya pendidikan, namun hal terkecil yang dapat dilakukannya saat ini adalah dengan memberi contoh yang nyata pada keluarganya, yaitu dengan membina anaknya untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya. Hal itu tentu saja bukan hanya omong kosong belaka. Saat ini, anak sulungnya tengah duduk di bangku kuliah di sebuah universitas di Kota Palu. Kelak, dia berharap bahwa anaknya dapat membawa perubahan, tidak hanya untuk keluarga kecilnya, tetapi juga untuk masyarakat Dusun Lima Apumpae tentang arti pentingnya sebuah pendidikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

F. Maslian dan Suharyanti yang Melindungi: *Life Story* Pendata

Ibu Suharyanti mendedikasikan waktunya untuk membantu suami beliau yang mendapat amanah sebagai Kepala Desa Limboro. Beliau menceritakan mengenai kondisi desa dan latar belakang penduduk desa. Desa Limboro merupakan area yang rentan terhadap banjir dan gempa bumi. Desa dengan luas 661 ha ini mempunyai sejarah banjir yang dimulai pada tahun 1962. Selain banjir, gempa bumi juga terjadi di desa ini. Kejadian gempa pada tahun 2018 telah berdampak pada rusaknya 25% infrastruktur desa, rumah ibadah, dan hunian warga. Penduduk Desa Limboro berjumlah sekitar 598 jiwa/KK. Mayoritas penduduk desa berusia 25 sampai 30 tahun, dan diikuti kelompok usia dengan rentang yaitu 50–55 tahun. Latar belakang pendidikan masyarakat umumnya menamatkan sekolah pada tingkat SD dan dengan jumlah yang lebih rendah pada tingkat SMP.

Desa Limboro berjarak kurang lebih 17 km dari pusat Kota Donggala dan 45 km dari Kota Palu. Meskipun hanya belasan kilometer dari Kota Donggala, PPL dan PML memerlukan perjuangan yang cukup besar untuk mencapai desa ini, terkhusus bagi petugas yang menggunakan kendaraan bermotor. Petugas pendata lapangan bersedia melaksanakan tugas Regsosek untuk input data masyarakat secara riil.

Proses Regsosek tentunya perlu dilaksanakan sebaik mungkin agar mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan Regsosek diawali dengan perekrutan petugas pendata yaitu PPL dan PML. Fungsi PPL dan PML cukup *urgent* karena petugas lapangan memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan data yang valid. Kriteria petugas lapangan disesuaikan dengan kebutuhan pendataan sehingga kompetensi dan domisili petugas lapangan menjadi syarat utama yang dipertimbangkan dalam proses seleksi PPL dan PML. Dalam pelaksanaan Regsosek di salah satu dusun di Desa Limboro, setiap PPL dan PML wajib berkomunikasi, berkoordinasi, dan konsultasi dengan kepala dusun. Apabila di lapangan terdapat kendala dan tidak dapat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

diselesaikan di lapangan, Koseka di kecamatan wajib turun tangan dan memeriksa akurasi data serta melakukan konfirmasi kepada kepala dusun. Secara sistematis, kegiatan ini sudah menggunakan aplikasi yang memudahkan petugas walaupun terdapat beberapa kendala di lapangan. Pertama, adanya kendala sinyal yang menyulitkan proses *geotagging*. Kedua, adanya penolakan warga terkait pengambilan gambar/foto kondisi rumah warga. Kedua kendala tersebut cukup menghambat kerja petugas lapangan.

Pendataan Regsosek juga memberikan informasi kepada penulis mengenai sejarah luas lahan pohon kelapa warga yang ternyata telah diwariskan secara turun temurun. Ada pula informasi mengenai kontrak terhadap hasil panen pohon kelapa. Pohon kelapa yang yang telah berbuah tidak dapat dimanfaatkan secara mandiri oleh pemilik pohon karena telah menjadi hak milik orang lain. Pihak lain yang memegang kontrak pohon dapat memanfaatkan hasil pohon kelapa termasuk batang kayunya sejak pohon dialihkan haknya hingga pohon tersebut mati.

Kenyataan ini sudah berlangsung lama dan berlangsung dari generasi ke generasi. Ibu kepala desa juga menyatakan bahwa beliau memiliki beberapa pohon kelapa yang terdampak kontraktual semacam ini. Biaya satu butir kelapa hanya berkisar Rp1.000,00, sementara upah buruh pemetikan satu pohon Rp3.000,00. Kondisi ini jelas menyulitkan warga, tetapi mereksa hanya dapat pasrah dan menerima keadaan. Bukti proses kontrak pohon sulit ditemukan karena tidak ada yang dapat memberikan bukti bagaimana kontrak ini terjadi, baik dokumen maupun latar belakang sejarahnya.

Kembali berbicara mengenai petugas lapangan sebagai ujung tombak pendataan, dengan waktu yang singkat, pihak BPS Donggala memutuskan untuk mengajak sebagian besar mitra yang pernah bekerja sama dengan kegiatan BPS sebelumnya. Mitra yang berpengalaman diharapkan akan mempermudah proses pelatihan yang hanya dilakukan secara singkat selama dua hari. Pelatihan umum yang dilakukan untuk PPL terkait tata cara pengisian kuesioner, tata cara dan teknik wawancara, serta tata cara menghadapi kesulitan di lapangan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Setelah proses pelatihan, pihak BPS Donggala melalui Koseka di masing-masing kecamatan mulai menentukan petugas enumerator dengan domisili yang sesuai dengan lokasi SLS agar pendataan yang dilakukan berjalan dengan efektif dan efisien, terutama untuk proses *probing*. Salah satu petugas PPL yang terpilih adalah Maslian. Beliau mengetahui kegiatan Regsosek ini dari mitra statistik. Beliau kemudian mendapat rekomendasi dari pemerintah Desa Limboro dan Kepala Dusun Lima Apumpae untuk menjadi salah satu enumerator. Rekomendasi tersebut tidaklah datang begitu saja, sebelumnya Maslian sudah aktif menjadi mitra BPS Donggala dan terlibat dalam berbagai kegiatan pendataan, seperti; Sensus BKKBN, Sensus Penduduk Statistik, dan Sensus Sistem Informasi Desa (SID). Dengan berbagai pengalaman di bidang survei terdahulu, Maslian kemudian menjadi pilihan yang tepat di tengah waktu yang sempit.

Maslian, atau biasa dipanggil dengan Lian, adalah satu dari tiga PPL yang ada di Desa Limboro. Saat ini usianya menginjak 26 tahun dan terhitung menjadi PPL termuda di desa ini jika dibandingkan PPL yang lain. Maslian merupakan anak sulung dari dua bersaudara, dengan nama ayahnya adalah Mastulu, sedangkan ibunya adalah Maslida. Saat ini Lian sudah menikah dan dikaruniai seorang anak berusia 4 tahun. Suami beliau adalah seorang buruh pikul semen. Dahulu, suaminya merupakan pegawai honorer di Dinas Perikanan. Namun, karena honor yang diperoleh tidak pasti, suami beliau memilih untuk berhenti dan menjadi buruh dengan penghasilan setiap hari. Lian dan keluarga kecilnya kini tinggal di Dusun Lima Apumpae di rumah orang tuanya. Dalam kesehariannya, Lian adalah seorang ibu rumah tangga, yang selain mengurus rumah, dia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial desa sebagai kader kesehatan di posyandu balita, posyandu lansia, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Maslian juga sering diminta bantuan oleh berbagai instansi pemerintah, baik lingkup dusun maupun desa, hingga kecamatan untuk keperluan berbagai pendataan penduduk ataupun sosialisasi berbagai program pemerintah. Kisah Lian menjadi seorang mitra BPS dimulai pada tahun 2018 melalui program pendataan sensus penduduk. Beliau

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sebelumnya aktif pada program sosial dan pemberdayaan masyarakat, salah satunya BKKBN. Kegiatan ini menjadikan beliau sebagai pihak yang diperhatikan oleh pemerintah desa dan direkomendasikan oleh perangkat desa setempat untuk menjadi mitra dan dipercaya oleh BPS.

Kehidupan Maslian sebelum menikah dapat dikatakan penuh liku tantangan. Ketika baru saja lulus dari bangku SMK, ayahnya meninggal dunia sehingga beliau menjadi tulang punggung keluarga. Ayah beliau adalah seorang sopir truk pengangkut kopra, sedangkan ibu beliau membuka usaha kopi tumbuk yang dapat dikatakan cukup viral pada masanya. Namun, usaha tersebut tidak berlangsung lama karena ketiadaan modal dan kalah saing dengan usaha sejenis lainnya. Ibu beliau kemudian beralih membuka usaha roti bakar. Saat Lian berumur 12 tahun, beliau mulai membantu ibunya untuk menjual roti bakar di sekitaran kampung Dusun Lima Apumpae. Namun, sekali lagi, usaha tersebut tidak bertahan lama dan harus berhenti pada tahun 2011. Usaha ini tidak bertahan dipengaruhi oleh kondisi ayah beliau yang mulai sakit. Ibunya fokus merawat ayahnya dan Lian sendiri belajar untuk mencari pendapatan demi melanjutkan pendidikan.

Maslian bercerita tentang pengalaman pendidikannya saat bersekolah di SD yang dirasakan cukup baik dibandingkan saat SMP, di mana ayah beliau mulai jatuh sakit. Impiannya di ambang kehancuran, antara berhenti sekolah dan memilih bekerja membantu orang tua atau melanjutkan pendidikannya. Dengan tekad yang bulat untuk maju bersama pendidikan dan meraih mimpi setinggi-tingginya, pada saat itu juga Lian memutuskan untuk tetap bersekolah. Ketidakberdayaan sang ayah karena sakit membuat Lian harus menempuh sekolah SMP dengan jalan kaki sejauh 2,5 km pulang pergi. Namun, hal ini sama sekali tidak menyurutkan tekad Lian untuk tetap sekolah dan sekaligus mencari uang untuk biaya sekolahnya. Lian melakukan berbagai pekerjaan seperti membuka usaha berdagang dan bekerja sama dengan ibu kantin sekolah. Lian juga bekerja serabutan dengan mencari keluarga yang mempunyai kebun luas di mana, setiap hari setelah pulang sekolah, dia pergi mencari apa saja yang ada di kebun

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tersebut yang dapat dijual ke pasar. Sedari kecil, dia sudah dipaksa untuk berpikir secara dewasa, bahwa kondisi keluarganya tidaklah dalam situasi yang baik-baik saja sehingga sebisa mungkin tidak membebankan biaya sekolah kepada orang tuanya. Lian mampu membeli buku-buku LKS sekolah dan tentu saja mendapatkan uang jajan hasil jerih payah sendiri. Lian sangat paham, dia harus mandiri sedari dini karena saat itu dari kedua orang tuanya, satu-satunya yang bekerja tinggallah ibunya, dan yang ditanggung ibunya saat itu bukan hanya dia, melainkan juga ada adiknya yang masih kecil dan tentu saja bapaknya yang sedang berbaring lemah karena sakit.

Dengan berbagai rintangan yang harus dilalui, akhirnya Lian mampu untuk menamatkan sekolah SMP-nya. Ketika Lian berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SMA/SMK, pada saat itu juga ibunya melarang keras karena terbentur dengan biaya. Ibunya kemudian memaksa agar Lian bekerja saja sebagai pembantu rumah tangga di Kota Surabaya. Tentu saja hal tersebut Lian tolak mentah-mentah karena teguh pendiriannya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Agar dapat restu dari ibunya, dia berjanji kepadanya untuk dapat membiayai sekolahnya sendiri tanpa membebani orang tua. Cita-citanya sebenarnya cukup sederhana, saat itu Lian hanya ingin suatu saat dia dapat mengoperasikan komputer atau laptop karena di dusunnya tidak ada penduduk yang dapat mengoperasikan alat tersebut. Lian berusaha mencari peluang kerja apa pun yang dapat dia dikerjakan setelah pulang sekolah untuk membiayai pendidikannya. Selama duduk di bangku SMK, Lian bekerja serabutan dengan berbagai jenis pekerjaan, di antaranya sebagai penjaga kios toko kelontong, bekerja sebagai pembantu dengan mengurus rumah tangga, mencuci pakaian, dan pekerjaan sejenis lainnya.

Lian bekerja sembari bersekolah. Lian bahkan harus menempuh jarak 13 km untuk ke SMK dari rumahnya. Lian beruntung memiliki teman yang sering memberikan tumpangan ke sekolah. Selain itu, pada saat duduk di bangku SMK, terkadang dia juga naik bus sekolah secara "gratis" karena sopirnya merupakan kenalan almarhum sang ayah. Aktivitas sekolah yang padat ditambah pekerjaan serabutan yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tidak kenal lelah dan jarak sekolah yang panjang dilalui Lian hampir setiap harinya. Namun ironisnya, bahkan setelah kerja keras banting tulang dengan hampir setiap hari pulang malam, biaya sekolah pada akhirnya masih belum tercukupi. Penyesalan Lian sampai sekarang adalah Lian belum dapat menebus satu buah kalung ibunya yang beratnya sekitar 1,2 gram yang digadaikan untuk biaya sekolahnya. Sungguh tidak mudah menjadi Lian, untuk membagi waktu antara belajar dan bekerja. Aktivitas dari pagi hingga malam membuat tubuh dan pikirannya lelah dan letih. Berangkat dari hal tersebut, hampir semua tugas sekolah pada akhirnya hanya dikerjakan di sela-sela waktu ketika di sekolah. Rutinitas itu pun dia jalani hingga lulus SMK. Dengan usaha keras yang tidak mengkhianati, Maslian akhirnya lulus SMK tanpa catatan yang jelek. Setelah lulus, dengan kondisi ekonomi yang belum membaik, Lian dijodohkan dengan kenalan ibunya yang berasal dari keluarga yang berkecukupan. Lian menolak karena saat itu hanya ingin fokus untuk berusaha membangkitkan perekonomian keluarga terlebih dahulu sebelum menikah dan tidak akan meninggalkan ibunya dalam keadaan sulit.

Sepeninggalan ayahnya pada tahun 2015 dan setelah menolak perjodohan, otomatis Lian menjadi tulang punggung keluarga. Lian pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk bekerja membiayai pendidikan adiknya. Lian sempat melamar untuk menjadi honorer di kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (UPTD CAPIL) Banawa Tengah, dan keberuntungan menghinggapinya karena Lian diterima untuk bekerja, meskipun dengan gaji seadanya. Gaji Lian awalnya sekitar Rp200 ribu per bulan pada tahun 2014–2018. Namun, jumlah penuh gaji tersebut baru diterima tiga atau enam bulan sekali. Berkat usaha kerasnya, Lian mampu untuk menyekolahkan adiknya hingga lulus SMA. Setelah adiknya lulus SMA, Lian pun berpikir untuk mencari pekerjaan yang lebih layak agar dapat mendorong adiknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (S-1). Menurutnya, pendidikan itu sangat penting. Lian melihat di dusunnya, kondisi pendidikan sangatlah memprihatinkan karena saat ini masih banyak sekali anak-anak

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang lebih memilih bekerja dibandingkan sekolah dengan alasan utamanya adalah karena persoalan perekonomian keluarga yang serba kekurangan dan dibarengi niat untuk membantu ekonomi keluarga serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan di kalangan masyarakat. Dia ingin adiknya kelak menjadi orang sukses dengan pendidikan yang dimilikinya. Namun sayang, sampai sekarang Lian belum mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga mimpi untuk menyekolahkan adiknya hingga sarjana pupuslah sudah.

Setelah adiknya lulus SMA dan dirasa sudah mampu hidup mandiri, pada Desember 2017, Lian melangsungkan pernikahan dengan pria yang dicintainya. Sedikit demi sedikit beban tanggungannya pun terasa ringan karena adiknya telah mandiri dan bertepatan saat itu juga dia mendapatkan bantuan suntikan dana UMKM dari pemerintah senilai Rp2.400.000,00. Lian mampu membuka usaha berjualan pulsa yang berjalan hingga sekarang. Keinginan Maslian untuk terus maju dan belajar tidak kunjung surut. Lian menambah pengetahuan dan wawasan terkait keadaan sosial, ekonomi, dan kesehatan penduduk di dusun tempat dia tinggal. Lian selalu aktif dalam kegiatan pembinaan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yakni menjadi kader posyandu, petugas enumerator, dan lain sebagainya. Saat ini, di Dusun Lima Apumpae sendiri, Maslian dikenal sebagai warga desa yang dekat dengan pemerintah desa. Masyarakat menaruh rasa hormat kepada Maslian karena pekerjaannya yang dirasa seperti jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa maupun kecamatan.

Buah dari kerja keras Lian selama ini dalam memperjuangkan pendidikan sedikit demi sedikit mulai tampak, terlihat dari berbagai pendapat masyarakat di desanya tentang dirinya. Kegiatan Regsosek juga membuat warga dusun makin memercayai dirinya sebagai sosok yang dengan senang hati membantu masyarakat dan juga ulet dalam bekerja. Menurut Lian, kegiatan pendataan awal Regsosek tahun 2022 ini merupakan kegiatan yang sangat baik karena mendata kondisi sosial dan ekonomi penduduk secara keseluruhan, terutama di daerah perdesaan. Selain itu, tujuan dan hasil dari pendataan ini nantinya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dapat dijadikan acuan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan program-program sosial dan program pengembangan desa untuk menjadikan desa yang lebih berdaya dan maju.

Ketetapan hati seorang petugas Regsosek untuk menyajikan data yang akurat serta tepercaya menjadikan survei ini membawa serta suara perubahan. Berkaca pada penduduk Dusun Lima Apumpae, masih banyak warga yang membutuhkan bantuan pemerintah secara berkesinambungan, contohnya adalah ibu Zubaidah yang berusia 38 tahun, perempuan tangguh tersebut memiliki dua orang putra yang masih bersekolah di kelas 2 dan kelas 4 sekolah dasar. Kondisi ekonomi keluarga Ibu Zubaidah tidak begitu baik dan diperparah oleh sang suami yang pergi entah ke mana. Ibu Zubaidah tinggal di dalam rumah kayu beratap daun kelapa kering, berlantai tanah dengan kisaran luas hanya 12 m^2. Dalam kesehariannya, Ibu Zubaidah berjualan es batu dan sirop di sekolah dasar yang jaraknya kurang lebih 3 sampai 4 kilometer. Beliau memperoleh Rp300 ribu per bulan dan membutuhkan Rp20.000,00 sampai Rp25.000,00 untuk keperluan harian. Kondisi ini diterima Ibu Zubaidah dengan tetap menjalankan aktivitasnya untuk masa depan anak-anak beliau agar lebih baik. Ibu Zubaidah mengungkapkan bahwa kepala dusunnya sangat proaktif untuk menyertakan beliau ke dalam berbagai bantuan pemerintah. Mayoritas warga memang mengharapkan bantuan tersebut karena kondisi masyarakat memang sangat membutuhkan.

Selanjutnya, kisah Bapak Lapaiso, seorang guru mengaji di kampung Dusun Lima Apumpae. Beliau hidup dengan istri dan ibu yang berusia 91 tahun yang sudah tidak dapat berkomunikasi secara aktif dan hanya terbaring lemah di tempat tidur. Kehidupan ekonomi keluarga ini hanya ditunjang oleh honorarium beliau sebagai guru mengaji, yakni 1 juta per bulan. Satu petak rumahnya sudah direnovasi pascagempa, sementara satu petak kecil lainnya masih beralaskan tanah beratapkan rumbia. Bapak ini pun, secara fisik, sudah tidak kuat untuk beraktivitas, hanya melakukan salat, azan, dan membaca Al-Qur'an setiap saat di musala terdekat yang menjadi rutinitasnya. Keluarga beliau telah mendapatkan bantuan PKH dari Kementerian

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sosial lewat Dinas Sosial Kabupaten Donggala. Bantuan-bantuan tersebut diharapkan karena kondisi keluarga memang termasuk keluarga prasejahtera. Honorarium guru mengaji tersebut tidak dapat dicairkan setiap bulan. Beliau menerima gaji secara berkala, baik tiga bulan atau empat bulan sekali.

G. Hidup Berharap Bantuan: *Life Story* Keluarga Didata

Dusun Lima Apumpae merupakan suatu daerah dengan bentang alam yang tidak hanya indah, tetapi juga mampu memengaruhi cara hidup dan kemampuan penduduknya dalam beradaptasi untuk mencari nafkah. Dataran tinggi dengan jalan berkelok-kelok yang sesekali diselingi dengan rumput dan ilalang yang tampak meranggas meskipun sudah memasuki periode musim hujan menjadi kesan pertama ketika penulis memasuki dusun ini. Jalan yang sepi akan lalu-lalang kendaraan dan jumlah rumah penduduk yang tidak padat menandakan penghuni di sini tidaklah terlalu banyak, hanya terdapat 130 kepala keluarga berdasarkan data program pencacahan terakhir. Suasana siang hari di dusun ini juga sangat sepi dikarenakan ditinggal banyak penghuninya untuk bekerja di ladang. Penduduk sebagian besar merupakan pekerja lepas (buruh) di bidang perkebunan, pertanian, maupun pertambangan, sedangkan sebagian lagi memilih untuk mengadu nasib sebagai nelayan tradisional. Beberapa dari warga

Foto: Tedi (2022)

Gambar 6.5 Kondisi Faktual dan *Life Story* Warga Dusun Lima Apumpae

Buku ini tidak diperjualbelikan.

juga didapati bekerja sebagai buruh kasar di pelabuhan-pelabuhan terdekat. Dengan bentang alam yang eksotis, di sepanjang perjalanan penulis menemukan puluhan hingga ratusan pohon kelapa di segala penjuru. Bahkan di sudut-sudut terpencil di dusun ini, penulis masih dapat menemukan pohon-pohon kelapa berdiri dengan tegaknya. Sungguh potensi alam yang luar biasa bila dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemajuan bersama. Namun, tampaknya hal tersebut mustahil untuk terjadi, setidaknya dalam jangka waktu yang dekat karena sampai sekarang eksploitasi alam di dusun tersebut hanya dinikmati oleh segelintir golongan tertentu saja.

Salah satu potret keluarga yang penulis temui ialah keluarga Bapak Nudin. Beliau tinggal di rumah sederhana berdinding bata ringan yang sudah dipoles dengan semen dan dicat warna krem (Gambar 6.5). Rumah ini dihuni oleh tiga orang, yang terdiri dari sepasang suami istri dan seorang putri (Bapak Nudin, Ibu Yuliana, dan putri mereka, Nima). Rumah tersebut diketahui merupakan rumah bantuan dari pemerintah ketika tempat tinggal mereka hancur akibat bencana alam gempa dan tsunami yang melanda Palu-Donggala pada tahun 2018 silam. Dahulu, rumah milik keluarga Bapak Nudin merupakan jenis hunian sapo khas Sulawesi Tengah yang semi permanen dengan dindingnya terbuat dari kayu pohon kelapa dan beratapkan jerami. Dengan kondisi demikian, selain mendapatkan bantuan stimulus gempa sebesar Rp10 juta, keluarga ini juga mendapatkan bantuan rumah kumuh senilai 7,5 juta rupiah pada tahun 2018 dan 2019 yang lalu. Rumah bantuan gempa ini pada dasarnya adalah hunian sangat sederhana yang belum selesai, atau dengan kata lain, mengusung konsep rumah tumbuh. Namun, empat tahun berselang pascabencana yang meluluhlantakkan Donggala, rumah bantuan ini tidak mengalami perubahan sama sekali dan tidak tumbuh. Bangunan rumah Bapak Nudin hanya memiliki tiga ruangan utama. Tampak salah satu ruangan besar digunakan sebagai ruang keluarga, sedangkan ruangan lainnya berfungsi baik sebagai kamar maupun dapur. Perabotan di rumah ini juga terlihat tidak ada yang mencolok atau bahkan tidak ada sama sekali dan tidak ada ornamen yang menghiasi dinding rumah ini, seperti lukisan, jam dinding, dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

semacamnya. Seluruh isi rumah memberikan kesan sangat minimalis atau mungkin kemiskinan adalah kata yang lebih tepat digunakan dalam menggambarkan kondisi ini.

Rumah ini tidak memiliki kamar mandi dan toilet, padahal hal tersebut merupakan salah satu unsur esensial agar dapat dikatakan sebagai sebuah rumah yang layak huni. Secara umum, bantuan rumah dari pemerintah tidak menyertakan fasilitas kamar mandi dan toilet dalam pembangunannya sehingga sampai sekarang jika ingin mandi, warga harus pergi ke tempat sanak saudara yang lebih berada. Selain itu, ketiadaan kamar mandi menyebabkan banyak warga didapati masih pergi ke semak-semak di hutan yang terletak di belakang rumah mereka untuk buang air besar. Dalam bahasa Kaili, aktivitas ini disebut dengan *motutai ghi vunggu* atau lebih dikenal dengan istilah *gumbu-gumbu*.

Kemiskinan dan kelaparan seolah-olah selalu hidup berdampingan bersama keluarga ini. Tentu saja keluarga Pak Nudin tidak ingin hidup seperti ini. Semenjak masih kecil, Bapak Nudin sudah bekerja membantu orang tuanya untuk mencari nafkah dengan menjadi buruh pemanjat kelapa. Sekolah bukanlah prioritasnya, lebih tepatnya pendidikan bukanlah prioritas utama bagi penduduk di dusun ini dari zaman dahulu hingga zaman sekarang.

Hal ini diperkuat dengan data yang mengungkapkan bahwa sebagian besar dari 130 keluarga di Dusun Lima Apumpae ini merupakan lulusan SD. Bahkan, jika ditelisik lebih dalam lagi, sebagian besar dari warga tidak lulus sekolah dasar. Bapak Nudin tumbuh dan berkembang dengan berbagai keterbatasan pilihan karier dan pekerjaan. Bapak Nudin seakan-akan mewarisi keadaan generasi sebelumnya yang memiliki kehidupan tidak menguntungkan. Ada satu cerita ketidakberuntungan keluarga ini ketika, pada tahun 2011, salah satu dinas melakukan pelebaran jalan untuk pariwisata yang melewati tanah miliknya, namun Bapak Nudin tidak mendapatkan uang ganti rugi dari tanah yang digunakan untuk proyek negara itu. Pada kenyataannya, Bapak Nudin hanya diberi ganti rugi sebesar jumlah pohon kelapa yang berada di lahannya. Bapak Nudin tidak diberikan ganti rugi sepeser pun untuk lahannya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sejarah kemalangan tersebut membuat keluarga kecil ini sekarang harus puas hidup dengan sebidang tanah yang kecil. Dengan sumber daya yang terbatas, kurangnya pengalaman dan pendidikan, serta ancaman bencana alam, mengakibatkan hanya ada sedikit alasan di benak keluarga ini untuk berharap akan masa depan yang cerah dan lebih baik. Pesimisme dalam hidup sangat terlihat jelas dari beberapa jawaban yang diberikan. Namun, tampaknya situasi seperti ini tidak dapat dihindari. Jika ditelisik kembali pada silsilah keluarga Pak Nudin, ditemukan bahwa ia dan nenek moyangnya telah hidup dalam kemiskinan sedari awal. Keluarga Pak Nudin adalah contoh bagaimana kemiskinan dapat dilanggengkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sama halnya seperti harta warisan, seperti tanah, rumah, maupun bentuk harta lainnya. Keluarga ini telah terperosok dalam kemiskinan selama beberapa generasi dan sepertinya tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Keluarga ini bahkan tidak lagi dikejutkan oleh rasa lapar dan dahaga yang melanda setiap harinya.

Kemalangan keluarga ini terus berlanjut. Saat Bapak Nudin (70 tahun) sedang bekerja keras sebagai buruh nelayan pada tahun 2021, beliau pertama kali merasakan gejala sakit. Beliau merasakan penglihatannya makin lama makin melemah, yang akhirnya menyebabkan saraf-saraf di matanya menjadi sulit untuk bergerak. Dilihat dari gejalanya, kemungkinan besar itu adalah penyakit katarak. Selain itu, beliau menderita sakit pikun dan penyakit menua lainnya yang menyiksa sepanjang siang dan malam. Beliau mengalami penurunan berat badan terus-menerus. Wajahnya yang tirus dengan cekungan mata yang dalam, menandakan beliau sedang tidak baik-baik saja. Beliau hanya berbaring lemah, saat ini itulah aktivitas utama dan sehari-harinya. Dengan kondisi demikian, pendapatan keluarga menjadi menurun secara signifikan sebagai akibat langsung dari sakit yang diderita Bapak Nudin. Bapak Nudin sebagai tulang punggung keluarga dapat disamakan dengan fondasi sebuah bangunan, dan ketika fondasinya runtuh, bangunan itu secara keseluruhan juga akan ikut runtuh. Jika demikian, lalu bagaimana keluarga Pak Nudin dapat menangani situasi yang tidak baik ini? Yuliana, istri beliau, mulai berbicara dalam bahasa Kaili Unde tentang bagaimana keluarga ini

Buku ini tidak diperjualbelikan.

berusaha bertahan hidup untuk mengatasi berbagai masalah hidup yang ada.

Yuliana adalah satu-satunya anggota keluarga yang sedikit dapat membaca dan menulis karena beliau sempat mengenyam pendidikan hingga kelas 2 SD. Beliau mengatakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keluarga ini mengandalkan program bantuan dari pemerintah untuk masyarakat kurang mampu, seperti program bantuan sosial sembako Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Keluarga ini mendapatkan bantuan PKH tidak lebih dari Rp100 ribu setiap bulannya, Namun, program bantuan sembako BPNT sudah tidak lagi diterima sejak Januari 2022. Alasan di balik berhentinya bantuan ini kemungkinan besar karena pengategorisasian kemiskinan di daerah tersebut. Keluarga Nudin sebelumnya merupakan keluarga yang masuk kategori 2 atau miskin. Hal ini didasarkan kepada kepemilikan properti berupa rumah tinggal. Memang harus diakui untuk kondisi rumah, keluarga Nudin sudah tidak lagi tinggal di rumah yang semipermanen jika dibandingkan beberapa keluarga lain yang masih tinggal di rumah semipermanen. Namun, perlu dicatat juga, rumah tersebut merupakan rumah bantuan gempa dan tsunami dari pemerintah, bukan dibangun atas biaya sendiri.

Keadaan ekonomi keluarga Nudin tidaklah lebih baik dari kondisi sebelum mendapatkan bantuan stimulan gempa. Keluarga ini tetap masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sinilah PPL berperan besar dalam melihat kondisi nyata di lapangan. Setelah berdiskusi dengan PML, Koseka, perangkat dusun, dan desa, akhirnya keluarga Bapak Nudin diganti dari kategori miskin ke kategori sangat miskin. Dari hal ini, bantuan pemerintah pada masa yang akan datang diharapkan dapat lebih tepat sasaran, terutama untuk keluarga ini.

Ibu Yuliana sebenarnya tidak ingin berpangku tangan saja melihat keadaan keluarganya. Wanita yang berusia genap 53 pada tahun ini, sudah berusaha mencari penghasilan untuk keluarganya agar tetap dapat bertahan hidup. Namun, sepertinya terdapat belenggu yang kuat mencengkeram erat kedua kakinya untuk tidak bekerja dan tetap

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bertahan di rumah saja. Suaminya saat ini sedang terbaring lemah karena sakit sehingga hampir mustahil untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa penjagaan dan bantuan orang lain.

Anak beliau, Nima, meskipun telah berusia dewasa (30 tahun), belum dapat hidup secara mandiri. Nima, putri satu-satunya keluarga ini, sejak kecil divonis akan tumbuh berbeda dengan anak-anak yang lainnya karena menderita gangguan keterbelakangan mental. Dia takut ketika melihat orang banyak dan tidak dapat bersosialisasi seperti kebanyakan anak sebayanya. Sedari kecil, Nima tidak memiliki teman bermain karena sifatnya yang sangat introver. Keterbatasan IQ yang dimiliki Nima akhirnya membuat dia tidak dapat melanjutkan pendidikan. Sarana SD untuk anak berkebutuhan khusus yang jauh dari dusun membuat biaya sekolah membengkak, belum lagi biaya sekolah lain yang harus dibayarkan, dan keterbatasan tenaga pendidik untuk anak-anak "spesial" di daerah ini, membuat Nima dan keluarga mengubur mimpi indahnya untuk dapat menempuh pendidikan yang sesuai dengan keadaannya.

Ibu Yuliana tentu saja menaruh kesedihan mendalam terhadap kondisi anaknya. Harapan akan masa depan juga tebersit di dalam benaknya, semoga kelak dia dapat mengasuh anaknya secara baik dan mengharapkan kehidupan anaknya nanti dapat lebih layak lagi daripada kehidupan yang telah dijalaninya serta para generasi sebelumnya. Salah satu kekhawatiran yang selalu mengganggu pikirannya setiap malam sebelum tidur adalah saat Ibu Yuliana tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk mencarikan pengganti dirinya sebagai teman anaknya kelak. Ibu Yuliana khawatir, mengingat anaknya yang berkebutuhan khusus akan hidup sebatang kara dan kesepian. Namun apa daya, dengan situasi yang demikian sulit, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah mengandalkan bantuan dari pemerintah.

Sesekali keluarga ini juga dibantu oleh tetangga untuk kebutuhan sehari-harinya. Selain itu, kadang Ibu Yuliana turun ke bibir pantai menjelang para nelayan pulang dari menjaring tangkapannya untuk mengemis, meminta belas kasih para nelayan agar diberikan sekadar satu atau dua ekor ikan untuk dijadikan lauk pauk. Tentu saja, anak-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

nya juga turut serta menjadi pengemis bersamanya. Sekali lagi, ketidakberuntungan masih menghinggapi keluarga ini, penyakit yang melumpuhkan sang pencari nafkah, ditambah dengan generasi baru yang memiliki kebutuhan khusus untuk melanjutkan hidup, makin menjerumuskan keluarga Bapak Nudin ke dalam palung yang dalam bernama kemiskinan ekstrem.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil dan makin menunjukkan tren positif, sejauh ini, sepertinya tidak dirasakan masyarakat hingga ke pelosok negeri, seperti halnya di Dusun Lima Apumpae ini. Sejauh keluarga Bapak Nudin ketahui, beliau merasakan negara hadir dalam hidupnya adalah ketika bencana gempa bumi dan tsunami melanda Palu-Donggala. Selebihnya, negara ada dalam bentuk bantuan tunai yang menurut penulis tidak menumbuhkan produktivitas. Kehadiran BPJS pada kurun waktu belakangan mungkin menjadi salah satu angin segar dari hadirnya negara untuk masyarakat miskin seperti keluarga ini. Berbicara mengenai kegiatan pendataan awal Regsosek, keluarga ini sangat terbuka untuk semua kegiatan pemerintah semacam ini. Keluarga Nudin tidak menolak, meskipun tidak mengerti maksud dan tujuannya. Keluarga ini hanya berpikir akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai dari pemerintah dari kegiatan pendataan ini. Kebiasaan ini tentu saja tidak sehat mengingat ketergantungan masyarakat miskin seperti keluarga Bapak Nudin terhadap bantuan pemerintah sangatlah besar.

Kemiskinan kultural dan kebijakan bantuan yang instan, akan memberikan efek ganda dalam menimbulkan ketergantungan dan kemalasan, baik pihak masyarakat maupun pemerintah. Dalam benak masyarakat, kegiatan Regsosek ini adalah pendataan untuk keluarga miskin yang nantinya akan mendapatkan bantuan pemerintah, tidak ada hal lainnya. Masyarakat tidak mengerti, atau tidak peduli lebih tepatnya, akan pentingnya pendataan Regsosek ini dalam upaya menjadikannya satu data yang terintegrasi di masa depan bagi kebijakan pemerintah di bidang sosial, kesehatan, hingga ekonomi. Mentalitas penduduk seperti di atas, yakni peminta-minta bukanlah dibentuk secara instan. Banyak faktor yang diyakini turut

Buku ini tidak diperjualbelikan.

berkontribusi dalam pembentukannya, tidak terbatas pada eksploitasi yang dimulai dari masa penjajahan Belanda, aktivitas kapitalisme yang menghisap kekayaan alam tanpa peduli lingkungan dan warga lokal sekitar hingga korupsi di berbagai level pemerintahan, dan tentu saja hasil dari kebijakan yang sekadar memanjakan saja tanpa merangsang masyarakat untuk berpikir kritis atau untuk mengembangkan diri. Ketiadaan ruang untuk berkembang membuat kebijakan-kebijakan pemerintah ini seakan-akan menjadi tidak ada artinya.

H. Mendata: Merumuskan Suatu Kekuatan Negara

Dusun Lima Apumpae memberikan sebuah pelajaran bahwasanya program sosial kemasyarakatan pemerintah harus didasarkan pada data faktual dan kondisi yang sebenarnya. Dusun ini menjadi contoh bahwa realitas kemiskinan itu ada, nyata, dan perlu penanganan serius oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Donggala. Komitmen sederhana sudah dimulai dari Kepala Dusun, Kepala Desa, serta Camat Banawa Tengah. Pendataan Regsosek Tahun 2022 tidak membatasi pelaksanaan kegiatan pada beberapa sektor saja sehingga fenomena kemiskinan faktual dan realitas sosial yang ada di tengah masyarakat dapat diungkap secara akuntabel, proporsional, dan bertanggung jawab.

Dusun Lima Apumpae menjadi wilayah prioritas untuk mengurai kasus kemiskinan sebab banyak hal yang harus dilakukan untuk membuat wilayah dusun ini menjadi lebih berdaya. Perhatian setidaknya pada pemenuhan air bersih dan fasilitas MCK yang wajib menjadi prioritas utama karena dua hal tersebut menjadi kebutuhan utama warga dan berdampak pada kesehatan. Selain itu, kualitas pendidikan dan SDM lainnya juga perlu menjadi perhatian lebih mengingat banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pendidikan tinggi yang tentu saja akan menghasilkan kualitas SDM yang rendah.

Perangkat desa dan warga wajib memiliki kesadaran bahwa lingkungannya memiliki potensi alam, baik darat maupun laut, yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kurang dimanfaatkan secara optimal. Contoh nyata adalah kurangnya wawasan warga masyarakat terkait dengan nilai tambah komoditas kelapa. Kondisi ini hendaknya menjadi prioritas pembenahan sebab puluhan ribu pohon kelapa di sini bukan lagi menjadi hak dari pemilik tanah atau warga, melainkan sudah dikuasai oleh para tengkulak. Sejarah hukum kontraktual merugikan pemilik tanaman kelapa hendaknya menjadi perhatian utama segenap perangkat Desa Limboro. Setiap pemilik pohon kelapa diharapkan mampu mengolahnya sehingga memiliki nilai ekonomi yang cukup signifikan.

Relasi yang baik setiap jenjang pemerintahan di level bawah ditandai dengan lancarnya kegiatan pendataan awal Regsosek 2022. Pendataan benar adanya dan tindakan dari pemerintah setempat yang tidak ragu untuk menyatakan warga yang harus diberi kompensasi, bantuan, dan diberdayakan, merupakan contoh relasi yang sehat. Realitas semacam ini bukan aib bagi pemerintah di level bawah, namun dipandang sebagai masalah yang harus dipecahkan bersama-sama sehingga pemerintah sangat diharapkan memiliki kepekaan sosial yang baik.

Kegiatan Pendataan Awal Regsosek 2022 di Dusun Lima Apumpae, Desa Limboro, secara umum berlangsung lancar. Data yang diperoleh lewat kuesioner yang diunggah ke aplikasi yang dilakukan PPL di Dusun Lima Apumpae akan dilakukan verifikasi pertama di level dusun dan desa oleh PML. Secara berjenjang, setelah PML memverifikasi secara faktual, konfirmasi secara acak maupun sistematis dilakukan petugas Koseka di level kecamatan. Data yang ada, baik dari aplikasi maupun dari kuesioner, kemudian akan tervalidasi. Saat *stakeholder*, yakni BPS dan pemerintah daerah, melakukan pemeriksaan secara bersama, diharapkan data *real time* yang tervalidasi dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dan yang paling penting dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan di Kabupaten Donggala maupun di *database* yang terintegrasi dalam skala nasional.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Daftar Pustaka

Abubakar, I., Yantu, M., & Asih, D. N. (2013). Kinerja kelembagaan pemasaran kakao biji tingkat petani perdesaan Sulawesi Tengah: Kasus Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. *Agrotekbis, 1*(1), 74–80.

Basaria, R., Setiawan, A., & Sediyono, E. (2018). Penentuan luas wilayah kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan metode poligon dengan bantuan Google Earth. *Jurnal Mercumatika: Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika, 3*(1), 9–22. https://doi.org/10.26486/jm.v3i1.606

BPS. (2022). Pendataan awal REGSOSEK 2022: Buku 3 pedoman pendataan lapangan. Badan Pusat Stastistik.

Kaunang, I. R. B, Haliadi, dan Rabani, L. O. (2016). *Jaringan maritim Indonesia: Sejarah toponim kota pantai di Sulawesi*. Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemerintah Desa Limboro. (2022). *Monografi Desa Limboro 2022, 1*.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Donggala. (2022). https://jdih.donggala.go.id/uploads/produk_hukum/Produk-Hukum-2-1676429016.pdf

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Donggala Dari Wilayah Daerah Kota Palu Ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Daerah Kabupaten Donggala. (1999). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54410/pp-no-71-tahun-1999

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) (Perpu) No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara. (1964). https://jdihn.go.id/files/4/1964ppu002.pdf

Randall, S., Coast, E., Antoine, P., Compaore, N., Dial, F. B., Fanghanel, A., Gning, S. B., Golaz, V., & Wandera, S. O. (2015). UN census "households" and local interpretations in Africa since independence. *SAGE, 5*(2). https://doi.org/10.1177/2158244015589353.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Syawal, I. (2019). Syekh Abdullah Raqi: Orang Minangkabau penyebar Islam di Palu pada abad XVII. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, 5*(2), 189–212. https://doi.org/10.36424/jpsb.v5i2.131

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah. (2008). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39665/uu-no-27-tahun-2008

Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi Tengah. (1959). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51529/uu-no-29-tahun-1959

Buku ini tidak diperjualbelikan.

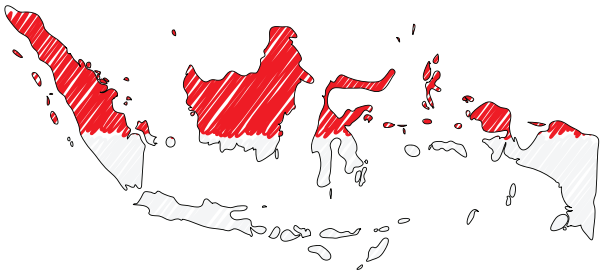

7

Regsosek: Isu dan Tantangan Meretas Angka di Bentang Alam Manokwari

Djoko Puguh Wibowo & Yudha Raphael

A. Menantang Bahaya, Menoreh Angka: Pengantar

Papua Barat merupakan salah satu provinsi yang berada di ujung timur Indonesia. Dikenal dunia dengan wisata alamnya yang memanjakan mata, warisan budaya yang tidak pernah luntur dimakan zaman, serta kehadiran hewan endemik, seperti burung cenderawasih dan burung kasuari menjadikan Papua Barat layaknya kepingan surga yang turun ke bumi. Dari beberapa tempat wisata di Papua Barat, Raja Ampat saat ini tentunya menjadi destinasi yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan lokal dan asing. Keanekaragaman spesies dan deretan terumbu karang yang tersusun rapi tentunya membuat banyak wisatawan berlomba-lomba untuk datang dan menikmati setiap jengkal keindahan yang ada di Raja Ampat. Taman Nasional Teluk Cenderawasih juga tidak kalah indahnya. Pulau Nusrowi, Roon,

D. P. Wibowo & Y. Raphael
Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: djok022@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Wibowo, D. P. & Raphael, Y. (2023). Regsosek: Isu dan tantangan meretas angka di bentang alam Manokwari. Dalam M. A. Humaedi., D. K. Imron, & A. Pramono (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 1 Indonesia Tengah-Timur (*261–300). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.775.c700 ISBN: 978-623-8052-94-3 E-ISBN: 978-623-8052-98-1

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Rumberpon, Mioswaar, dan Yoop adalah wilayah cakupan Taman Nasional Teluk Cenderawasi. Beragam terumbu karang dan berbagai jenis ikan hidup dengan bebas, bahkan beberapa wisatawan jika beruntung bisa melihat kehadiran hiu paus yang menyelam bebas di Taman Nasional Teluk Cenderawasih.

Dari segala keindahan yang dimiliki oleh Provinsi Papua Barat, mata kami tertuju kepada Kabupaten Manokwari. Berdekatan dengan bandara dan pelabuhan tentunya menjadi keunggulan tersendiri untuk Kabupaten Manokwari. Terdapat fakta menarik terkait dengan fenomena kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Manokwari. Mengacu pada data BPS Kabupaten Manokwari, jumlah penduduk miskin Kabupaten Manokwari pada tahun 2016–2020 mengalami penurunan yang lumayan signifikan, dari 40,28 (dalam ribu) turun menjadi 35,92 (dalam ribu) pada tahun 2020 (BPS Provinsi Papua Barat, 2022). Indeks pembangunan manusia Kabupaten Manokwari pada tahun 2016 adalah 70,34% dan naik menjadi 72,01% pada tahun 2020 (BPS Provinsi Papua Barat, 2022). Bila mengacu pada data ini, tentunya keadaan tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari.

Namun, setelah ditelusuri lebih dalam, menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Manokwari, terdapat dua kecamatan yang belum memiliki desa dengan status berkembang. Kecamatan tersebut adalah Tanah Rubu dan Warmare (BPS Kabupaten Manokwari, 2022). Status dua desa pada kecamatan tersebut mayoritas adalah sangat tertinggal dan tertinggal. Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa dua kecamatan tersebut tidak ada satupun desa yang memiliki status *berkembang*? Pertanyaan ini menjadi dasar untuk kami dalam meninjau langsung kondisi sosial ekonomi yang ada di kecamatan tersebut.

Program Regsosek yang dilakukan mempunyai tujuan mengumpulkan seluruh data penduduk yang berfokus pada kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Informasi yang dikumpulkan oleh BPS, termasuk detail di antaranya, adalah kepemilikan aset, kondisi sanitasi air bersih, kondisi perumahan, serta tingkat kesejahteraan. Tepat sasaran menjadi tujuan akhir dari program Regsosek yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sekarang telah berjalan. Maksud dari tepat sasaran adalah setiap data yang telah terkumpul akan menjadi dasar pemerintah untuk melakukan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah serta saling terintegrasi dari satu daerah ke daerah lain. Diharapkan juga melalui Regsosek, tidak terjadi lagi duplikasi data antarinstansi pemerintah sehingga keseluruhan data terkait dengan sosial ekonomi masyarakat hanya *satu pintu* dan dikelola oleh BPS.

Perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui program Regsosek tentunya perlu mendapatkan dukungan konkret dari pemerintah daerah. Pimpinan masing-masing daerah dapat melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh perangkat daerah, bahkan sampai kepada kepala kampung. Bila hal ini dilakukan, masyarakat yang ada di seluruh Kabupaten Manokwari pastinya akan menyambut dengan antusias program Regsosek yang dilakukan oleh BPS. Pada bab selanjutnya, kami bersama dengan petugas BPS Manokwari akan menyusuri sudut-sudut desa sembari melakukan pendataan serta melihat langsung kondisi sosial ekonomi dari masyarakat.

B. Bentang Alam Tersulit Tanah Papua Barat

Konfigurasi sebagai negara kepulauan menjadi salah satu tantangan Indonesia untuk melaksanakan Pendataan Awal Regsosek tahun 2022. Keragaman geografi bentang alam wilayah pegunungan, pulau kecil terluar, wilayah terpencil dengan karakter sosial budaya, dan adat istiadat yang berbeda mengakibatkan operasionalisasi pendataan makin kompleks. Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi yang berbeda di setiap wilayah untuk menarasikan peta bisnis dan mekanisme kerja untuk mendapat data secara cepat dan akurat. Kabupaten Manokwari adalah bagian dari bentang alam Tanah Papua, mempunyai lanskap geografi dan sosial budaya yang kompleks dengan status tertinggal. Kabupaten ini menjadi salah satu unit pengamatan untuk mendokumentasikan proses kegiatan Regsosek secara emik sebagai pembelajaran tentang potensi dan kendala membangun satu data Indonesia. Untuk memperoleh gambaran di tingkat mikro, dalam

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tulisan ini juga akan dideskripsikan secara rinci lanskap, tantangan, dan permasalahan salah satu desa dengan status tertinggal yang berada dalam wilayah Kabupaten Manokwari.

Sumber: Petatematikindo (t.t)

Gambar 7.1 Peta Adminisitrasi Kabupaten Manokwari

Kabupaten Manokwari terletak di pantai utara "kepala burung" Pulau Papua. Kota ini mempunyai beberapa sebutan, yaitu kota pemerintahan tertua di Papua dan kota Injil. Sebutan sebagai kota pemerintahan tertua merujuk pada fakta sejarah tentang pengangkatan J.J. Van Oosterezee sebagai *Controlleer Afdeling Noord Niew Guenia* berkedudukan di Manokwari pada tanggal 8 November tahun 1898. Penamaan sebagai kota Injil mengacu pada fakta bahwa Injil pertama kali disebarkan misionaris Jerman yang bernama Carel Willem Ottow dan Johann Gottlob Geissler pertama kali di Tanah Papua oleh misionaris Jerman disebarkan tepatnya di Pulau Kasiman pada 5 Februari tahun 1858.

Sejak tahun 2007 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat, Kota Manokwari ditetapkan sebagai ibu kota provinsi. Luas wilayah 3.186,28 km^2 membentang dari Teluk Doresi sampai menjelang batas Pegunungan Arfak. Batas wilayah di sebelah selatan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

adalah Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari Selatan, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rabauw dan di sebelah utara dan timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Secara administratif, kota ini terdiri dari 9 distrik, yaitu Distrik Warmare, Prafi, Tanah Rubu, Manokwari Barat, Manokwari Timur, Manokwari Utara, Manokawari Selatan, Masni, Sidey Warmare, dan Manokwari Timur. Beberapa suku di Manokwari ialah Arfak, Mawesa, Samuri, Sebyar, Irarutu, dan Numfor Biak, sedangkan etnis pendatang terdiri atas suku Jawa, Bugis, Toraja, dan Ambon.

Suku terbesar adalah suku Arfak yang mendiami Pegunungan Arfak, Distrik Tanah Rubu, Distrik Warmare, dan sebagian mendiami wilayah pesisir/pantai. Penduduk pendatang yang berasal dari suku Jawa didatangkan melalui program transmigrasi dan terkonsentrasi pada Distrik Prafi, Warmare, Masni, Oransbari, dan Ransiki. Jumlah penduduk sebanyak 192.663 orang terdiri dari penduduk perempuan 100.006 orang (51,91%) dan penduduk laki-laki 92.657 orang (48,09%). Kepadatan penduduk Kabupaten Manokwari pada tahun 2020 mencapai 56,3 jiwa/km2. Distrik atau kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Distrik Manokwari Barat, sedangkan distrik dengan kepadatan penduduk paling kecil adalah Distrik Tanah Rubu dengan tingkat persentase jumlah penduduk sebesar 1,98% (BPS Kabupaten Manokwari, 2022).

Ketika menyusuri Kota Manokwari terlihat dengan jelas berbagai pembangunan infrastruktur, seperti perluasan landasan pacu bandara, jembatan layang, pusat pemerintah provinsi, pembangunan pusat pertokoan baru, dan perhotelan baru di berbagai lokasi strategis dan di luar kota. Di sisi lain, di balik gencarnya pembangunan tersebut, selain menghasilkan beberapa kemajuan juga masih menyisakan beberapa persoalan untuk segera dipecahkan. Ditinjau dari keberhasilan yang di antaranya diindikasikan dengan indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Manokwari di tahun 2020 mencapai 72,01, mengalami kenaikan sebesar 0,34 jika dibandingkan IPM tahun 2019 dengan nilai 71,67 (Gambar 7.2). IPM Kabupaten Manokwari menempati peringkat kedua tertinggi se-wilayah Provinsi Papua Barat, sedangkan nilai IPM tertinggi adalah Kabupaten Sorong dengan nilai IPM 78,45.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

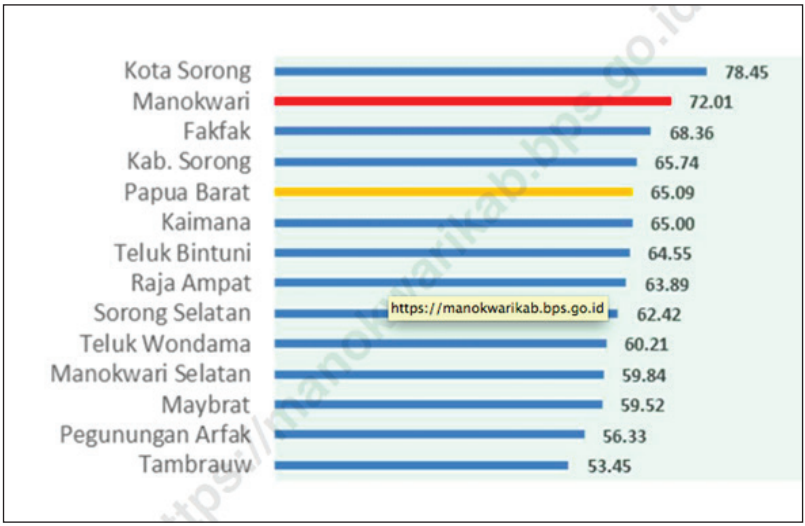

Sumber: BPS Kabupaten Manokwari (2021)

Gambar 7.2 Kondisi IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Tahun 2020

Paling tidak masih terdapat dua tantangan yang menjadi agenda prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Manokwari. *Pertama*, dari jumlah penduduk 35.920 orang masih terdapat penduduk yang menyandang status miskin sebesar 20,16%, sedangkan penduduk dengan status miskin ekstrem sebesar 15,05%. *Kedua*, berdasarkan pemeringkatan status desa tahun 2022, nilai rata-rata indeks desa membangun (IDM) tingkat Provinsi Papua Barat sebesar 0,5184 dengan status tertinggal. Dalam arti lain, berdasarkan nilai rata-rata tersebut, seluruh desa di Papua Barat termasuk dalam kategori tertinggal. Dari uraian tersebut, tecermin bahwa isu dan tantangan pembangunan bentang alam Papua Barat, khususnya Kabupaten Manokwari, mempunyai spektrum yang luas. Tantangan tersulit tidak terbatas pada aspek geografis semata, tetapi persoalan tersebut mempunyai implikasi ikutan sehingga menghambat laju percepatan peningkatan kesejahteraan. Pemahaman atas persoalan bentang alam dalam skala lebih mikro di Kabupaten Manokwari akan menjadi penting.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ketika berdiskusi dengan Kepala BPS Kabupaten Manokwari yang didampingi dua orang stafnya, ada satu informasi menarik. Salah satu staf BPS Kabupaten akan mengunjungi salah satu desa di wilayah Distrik Warmare untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Regsosek 2022. *Monitoring* itu akan dilakukan pada sampel kurang lebih 5–6 responden yang sebelumnya telah didata oleh seorang PPL. Kebetulan desa yang akan dikunjungi sebagian besar penduduknya *saudara asli Papua* (SAP). Dalam konteks ini, Papua menggunakan diksi itu lebih egaliter, tidak berjarak dibandingkan istilah *orang asli Papua* (OAP) yang selama ini digunakan dalam berbagai narasi, baik oleh pejabat pusat, daerah, peneliti, maupun orang luar Papua. Diksi OAP mencerminkan suatu jarak sosial yang dapat memberikan penajaman terhadap perbedaan sosial. Dalam pandangan penulis pribadi, diksi itu dapat melebarkan jarak sosial yang tajam sebab secara tegas bermakna "dia, mereka, dan saya" yang seharusnya adalah "kita". Berdasarkan saran dan pertimbangan waktu, dipilihlah satu desa di Distrik Warmare dengan mayoritas penduduknya adalah SAP untuk menggambarkan kesulitan bentang awal dalam lingkup mikro di wilayah Manokwari,.

Menyusuri "Ketinggalan" Desa di Kabupaten Manokwari

Kami bertiga berangkat menuju Warmare menggunakan kendaraan roda dua sekitar pukul 09.00. Lalu lintas pagi Kota Manokwari sudah ramai dan padat. Aktivitas masyarakat untuk bekerja, baik dari luar kota maupun dari dalam kota, menambah kemacetan di setiap persimpangan. Sepanjang jalan menuju Warmare terlihat geliat perekonomian yang sedang berkembang. Di kiri dan kanan tampak bangunan baru pertokoan, ruang pamer dan penjualan mobil, toko serbaada, toko pakaian, bengkel, warung makan dan restoran, serta deretan warung yang menjajakan kue basah. Sesekali tampak lapak kecil yang dijaga SAP menjajakan buah-buahan. Pemandangan lain yang tampak adalah sekolah keagamaan yang berdiri megah dengan bangunan ibadah yang dilengkapi dengan ruang belajar dan mungkin asrama.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Keriuhan lalu lintas makin ramai ketika memasuki wilayah yang dari jauh terlihat cerobong dan bangunan beton melintang memotong jalan raya Manokwari menuju Warmare. Bangunan beton itu ternyata ban berjalan yang mengangkut bahan semen untuk diproses, sedangkan bangunan beton menjulang itu cerobong asap untuk membuang partikel berbahaya ke udara. Di simpang tiga yang menghubungkan Kota Manokwari, Kota Bintuni, dan Sorong itu merupakan area pabrik Semen Maruni yang dimiliki oleh PT SDIC Papua Cement Indonesia. Di sekitar area pabrik, juga berdiri beberapa bangunan masif berbentuk kotak memanjang dan bertingkat yang berfungsi sebagai tempat tinggal karyawan, lapangan olahraga, dan fasilitas kesehatan. Selepas melewati kompleks pabrik semen tersebut, seketika terlintas pertanyaan dalam benak saya. Apakah kekayaan bentang alam Manokwari dalam bentuk perbukitan kapur (*karst*) yang telah dieksplorasi itu berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar dan pelestarian lingkungan?

Dalam banyak kasus di Tanah Papua, eksploitasi sumber daya dalam skala besar masih belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesempatan kerja, perluasan peluang usaha, dan keadilan masyarakat sekitar. Sebaliknya, masih menyisakan persoalan dan menjadi isu lokal maupun global. Demikian halnya dengan keberadaan pabrik semen Maruni di Manokwari, dalam catatan awalnya, Kelly Dowansiba (2020) menyatakan bahwa keberadaan industri semen tersebut mempunyai dampak terhadap kerusakan lingkungan (perubahan bentang alam, hidrologi, kepunahan flora dan fauna, dan pencemaran lingkungan). Dari aspek sosial, keberadaan pabrik semen yang diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan pendapatan, di dalam praktiknya jauh dari yang diharapkan. Pandangan tersebut tergambar saat memasuki desa yang tidak jauh dari lokasi pabrik semen itu. Kampung SAP tampak sepi. Bangunan rumah berbahan kayu, tak berpagar, dan berderet di pinggir jalan berlapis aspal menuju Warmare dan Sorong itu tidak tampak adanya aktivitas ekonomi produktif. Hampir tidak ditemui warung dan toko yang menjual kebutuhan harian. Halaman rumah terlihat rimbun dikelilingi tanaman buah dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tanaman keras lainnya. Pemandangan itu terlihat hampir sepanjang jalan menuju Warmare. Di antara hutan di kiri kanan jalan beraspal, sesekali tampak desa yang kelihatan lebih ramai dengan bangunan rumah permanen, identitas keagamaan, dan rumah ibadah yang tampak bersih dan rapi.

Memasuki Desa Dindey yang berfungsi sebagai ibu kota Distrik Warmare, pemandangan tampak lebih menggambarkan bahwa desa tersebut di samping sebagai pusat pemerintahan, juga berfungsi sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan desa-desa sekitar. Sebagai ibu kota distrik, selain terdapat kantor kecamatan, kantor kepolisian resor (polres), kantor rayon militer (koramil), pusat pertokoan, dan warung, juga terdapat terminal (walaupun sepi), rumah ibadah Kristen dan Islam, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan. Untuk menuju desa dengan mayoritas SAP, kami bertiga menemui Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML) bernama FR yang rumahnya di samping terminal Dndey. FR adalah satu-satunya PML perempuan di Distrik Warmare dan saat ini masih menempuh pendidikan di Universitas Papua (UNIPA) Fakultas Arsitektur semester lima. Ia mempunyai pengalaman dalam kegiatan yang dilakukan oleh BPS kabupaten Manokwari, yaitu sebagai Petugas Pendataan Lapangan (PPL) Sensus Penduduk tahun 2020. Dalam pendataan Regsosek, Ia membawahi empat PPL, satu orang laki-laki mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Fakultas Kesehatan jasmani, dan tiga orang perempuan yang semuanya masih kuliah di UNISPA.

Jarak Desa Nimbay kurang lebih 10 km dari ibu kota Distrik Warmare. Desa ini terletak di ruas jalan raya Manokwari-Sorong. Ketika menjelang memasuki Nimbay, terdapat lahan tegalan dengan tanaman jagung, singkong, dan sayuran yang ditanam berselang-seling dan beberapa petani SAP sedang membersihkan rumput dan ilalang. Di sisi ruas jalan terdapat rumah indah berdiri megah dan kompleks perumahan baru. Demikian juga ketika memasuki jalan desa dengan konstruksi tanah yang telah diperkeras lapisan batu, terlihat bangunan rumah ibadah dan bangunan permanen rumah penduduk. Di belakang rumah berdiri bangunan toilet permanen

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dengan bentuk seragam dan aneka tanaman buah-buahan seperti pisang, rambutan, manga, dan nangka, serta tanaman singkong dan talas.

Setelah mengelilingi Desa Nimbay, secara fisik, tidak tecermin bahwa desa itu berstatus sebagai desa tertinggal. Dari hasil penilaian IDM tahun 2022, status sebagai desa tertinggal terlihat dari nilai IDM sebesar 0,5594. Dalam perhitungan, nilai IDM terdiri dari komposit indeks ketahanan sosial (IKS) sebesar 0,6114, indeks ketahanan ekonomi (IKE) 0,4000, dan indeks ketahanan lingkungan (IKL) 0,6667 (Ditjen PDP Kemendesa, 2022). Bila membandingkan nilai dasar setiap indeks pembentuk IDM, IKE mempunyai nilai yang lebih kecil dibandingkan dua indeks lainnya. Hal ini juga menggambarkan bahwa aktivitas produksi dan ekonomi masyarakat belum optimal dan mencapai skala ekonomi.

Dari hasil diskusi dengan aparat kampung dan beberapa warga Desa Dindey terungkap bahwa perekonomian desa tidak berkembang disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, aktivitas pertanian masih dilakukan secara tradisional, hanya cukup untuk memenuhi kehidupan keluarga hasil produksi, dan masih terbatas pada pemenuhan kehidupan rumah tangga. *Kedua*, hasil produksi tanaman buah-buahan hanya dijual di tingkat lokal dengan harga rendah. *Ketiga*, belum dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berfungsi sebagai penyedia sarana produksi, membantu penyediaan modal, dan pemasaran hasil produksi. *Keempat*, terbatasnya sarana transportasi untuk mendukung kelancaran arus barang dan jasa dari desa ke pusat pelayanan dan pemasaran wilayah (kecamatan, kabupaten).

Uraian sebelumnya memberi gambaran bahwa tantangan utama/tersulit bentang alam, khususnya wilayah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, bukan semata terbatas pada aspek lanskap geografi. Namun, juga terjadi kecenderungan bahwa pembangunan fisik dalam wujud infrastruktur tidak serta-merta mampu meningkatkan arus lalu lintas barang dan jasa antara desa dan pusat pelayanan dan pemasaran hasil.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kehadiran industri berbasis sumber daya wilayah dalam kenyataan tidak serta-merta mampu memberikan perluasan kesempatan kerja dan berusaha kepada masyarakat sebagai pintu masuk untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Demikian juga produksi pertanian sebagai pilar pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan belum dikembangkan secara optimal akibat keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, teknologi, dan sarana produksi pertanian.

Ambisi Regsosek adalah menghasilkan satu data untuk Indonesia yang mendeskripsikan kondisi sosial dan ekonomi maupun tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai basis untuk merumuskan program perlindungan sosial dan pelayanan dalam konteks percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem. Dalam konteks tantangan dan persoalan, bentang alam Kabupaten Manokwari dapat diatasi apabila para pihak mempunyai kesepakatan untuk merancang program dan kegiatan secara terpadu bersandar pada satu data. Pemanfaatan satu data produk Regsosek juga merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab negara untuk menghapus kemiskinan ekstrem di berbagai wilayah secara cepat adil tanpa diskriminasi.

C. Regsosek: Mencacah Angka Manokwari Papua Barat

Gema deklarasi kegiatan akbar Pendataan Awal Regsosek tahun 2022 seolah tertutup oleh pemberitaan tentang ekonomi, politik, dan peristiwa global yang menjadi menu media cetak dan elektronik di tanah air. Masyarakat sebagai penyedia informasi utama dalam kegiatan Regsosek justru tidak mendapatkan informasi yang sepadan sehingga bersikap antusias untuk menunggu kehadiran PPL. Ditilik dari apa yang akan dihasilkan, produk kegiatan awal Regsosek mempunyai nilai strategis, yaitu satu data kependudukan yang memuat gambaran sosial ekonomi penduduk yang akan digunakan kementerian dan lembaga terkait program penghapusan kemiskinan (ekstrem), perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan awal Regsosek tahun 2022 merupakan transformasi amanat Instruksi Presiden Nomor 4

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tahun 2022 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (Inpres 4 Tahun 2022).

Untuk melaksanakan kegiatan Regsosek, BPS telah menyusun proses bisnis dan mekanisme Pendataan Awal Regsosek tahun 2022 sebagai peta jalan untuk melaksanakan kegiatan. Proses bisnis sebagai rancangan teknokratis disusun merujuk pada prinsip-prinsip dasar pendataan yang telah disepakati oleh seluruh negara di dunia, yaitu: privasi dan kerahasiaan, integritas, profesional, dan imparsial (ketidakberpihakan). Prinsip kerahasiaan merupakan prinsip dasar yang harus ditaati dalam kegiatan pendataan (United Nations, 2015).

Peta jalan itu menjadi pedoman para pelaksana baik di tingkat pusat sampai tingkat kabupaten/kota. Proses bisnis Regsosek, secara teknokratis, itu terdiri lima tahapan. *Pertama*, koordinasi dan konsultasi dengan para pihak untuk mendapatkan dukungan pelaksanaan lapang serta sosialisasi, edukasi, dan publikasi tentang pengetahuan dan pemahaman kegiatan Regsosek. Keberhasilan Regsosek tidak semata tergantung pada BPS, namun juga ditentukan oleh dukungan dan komitmen para pihak di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, desa, dan masyarakat sebagai pelaku penyedia utama informasi untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan pendataan. *Kedua*, penyiapan basis data dan kebutuhan teknis. Tahap ini adalah identifikasi wilayah pendataan mencakup satuan lingkungan setempat (SLS) (RT, banjar, lorong) dan wilayah khusus (pesantren, asrama, apartemen, penjara, barak militer). Bahkan, untuk akurasi pendataan juga dilakukan pada titik tertentu seperti pelabuhan untuk pendataan nelayan yang sedang bersandar dan tuna wisma melalui acara "Malam Regsosek". Pada fase ini juga dilakukan rekrutmen dan pelatihan petugas untuk mendapatkan petugas yang terampil dalam melakukan pendataan dan penyiapan perlengkapan kerja lapang (kuesioner, lembar VK1, dan peta SLS, buku panduan lapang). Tahap *ketiga*, yaitu pelaksanaan pengumpulan data. Tahap ini merupakan fase berat yang dihadapi PPL. Faktor jarak, cuaca, dan sikap masyarakat menjadi tantangan yang dihadapi PPL. Di sisi lain, PPL dituntut melakukan pendataan secara cepat sesuai KK yang sudah tercantum dalam lembar VK 1

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang kemungkinan bisa bertambah dan berkurang. Untuk akurasi data, dalam proses pendataan, juga dilakukan penetapan lokasi (*geotagging*) yang dilengkapi dengan foto rumah responden dengan aplikasi Wilkerstat.

Tahap *keempat*, pengolahan data. Semua kegiatan pada tahap ini mulai dari pelingkupan, pelaksanaan, input data dan pengolahan data, dan pemeringkatan keluarga miskin merujuk pada kaidah teoritis dan metodologis dengan melibatkan BPS daerah sebagai validasi model. Tahap *kelima*, forum konsultasi publik. Wadah ini menjadi bentuk transparansi dari BPS sebagai lembaga penyedia data. Dalam artian, akurasi dan kebenaran hasil pemeringkatan terkait dengan status kesejahteraan bukanlah semata monopoli BPS sehingga hasilnya perlu dikonsultasikan dengan para pihak, yaitu kepala desa, pihak yang terkait dengan perlindungan sosial dan pelayanan, fasilitator, dan petugas entri data.

Dari uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa proses bisnis dan mekanisme kerja Regsosek adalah kerangka kerja yang mendeskripsikan kegiatan terinci pada setiap tahapan sebagai rujukan untuk pelaksanaan pendataan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Namun, tantangan terberat yang dihadapi para pelaksana adalah implementasi pendataan di tingkat lapang. Secara umum, Indonesia mempunyai kondisi geografis wilayah yang bervariasi. Daerah *remote* seperti pulau terpencil, wilayah pedalaman, dan pegunungan susah terjangkau karena terbatasnya akses dan keamanan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pendataan. Karakter sosial budaya masyarakat dan komunitas tertentu tidak bersedia menerima petugas untuk melakukan pendataan, mereka beranggapan pendataan adalah identik dengan bantuan. Sementara itu, di wilayah perkotaan pada lokasi khusus seperti apartemen dan kompleks perumahan, hanya pada waktu tertentu penghuninya bersedia untuk menerima kedatangan petugas. Tantangan lain yang menjadi kendala pendataan adalah kesulitan untuk mendapatkan tenaga di tingkat lokal yang menguasai kondisi dan karakter masyarakat pada lingkungannya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Peta bisnis dan perencanaan adalah rangkaian agenda kerja yang menjadi rujukan bagi aparat BPS, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memproduksi data. Sebagai ilustrasi, dari hasil wawancara dengan Kepala dan staf BPS Kabupaten Manokwari, dalam konteks pendataan awal Regsosek, mereka memahami dan menaati seluruh tahapan proses bisnis dan mekanisme kerja serta melaksanakan seluruh tahapan kegiatan sehingga tidak dapat menyimpang dari standar operasional yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu, langkah kerja sebagai bentuk inovasi untuk menyukseskan pendataa Regsosek dihadapkan pada beberapa hambatan terkait dengan prinsip-prinsip proses bisnis, juga ketersediaan anggaran, situasi, dan kondisi politik lokal dan nasional. Sosialisasi Regsosek Kabupaten Manokwari dikemas melalui rapat koordinasi daerah (Rakorda) peserta terbatas pada level kecamatan. Di sisi lain, aparat desa sebagai aktor yang memahami lingkungan setempat dan memudahkan kerja petugas tidak dilibatkan sebagai peserta rakorda. Demikian juga, prakarsa melakukan publikasi melalui media luar ruang, media cetak, maupun elektronik dengan melibatkan pejabat publik dan tokoh masyarakat sebagai *endorser* selain dibatasi prinsip kerja, juga dibatasi oleh anggaran, birokrasi, dan situasi (politik) lokal.

Bagi lembaga produsen data di tingkat kabupaten dan pelaksana lapangan pendataan awal Regsosek 2022, persoalan seperti yang telah diuraikan sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi BPS Kabupaten Manokwari untuk menghasilkan data yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. BPS Kabupaten Manokwari (kemungkinan) merupakan satu-satunya lembaga produsen data yang wilayah pendataannya mencakup tiga kabupaten dengan perkiraan pendataan 69.377 KK, terdiri dari Kabupaten Manokwari 52.280 KK, Kabupaten Manokwari Selatan 7.909 KK, Kabupaten Pegunungan Arfak 9.188 KK, dan tersebar di 23 distrik/kecamatan. Untuk pelaksanaan pendataan didukung oleh 419 orang PPL, 115 PML, dan 27 orang Koseka.

Dilihat dari komposisi antartarget pendataan dan jumlah PPL maka beban setiap PPL kurang lebih 165 KK. Target itu relatif lebih

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kecil dibandingkan target pendataan di Pulau Jawa yang berkisar antara 200–250 KK setiap PPL. Namun, tantangan yang dihadapi bagi petugas di Tanah Papua maupun di Manokwari lebih berat dan bervariasi dibandingkan tantangan petugas di Jawa maupun wilayah yang lebih maju. Keterpencilan wilayah, keamanan dan karakter masyarakat, cuaca, dan domisili PPL yang sementara ini masih terkonsentrasi di Manokwari menjadi kendala yang dihadapi para petugas untuk menghimpun data secara cepat dan akurat di Tanah Papua. Hal ini saya rasakan selama dua hari mengikuti kerja PPL melakukan pendataan di dua desa di Tanah Rubu yang berjarak 70 km dari Manokwari dan Nimbay Kecamatan Warmare yang jaraknya kurang lebih 45 km.

Dengan menggunakan kendaraan roda dua, bersama PPL yang berdomisili di Kota Manokwari, untuk mencapai di wilayah Tanah Rubu perlu waktu kurang lebih dua jam. Walaupun kondisi jalan sudah beraspal, namun hambatan yang muncul adalah tanah longsor yang menutup ruas jalan yang hanya dibuka siang dan sore. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu pekerjaan perbaikan jalan. Sampai di lokasi tujuan, waktu sudah menunjukkan pukul 12.00 WIT. Dengan sisa waktu dan memperhitungkan keberadaan target di rumah, pendataan hanya menghasilkan 4 orang KK dari 10 rumah yang didatangi. Kondisi yang sama juga terjadi ketika mengikuti PPL melakukan pendataan di Desa Nimbay. Walaupun jaraknya relatif cukup dekat, PPL berdomisili 10 km dari lokasi pendataan, dan sudah memperhitungkan waktu luang responden, tetap saja pendataan tidak optimal. Dari 10 rumah yang didatangi, hanya lima rumah yang berhasil dilakukan pendataan karena faktor cuaca.

Menelisik pemahaman proses bisnis Regsosek tahun 2022 oleh para pihak di tingkat pusat sampai tingkat lapang dan pengamatan langsung terhadap kerja pendataan di wilayah kerja BPS Kabupaten Manokwari, paling tidak dapat memberikan gambaran, walaupun mungkin tidak utuh, tentang proses dan tantangan kerja pendataan di Tanah Papua. Dalam hal ini, pendataan awal Regsosek mempunyai spektrum yang kompleks, baik dalam lingkup cakupan lingkungan,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

geografis, maupun karakter sosial wilayah. Persoalan dan tantangan yang dihadapi lembaga pelaksana di tingkat daerah sangat bervariatif sehingga strategi untuk melaksanakan pendataan berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainya. Namun, di tengah perbedaan tersebut, untuk mewujudkan satu data terpadu terintegrasi setiap tahap kegiatan tetap mengacu pada prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam proses bisnis dan mekanisme kerja dalam seluruh proses pendataan.

Di balik kegiatan pendataan Regsosek, seharusnya juga dibaca bahwa berbagai program pembangunan selama ini masih menyisakan persoalan dan tantangan berat yang masih belum tertangani secara tuntas, yaitu kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang masih melanda di berbagai wilayah. Selain itu, persoalan lain yang dihadapi pemerintah (pusat, kabupaten, desa) adalah terkait ketahanan pangan, perubahan iklim, akses terhadap pendidikan, kesehatan permodalan, dan infrastruktur yang dampaknya sangat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai ilustrasi, jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2021 secara nasional adalah 10,14% (27.542.770 jiwa) dari total jumlah penduduk. Daerah dengan persentase tertinggi adalah Provinsi Papua, yaitu 26.86% (920.440 jiwa) diikuti Provinsi Papua Barat 21,8% (219.070 jiwa). Secara nasional, jumlah dan persentase penduduk miskin ekstrem pada periode yang sama adalah 4% (10.785.346 jiwa dari total penduduk, daerah dengan persentase tertinggi adalah Provinsi Papua Barat 13,6% (134.408 jiwa), diikuti Provinsi Papua Barat 13,1% (445.240 jiwa) (Suharto, 2022).

Salah satu masalah krusial yang dihadapi pemerintah (pusat dan daerah) untuk pengentasan kemiskinan adalah *pertama*, ketersediaan data yang akurat. Hal ini mengakibatkan program perlindungan sosial dan pemberdayaan tidak tepat sasaran. Banyak kasus yang muncul di tingkat lapang di mana rumah tangga yang tidak berhak menerima bantuan sosial malah menerima bantuan (*inclusion error*). Sebaliknya, rumah tangga yang berhak menerima bantuan social, namun tidak menerima bantuan (*exclusion error*). *Kedua*, lemahnya integrasi antara program, anggaran, dan sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem di pusat dan daerah. *Ketiga*, sinkronisasi dan koordinasi lintas organisasi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

perangkat daerah (OPD) belum berhasil memastikan ketepatan sasaran kelompok miskin ekstrem. *Keempat*, proses penentuan target program belum inklusif.

Sebagai amanat dari Inpres Nomor 4 Tahun 2022, Regsosek adalah pintu masuk sebagai langkah awal untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penyediaan satu data terintegrasi. Satu data kependudukan hasil Regsosek menggambarkan secara terperinci postur kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan seluruh penduduk. Dengan satu data terintegrasi, pemerintah dapat merancang program perlindungan sosial, pemberdayaan dan meningkatkan pelayanan secara terpadu, tepat sasaran dan kebutuhan, dan menghindari terjadinya tumpang tindih seperti yang terjadi sebelumnya.

D. Antara Nilai Positif dan Tantangan dalam Mendata

Tanggal 2 November 2022 menjadi perjalanan awal tim menuju salah satu desa di Kecamatan Tanah Rubu. Keberangkatan bersama dengan salah satu petugas PPL bernama DRK, yang merupakan keturunan asli dari Papua. DRK pun tidak sendiri dalam menjalankan tugas, terkadang istrinya ikut menemani untuk membantu dalam hal mewawancarai responden dan mencatat setiap tanggapan pada kuesioner Regsosek yang dilakukan antara DRK dan responden. Sekilas terlihat biasa saja, namun tersimpulkan suatu pernyataan bahwa kerja sama ini dapat meminimalisasi kesalahan data/informasi di saat responden memberi tanggapannya sehingga tidak ada data yang terlewat.

Keberangkatan dari kantor BPS Manokwari sekitar pukul 09.00 pagi dikarenakan terdapat longsor di jalan menuju Kecamatan Tanah Rubu. Sistem buka-tutup yang diterapkan oleh petugas membuat rombongan kecil harus mengatur waktu keberangkatan dan kepulangan agar tepat waktu. Perjalanan menuju Kecamatan Tanah Rubu berjarak 70 km dan ditempuh menggunakan sepeda motor. Sepanjang perjalanan diwarnai dengan lebatnya hutan di samping kiri dan kanan, jalan sudah beraspal rapi serta keindahan alam bahari yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

memesona. Nuansa teduh sepanjang jalan menuju Kecamatan Tanah Rubuh membuat rasa kagum, bersyukur dapat melihat langsung karya indah Tuhan di Tanah Papua.

Sampai di lokasi longsor tepat pukul 11.30 siang, waktu di mana portal dibuka sehingga kami dapat melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Tanah Rubu. Selang sekian jam, akhirnya tibalah di Warami dan bertemu dengan Kepala Kampung yang sedang duduk-duduk di balai bersama dengan dua pemuda. Percakapan dimulai bersama dengan Kepala Kampung di kediaman beliau. DRK yang merupakan PPL pun memperkenalkan diri, menjelaskan program Regsosek yang dilakukan BPS Manokwari dan meminta izin kepada Kepala Kampung untuk mendata setiap warga. Kepala Kampung pun menyetujui serta berharap nantinya akan ada bantuan untuk setiap warganya, baik itu kebutuhan sandang, pangan, maupun papan.

Terselip hal menarik ketika DRK memulai tugasnya untuk mendata warga yang ada di Warami. Pembawaan DRK yang santai dan bersahaja membuat warga sekitar langsung menerima kehadiran DRK, ditambah lagi DRK merupakan keturunan asli Papua, kedekatan emosional hampir pasti terjalin secara alami sehingga proses pendataan berjalan dengan lancar. Namun, di sela-sela pendataan, terjadilah pertemuan dengan salah satu keluarga yang menolak untuk didata, alasannya pun terbilang logis. Ibu ini mulai menaikkan nada bicaranya ketika DRK bertanya terkait dengan KK keluarga tersebut. Usut punya usut, ternyata keluarga ini sering didata oleh petugas yang entah dari mana asalnya lalu datang ke rumah meminta dokumen KK, namun sampai saat ini realisasi dari permintaan KK tersebut tidak pernah ada wujudnya. Berkali-kali dikecewakan membuat si ibu naik pitam ketika ada petugas yang lagi-lagi datang untuk meminta data mereka.

Pada akhirnya dengan sangat terpaksa, rumah tersebut dilewatkan untuk hari ini. DRK pun berkata bahwa besok akan datang lagi untuk menjelaskan kepada si Ibu terkait dengan pentingnya program Regsosek yang sekarang digagas oleh pemerintah. Tidak jarang juga selama proses pendataan menemukan rumah yang tidak dihuni sama

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sekali. Hal ini disebabkan warga tersebut masih bekerja di ladang atau rumah tersebut memang sudah tidak dihuni lagi oleh pemiliknya. Persoalan seperti ini sering kali terjadi dan dialami juga oleh PPL di kabupaten lain. Di satu sisi, PPL harus kejar target untuk mendata seluruh warga di tempat penugasannya dengan berbagai hambatan yang beragam, di satu sisi juga harus ada *deadline* waktu pendataan yang harus ditaati.

Petugas PPL mau tidak mau, suka tidak suka, diharuskan untuk cepat, sigap, adaptif, dan kreatif. Pendataan kali ini bisa disimpulkan berjalan cukup lancar, harapan warga terhadap Regsosek ini pun cukup besar. Kebanyakan dari mereka mengharapkan tindak lanjut yang konkret saat pendataan selesai, yaitu mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Tidak terasa hari mau menjelang sore, tim pun kembali pulang sembari menikmati senja yang perlahan memudar dibalik pantai yang tenang.

Keesokan harinya tim mendapatkan kesempatan untuk melihat PPL di daerah lain dalam melaksanakan tugasnya. Perjalanan ditempuh bersama dengan Pak Umam yang merupakan salah satu staf BPS Manokwari menuju ke salah satu desa yang bernama Nimbay, Kecamatan Warmare. Sepanjang perjalanan, lagi dan lagi, disuguhkan panorama indah nan menawan. Barisan perbukitan yang ditumbuhi pohon-pohon yang rindang sungguh memanjakan mata, rasa-rasanya alam Papua Barat mengizinkan kami untuk bertamu di sini.

Namun, tiba-tiba Pak Umam mendapat kabar yang kurang menyenangkan, rute yang nantinya dilalui sedang terjadi kerusuhan antarwarga sehingga kami memutuskan untuk melambatkan laju kendaraan. Selang beberapa lama sampailah di lokasi tempat warga bertikai. Benar saja ketika sampai di daerah itu hampir setengah jalan telah dihalangi oleh pohon serta ada beberapa pemuda dan orang tua yang berdiri di pinggir jalan. Tim memberanikan diri melewati mereka sambil mengucap permisi dan ternyata diizinkan lewat. Sungguh pengalaman yang membuat adrenalin meningkat dengan drastis.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Akhirnya, sampailah kami di sebuah rumah seorang PML yang bernama FR. Alasan singgah terlebih dahulu di rumah FR dikarenakan petugas PPL di bawah koordinasi FR sedang melakukan pendataan di Desa Nimbay. FR langsung menghubungi petugas PPL yang bertugas dengan maksud agar tim bisa bertemu langsung di lokasi. Setelah melakukan koordinasi, tim pun langsung bergegas ke Desa Nimbay untuk menemui petugas PPL tersebut. Sesampainya di Desa Nimbay, AJL dan IGT yang merupakan petugas PPL di Desa Nimbay kebetulan sedang melakukan wawancara di rumah warga. Proses pendataan yang dilakukan AJL dan IGT bisa dikategorikan cepat, kira-kira memakan waktu hanya 20 menit saja, padahal instrumen pertanyaan yang ada di form Regsosek tidak sedikit.

Kecepatan dan ketelitian yang dimiliki oleh AJL dan IGT sepertinya akan memudahkan mereka untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Di sisi lain, kondisi jalan aspal turut membantu petugas dalam menjangkau lokasi warga (Gambar 7.3). Beralih ke rumah sebelah, AJL mengetuk pintu rumah warga tersebut, namun tidak ada jawaban. Berkali-kali pintu rumah diketuk oleh AJL tetap tidak ada jawaban. Sepertinya penghuni rumah sedang bekerja di ladang, kendala ini pun sama dengan yang dialami DRK di Tanah Rubu. Beberapa rumah ternyata sudah dalam keadaan kosong karena warga yang mendiami rumah sedang di ladang atau sudah pindah.

Foto: Yudha (2022)

Gambar 7.3 Kondisi Jalan Menuju Desa Nimbay

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Yudha (2022)

Gambar 7.4 Petugas PML dan PPL melakukan pendataan.

Hambatan ini dikhawatirkan memberikan efek domino pada penetapan realisasi target AJL dan IGT. IGT bercerita bahwa kunci sukses agar diterima oleh masyarakat setempat adalah sudah mengantongi izin kepala kampung terlebih dahulu. Namun, ternyata izin saja tidak cukup, beberapa warga juga sempat menolak kehadiran AJL dan IGT, meskipun mereka sudah mendapatkan izin dari Kepala Kampung. Dengan adanya berbagai hambatan, petugas tetap melaksanakan tugasnya untuk melakukan pendataan (Gambar 7.4). Namun, jika Regsosek sedari awal sudah disosialisasikan secara masif oleh pemerintah daerah, masyarakat sekitar pasti menerima kehadiran para petugas yang datang ke rumah mereka.

E. Dukungan Kelembagaan Sosial Adat dalam Pendataan

Teringat sebuah momen yang cukup menegangkan di saat melakukan perjalanan ke distrik Tanah Rubu. Perjalanan panjang sekitar 50 kilometer membuat badan terasa letih serta dahaga yang makin menjadi-jadi, akhirnya tim menepi untuk beristirahat dan makan siang. Kedatangan tim disambut oleh pasangan suami istri yang sejak tahun 2000 sudah mengadu nasib di Distrik Tanah Rubu, keputusan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang sangat berani untuk berpindah ke tempat ini. Menurut beliau, di tahun 2000, Distrik Tanah Rubu hanyalah hamparan tanah luas serta dipenuhi dengan alang-alang yang merambat hampir di seluruh wilayah, belum ada rumah-rumah seperti saat ini. Seiring berjalannya waktu, keluarga ini dengan sangat gigih mencoba bertahan hidup dengan memulai usaha warung makan. Tidak disangka-sangka, Tanah Rubu saat ini sudah mulai ramai dengan para penduduk serta rumah yang sudah banyak dibangun, baik oleh warga maupun oleh pemerintah.

Di saat mulai menikmati makanan yang sudah dihidangkan, fokus teralihkan ke kantor distrik Kecamatan Tanah Rubu. Posisi kantor distrik persis di depan warung makan yang sedang disinggahi. Dari luar terlihat sepi dan terdapat seorang staf yang sedang duduk di sebelah pintu masuk. Rasa penasaran pun timbul, setelah selesai makan, tim berjalan menghampiri kantor distrik dengan harapan dapat bertemu dengan Camat Tanah Rubu untuk berdiskusi terkait dengan sosialisasi program Regsosek yang dilakukan oleh distrik pada seluruh kampung yang ada di Tanah Rubu. Percakapan dimulai dan masing-masing dari tim memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan kepada staf tersebut. Kebetulan Camat serta staf yang lain tidak ada di tempat dan hanya beliau yang bertugas untuk menjaga kantor distrik hari ini.

Di sela-sela perbincangan, tiba-tiba kami dihampiri oleh seorang pemuda yang sepertinya setengah sadar dan sedang di bawah pengaruh alkohol. Pemuda ini meminta tim untuk memasuki ruangan yang ada di kantor distrik sembari bertanya maksud dan tujuan kedatangan. Pemuda tersebut sudah ditolak dengan halus, namun tidak henti-hentinya memaksa untuk masuk ke dalam ruangan. Staf distrik pun memberikan isyarat agar lekas pergi dari kantor tersebut. Akhirnya tim pamit dan bergegas meninggalkan kantor distrik, namun masih sayup terdengar teriakan pemuda tersebut agar kembali ke kantor. Sungguh suatu kebetulan yang tidak disangka-sangka kejadian tersebut tidak memicu konflik atau kontak fisik, mengingat seseorang bila sudah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dipengaruhi alkohol susah untuk mengontrol dirinya sendiri. Lagi dan lagi kejadian barusan membuat adrenalin kami terpacu dengan cepat.

Perjalanan menuju Desa Warami untuk bertemu dan berdiskusi perihal program Regsosek dengan Bapak Martin selaku Kepala Kampung. Beliau menerima kedatangan kami dan tim memulai perbincangan dengan bertanya kepada Bapak Martin, apakah beliau mengetahui program Regsosek yang sekarang sedang berlangsung. Namun, beliau tidak mengetahui terkait dengan program Regsosek. Akhirnya muncul suatu pertanyaan, apakah sosialisasi terkait dengan Regsosek sudah masif dilakukan sampai di tingkat desa? DRK pun menjelaskan kepada Bapak Martin terkait dengan latar belakang hingga tujuan pemerintah mengadakan Regsosek. Terlihat Bapak Martin serius mendengarkan penjelasan dari DRK terkait dengan Regsosek.

Setelah berbincang cukup intens, usut punya usut beliau ternyata sempat menjadi sasaran amarah warga. Hal ini disebabkan tidak meratanya bantuan pemerintah yang pernah turun ke warga. Padahal data yang terkait dengan masyarakat kurang mampu sudah beliau berikan kepada kecamatan, misalnya ada 10 keluarga yang tergolong kurang mampu, namun hanya 3 keluarga yang diberikan bantuan. Tentunya hal ini dapat memicu konflik antarwarga dan jika dibiarkan terus-menerus, ke depannya pasti akan membuat kondisi lingkungan menjadi kurang kondusif. Bapak Martin sangat berharap melalui program Regsosek ini tidak ada warganya yang tertinggal, khususnya warga yang memang benar-benar membutuhkan bantuan, dan juga semoga program Regsosek menjadi momentum untuk pemerintah dalam hal membenahi data kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya di Papua Barat.

Bapak Martin saat berbincang dengan tim peneliti (Gambar 7.5) menyatakan siap untuk berperan aktif dalam menyosialisasikan program Regsosek kepada seluruh warga yang ada di Desa Warami. Bapak Martin berencana untuk sesegera mungkin mengumpulkan seluruh warga dan menjelaskan langsung terkait dengan program Regsosek yang sekarang telah berjalan. Sosialisasi yang dilakukan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Yudha (2022)

Gambar 7.5 Perbincangan Bersama dengan Bapak Martin dan DRK

langsung oleh Kepala Kampung diharapkan dapat memantik antusiasme warga untuk bersedia didata ketika PPL datang ke rumah warga. Di sela-sela obrolan dengan Bapak Martin, terselip fakta menarik bahwa ada pihak lain di luar dari struktur perangkat desa yang dipercaya oleh kalangan masyarakat.

Pihak tersebut adalah Pendeta, sampai-sampai Bapak Martin berkata bahwa warganya lebih percaya kepada Pendeta dibandingkan pihak luar, bahkan pemerintah. Pemuka agama di kalangan masyarakat Papua memegang peranan penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Pendeta menjadi sosok yang disegani dan dihormati oleh masyarakat, bahkan data pribadi seperti salinan kartu keluarga dan salinan kartu tanda penduduk dititipkan kepada Pendeta. Bapak Martin juga ingin melibatkan Pendeta di Warami untuk membantu menyosialisasikan program Regsosek dengan harapan masyarakat lebih antusias lagi untuk menerima program Regsosek.

Antusiasme dan keseriusan Kepala Kampung Warami dalam menerima dan menjalankan program Regsosek tentunya menjadi awal yang baik bagi perbaikan kesejahteraan sosial warga ke depannya. Bapak Martin memilih untuk percaya bahwa program Regsosek ini akan berdampak baik untuk desa yang dipimpinnya. Data sosial ekonomi yang telah dikumpulkan pastinya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan di

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Papua Barat. Jika seluruh Kepala Kampung yang ada di Papua Barat mempunyai sikap yang sama dengan Bapak Martin, bukan tidak mungkin Papua Barat akan melesat maju dengan pesat.

Pembangunan yang didasarkan dengan kondisi sosial ekonomi dan kearifan lokal masyarakat setempat menjadi kombinasi yang terbilang sempurna. Di satu sisi, masyarakat mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya, pembangunan disesuaikan dengan kondisi yang ada di wilayah tersebut tanpa menghilangkan esensi kearifan lokal di wilayah tersebut. Bapak Martin dan seluruh perangkat desa akan terus mengawal program ini. Terdapat banyak asa yang tertanam oleh semua warga desa Warami pada program Regsosek yang sedang dilakukan oleh BPS.

F. Beban yang Tak Ringan Pencacah Angka: Kisah Hidup

Sebelumnya tidak tebersit dalam benak para pengguna data (peneliti lain, perencana, dan pengambil kebijakan) bagaimana ragam data produksi BPS (hasil survei, registrasi, dan sensus) yang tersaji secara sistematis di *website* mudah diperoleh oleh setiap orang yang membutuhkan. Kita pun masih teringat pada saat pandemi COVID–19 di akhir tahun yang akhirnya menghancurkan perekonomian negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Lumpuhnya perekonomian, penerbangan, dan jasa perhotelan mengakibatkan pengangguran yang cukup besar. Pada saat itu, Pemerintah Indonesia terlihat tidak siap dan gagap untuk menentukan target siapa dan berapa jumlah masyarakat yang berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial.

Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang seharusnya menjadi dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial kenyataannya tidak memadai untuk menentukan target dan sasaran penerima bantuan secara cepat dan tepat. Setiap sektor akhirnya berusaha menentukan sasaran penerima bantuan dengan metode yang tidak seragam. Belajar dari momentum itu, tergambar

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bahwa ketersediaan data yang akurat merupakan salah faktor penentu (determinan faktor) keberhasilan pembangunan maupun program perlindungan sosial dan pemberdayaan, baik dalam konteks nasional maupun daerah.

Pertanyaan besarnya, bagaimanakah peran BPS sebagai lembaga yang mendapat amanat untuk penyedia data bekerja? Tidak diragukan lagi bahwa BPS sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyediaan data dalam proses bisnis dan mekanisme pengumpulan berbagai kegiatan pengumpulan data, baik itu Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), dan Potensi Desa (PODES) bersandar pada metode yang akuntabel, transparan, dan imparsial sebagai prinsip yang harus ditaati oleh lembaga penyedia data di seluruh dunia.

Salah satu kunci keberhasilan kegiatan pendataan yang dilakukan oleh BPS sangat ditentukan oleh kemampuan tenaga PPL atau enumerator yang tersebar di seluruh wilayah pendataan. Tugas seorang PPL hasil rekrutmen baru ataupun PPL yang sudah pernah mengikuti kegiatan pendataan sebelumnya atau yang dikenal dengan "Mitra BPS" dipersiapkan secara matang melalui pelatihan dan pemberian peralatan pendukung sehingga menjadi PPL yang terampil. Walaupun langkah kerja perinci dalam proses bisnis pendataan sudah dipersiapkan, didesain secara praktis dan menjadi agenda kerja yang mudah dipahami, tantangannya adalah pada teknis pelaksanaannya. Mengingat tugas seorang PPL tidak hanya terbatas menguasai dan memahami pertanyaan yang tertuang dalam kuesioner, tetapi juga dituntut mampu "menguras" data dari responden secara akurat, cepat, dan tidak menimbulkan persepsi yang berlebihan melalui strategi komunikasi yang tepat serta dapat mengatasi hambatan sosial di masyarakat dan lingkungan wilayah kerjanya.

Tujuan tulisan dalam subbab ini menarasikan emik kegiatan awal Regsosek tahun 2022. Tulisan ini memberikan fokus pada kegiatan seorang PPL melakukan pendataan di tingkat lapang dengan mendeskripsikan secara rinci tentang latar kehidupan PPL, tujuan dan harapan menjadi PPL, dan pengetahuan tentang pelaksanaan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pendataan Regsosek, pengamatan selama PPL bekerja melakukan pendataan (cara memperkenalkan diri, melontarkan, dan menjelaskan pertanyaan yang tidak dipahami oleh responden).

Melalui pengamatan dan pencatatan selama kerja ini akan diperoleh mosaik secara utuh yang memberikan gambaran tentang etos kerja seorang PPL dalam melakukan pengumpulan data. Pemilihan objek dan lokasi pengamatan adalah hasil konsultasi dengan Koordinator Regsosek Kabupaten Manokwari dan PML di Kecamatan Warmare yang jaraknya kurang lebih 40 km dari Manokwari.

Berdasarkan hasil konsultasi dengan PML, Desa Nimbay yang berjarak kurang lebih 10 km dari ibu kota kecamatan ditentukan sebagai lokasi pengamatan yang pada saat itu terdapat PPL yang sedang melakukan pendataan. Menggunakan kendaraan bermotor roda dua ditemani oleh PML dan berpatokan posisi lokasi yang dikirim melalui Whatsapp (*share location*), kami segera berangkat menuju Desa Nimbay menemui PPL yang sedang melakukan pendataan.

Ketika memasuki Desa Nimbay, di tengah desa, PML menunjuk seorang pemuda yang menggunakan *polo shirt*, bersepatu *sneaker*, dan membawa tas punggung sedang berdiri di depan pintu rumah warga yang berdinding papan. Tim Regsosek minta untuk berhenti tidak usah menemui secara langsung. Pertimbangan mengambil keputusan itu adalah, dirasa tidak mendesak untuk sekadar menghentikan kerjanya hanya untuk melakukan wawancara menggali identitas diri dan latar belakang alasannya menjadi PPL. Momen langka ini penting untuk merekam dan mencatat tingkah laku dan ekspresi sang pendata mulai awal kegiatan sampai selesai melakukan pendataan.

1. Menakar Beban Pendata

Sambil berdiri di pinggir jalan, tak jauh dari rumah yang didatangi PPL, Tim fokus mengamati gestur PPL menghadap pintu rumah dan berusaha untuk tidak mengganggu aktivitasnya. Rupanya dia sudah beberapa saat berusaha untuk menemui pemilik rumah dan menunggu lama, namun belum dibukakan pintu dan dipersilakan masuk rumah. Ketika dibukakan pintu dan PPL memasuki rumah, tim bergegas

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menemuinya. Berdiri di depan pintu, setelah memperkenalkan diri, Tim mengamati PPL sedang duduk di lantai semen yang beralas karpet plastik bermotif bunga. Dua gadis bersimpuh di depannya, salah satunya bermain ponsel dan satunya tersenyum menatap para tamunya. Gadis yang bermain ponsel dan acuh terhadap kedatangan PPL ternyata anak pemilik rumah, sedangkan gadis satunya adalah temannya. Sambil berbincang singkat, PPL membuka perbincangan dengan topik ringan di luar dari materi dalam kuesioner. Dari obrolan ringan terkuak bawa gadis ber-ponsel itu hanya berdua dengan sang ayah menempati rumah di Nimbay. Dia masih belajar di kelas dua SMA Warmare, ibunya sudah meninggal dan ayahnya baru bekerja di luar desa.

Setelah berorientasi, beradaptasi, dan mengamati kondisi dalam ruang tamu sederhana, PPL memperkenalkan diri secara perlahan dan hati-hari dia menjelaskan tujuan pendataan dan memohon gadis ber-ponsel bersedia menjadi responden untuk menjawab pertanyaan mewakili ayahnya dan meminta izin diperbolehkan melihat KK. Sambil menunggu tuan rumah mencari kartu KK, tim berusaha secara singkat menjelaskan tujuan pengamatan. Prinsipnya, bukan mengevaluasi kerjanya, melainkan tujuan utamanya ingin mengetahui secara detail dan sekaligus belajar tentang mekanisme kerja pendataan awal Regsosek, tantangan, dan hambatan selama melakukan pendataan.

Saat mendengarkan penjelasan singkat dari tim, pandangan matanya berganti-ganti arah, mengamati segala situasi rumah yang menjadi obyek pendataan. Sesekali melihat dapur yang terlihat dari celah pintu yang terbuka dan sesekali mendongak ke atas. Rupanya dia sedang mengamati detail kondisi rumah (lantai, dinding, plafon, dan pemilikan aset) sesuai dengan butir-butir pertanyaan dalam kuesioner yang kasat mata (sudah jelas) dan tidak perlu ditanyakan kepada responden. Kalaupun ditanyakan, hanya sebagai penegasan sebagai kewajiban yang harus dilakukan seorang PPL. Hal ini terbukti, ketika dia menerima kartu KK, dia segera mengambil kuesioner dan alat tulis dari tasnya dan segera melakukan pencatatan data dasar tentang keterangan perumahan (poin III dalam lembar kuesioner).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sesekali ia melontarkan pertanyaan seperti sumber air untuk kebutuhan sehari-hari, dan bahan bakar untuk kebutuhan memasak. Mengenai kebutuhan air, apakah berasal dari sumur atau mengambil dari mata air di luar pekarangan (mata air dan sungai), sedangkan kebutuhan memasak apakah menggunakan kayu bakar, minyak tanah atau bahan bakar gas. Ketika saya tanyakan mengapa pertanyaan itu diulang, *toh* dia sudah observasi tentang kondisi rumah responden yang terlihat jelas sederhana. Jawabannya cukup taktis, itu tidak boleh dilakukan, harus ditanyakan kepada responden. Kita tidak diperbolehkan berprasangka bahwa dengan kondisi rumah sederhana itu pasti mengambil air dari sungai ataupun menggunakan bahan bakar kayu untuk memasak, bahkan tidak mempunyai lemari pendingin. Dengan pendekatan melalui obrolan singkat seperti itu, terbangun suasana menjadi lebih cair, hilang rasa kikuknya ketika bekerja didampingi orang yang baru dikenalnya.

Ketika beranjak ke pertanyaan IV, yaitu keterangan sosial, ekonomi anggota keluarga poin C (ketenagakerjaan), D (kepemilikan usaha), E (kesehatan program perlindungan sosial), F (perlindungan sosial), dan pertanyaan V terkait keikutsertaan program, terlihat responden kebingungan untuk menjawabnya. Hal ini disebabkan pertanyaan PPL yang disampaikan cenderung *textbook* sesuai dengan narasi pertanyaan dan jawaban tertulis di dalam kuesioner yang pengertiannya bersifat sangat teknis. Beberapa terminologi sebagai pilihan jawaban, seperti hortikultura, *real estate*, dan istilah ragam kepemilikan perizinan usaha adalah pilihan jawaban yang sulit untuk dipahami oleh responden yang sejak awal tidak konsentrasi, cenderung malu, takut, dan konsentrasi bermainponsel. Pada titik inilah PPL berulang kali menjelaskan secara singkat dengan mencari padanan pengertian yang sekiranya mudah dipahami responden.

Saat melontarkan pertanyaan tentang program perlindungan sosial dan keikutsertaan program, responden merasa kesulitan untuk memahami apa yang dimaksud dengan program Bantuan Sosial Sembako/BNPT, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Bahkan, PPL

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mengalami kesulitan untuk menjelaskan secara mudah pengertian berbagai program sebagai salah satu pilihan jawaban yang harus diberikan responden. Sebagai ilustrasi, ketika ditanyakan berulang kali program apa saja yang pernah diterima, responden kebingungan untuk menjawab. Saat ditanya apa pernah mendapat bantuan dalam bentuk uang yang dibagikan oleh Kepala Kampung, responden secara cepat menjawab iya dan sampai saat ini terus menerimanya, dan PPL mengerti maksud dari jawaban tersebut. Padahal jawaban yang dikemukakan oleh responden tidak tersedia di dalam pilihan jawaban yang tersedia di kuesioner. Saat saya menanyakan kepada PPL apakah mengerti dan paham terhadap jawaban yang dikemukakan oleh responden, dia pun memahaminya.

Berdasarkan pengakuannya, konsep-konsep atau pengertian yang berada dalam kuesioner tersebut pasti akan susah dipahami oleh masyarakat apabila ditanyakan seperti yang tertera. Mereka hanya mengerti siapa yang membagi dan bukan nama program bantuannya. Menurut pengalamannya selama mendata dan didampingi oleh aparat desa, bantuan yang diserahkan oleh aparat desa selama ini adalah bersumber dari BLT Desa. Dalam beberapa kasus, sistem distribusi program bantuan pada beberapa desa tidak sama. Pada beberapa daerah, masyarakat menerima bantuan PKH yang dibagikan oleh petugas dari Dinas Sosial Kabupaten atau mereka mengambil di kantor pos. Sementara itu, penyaluran BLT Desa pada umumnya didistribusikan kepada masyarakat melalui kepala kampung.

Ketika PPL berkemas mengumpulkan berkas dan memasukkannya ke dalam tas, dia beranjak izin keluar untuk mendokumentasikan rumah dan menandai posisi/kedudukan rumah (*geotagging*) menggunakan ponsel. Tim baru sadar bahwa pendataan sudah selesai. Saat saya mengamati jam tangan, ternyata waktu yang dibutuhkan kurang lebih 20 menit. PPL mengajak kami untuk melanjutkan pendataan di rumah warga yang satu deret dengan rumah warga yang sebelumnya dilakukan pendataan. Sambil berjalan, saya dijelaskan tentang strategi pendataan yang dia lakukan. Pertama, dia melakukan koordinasi dengan kepala kampung untuk menjelaskan maksud dan tujuan pen-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dataan awal Regsosek, selanjutnya memverifikasi jumlah penduduk yang akan didata berdasarkan lembar VK 1. Jumlah keluarga yang tercantum dalam dokumen VK 1 lah yang menjadi target pendataan PPL. Jumlahnya bisa berkurang atau bertambah, disebabkan kematian dan adanya pendatang baru. Untuk menyesuaikan dan mempercepat pendataan, juga ditanyakan tentang kebiasaan warga saat berada di rumah dan mohon diinformasikan kepada masyarakat untuk menyiapkan kartu keluarga.

Melanjutkan pendataan dari target empat keluarga, satu keluarga tidak berada di rumah karena sedang bekerja di ladang. Saya mencatat, proses pendataan relatif berjalan lancar, AJL tidak perlu mengulang pertanyaan berkali-kali. Hal ini disebabkan tiga keluarga sudah biasa mendapat kunjungan petugas pendataan dan sebelumnya sudah mendapat informasi dari aparat kampung. Ketika saya bertanya berapa rumah yang dikunjungi dan berapa yang menolak atau tidak berada di tempat. Ternyata dari 10 keluarga yang ditargetkan, tidak ada yang menolak, tetapi sebanyak 4 orang tidak berada di tempat. Keadaan seperti itu menunjukkan suka dukanya melakukan pendataan yang targetnya tidak dapat dipastikan.

Anggota tim beruntung berkenalan dengan PPL yang terlibat dalam pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi Tahun 2022 di Desa Nimbay Kecamatan Warmare Kabupaten Manokwari Papua Barat. Target pendataan mayoritas adalah masyarakat lokal dan sedikit pendatang yang berasal dari Jawa, Buton, dan Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Pemuda yang pertama kali saya lihat saat berdiri di depan rumah warga dengan baju *polo shirt*, sepatu jenis *sneaker*, dan menyandang tas punggung itu bernama AJL (semoga saya tidak salah mengeja). Lahir 21 tahun yang lalu di Desa/Kampung Indipi Hilir Kecamatan Warmare dari seorang ibu, putri seorang transmigran, ayah berasal dari Buton yang saat ini bekerja di SMA Warmare. Indipi Hilir adalah salah satu desa yang awalnya adalah permukiman transmigrasi di Kabupaten Manokwari.

Dengan latar belakang itu, beliau adalah generasi ketiga transmigran di Desa Indipi Hilir. Saat ini dia kuliah di Universitas

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pendidikan Muhammadiyah Sorong Fakultas Pendidikan Jasmani. Di tengah waktu menyiapkan skripsi, seorang teman menawari untuk mendaftar menjadi PPL Registrasi Sosial Ekonomi. Dengan alasan mencari pengalaman baru dan mengisi waktu luang akhirnya dia mendaftar dan diterima menjadi PPL yang bertugas di Desa Nimbay dan Subsay Kecamatan Warmare. Jarak lokasi pendataan 10 km dari tempat tinggalnya sehingga sudah tidak asing dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi target pendataan. Untuk perekrutan tenaga pendata (PPL), kebijakan BPS adalah mengutamakan tenaga kerja setempat yang lebih menguasai karakter sosial dan lingkungan wilayah pendataan.

Dia menyadari setelah mendapat pelatihan dan diberi tugas pendataan di dua desa, beban tanggung jawab yang dirasakan PPL tidaklah ringan. Ditambah dengan target keluarga yang mayoritas masyarakat lokal. Hal yang paling dirasakan adalah memahami pertanyaan yang berjumlah kurang lebih 68 dengan ragam pilihan jawaban. Untuk memahami, ia harus membaca berulang-ulang. Di dalam praktiknya, target yang sudah ditetapkan di lembar VK-1 besar kemungkinan bertambah dan itu tidak dapat diprediksi. Hal ini terbukti pada saat dia konfirmasi dengan Kepala Kampung Nimbay, jumlah penduduk Nimbay lebih besar dibandingkan jumlah yang tercantum dalam VK 1. Selain itu, faktor cuaca, jarak, keberadaan keluarga di rumah, dan penolakan adalah tantangan yang sudah terpikir dibenaknya. Ketika ditanya, mengapa pertanyaan diajukan dan dijelaskan secara singkat, *to the point*, dan cenderung lugas? AJL menjawab teknik itu dilakukan untuk menghindari rasa bosan dan tidak menyita waktu, mengingat bahwa responden bersedia meluangkan waktu untuk wawancara itu lebih dari cukup serta mengejar target pendataan. Dalam perbincangan itu, ia mengaku punya sifat introver (tertutup) dan tidak biasa berdialog melakukan percakapan yang bertele-tele.

2. **Momentum Refleksi**

Berkenalan dengan AJL dan mengikuti dia bekerja melakukan pendataan awal Regsosek tahun 2022 di Desa Nimbay, Kabupaten Manokwari Papua Barat, yang sebagian besar warganya masyarakat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

lokal, adalah momentum historis dan memberikan pengalaman berharga yang tidak mungkin saya lupakan. Walaupun dengan waktu relatif singkat, banyak pelajaran yang dapat diperoleh serta telah membuka mata dan pikiran bagaimana memaknai data dan proses merangkainya. Dalam konteks pendataan awal Regsosek 2022, seorang PPL adalah subsistem dari proses bisnis dan mekanisme kerja BPS. Akurasi hasil pendataan salah satunya ditentukan oleh kinerja PPL.

Petugas pendataan tidak hanya dituntut mampu dan memahami 68 pertanyaan serta menentukan beragam jawaban dengan pengertian yang bersifat teknis yang tercantum dalam kuesioner. Kondisi wilayah kerja dengan karakteristik sosial, adat istiadat, dan lingkungan geografis berbeda, jelas membutuhkan strategi yang tidak sama. Tidak hanya terbatas pada dukungan anggaran, tetapi juga strategi komunikasi yang tepat dan mudah dipahami oleh keluarga yang menjadi target pendataan. Beberapa catatan penting lainnya, antara lain sudah saatnya untuk jenis pendataan mendatang perlu kiranya untuk menjelaskan secara mudah, khususnya, konsep program dan terminologi, seperti PKH, BLT Desa, BNPT, SITU, SIUP, dan NRDDP. Demikian pula dalam konteks sosialisasi dan koordinasi, sebaiknya tidak berhenti pada level kecamatan, tetapi juga melibatkan pemerintah desa/kampung. Di lapangan, otoritas di tingkat desa mempunyai peran penting dalam rangka menyosialisasikan pendataan. Terlalu berlebihan rasanya apabila pembelajaran dari seorang PPL di Tanah Papua dalam waktu singkat ini mewakili profil seorang pendata sebagai mitra BPS. Akurasi data dalam kegiatan pendataan apa pun, salah satunya ditentukan oleh kinerja sang pendata yang memegang prinsip profesionalitas, dapat menjaga kerahasiaan, dan tidak berpihak.

G. Menarasikan dan Memaknai Angka Entitas Keluarga

Pada konteks pendataan yang terkait kependudukan, masyarakat adalah "objek" penyedia informasi. Dalam pendataan awal Regsosek tahun 2022, keterangan perumahan, kondisi sosial ekonomi (demografi,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pendidikan, ketenagakerjaan, kepemilikan usaha, kesehatan, program perlindungan sosial) dan keikutsertaan program serta kepemilikan aset dan layanan adalah aspek penting yang melekat pada setiap orang dan menjadi sasaran pendataan. Dalam lembar kuesioner Regsosek tahun 2022 poin-poin itu tertuang pada 68 pertanyaan yang dilontarkan pendata kepada responden. Untuk mendapatkan berbagai informasi secara cepat, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses pendataan adalah terganggunya privasi saat pengumpulan data dan kekhawatiran penggunaan informasi rahasia individu (responden).

Dalam konteks ini, komponen pertanyaan yang terkait dengan kepemilikan aset harus spesifik, mudah dipahami, dan dijaga kerahasiaannya. Selain itu, harus diperhatikan lama waktu wawancara saat pengumpulan agar tidak mengganggu kehidupan responden. Kedua aspek tersebut merupakan salah satu tantangan tersulit yang dihadapi oleh petugas pendata di tingkat lapangan.

Keragaman karakter sosial budaya, adat istiadat masyarakat di Indonesia membutuhkan pendekatan dalam kerja pendataan penduduk. Dalam banyak kasus terdapat masyarakat yang menolak kedatangan petugas, mereka beranggapan tabu untuk memberikan informasi identitas yang melekat pada dirinya. Tidak menutup kemungkinan kesalahan kecil seperti pemanfaatan alat komunikasi ponsel untuk mengambil beberapa bagian rumah menyebabkan perampasan dan denda ke petugas. Seringnya kegiatan pendataan juga berdampak terhadap persepsi masyarakat. Mereka menganggap bahwa pendataan adalah identik dengan bantuan. Masyarakat yang kebetulan didata sesuai dengan kebutuhan, pada akhirnya melekat dibenaknya bahwa ketika dilakukan pendataan ulang mereka memastikan akan mendapatkan bantuan. Sebaliknya, masyarakat yang berkali kali dilakukan pendataan dalam konteks yang lain dan bukan sebagai target akan merasa bahwa mereka mendapat perlakuan tidak adil.

Beberapa masalah tersebut seolah menjadi biasa dan hal yang selalu dialami petugas saat mereka bekerja. Pada masa mendatang, para pemangku kepentingan perlu membangun kerja sama agar proses pendataan tidak dipandang negatif oleh masyarakat. Proses

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pendataan bukan menjadi tanggung jawab BPS semata, melainkan juga para pemangku kepentingan. Para pihak terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus mempunyai kesadaran bersama untuk terlibat aktif dalam proses pengumpulan data, baik melalui koordinasi maupun sosialisasi kegiatan pendataan.

Di masa mendatang, keberhasilan pengumpulan data akan ditentukan oleh kolaborasi para pihak yang mengedepankan edukasi kepada masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga harus membuktikan bahwa data yang bersumber dari masyarakat telah bertransformasi dalam bentuk program dan kegiatan nyata untuk peningkatan kesejahteraan.

Gambaran singkat tentang potret keluarga penyedia informasi ini terekam saat mengikuti PPL melakukan pendataan di Desa Nimbay, salah satu desa dengan kategori tertinggal di Manokwari dan mayoritas penduduknya adalah masyarakat asli Papua. Ketika PPL dibukakan pintu, saya bergegas mendatangi rumah yang menjadi target pendataan untuk mengetahui bagaimana potret keluarga yang menjadi sasaran pendataan. Ternyata yang menyambut kedatangan PPL adalah dua gadis muda, yang satu berperawakan jangkung memegang ponsel dan satunya berperawakan langsing. Mereka berdua tidak segera mempersilakan kami masuk ke dalam rumah. Dari ekspresi wajahnya, kedua gadis tampak kaget, malu, dan kelihatan ragu untuk menerima kedatangan kami berdua. Setelah dijelaskan singkat oleh PPL, baru kami dipersilakan untuk memasuki rumah dan duduk di ruang tamu berlantai semen.

Dengan cepat PPL menjelaskan kembali maksud dan tujuan kedatangannya dan sebelum memulai wawancara minta kepada tuan rumah untuk memperlihatkan kartu keluarga. Saat dia beranjak menuju kamar untuk mencari dokumen keluarga, saya mengamati secara cepat situasi dalam rumah berdinding bambu dan berlantai semen itu. Ternyata PPL juga melakukan hal yang sama, mencermati detail isi rumah. Rumah sederhana ini tidak tertutup plafon, mempunyai dua kamar bersebelahan tidak berpintu, dan ditutup dengan kain gorden berwarna biru. Di dalam ruang tamu terdapat lemari kecil,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

di atasnya terdapat televisi warna putih tertutup kain berenda. Dilihat dari bentuknya, televisi itu model lama dan masih belum berwarna. Pada bagian belakang terdapat pintu kayu yang menghubungkan rumah induk dengan dapur terbuka.

Gadis yang memegang ponsel keluar kamar membawa kartu keluarga dan menyerahkan kepada PPL yang saat itu masih berorientasi dan beradaptasi dengan situasi rumah. Setelah menerima KK, PPL dengan cepat menyalin informasi dalam kartu keluarga dan sesekali bertanya kepada tuan rumah apabila ada beberapa hal yang dirasa tidak jelas. Ketika selesai mencatat identitas diri dari KK, PPL menjelaskan ulang yang ketiga kalinya tentang tujuan pendataan. Pada saat memulai wawancara dan menanyakan keberadaan kepala rumah tangga, gadis yang ternyata bernama MGD itu, sambil tetap memainkan ponselnya, menjawab bahwa saat ini dan setiap hari ayahnya bekerja di kebun di luar desanya. Sambil mempersiapkan diri untuk memulai pendataan, PPL menjelaskan kepada saya situasi seperti ini sering dialami petugas ketika melakukan pendataan. Ketika kepala keluarga tidak berada di rumah, pihak yang mewakili memberikan informasi pada umumnya diwakili oleh istri ataupun anaknya yang saat itu kebetulan berada di rumah.

Mengetahui bahwa responden diwakili oleh anak gadis kepala keluarga, dengan hati-hati PPL segera menanyakan identitas keluarga secara sabar dan hati-hati agar dapat dijawab dengan mudah. Sambil mendengarkan wawancara, saya berusaha untuk mengikuti secara saksama agar dapat memotret jati diri responden sebagai penyedia informasi dalam kegiatan pendataan awal Regsosek tahun 2022. Sesekali secara singkat saya juga ikut bertanya untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan beberapa hal yang saya tidak mengerti. Selama mengikuti wawancara, saya berusaha untuk merangkai jawaban responden menjadi mosaik yang utuh sehingga dapat menggambarkan profil masyarakat sebagai penyedia informasi dalam pendataan Regsosek dan mungkin karakter masyarakat pada kegiatan pendataan lainnya. Dari hasil penuturan anak perempuan yang masih sekolah di tingkat SMA ini secara jelas terungkap jati diri salah satu profil pendataan di satu desa di Papua.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ayah responden dengan inisial MGD menempuh pendidikan hingga sekolah dasar dan kemudian bekerja sebagai petani. Jumlah keluarga saat ini tiga orang, dua orang sudah berkeluarga dan bertempat tinggal di luar desa, sedangkan satu anak perempuan saat ini masih bersekolah kelas 2 di SMA. AI saat ini hidup di Desa Nimbay hanya ditemani oleh anaknya (yang mewakili kepala keluarga saat pendataan), sedangkan istrinya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Untuk menghidupi keluarganya, AI bekerja sebagai petani, dengan mengusahakan kebun di belakang rumah dan kebun pisang di luar desa. AI menempati rumah sederhana layak huni berdinding papan, mempunyai jendela di setiap ruangan, dan beratap seng dengan halaman bersih tampak rapi. Di belakang rumah terlihat kamar mandi dan WC dengan bangunan permanen terpisah dari rumah induk.

Di Desa Nimbay ini hampir di semua rumah mempunyai kamar mandi dan WC di belakang rumah dengan bangunan yang sama. Dari penjelasan aparat desa, kamar mandi dan WC adalah bantuan dari Pemerintah Desa dan dananya bersumber dari dana desa. Terdapat berbagai jenis tanaman kebun belakang, seperti pisang, nangka, rambutan, langsat, mangga, pohon kelapa, dan singkong. Seperti umumnya, kebun masyarakat desa Nimbay tidak diusahakan secara intensif, hasil panen buah setiap musim sebagian dijual untuk menopang kehidupan dan sebagian sebagai konsumsi keluarga.

Berdasarkan penjelasan anaknya, keluarga AI adalah satu satu anggota masyarakat Desa Nimbay penerima program bantuan BLT Desa dan program subsidi listrik. Hal ini sudah cukup menjelaskan bahwa AI adalah keluarga tidak mampu (miskin) yang berhak mendapat perlindungan sosial. Dengan kedua bantuan tersebut, diharapkan mereka mampu hidup di tengah kesulitan ekonomi melalui kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Namun, ketika diajukan pertanyaan dalam kuesioner yang mencantumkan jenis bantuan program seperti program bantuan sembako, subsidi listrik, bantuan pemerintah daerah, subsidi pupuk, dan subsidi LPG mereka tidak dapat menjawab dengan pasti. Selama mengikuti pendataan, keluarga yang menerima bantuan, pada umumnya tidak mengetahui jenis program. Mereka

Buku ini tidak diperjualbelikan.

hanya mengetahui bahwa selama ini menerima bantuan uang yang disalurkan pemerintah desa dan dibebaskan dari biaya langganan listrik.

Keterbatasan terhadap literasi pendataan dan berbagai jenis bantuan sebagai bagian dari perlindungan sosial selama ini justru menimbulkan kecenderungan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Anggapan yang muncul di dalam benak masyarakat adalah bahwa pendataan adalah identik dengan bantuan. Hal ini melekat pada sebagian masyarakat yang telah beberapa kali dilakukan pendataan pada akhirnya terbukti menerima bantuan. Di sisi lain, juga muncul anggapan bahwa pendataan tidak bermanfaat. Anggapan ini tertanam pada mereka yang telah beberapa kali dilakukan pendataan dan diminta menunjukkan kartu keluarga, tetapi pada kenyataannya tidak pernah mendapat bantuan. Kemungkinan yang terjadi adalah mereka memahami bahwa kegiatan pendataaan dalam program perlindungan bertujuan mendapatkan informasi tentang kondisi sosial masyarakat dan hanya mereka yang mempunyai kriteria tertentu menjadi target program dan berhak menerima bantuan. Dari hasil diskusi dengan aparat BPS, ragam persepsi masyarakat target pendataan tersebut selalu dihadapi setiap pendataan dilakukan petugas BPS. Masyarakat tidak menyadari bahwa semua kegiatan BPS yang dilakukan secara periodik tidak bertujuan mencari target pemberian bantuan perlindungan sosial (bantuan keuangan, peralatan kerja, sarana produksi pertanian dan usaha produktif keluarga, dll.)

H. Mengungkap Kemiskinan: Suatu Penutup

Kemiskinan ekstrem adalah salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah hingga saat ini. Berbagai program dan kegiatan pembangunan selama ini seolah tidak dapat mengatasi persoalan tersebut. Berbagai kalangan menilai bahwa persoalan klasik yang menjadi persoalan pembangunan adalah ego sektoral yang sangat tinggi dari para pihak yang mempunyai otoritas terkait dengan pengentasan kemiskinan. Di sisi lain, pengalaman juga menunjukkan bahwa perencanaan program pembangunan tidaklah berbasis data yang valid. Kedua persoalan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menyebabkan tumpang tindih program dan kecenderungan bantuan yang seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, khususnya terkait dengan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Regsosek berupaya membangun satu data terintegrasi sebagai pintu masuk bagi para pihak untuk merancang berbagai program perlindungan sosial sesuai kebutuhan sasaran penerima manfaat secara akurat.

Satu data hasil Regsosek secara jelas mampu menggambarkan status kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah dengan karakter berbeda sehingga tidak ada lagi argumen para pihak untuk tidak memanfaatkannya. Pemanfaatan satu data terpadu sebagai basis perencanaan program pembangunan adalah wujud komitmen dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan pemicu pengentasan kemiskinan ekstrem.

Daftar Pustaka

BPS Kabupaten Manokwari. (2022). *Kabupaten Manokwari dalam angka 2022*. https://manokwarikab.bps.go.id/publication/2022/02/25/3853bce77629ca52ec2d6b44/kabupaten-manokwari-dalam-angka-2022.html

BPS Provinsi Papua Barat. (2022). *Provinsi Papua Barat dalam angka 2022*. https://papuabarat.bps.go.id/publication/2022/02/25/55355ed63b32c5ab9dad5f0b/provinsi-papua-barat-dalam-angka-2022.html

BPS Kabupaten Manokwari. (2021). *Indeks pembangunan manusia Kabupaten Manokwari tahun 2020*. https://manokwarikab.bps.go.id/publication/ 2021/12/31/4cadd2cfefb380b59b8cf206/indeks-pembangunan-manusia-kabupaten-manokwari-2020.html

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2022). *Peringkat nilai rata-rata indeks desa membangun tahun 2022: Provinsi–kabupaten–kecamatan–desa*. https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/3/publikasi

Dowansiba, K. (2020, 22 Agustus). Dampak buruk Kehadiran pabrik semen Maruni di Manokwari. *Laolao*. https://laolao-papua.com/2020/08/22/catatan-awal-dampak-buruk-kehadiran-pabrik-semen-maruni-manokwari/

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. (2022). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/211477/inpres-no-4-tahun-2022

Peta Administrasi Kota Manokwari. (t.t). *Petatematikindo*. Diakses pada 15 November 2022, dari https://petatematikindo.files.wordpress.com/2013/01/adminsitrasi-manokwari1.jpg

Suharto, W. (2022). Penguatan kapasitas daerah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem [Presentasi PowerPoint]. https://smeru.or.id/sites/default/files/events/wahyu_suharto_-_penguatan_kapasitas_daerah_dalam_penghapusan_kemiskinan_ekstrem.pdf

United Nations. (2015). *Conference of European statisticians: Recommendations for the 2020 censuses of population and housing*. https://unece.org/DAM/stats/publications/2015/ECECES41_EN.pdf

Buku ini tidak diperjualbelikan.

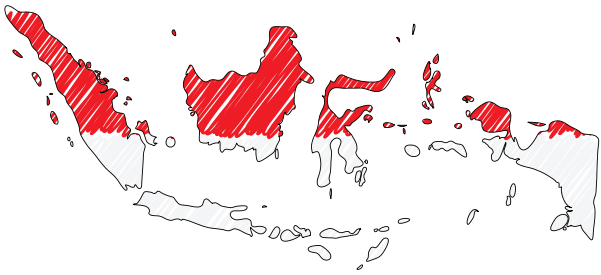

8

Mencacah Angka, Menarasikan Realitas: Memotret Realitas Kelindan Regsosek dan Masyarakat di Pulau Ternate

Lukman Nul Hakim & Reza Amarta Prayoga

A. Menghayati Regsosek di Kota Ternate Maluku Utara

Pada bulan Oktober–November 2022, bangsa Indonesia mempunyai hajatan besar, yaitu berupa kegiatan mendata seluruh penduduk Indonesia di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Secara konten, pendataan ini bertujuan memetakan jumlah penduduk, pekerjaan, perlindungan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan, disabilitas, dan keberdayaan secara ekonomi. Kajian ini berupaya melihat secara lebih dekat kegiatan yang sangat masif ini dari pintu ke pintu yang dilalui petugas lapangan. Kajian ini mencoba merekam euforia masyarakat yang menjadi responden pendataan dan suka duka petugas-petugas garda terdepan kegiatan Regsosek.

L. N. Hakim & R. A. Prayoga
Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: lukm011@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Hakim, L. N. & Prayoga, R. A. (2023). Mencacah angka, menarasikan realitas: memotret realitas kelindan regsosek dan masyarakat di Pulau Ternate. Dalam M. A. Humaedi., D. K. Imron, & A. Pramono (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 1 Indonesia Tengah-Timur* (301–344). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.775.c701 ISBN: 978-623-8052-94-3 E-ISBN: 978-623-8052-98-1

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Secara demografi, hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa per 30 Juni 2021 jumlah penduduk di Provinsi Maluku Utara sebanyak 1,32 juta jiwa. Dari total tersebut, sebanyak 981,12 ribu jiwa (74,38%) beragama Islam, 328,858 jiwa beragama Kristen, 6.606 beragama Katolik, 113 jiwa beragama Hindu, 139 jiwa beragama Budha, 112 Konghucu, dan 10 orang lainnya menganut aliran kepercayaan. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak (674,14 ribu) dibanding penduduk perempuan (642,87) (Kusnandar, 2021). Selain penelusuran literatur, data digali melalui *focus group discussion* (FGD) dengan para pemangku kepentingan terkait Regsosek di Kota Ternate.

Bapak Aidil Adha (Kepala BPS Provinsi Maluku Utara) dalam FGD menjelaskan bahwa garda terdepan pelaksanaan Regsosek adalah para petugas pendataan lapangan (PPL). PPL bertugas mendata profil penduduk dari rumah ke rumah. Setiap PPL memiliki beban tugas mendata sekitar 250 kepala keluarga. Menurut Bapak Harim Arrosid, BPS Kota Ternate mengerahkan sebanyak 224 PPL, 58 PML, dan 11 Koseka. Petugas PPL biasanya direkrut dari sekitar wilayah yang akan didata untuk memudahkan proses pendataan. Petugas yang berasal dari wilayahnya sendiri mempunyai keunggulan dalam pengetahuan peta wilayah, memahami kondisi sosial masyarakat, dan bahkan sudah mengenal banyak warga di sekitar lokasi tersebut. PPL juga disupervisi oleh seorang petugas pemeriksaan lapangan (PML) untuk memastikan kualitas output kinerjanya. PML kemudian akan disupervisi oleh koordinator sensus kecamatan (Koseka) yang bertanggung jawab untuk tingkat kecamatan.

Kegiatan Regsosek di Kota Ternate melibatkan 224 PPL, 58 PML, dan 11 Koseka. Proses pemilihan petugas, baik itu untuk PPL maupun PML, dilakukan melalui seleksi yang ketat. Latar belakang PPL sangat beragam, di antaranya mahasiswa, pegawai kelurahan, ibu rumah tangga, tukang ojek, dan lain-lain. Kemudian, terkait pemilihan PML, umumnya merupakan mitra kerja BPS yang sudah lebih berpengalaman, yaitu orang-orang yang sebelumnya terlibat di kegiatan pengambilan data ataupun sensus BPS dengan latar belakang yang juga beragam. PML ada yang berprofesi sebagai tenaga honorer

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sumber: BPS Kota Ternate (2022)

Gambar 8.1 Pengumuman Rekrutmen Mitra Pendataan Regsosek

di kelurahan, ibu guru taman kanak-kanak, ataupun ibu rumah tangga yang merupakan aktivis sosial kemasyarakatan.

Untuk merekrut petugas PPL dan PML, BPS Kota Ternate membuat pengumuman melalui *website* BPS Kota Ternate dan melalui media sosial, seperti Facebook ataupun Instagram (Gambar 8.1). Pengumuman rekrutmen tersebut dimulai pada tanggal 1 September 2022. Proses rekrutmen dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu kegiatan skrining awal dan kemudian dilakukan tes wawancara.

Menurut Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, tes wawancara sangat penting untuk mengetahui kemampuan komunikasi pelamar karena kemampuan komunikasi adalah kriteria utama dan merupakan modal penting dalam menjalankan tugas mendata di lapangan. Kriteria penting lainnya adalah ketelitian. Petugas harus teliti memeriksa keabsahan data-data yang digunakan untuk melamar. Kriteria selanjutnya adalah mengetahui lokasi tinggal calon petugas agar petugas ditempatkan di wilayah yang telah dikenalnya.

Pengumuman final hasil seleksi di Kota Ternate dilakukan pada 1 Oktober 2022 (Gambar 8.2). Komposisi PML dan PPL hasil seleksi seperti dapat dilihat di Tabel 8.1. Kecamatan dengan jumlah petugas terbanyak adalah Ternate Selatan dengan 17 orang PML dan 67 orang PPL, sedangkan kecamatan dengan jumlah petugas paling sedikit adalah Kecamatan Batang Dua dan Kecamatan Hiri, masing-masing

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sumber: BPS Kota Ternate (2022)

Gambar 8.2 Hasil Seleksi Calon Petugas Regsosek BPS Kota Ternate

Tabel 8.1 Hasil Seleksi Final Petugas PML dan PPL Kota Ternate

KECAMATAN	Sebaran Petugas	
	PML	PPL
Pulau Ternate	2	11
Moti	1	7
Batang Dua	1	5
Hiri	1	5
Ternate Barat	2	11
Ternate Selatan	17	67
Ternate Tengah	13	51
Ternate Utara	11	62

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dengan satu orang PML dan lima orang PPL. Kedua kecamatan tersebut berada di sebuah pulau kecil yang terpisah.

Dalam pelaksanaan di lapangan, proses kerja kegiatan Regsosek dimulai dengan petugas Regsosek meminta izin kepada ketua/pengurus satuan lingkungan setempat (SLS) dan mengenali wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian, ketua/pengurus SLS melakukan identifikasi awal status kesejahteraan keluarga di lingkungannya. Selanjutnya, petugas Regsosek akan mendatangi satu per satu rumah di RT tersebut untuk melakukan wawancara dan *geotagging* lokasi keluarga. Dalam pelaksanaan wawancara, petugas PPL telah dibekali dengan satu lembar kuesioner yang berisi empat halaman. Kuesioner tersebut telah didesain sedemikian rupa oleh BPS pusat sehingga terlihat ringkas agar responden tidak merasa terbebani dengan jumlah halaman yang banyak.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa dalam satu rumah dapat terdiri dari beberapa kepala keluarga. Petugas PPL harus memastikan setiap keluarga terdokumentasi dalam satu lembar kuesioner. Petugas PPL bertugas mengidentifikasi apakah keluarga di rumah tersebut masuk dalam kategori tidak miskin, miskin, atau sangat miskin. Ketika petugas menilai bahwa keluarga tersebut masuk kategori miskin atau sangat miskin maka petugas harus memberikan bukti (*evidence*) berupa foto pada empat bagian dari rumah tersebut, yaitu bagian dinding, lantai, atap, dan kamar mandi. Foto-foto tersebut kemudian di upload ke aplikasi Wilkerstat (Gambar 8.3), sebuah aplikasi berbasis android yang dibuat khusus untuk lingkungan kerja BPS. Aplikasi ini berfungsi untuk mengenali batas wilayah kerja statistik (Wilkerstat) dan untuk melakukan pengambilan *geotagging* foto suatu *landmark* batas Wilkerstat maupun *landmark* infrastruktur.

Aplikasi ini menjadi saluran validasi data untuk mengetahui secara riil potret kemiskinan di masyarakat. Gambar-gambar yang diunggah oleh petugas PPL menjadi pembuka informasi sahih realitas kondisi di masyarakat. Gambar-gambar itu menjadi bukti apakah sebuah keluarga yang menjadi responden masuk kategori tidak miskin, miskin atau sangat miskin. Kondisi rumah tinggal menjadi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Gambar 8.3 Aplikasi Wilkerstat

aset nyata keluarga miskin, terlebih kepemilikan rumah ini berstatus sewa/kontrak, numpang, atau milik sendiri juga menjadi penguat bahwa keluarga tersebut masuk dalam kategori tersebut. Sherraden (2006) dalam ulasannya menguatkan bahwa rumah menjadi bagian dari aset nyata (*tangible aset*) yang disebutkannya sebagai properti nyata (bangunan atau tanah). Rumah menjadi aset penopang inti kehidupan yang paling dasar harus dipenuhi, selain pangan dan sandang (Jayaputra, 2017; Prayoga, 2021). Regsosek melalui bantuan perangkat lunak *Wilkerstat* dapat menghimpun informasi kondisi kemiskinan berbasis bukti foto.

Dengan metode verifikasi yang lebih baik ini maka diharapkan dapat memberikan gambaran yang riil atas kondisi di masyarakat. Dengan data yang valid maka diharapkan negara mempunyai gambaran yang sesungguhnya mengenai kondisi masyarakat. Informasi yang akurat akan mendukung pemberian bantuan yang tepat sasaran. Informasi dari *Wilkerstat* pada Regsosek ini menjadi alat triangulasi lapangan, selain informasi lain dari ketua RT untuk mengecek kondisi kemiskinan.

B. Menyisir Bentang Alam Ternate: Dari Kasturian hingga Pulau Hiri

Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 telah menetapkan Provinsi Maluku Utara sebagai provinsi paling bahagia se-Indonesia. Alam

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kota Ternate menyuguhkan pesona perpaduan birunya laut, hijaunya gunung, dan pulau-pulau yang indah. Laut dan pantai terlihat bersih. Hebatnya, pantai tempat berenang itu berada di sisi jalan raya yang trotoarnya lebar dan juga bersih. Selain laut, terbentang hamparan pemandangan hijau dari sebuah gunung yang nampak gagah. Sungguh, di Ternate ke manapun arah pandangan dihadapkan, di sana terlihat keindahan. Sebuah mahakarya alam semesta ciptaan Yang Maha Kuasa. Seluruh pemandangan dan tata kelola pemerintahan Provinsi Maluku Utara telah bekerja sama dengan sempurna untuk membuat orang yang tinggal di atasnya merasa bahagia.

Pulau Ternate mempunyai luas 111,80 km^2 (BPS Kota Ternate, 2016). Gambaran geografis peta Kota Ternate dapat dilihat pada Gambar 8.4. Panjang keliling pulau sekitar 55 km (Katherina, 2021). Jarak ini menunjukkan tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk mengelilingi pulau Ternate. Jika ingin mengelilingi pulau ini dengan sepeda, hanya membutuhkan setengah hari, atau sekitar 3,6 jam jika kecepatan sepedanya adalah 15 km/jam. Namun, temperatur udara di Ternate cukup panas, yaitu sekitar 39°, kelembapan udara sebesar 76%, dan kecepatan angin 5 km/jam. Matahari mulai menyengat sejak pukul 9 pagi. Hal ini wajar mengingat lokasinya dikelilingi lautan sehingga cahaya matahari langsung masuk tanpa hambatan.

Masyarakat Pulau Ternate mempunyai dua istilah untuk penunjuk jalan, yaitu *kelao*' dan kedara. *Kelao*' merujuk pada ke arah laut. Sementara itu, kedara merujuk pada ke arah gunung (daratan).

Bentang alam Pulau Ternate memperlihatkan ragam perkebunan cengkeh, kopra, pala, dan kakao. Komoditas perkebunan yang telah menjadi andalan Pulau Ternate sejak dahulu kala. Komoditas perkebunan yang telah menarik bangsa Eropa berdatangan untuk berdagang dengan petani Pulau Ternate, yang kemudian berlanjut dengan keinginan bangsa Eropa tersebut untuk memonopoli perdagangan. Beberapa negara Eropa yang tercatat dalam sejarah mengunjungi Pulau Ternate adalah Spanyol, Portugis, dan Belanda. Jejak kehadiran bangsa Eropa dapat dilihat dari benteng-benteng yang didirikan. Terdapat sekitar 15 benteng eropa dengan berbagai

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sumber: Peta kota (2017)

Gambar 8.4 Pulau Ternate

variasi bentuk dan ukuran di Pulau Ternate, akan tetapi yang masih bisa dinikmati kondisinya tinggal tujuh benteng (Iriyanto, 2010). Kesohoran Ternate yang dikenal sebagai pulau rempah karena hasilnya yang berlimpah menjadikan Ternate dulu sebagai basis benteng dagang bagi VOC Belanda dan Portugis (Harkantiningsih, 2014; Stefanus & Koestoro, 2018).

Ternate saat ini juga dikenal sebagai pusat aktivitas kegiatan jasa dan perdagangan di Provinsi Maluku Utara Kawasan Indonesia Timur. Trajektori historis Ternate sebagai pulau rempah, masih tersohor dan melekat sebagai *the spicy island* (kota rempah) (Kota rempah jadi, 2022). Selain itu, Ternate memiliki *branding* sebagai kota "Bahari Berkesan". Hal ini bermakna kota yang menyelaraskan 6 (enam) entitas, yakni berbudaya, agamis, harmonis, mandiri, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan (Bappeda Kota Ternate, 2016).

Bappeda Kota Ternate (2016) juga menyebutkan ada tujuh kecamatan dan 77 kelurahan. Tujuh kecamatan ini meliputi Ternate Selatan, Ternate Utara, Ternate Tengah, Pulau Ternate, Pulau Moti, Pulau Batang Dua, dan Pulau Hiri. Kontur topografi Ternate sebagian besar daerah bergunung dan berbukit, yang terdiri dari pulau vulkanis dan karang. Ciri Kota Ternate merupakan wilayah kepulauan, lima

Buku ini tidak diperjualbelikan.

di antaranya didiami penduduk (Pulau Ternate, Hiri, Moti, Mayau, dan Tifure), sedangkan tiga pulau yang berukuran kecil tidak dihuni (Pulau Maka, Mano, dan Gurida).

Ternate menjadi pilihan dalam penggalian emik dari proses Regsosek tahun 2022. Ada beberapa pertimbangan dipilihnya Ternate menjadi lokus penggalian emik Regsosek. Pemilihan ini didasarkan secara *purposive* mengikuti penjelasan Creswell (2014) disertai pertimbangan melalui penggalian kepustakaan berupa hasil kajian terdahulu. Berikut delapan pertimbangan Ternate menjadi lokus penggalian emik proses Regsosek, yakni (1) daerah rawan miskin akibat migrasi dan pertambangan (Andjarwati & Kusumartono, 2019; Syahrain, 2019), (2) pernah terjadi konflik komunal horizontal (etnik-agama) (Rozi, 2006; Sadjim dkk., 2016), (3) karakter masyarakat yang majemuk (Irsyadi, 2015), (4) involusi politik pemekaran (Qodi, 2012), (5) etnisitas dan agama menjadi potensi segregasi sosial (Jati, 2013), (6) anomali tensi politis tingkat elite lokal (Hasim dkk., 2019; Umar, 2019), dan (7) daerah rawan bencana gempa, gunung api, dan tsunami (Djalil dkk., 2015; Sarihi dkk., 2022). Meskipun demikian, dengan beberapa kriteria yang bersifat ancaman tersebut, Provinsi Maluku Utara meraih peringkat pertama dalam indeks kebahagiaan, hal ini menjadi alasan kedelapan (8). Delapan pertimbangan ini menjadi justifikasi yang menarik dasar *purposive* lokus Ternate untuk dokumentasi penggalian emik proses Regsosek 2022 di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Dalam upaya mendapatkan gambaran atas pelaksanaan Regsosek di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, tim peneliti mendampingi petugas PPL ke beberapa kelurahan, yaitu Kasturian, Foramadiahi, dan Pulau Hiri.

Kasturian: Peri Urban Ternate di Gunung Gamalama

Kasturian merupakan kelurahan yang menjadi bagian dari Kecamatan Ternate Utara. Masyarakat di pinggiran pantai sering kali menyebut arah letak kelurahan tersebut dengan *kedara* (arah gunung). Kasturian ini memang terletak di kaki Gunung Gamalama. Kontur yang mendaki menjadi tantangan tersendiri untuk menuju ke Kelurahan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kasturian. Kelurahan ini menjadi salah satu destinasi pengambilan data Regsosek. Setidaknya ada empat PPL yang bertanggung jawab penuh atas penghimpunan data Regsosek di wilayah ini. Kelurahan ini menjadi sampel penggalian proses emik Regsosek.

Wilayahnya yang menanjak tinggi mengakibatkan tidak semua rumah di wilayah tersebut dapat dialiri pipa PDAM sehingga sebagian dari masyarakat di sana masih mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air. Mata pencarian masyarakat di Kasturian bervariatif, mulai dari petani pala dan sayuran, tukang ojek, ASN, tentara, pedagang, hingga honorer. Kelurahan ini juga tidak terlalu jauh dari pusat Kota Ternate, hanya berjarak sekitar 2,8 km dari bibir pantai dan kantor Wali Kota Ternate. Nilai jual tanah dan bangunan yang tinggi di sekitar pinggiran pantai Kota Ternate membuat Kasturian menjadi pilihan tempat bermukim bagi sebagian masyarakat di peri Kota Ternate. Wilayah yang agak ke dataran tinggi (kaki Gunung Gamalama) mengakibatkan masih banyak tersedia harga tanah dan bangunan yang lebih terjangkau bagi masyarakat pinggiran Kota Ternate.

Foto: Reza (2022)

Gambar 8.5 Kondisi Permukiman di Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dalam kegiatan Regsosek, jalur yang mendaki menjadi tantangan tersendiri bagi para petugas PPL dan PML yang bertugas di Kelurahan Kasturian ini. Dataran yang tinggi dan menanjak serta permukiman penduduk yang cukup padat dan berundak membuat Kasturian menjadi lokasi yang membutuhkan tenaga ekstra untuk dilewati seperti yang terlihat pada Gambar 8.5. Tantangan pencacahan di sana tidak hanya dari kontur lokasi saja, tetapi juga masyarakatnya. Di siang hari kebanyakan rumah-rumah hanya dapat ditemui dalam kondisi kosong. Masyarakat sangat sulit ditemui untuk didata di rumah saat jam kerja. Pengambilan data Regsosek yang dilakukan oleh PPL biasanya hanya dapat dilakukan pada malam hari.

Foramadiahi: Sakralitas Makam Sultan Babullah

Kelurahan ini berada tepat di selatan kaki Gunung Gamalama Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Kontur geografis yang menanjak dan dataran tinggi di kelurahan ini juga menjadikan wilayah ini sulit diakses air bersih. Permukiman di Kelurahan Foramadiahi berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Masyarakat di sana masih banyak mengandalkan berkah alam berupa air hujan untuk konsumsi.

Kelurahan ini merupakan lokasi makam Sultan Babullah (meninggal pada tahun 1583) tergambarkan melalui Gambar 8.6, yang namanya diabadikan sebagai nama bandar udara di Ternate. Lokasi sekitar makam merupakan tempat yang asri sekaligus terasa nuansa sakral yang ketat. Makam ini dikeramatkan bagi Kesultanan Ternate dan masyarakatnya, untuk menuju kesana melewati bukit yang cukup terjal (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022). *Jere Foramadiahi* merupakan makam keramat yang sering dikunjungi oleh masyarakat untuk ritual ziarah makam Sultan Babullah, Sultan Ternate ke-24, yang berada di lembah lebih tinggi ke arah pegunungan Gamalama (La Hade dkk., 2021). Pergi ke lokasi makam tersebut harus melewati rimba pepohonan pala dan cengkih, seakan menjadi bukti yang dapat merasakan glorifikasi historis Ternate sebagai sentral rempah dunia. Lokasi jalan yang ditelusuri terlihat berbukit dengan pemandangan Gunung Gamalama sesuai Gambar 8.7.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Reza (2022)

Gambar 8.6 Potret Makam Sultan Ternate, Babullah, di Foramadiahi

Foto: Reza (2022)

Gambar 8.7 Jalan menjulang terjal eksotisme hamparan indah dari selatan Gunung Gamalama.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pulau Hiri: Redupnya Gemerlap Wisata Bahari di Hiri

Togolobe adalah sebuah kelurahan bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Pulau Hiri. Akses menuju ke Pulau Hiri hanya bisa dilalui laut, menggunakan *speedboat* penyeberangan memakan waktu selama 25 menit dari Dermaga Sulamadaha. Pulau Hiri sendiri terletak terpisah dari Pulau Ternate. Luas pulau ini mencapai 12,40 km² dan jumlah penduduk mencapai 2.957 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Ternate, 2022; BPS Kota Ternate, 2016). Suhu terik di siang hari bisa mencapai 39°C. Berlokasi tidak terlalu jauh dari Kota Ternate, Pulau Hiri dengan hamparan khas pulau yang memiliki juluran Gunung Hiri. Kepulauan di Ternate memiliki keunikan sendiri, setiap pulau memiliki gunung yang menjulang tinggi di tengah pulau tersebut.

Panas dan cuaca terik di Pulau Hiri ini bisa dimaklumi dengan keindahan bentangan pantai pasir putih, air laut yang jernih yang berwarna biru (Gambar 8.8), kumpulan koral karang yang terjaga, dan keramahan masyarakatnya yang khas dengan senyuman. Di balik keindahan pulau Hiri, menyisipkan kepiluan dari masyarakatnya. Pulau dengan julukan "Kampung Bahari Nusantara" dan memiliki pelbagai potensi destinasi wisata bahari menghadapi kesulitan akibat hantaman

Foto: Reza (2022)

Gambar 8.8 Perjalanan menuju Pulau Hiri yang dihiasi hamparan biru laut

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pandemi COVID-19 yang menggerus pendapatan masyarakat. Wisata menjadi tulang punggung penghasilan kebanyakan warga di Pulau Hiri, selain nelayan, tukang ojek, dan petani. Kedatangan pelancong yang minim jumlahnya menunjukkan kondisi pulau yang sepi. Para tukang ojek berebut menawarkan tumpangan (berkerumun seperti semut yang mendekati gula) ke wisatawan luar pulau yang dianggap sebagai oase di tengah kelesuan wisata di pulau itu.

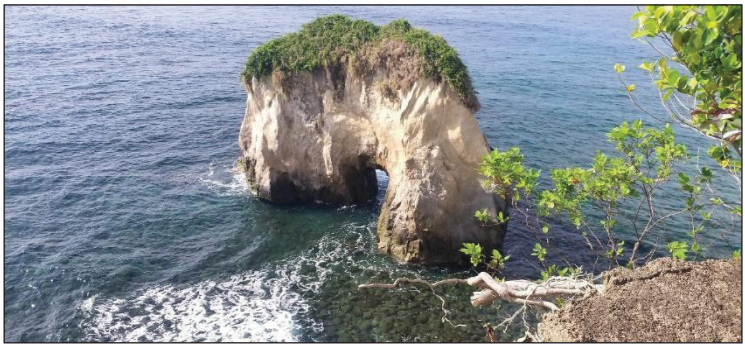

Foto: Reza (2022)

Gambar 8.9 Pesona Tebing Karang Gurabala di Pantai Tomajiko, Pulau Hiri Ternate

C. Proses Bisnis Regsosek di Ternate: *Badata yang tra tadata*

Kemiskinan dan anak jalanan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan masalah klasik di perkotaan, tidak terkecuali di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Kota Kesultanan yang kental akan kultur, adat, dan religiositasnya ternyata masih tetap terjebak pada masalah klasik tersebut. Padahal, dinukil dari media populis nasional Kompas, Provinsi Maluku Utara termasuk provinsi paling bahagia di Indonesia, dengan indeks kebahagiaan yang mencapai angka 76,34 (Setyaningrum, 2022). Indeks kebahagiaan Provinsi Maluku Utara melampaui standar bahagia secara nasional, yakni 71,49 (BPS, 2021). Indeks kebahagiaan ini diukur dari kepuasan hidup,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

afeksi, dan makna hidup. Realitas ini menggambarkan situasi yang paradoks, di satu sisi memiliki kebahagiaan yang tinggi, tetapi di sisi lainnya persoalan klasik seperti kemiskinan juga menjadi "lingkaran patologi sosial kronis" yang masih tidak terpecahkan. Salah satu potret tersebut tergambarkan dari Ternate Landmark (Gambar 8.10)

Foto: Reza (2022)

Gambar 8.10 Potret anak jalanan tidur di dekat Ternate Landmark.

Miskin menjadi suatu realitas yang menggambarkan kondisi individu yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau bisa dikatakan individu yang tidak mampu dalam memenuhi standar penghidupan masyarakat pada umumnya (pangan, sandang, dan papan) (Kusuma, 2022; Pattinama, 2009; Prayoga, 2021; Yulasteriyani dkk., 2019). BPS Provinsi Maluku Utara mencatat, pada tahun 2021 terdapat 8.450 jiwa atau 3,55% penduduk miskin dari jumlah penduduk Kota Ternate yang mencapai 205.870 jiwa (BPS Provinsi Maluku Utara, t.t). Angka tersebut masih dinamis karena rentang waktu, disinyalir akan ada kenaikan atau penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Ternate. Namun, fakta angka bisa jadi tidak menggambarkan realitas sosiologis yang terjadi. Angka kemiskinan yang tercatat bisa jadi tidak sinkron dengan realitas di masyarakat.

Fenomena tidak sinkronnya data memang sebuah tantangan di Indonesia. Bapak Taufik Hanafi (Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan Pengendalian Bappenas) mengatakan bahwa selama ini perbedaan data kerap terjadi, termasuk antarkementerian dan lembaga (Ristianto, 2019). Perbedaan data seperti ini menjadi kendala dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di lapangan (Agustini, 2020; Chairuddin dkk., 2021).

Foto: Reza (2022)

Gambar 8.11 Potret Kemiskinan Lansia Penjual Kue, Janda Beranak 10, Aisyah Alting, di Kasturian, Ternate Utara, Kota Ternate

Potret kemiskinan nampak dari seorang lansia yang menetap di Kasturian (Gambar 8.11). Realitas kehidupan dikisahkan sebagai warga yang masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sejalan dengan pernyataan Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Bapak Aidil Adha, Regsosek diharapkan mampu memotret kondisi riil masyarakat yang akan menjadi jembatan atas terciptanya data masyarakat Indonesia yang valid dan dapat menjadi rujukan dalam program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Aktivitas "mencatat Indonesia" diharapkan menawarkan solusi paripurna persoalan perlindungan dan pemberdayaan sosial. Itulah sukma nilai positif kerja BPS yang menyebar serentak mendata Indonesia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Regsosek menjadi upaya mengonfirmasi status kemiskinan seseorang dan menghindari penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Pengalaman saat COVID-19 melanda, banyak sekali kendala tidak tepatnya penyaluran bantuan sosial dikarenakan data penerima bantuan yang tidak terintegrasi (Rahmansyah dkk., 2020). Menurut keterangan seorang warga yang di wawancara tim peneliti, di daerahnya pernah terjadi bantuan sosial tidak jatuh ke tangan warga yang membutuhkan, melainkan ke keluarga sekelompok oknum masyarakat yang sesungguhnya bertugas untuk mendistribusikan bantuan. Beliau mengungkapkan, "Selama ini yang mendapatkan bantuan hanya dari orang-orang mereka saja, yang semestinya tidak layak untuk menerima bantuan pemerintah".

Informasi tersebut sungguh memprihatinkan. Regsosek diharapkan akan memperbaiki kondisi tersebut. Regsosek berfungsi sebagai candradimuka pembuka satu data kemiskinan untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. PPL, PML, dan Koseka sebagai ujung tombak yang penting, mencatat dan mendata masyarakat yang selama ini tidak terdata atau selama ini tidak masuk dalam radar instansi pemerintah. Petugas pendata ini secara riil mendata seluruh masyarakat tanpa membedakan ras, etnis, agama, status sosial, dan pekerjaan. Pendataan dilakukan sama rata tanpa pembedaan. Sinergitas antara petugas PPL dan PML, yang rata-rata bukan petugas organik atau biasa disebut sebagai mitra, tidak mengenal hambatan medan geografis untuk mendata seluruh masyarakat Indonesia. Selama responden adalah warga negara Indonesia, wajib untuk terdokumentasi secara riil dan sahih dalam Regsosek.

Bapak Taufik Hanafi mengungkapkan, "Regsosek ini sendiri merupakan pendataan yang dilakukan oleh BPS untuk satu data Indonesia, yang kemudian data ini sebagai basis dalam menentukan kebijakan pemerintah ke depannya terutama terkait perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat". Harapan beliau agar di masa mendatang, data yang tidak sinkron dapat diatasi. Regsosek ini menjadi penawar ketidakpaduan data tadi menjadi satu data. Masyarakat Ternate telah terinternalisasi dalam benaknya memaknai Regsosek

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sebagai *Badata yang tra tadata* (mendata yang tidak terdata). Seluruh masyarakat dapat terdata dan tidak ada yang terlewat. Aksi Regsosek menjadi nadi pembangunan melalui basis data yang sahih dan riil. Regsosek merupakan bukti bahwa negara hadir untuk masyarakat. Hadirnya negara menjangkau warga negara yang tidak dijangkau selama ini dalam pendataan.

D. Mengambil Nilai Positif dan Pembelajaran dari Petugas Garda Terdepan dalam Mendata

Ternate menjadi sebuah pulau yang menarik untuk dijelajahi. Dinamika kultur adat dan kesultanannya menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perkembangan masyarakatnya. Penggalian emik pada proses Regsosek di Ternate mengukir sesuatu *mnemonic knowledge*, yang berarti menjadi suatu perangkat pengetahuan yang di dalamnya terpatri ingatan dari sebuah realitas (Lachmann, 2008; McCabe dkk., 2013; Pressley dkk., 2014). Regsosek menjadi suatu cara pemerintah hadir untuk mendata masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Pendata di lapangan, terlebih PPL dan PML di Ternate menghadapi hal yang tidak mudah. Tantangan berupa perpaduan fenomena masyarakat zaman sekarang dan masyarakat timur yang begitu kritis terhadap kedatangan orang asing terutama untuk mendata NIK, KTP, dan KK. Ada ketakutan dari masyarakat bahwa data akan disalahgunakan sehingga ada pandangan pesimis dari masyarakat dengan kegiatan sejenis pendataan ini. Petugas PPL dan PML sempat berkeluh kesah kepada peneliti bahwa ada masyarakat yang memandang survei ini hanya memberi harapan akan bantuan sehingga petugas survei dianggap secara tidak langsung telah *bafoya* 'menipu'. Beberapa masyarakat kemudian menjadi resisten atau menolak menjadi responden.

Seorang PPL bernama Dian, berusia 22 tahun, menceritakan pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika melakukan pendataan di lapangan. Pengalaman menyenangkan adalah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ketika warga menerima Dian dengan baik, menawarkan minum dan penganan kue-kue. Dian mengaku paling senang ketika respondennya menerima petugas dengan ramah, membuka diri terhadap setiap pertanyaan, dan sigap memberikan fotokopi kartu keluarga. Namun demikian, Dian juga mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Salah satu respondennya pernah berkata "*ba data terus, baku data, foya saja*" 'mendata terus, ambil data saja, bohong saja'. Dian mengatakan bahwa ia bersyukur telah mendapatkan pelatihan di kantor BPS untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Dian juga selalu berkomunikasi dengan PML dan Koseka jika ada responden yang sulit. Ia juga bersyukur sering kali ketua RT setempat siap membantu mengakses warga yang "sulit".

Tantangan yang dihadapi petugas di lapangan memang tidak mudah. Selain tantangan geografis, tantangan sosial berupa penolakan seperti makian dan tingkah laku agresif kemarahan telah menjadi hal yang biasa dihadapi di lapangan. Kesulitan personal dan psikis (perasaan emosional pendata, kesulitan hidup pendata, dan lainnya) turut menjadi hal yang harus dilalui pendata di lapangan.

Sekelumit cerita nilai positif pendataan Regsosek di lapangan, yakni kegigihan dari petugas PPL yang pantang menyerah untuk memperoleh data. Pengusiran dan penolakan dari masyarakat setempat sering kali ditemui oleh petugas PPL (muncul pernyataan lisan masyarakat "Data terus…data terus….tapi bantuannnya mana?"). Hal ini tidak menyurutkan niat PPL untuk terus mendata sampai data tersebut diperoleh dari masyarakat yang awalnya menolak sampai bisa memberikan data tersebut.

Dibalik itu semua, kegigihan pendata untuk tetap mendata sampai pelosok permukiman menjadi nilai positif yang dapat dimaknai. Berterus terang kepada masyarakat bahwa Regsosek ini bukanlah bantuan adalah kesulitan tersendiri dalam memahamkan masyarakat. Harapan masyarakat kepada pendataan sebagai saluran memberikan bantuan sering kali dihadapkan oleh petugas lapangan terutama PPL dan PML. Pertanyaan seperti "Bantuannya mana?" biasanya muncul dari tutur lisan keluarga yang terkategori miskin atau sangat miskin.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Hadirnya negara sangat diharapkan oleh masyarakat terkategori miskin. Ujian kesulitan ini menjadi hal yang sering dijumpai oleh PPL dan PML di Ternate.

Gestur tubuh, komunikasi lisan yang luwes, dan bahasa pengantar daerah setempat menjadi pembuka saluran interaksi untuk memberikan pemahaman pentingnya Regsosek bagi masyarakat. Cara pengantar komunikasi sederhana yang mudah dipahami dan selalu menjadi cara bagi PPL dan PML di Ternate menghadapi kendala demikian, yaitu disampaikan bahwa Regsosek ini dilakukan atas perintah presiden—disuruh bapa Presiden untuk pendataan—jadi mohon Bapak/Ibu bersedia untuk didata. Menyelipkan diksi "Presiden" dalam tiap tutur lisan dari PPL dan PML membuat masyarakat yang awalnya resisten menjadi permisif untuk menerima didata Regsosek.

BPS Kota Ternate menyadari betapa pentingnya mitra BPS seperti PPL dan PML sebagai garda etalase dalam mendata. Mitra BPS layaknya menjadi ujung tombak dalam pendataan. Data hasil Regsosek ini bagi PPL dan PML sama dengan nyawa. Data yang diperoleh dalam kuesioner tersebut disimpan rapi dalam map plastik. Map itu didekap erat, sekalipun hujan, data dalam map itu harus tetap kering diterima oleh PML. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara salah satu PPL Togolobe yang bertugas di Pulau Hiri (IH):

> …Walau hujan deras, mendata tetap harus jalan. Kuesioner dalam map harus dijaga tidak boleh basah, badan dan kepala boleh basah, tetapi map tidak boleh rusak dan basah. Sekalipun jatuh ke laut, yang tetap harus di permukaan air laut adalah map data. Menjaga lembaran kuesioner Regsosek ini sama halnya dengan menjaga nyawa di badan..." (PPL, komunikasi pribadi, 5 November 2022)

Betapa pentingnya arti Regsosek ini bagi PPL dan PML di Ternate. Komitmen bekerja dan berjuang memperoleh data dengan kegigihan menjadi refleksi positif yang bisa diambil dalam proses penggalian emik ini. Sikap kegigihan dengan terus mendatangi responden yang berkali-kali menolak juga menjadi nilai positif. Sekalipun PPL diusir,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dihardik dan dimarahi dengan lisan masyarakat yang "tajam" tidak menyurutkan semangat dari PPL dan PML di lapangan. Petugas pendata (PPL dan PML) menganggap bahwa Regsosek ini ikhtiar perjuangan mendata masyarakat yang selama ini tidak terjangkau untuk didata. Perjuangan melalui Regsosek ini menjadi bukti cara para PPL dan PML berkontribusi mengabdi diri untuk negara.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa orang PPL dan PML di Kota Ternate, dapat digarisbawahi bahwa setidaknya terdapat dua jenis hambatan (*obstacle*) yang kerap ditemui di lapangan ketika pendataan dilakukan. Pertama, hambatan fisik yang disebabkan kondisi geografis Kota Ternate. Kedua, hambatan psikologis yang disebabkan karakteristik masyarakat.

1. Hambatan fisik

a. Tantangan utama menjadi PPL PML di Kota Ternate adalah ketika petugas bertugas mendata masyarakat yang tinggal di kaki Gunung Gamalama. Ketika peneliti mengikuti PPL dan PML mendata dari pintu ke pintu di wilayah tersebut, peneliti dapat merasakan langsung sulitnya medan. Sering kali petugas harus berjalan di jalur dengan tingkat kemiringan hampir 45°. Di wilayah perbukitan tersebut jarak antarrumah juga cukup jauh sehingga membutuhkan stamina yang baik.

b. Temperatur di Kota Ternate sangat tinggi, yaitu sekitar 39°. Seperti dituliskan di bagian awal bahwa di Ternate matahari sudah sangat terik sejak sekitar pukul 9 pagi. Temperatur menjadi lebih panas lagi di pulau-pulau kecil sekitar pulau Ternate. Peneliti berkesempatan mengunjungi Pulau Hiri yang berjarak 13.6 km dari Ternate. PPL dan PML menceritakan bahwa kondisi panas membuat petugas cepat kelelahan. PPL dan PML mengatasi hal tersebut dengan mendata pada malam hari.

2. Hambatan psikologis

a. Adanya kecurigaan masyarakat kepada PPL sehingga sering kali ditolak untuk didata. Kecurigaan ini kemungkinan karena

Buku ini tidak diperjualbelikan.

masyarakat khawatir bahwa orang yang datang adalah orang yang punya niatan jahat (kriminal). Hal ini tidak bisa lepas dari kasus-kasus kejahatan di mana pelaku kriminal menggunakan berbagai macam cara untuk masuk ke dalam rumah seseorang.

b. Faktor lain yang menjadi hambatan adalah pikiran masyarakat bahwa pendataan ini tidak memberikan manfaat. Masyarakat umumnya berpikir bahwa pendataan ini akan mempunyai *output* berupa pemberian bantuan. Masyarakat pernah didata sebelumnya dan tidak ada output bantuan dari pemerintah. Insiden ini kadang kala disebabkan data yang tidak sinkron di pemerintah, atau dikarenakan teknis pelaksanaan di lapangan yang tidak baik.

c. Petugas lapangan mendapati sekelompok orang cenderung tidak mau diwawancara dan kalaupun di wawancara warga tidak akan terbuka. Di Kota Ternate kelompok masyarakat ini didapati di kelurahan Santiong Kota Ternate, di mana mayoritas merupakan pedagang.

d. Di Kota Ternate, karakteristik kelompok masyarakat yang juga sulit untuk di wawancara adalah justru oknum masyarakat yang mempunyai status sosial tinggi. Kelompok ini adalah oknum pejabat negara di daerah. Dikatakan "oknum" karena memang tidak semua pejabat di daerah seperti itu. kelompok ini umumnya berprofesi sebagai aparatur sipil negara, tentara, polisi, kejaksaan.

e. Hambatan selanjutnya adalah ketika responden yang menerima petugas PPL adalah penyandang disabilitas. PPL menemukan responden disabilitas rungu sehingga proses pendataan tidak dapat dilakukan. Untuk mengatasi masalah ini maka petugas PPL datang di waktu yang sekiranya anggota keluarga lain dari penyandang disabilitas itu berada di rumah.

f. Sering kali PPL dipandang oleh masyarakat sebagai petugas filantropi yang memberikan/menyalurkan bantuan pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat kemudian akan kecewa ketika mengetahui kegiatan ini hanya berupa pendataan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tantangan bukan hanya dihadapi para petugas di lapangan. Pejabat struktural BPS juga punya tantangan tersendiri. BPS Kota Ternate hingga saat ini belum memiliki gedung sendiri sehingga masih menyewa gedung kepada pihak lain. Status gedung sewa mengakibatkan BPS Kota Ternate harus selalu bersiap jika sewa gedung tidak dilanjutkan oleh pemilik gedung. Artinya, BPS Kota Ternate akan memulai segala sesuatunya dari awal lagi, mulai dari memindahkan barang, mendekor ruangan, dan lain lain. Status "sewa" kantor BPS Kota Ternate yang kurang lebih 20 tahun tidak menyurutkan kinerja para aparatur organik dalam setiap agenda survei nasional. Persoalan kedudukan kantor yang hanya "menyewa" sama sekali tidak menurunkan semangat kerja terutama dalam menyukseskan pendataan Regsosek ini.

BPS Kota Ternate, PPL dan PML menjadi mitra strategis yang menyiratkan cara kerja simbiosis mutualisme. Kerja sama ini saling menguntungkan antara BPS dan Mitra dalam mendata. Di satu sisi, rekrutmen mitra BPS berarti sebagai upaya dari pemerintah memberikan kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di sisi lain, menjadi mitra BPS sama halnya membantu para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan walaupun tidak permanen. Setidaknya, kegiatan serupa Regsosek memberikan harapan bagi PPL dan PML beserta keluarganya agar asap dapur tetap mengepul.

E. Dukungan Kelembagaan Sosial dalam Pendataan: Suksesor Pranata Struktural hingga Adat Kultural

Regsosek merupakan sebuah survei yang rentang waktu pelaksanaannya relatif singkat dengan target yang sangat ambisius, yaitu mendata seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kegiatan Regsosek dipandang cukup sulit dilaksanakan. Namun, dengan sistem kerja di BPS, khususnya BPS Provinsi Maluku Utara dan BPS Kota Ternate yang sudah mapan, dengan sumber daya manusia yang telah berpengalaman, tersedianya dukungan teknologi yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

canggih, serta adanya dukungan pranata struktural sampai dengan pranata adat kultural maka pelaksanaan Regsosek di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berjalan dengan sangat baik. BPS Provinsi Maluku Utara dan BPS Kota Ternate menggunakan secara optimal potensi internal maupun potensi eksternal BPS. Cara yang dilakukan ialah memaksimalkan potensi internal dan melibatkan seluruh mitra BPS yang pernah bekerja untuk BPS. BPS juga menjangkau potensi eksternal berupa dukungan dari orang-orang elit daerah baik pejabat daerah maupun petinggi adat untuk mendukung pelaksanaan Regsosek. Oleh karena itu, bukan menjadi perkara yang sulit jika Regsosek mendapat dukungan, mulai dari ketua rukun tetangga (RT) sampai dengan Sultan Kerajaan Ternate. Strategi BPS di daerah menjadi sebuah langkah yang sangat efektif dan efisien.

Media turut memberi dukungan melalui pelbagai sumber daya (*resources*) yang ada. Kota Ternate mempunyai julukan "Kota dengan Seribu Masjid dan Seribu Benteng", sebuah ungkapan yang menunjukkan secara hiperbolis bahwa di kota ini terdapat banyak sekali masjid. Masjid merupakan saran media komunikasi ke masyarakat yang sangat mudah, murah, dan efisien. BPS Kota Ternate memaksimalkan potensi ini. Maka sosialisasi Regsosek kepada masyarakat di tingkat RT dan RW dilakukan menggunakan *speaker* di masjid-masjid merupakan cara yang tepat. Isi dari pengumuman berupa ajakan kepada masyarakat untuk membantu menyukseskan Regsosek dengan berpartisipasi dalam pendataan, dengan menyiapkan data kartu keluarga dan menerima dengan tangan terbuka petugas dari BPS yang akan datang ke setiap rumah untuk mendata.

Media komunikasi lain adalah penggunaan media sosial pada pelbagai platform, seperti facebook, instagram, dan whatsapp. Dengan desain komunikasi visual yang menarik, penyebaran informasi tentang Regsosek di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara ini menjadi masif. BPS Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate juga telah menggunakan komunikasi massa kontemporer, yaitu menggunakan *influencer*, yaitu orang-orang yang berpengaruh. Berdasarkan observasi tim peneliti,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BPS membuat konten video sosialisasi Regsosek yang pemateriinya adalah tokoh-tokoh seperti Kapolres, Dandim, Gubernur hingga Sultan Ternate.

BPS Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate juga mendistribusikan spanduk-spanduk untuk ditempatkan di beberapa titik lokasi yang strategis untuk mengedukasi warga tentang Regsosek. Berdasarkan pengamatan peneliti, BPS telah dengan sangat cerdas menggunakan bahasa lokal. Sebagai contoh, ketika tim peneliti tiba di Pulau Hiri disambut dengan spanduk dengan warna khas Regsosek yang dipasang persis di depan pelabuhan kecil. Orang-orang yang baru turun dari perahu dapat melihat dengan jelas spanduk tersebut (Gambar 8.12). Spanduk tersebut bertuliskan "Mari Torang bersama sukseskan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) Kota Ternate".

Foto: Reza (2022)

Gambar 8.12 Spanduk untuk menyukseskan Regsosek terpasang di depan pelabuhan kecil Pulau Hiri.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Implementasi di lapangan

Distribusi informasi digalakkan oleh pihak setingkat RT melalui jaringan Whatsapp (WA) grup RT. Ketua RT melalui grup WA menyebarkan informasi terkait Regsosek dengan melampirkan gambar lini masa Regsosek. Ketua RT juga mengimbau kerja sama warga untuk berkoordinasi jika nantinya tidak atau belum didata oleh petugas Regsosek di lapangan. Fakta di lapangan banyak ditemui warga yang masih sulit untuk ditemui. Setidaknya yang dilakukan perangkat RT dengan memberikan imbauan persuasif melalui corong toa masjid dan perluasan informasi ke grup WA merupakan bentuk dukungan nyata dalam pendataan Regsosek. Regsosek juga dimanfaatkan sebagian perangkat setingkat RT dalam memvalidasi informasi kemiskinan di wilayah lingkungannya. Banyak juga dari perangkat RT di wilayah Ternate, dengan pendataan Regsosek, malah "baru" mengetahui bahwa warganya ada yang masuk dalam kategori miskin dan sangat miskin.

Perangkat RT menunjukkan bentuk dukungan yang bervariatif. Ada yang hanya sekadar memberikan informasi pemetaan awal warga miskin dan sangat miskin, tanpa mendampingi. Hal ini dapat dimaklumi karena adanya kesibukan personal dari perangkat RT. Ada juga perangkat RT yang hanya menemani di beberapa rumah. Perangkat RT juga ada yang memberikan dukungan maksimal bagi pelaksanaan Regsosek dengan mendampingi PPL dan PML datang dari pintu ke pintu. PPL menceritakan bahwa ada ketua RT yang secara aktif berpartisipasi dalam pendampingan pendataan Regsosek, terutama di saat mendapatkan informasi dari PPL yang ditolak dan diusir oleh warga karena tidak ingin didata. Peran ketua RT sangat vital dalam memediasi komunikasi antara PPL dan warga dalam memahamkan pentingnya Regsosek. Seorang PPL menceritakan bantuan dari RT ketika ia mengalami penolakan oleh warga yang rumahnya sulit didatangi karena selain pagarnya tinggi, rumah juga dijaga anjing.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Supporting sistem sosial untuk pendataan Regsosek ini dilakukan dari dukungan dua pranata dalam masyarakat yaitu pranata struktural dan pranata kultural. Dukungan ini lebih kepada imbauan persuasif kepada masyarakat untuk menyukseskan "satu data" program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dukungan ini melibatkan pelbagai instansi pemerintah dalam lingkup pranata struktural, seperti kepolisian setingkat polres, perangkat lurah, perangkat RT, petugas kecamatan, Komandan Kodim Kota Ternate, Gubernur Maluku Utara, dan Sekda Kota Ternate. Dukungan pranata struktural dari pelbagai pemangku kepentingan tersebut dapat memberikan jaminan perlindungan legalitas dalam pendataan satu data Regsosek. Imbauan persuasif yang digaungkan perangkat pranata struktural, seperti ajakan Kapolres Kota Ternate, Andik Purnomo Sigit, untuk memberikan jawaban kepada petugas BPS yang sesuai dengan realitas profil warga, berupa "Mari sambut kedatangan petugas BPS. Dengan menjawab pertanyaan dengan baik. Agar mendapatkan data yang valid untuk kepentingan bersama…"

Tak kalah dengan pranata polisi, Kodim Kota Ternate, Letkol Inf. Jamet Nijo menyampaikan hal serupa, dengan lebih menekankan satu data melalui pemberian jawaban yang sejujurnya kepada petugas pendata Regsosek, yakni "Berikan jawaban sejujurnya pada petugas yang akan mengunjungi warga di seluruh kota Ternate. Mari sukseskan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat." Hal yang serupa juga disampaikan Gubernur Provinsi Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, mengajak masyarakat di seluruh Maluku Utara untuk mendukung suksesnya pendataan awal Regsosek demi terwujudnya satu data untuk membangun negeri. Selain adanya *supporting* sistem sosial dari pranata struktural, tidak kalah penting adanya peran serta dukungan secara adat kultural dari Kesultanan Ternate terhadap Regsosek 2022 ini.

Titah dari Sultan Ternate yang mengajak masyarakatnya bersedia untuk didata Regsosek profilnya sebagai warga negara tanpa perlu ada ketakutan yang disembunyikan. Berikut titah simbolis yang perlu dipatuhi oleh seluruh masyarakat Ternate, yakni

Buku ini tidak diperjualbelikan.

> …Regsosek menjadi *database* yang bagus dan menjadi data yang penting bagi negara yang kelak di kemudian hari bisa kita mengetahui sebenarnya setiap warga negara anak bangsa ini profilnya seperti apa. Harapan semua masyarakat mau untuk mengisi apa adanya sesuai dengan seluruh item pertanyaan. Masyarakat tidak perlu takut dan tidak perlu sembunyikan. Sampaikan apa adanya, data ini sebenarnya hasilnya nanti bisa menunjukkan indikator-indikator penting.

Sultan Ternate, Hidayatullah Sjah, menjadi perangkat sistem sosial dalam pranata adat kultural. Dukungan secara kultur dan adat dari Kesultanan Ternate menjadi simbol institusional terkultur dalam sistem sosial masyarakat Kota Ternate. Sultan Ternate menjadi simbol sakral kewibawaan yang dipatuhi oleh seluruh sistem masyarakatnya. Kepatuhan atas kesakralan titah Sultan Ternate menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Ternate. Tak pelak, Regsosek dengan dukungan Kesultanan menjadi titah simbolis ajakan kepada warga Ternate untuk menyukseskan satu data ini. Strategi pendekatan yang dilakukan BPS Kota Ternate dengan pelibatan unsur kultur adat dari pranata kesultanan merupakan jurus jitu mendukung kegiatan Regsosek melalui konsensus pemahaman masyarakat dalam kerangka sosio-historis. Hal ini sejalan dengan pandangan Nanuru (2011), bahwa suatu usaha penyertaan kerangka sosio-historis pelbagai perangkat dan pranata sosial dalam pencapaian konsensus komunikasi dengan menonjolkan aspek sistem kepercayaan atau corak kultur melalui entitas kesultanan sebagai kesadaran sejarah (*historical consciousness*) masyarakatnya.

F. *Life Story* Enumerator: Halang Rintang demi Data Ibu MTI (PML)

Ibu MTI telah sejak lama membantu BPS Kota Ternate dengan menjadi petugas lapangan dan kinerjanya sangat baik. Tim peneliti berkesempatan mengikuti Ibu MTI mengunjungi rumah-rumah warga yang menurut petugas PPL sulit untuk ditembus, yaitu warga

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang selalu menolak untuk diwawancarai. Tim melihat sendiri dengan kemampuan komunikasi dan pendekatannya yang percaya diri mampu meluluhkan hati warga untuk didata oleh petugas PPL.

Ibu MTI bergabung dengan BPS Kota Ternate sejak 2019. Ibu MTI sesungguhnya berasal dari Sumatra. Beliau sangat memahami medan dan mampu berkomunikasi dengan warga menggunakan bahasa lokal. Beliau mendapatkan penghargaan Mitra Loyal dari BPS Kota Ternate pada 2021. Penghargaan ini layak diterima berkat konsistensi dan performa beliau. Ibu MTI kembali terpilih menjadi Mitra Hebat pada 2022. Itu adalah bentuk penghargaan dari BPS Kota Ternate kepada mitra-mitra yang berprestasi.

Pekerjaan sebagai mitra BPS Kota merupakan pekerjaan sampingan bagi Ibu MTI karena pekerjaan utamanya adalah sebagai guru Taman Kanak-Kanak sekaligus wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di sebuah TK swasta di Kota Ternate. Ibu MTI rutin berpartisipasi sebagai mitra BPS sehingga anak-anaknya jika ditanyakan profesi ibunya, selalu mengatakan, "Ibu saya itu guru, pedagang, dan tukang kumpul data". Berbagai pekerjaan dan gabungan penghasilan yang Ibu MTI dan suaminya hasilkan dirasakan belum cukup untuk menghidupi kedua anaknya, anak pertama kelas 3 SD, dan anak kedua kelas 1 SD. Dengan kondisi tersebut, beliau sangat bersyukur dan antusias mendapat kesempatan menjadi mitra BPS.

Ibu MTI menceritakan, sebelum pandemi COVID-19, usaha sang suami yang membuka jasa fotokopi mendapat penghasilan cukup baik. Namun, usaha tersebut menjadi tidak menghasilkan ketika pandemi COVID-19 terjadi. Hal ini dikarenakan lokasi usaha dibuka di sekitar kampus Universitas Khairudin. Ketika pandemi seluruh kegiatan perkuliahan dilakukan secara *online*, mahasiswa tidak lagi pergi ke kampus. COVID-19 menjadi pukulan yang sangat hebat secara ekonomi bagi banyak masyarakat Indonesia, tak terkecuali keluarga Ibu MTI. Namun, pasangan ini tidak kenal menyerah. Sang suami mencari nafkah tambahan dengan bekerja di sektor pertambangan dan Ibu MTI bersyukur mempunyai pekerjaan tetap sebagai guru TK yang penghasilannya sebesar Rp1.600.000,00 per bulan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ibu MTI menceritakan titik terendah dalam hidupnya adalah ketika COVID-19 terjadi saat bulan Ramadan 2020. Dengan suara parau Ibu MTI menceritakan bahwa pada masa itu beliau melakukan apa saja usaha yang bisa dilakukan selama itu halal. Beliau memang menghadapi kesulitan, tetapi tetap merahasiakan kondisinya dari orang tuanya di Sumatra karena tidak ingin menjadi beban pikiran orang tuanya. Ibu MTI dan suami bertekad untuk menangani permasalahan secara mandiri. Ibu MTI bersyukur pekerjaannya sebagai guru TK membuatnya mempunyai jaringan perkenalan yang luas, yaitu dengan para orang tua murid. Salah satu orang tua murid mempunyai usaha jualan dan menawarkan Ibu MTI untuk menjadi *reseller*. Ibu MTI mencontohkan, untuk produk yang di luaran dijual Rp20.000, sang orang tua murid memberi harga Rp17.000,00 sehingga Ibu MTI bisa mengambil untung Rp3.000,00. Beliau sangat bersyukur pada bulan Ramadan 2020 dapat menghasilkan 500 ribu rupiah dari usaha menjadi *reseller*.

Ibu MTI menunjukkan rasa syukurnya bahwa di masa Ramadan selama sebulan penuh beliau tidak perlu memasak untuk berbuka puasa. Ibu MTI menceritakan, di bulan Ramadhan beliau sering kali mendapatkan makanan berbuka puasa dari orang tua murid ataupun dari orang yang membeli produknya. Saat itu, di bagian kanan kiri motornya selalu penuh dengan barang-barang jualannya.

Kegiatan survei ataupun sensus yang dilakukan oleh BPS menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh Ibu MTI dan rekan-rekan mitra BPS lainnya. Ibu MTI sangat berbahagia dapat berpartisipasi dalam kegiatan Regsosek kali ini. Ibu MTI merasa ikut berpartisipasi untuk bangsa Indonesia melalui perannya, di samping itu, beliau juga mendapatkan penghasilan tambahan. Ibu MTI menjelaskan beliau mendapatkan honor sebesar Rp4.500.000,00 untuk masa kerja selama sebulan. Selain Regsosek, Ibu MTI terlibat dalam Survei Biaya Hidup (SBH). SBH adalah survei pengeluaran konsumsi rumah tangga di daerah perkotaan (*urban area*) dan perdesaan (*rural area*) untuk mendapatkan pola konsumsi masyarakat sebagai bahan penyusunan diagram timbang dan paket komoditi yang baru dalam perhitungan indeks harga konsumen (IHK).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Insentif yang beliau terima untuk survei SBH adalah per dokumen. PPL mendapatkan insentif Rp72.000,00/dokumen dan PML seperti Ibu MTI mendapat insentif sebesar Rp28.000,00/dokumen. Insentif PPL lebih besar karena PPL turun ke lapangan, sedangkan PML bertugas memeriksa hasil kerja PPL. PML akan memeriksa jika ada isian yang belum lengkap kemudian menghitung total data.

Prinsip kerja dari Ibu MTI adalah menjalankan amanah yang diberikan dan bekerja jujur. Ibu MTI menjalani multiperan, yakni fungsi domestik sebagai istri, ibu dari anak-anaknya, fungsi publik sebagai guru, wakil kepala sekolah, dan PML Regsosek. Multiperan itu dilakukan oleh Ibu MTI tidak hanya untuk dapat menjaga kelangsungan hidup keluarganya, tetapi lebih untuk dapat mengabdi diri demi negara melalui Regsosek. Ibu MTI mengaku berharap bisa lolos seleksi PNS, namun peruntungan belum berpihak pada ibu dua anak ini. Regsosek bagi Ibu MTI dirasa sebagai "pelepas dahaga" ambisi untuk mengabdikan diri kepada negara sebagai PML mitra BPS.

IH (PPL)

Kisah menarik lainnya ada Saudara IH, seorang PPL dari Kelurahan Togolobe di Pulau Hiri. Saudara IH telah mengabdi sebagai honorer Kelurahan Togolobe selama 15 tahun. Penghasilan Rp900 ribu sebagai honorer kelurahan dirasa tidak cukup untuk biaya hidup yang sangat tinggi. Terlebih, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, merupakan kota ketiga dengan biaya hidup termahal di Indonesia (Aninditya, 2022). Selain menjadi honorer, Saudara IH juga berprofesi sebagai tukang ojek di Pulau Hiri. Pendapatan tambahannya dari kerja sebagai mitra BPS Kota Ternate dirasa cukup untuk dapat membiayai anaknya yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Ternate.

Penolakan dari masyarakat di Pulau Hiri awalnya sering kali ditemui ketika melakukan pendataan. Penolakan ini lebih kepada ketakutan adanya intrik berbau politis dalam pendataan Regsosek. Pendataan Regsosek di Pulau Hiri dengan menghimpun data berupa KK dianggap beberapa orang sebagai intrik untuk mendulang du-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kungan suara politik. Dukungan politik seperti apa yang dimaksud oleh masyarakat tidak begitu jelas. Hal ini dapat menjadi penanda adanya ketakutan akan penyalahgunaan data kependudukan untuk kepentingan politik.

Saudara IH yang merupakan warga lokal Pulau Hiri paham betul cara menghadapi penolakan pendataan demikian. Pengetahuannya terkait karakter masyarakat Pulau Hiri dan komunikasi dengan pendekatan "hati ke hati" menjadi trik jitu bagi saudara IH untuk dapat meyakinkan warga Pulau Hiri. Saudara IH masih rela turun naik bukit untuk mendata warganya. Baginya, Regsosek tidak hanya persoalan mendata saja, tetapi ada sebuah harapan hidup bagi dia dan keluarganya maka tak pelak, setiap ada kegiatan yang melibatkan mitra BPS Kota Ternate, Saudara IH begitu bersyukur dapat diterima sebagai PPL yang bertugas di Pulau Hiri. Kegiatan yang melibatkan mitra BPS ternyata menyelipkan harapan penghidupan dari sebagian mitra. Bekerja dengan jujur dan tidak berbohong (*ba foya*) menjadi prinsip kerja yang dilakukan oleh saudara IH.

Saudara IH sadar bahwa usianya tidak lagi muda dan harus bersaing dengan tenaga-tenaga mitra yang lebih muda dan berpendidikan tinggi. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat kompetisi dari dirinya. Sadar penguasaan teknologinya kurang, terlebih dalam mendata Regsosek ini harus dibekali pengetahuan teknologi informasi dengan aplikasi Wilkerstat, membuat saudara IH terus memperbarui pengetahuannya dengan belajar dari video berbagi di Soutube mengenai penggunaan aplikasi tersebut. Halang rintang keterbatasan pengetahuan tidak menjadi penghalang bagi PPL, seperti saudara IH untuk berkontribusi dalam Regsosek ini.

Ibu WL (PML)

Di Pulai Hiri, ada juga terselip kisah haru dari PML dari Kelurahan Mado. Ibu WL, merantau jauh dari Sulawesi Utara untuk mengadu nasib bersama suami di Ternate. Ibu WL ini juga sudah menjadi honorer Kelurahan Togolobe selama 17 tahun dengan penghasilan 900 ribu rupiah. Tulang punggung keluarga sudah dijalani Ibu WL

Buku ini tidak diperjualbelikan.

beberapa tahun terakhir sejak sang suami divonis sakit gagal ginjal dan harus menjalani pengobatan cuci darah. Suami yang tidak lagi bekerja, membuat Ibu WL harus berpikir keras untuk dapat menghidupi keluarganya. Pengharapan pada anak sulungnya yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Ternate menjadi pelecut semangat bagi Ibu WL untuk bekerja lebih keras. Baginya, pendidikan adalah cara untuk bisa mengangkat nasib nelangsa keluarga, dibenaknya pun selalu tertanam bahwa anak tidak boleh merasakan nasib kesulitan hidup sepertinya dirinya sekarang. Apa pun ia kerjakan selama itu halal dan *ba foya* (tidak berbohong) termasuk menjadi PML mitra BPS Kota Ternate.

Pengalaman menarik dari Ibu WL dalam mendata, yaitu dengan mendatangi masyarakat pada waktu malam hari dan dengan suasana santai. Hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan pendataan. Kedekatan emosional dari PML Ibu WL turut juga membantu dalam mendata masyarakat di Pulau Hiri. Cenderung tidak ada penolakan dari masyarakat sekitar Pulau Hiri ketika Ibu WL datang untuk mendata. Halang rintang dalam mendata yang dirasai oleh Ibu WL adalah jaringan internet, terutama ketika melakukan *tagging* lokasi dan unggah foto rumah (wc, lantai, plafon, dan dinding). Harapannya, melalui Regsosek ini dapat terdata seluruh masyarakat terkategori miskin yang selama ini tidak terdata. Pendataan ini diharapkan sebagai saluran bagi masyarakat miskin yang tidak terdata memperoleh perlindungan dan bantuan sosial. Terkhusus para janda-janda yang selama ini tidak terdata dapat menerima bantuan.

G. Aisyah: *Life Story* sebagai Fokus Sumber Data

Jauh dari bibir pantai dan gegap gempita Kota Ternate, pinggiran kota terselip sebuah kisah sedih dari seorang janda beranak sepuluh. Aisyah Alting (57 Tahun) namanya, hidup bersama anak dan cucunya dalam rumah berukuran 5 × 7 m^2, beratap seng, dan berdindingkan tripleks. Hawa seng yang panas pada siang hari tidak menyurutkan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

semangat Aisyah di usia senja dan fisik renta untuk membuat kue dan menjualnya di kios-kios pasar di Kota Ternate. Semenjak ditinggal suami, Aisyah Alting menjadi tulang punggung keluarga walaupun punggungnya renta. Aisyah menamatkan pendidikan hingga jenjang SMP, tetapi ternyata mampu menghidupi dan membesarkan anak seorang diri. Janda ini tidak pernah mengeluh. Seorang lansia harus bertatapan dengan kerasnya hidup di kaki Gunung Gamalama Kota Ternate.

Aisyah tidak mengetahui apapun terkait dengan Regsosek. Pendataan dalam benaknya hanya untuk mendapatkan bantuan. Pengharapan Regsosek ini memang kerap kali dianggap sebagai pendataan bantuan. Banyaknya masyarakat tidak mengetahui esensi dari Regsosek ini termasuk Aisyah Alting. Kedatangan untuk pendataan yang dilakukan oleh PPL dan PML di Kelurahan Kasturian terutama di rumah Aisyah Alting mengalami penolakan sampai tiga kali. Aisyah Alting merasa pendataan bukan perkara hal penting dan tidak terkait dengan perjuangannya untuk melanjutkan kehidupan. Aisyah hanya berpikir bagaimana bisa makan hari ini dan kue laku terjual.

Aisyah Alting juga cukup lantang menjawab kepemilikan aset yang dia miliki, padahal pertanyaan tersebut cukup "sensitif" sebagai rahasia keluarga. Dia menjawab dengan intonasi tinggi tidak memiliki tabungan di bank, tidak pernah melakukan peminjaman uang di bank dan koperasi, dan rumah yang ditinggali sekarang statusnya hanya milik saudara dari Almarhum suaminya. Aisyah juga tidak menutupi atau malu-malu dalam menjawab pertanyaan dari petugas PPL dan PML ketika ditanya mengenai aset yang dimiliki. Beliau memang seorang janda, tetapi masih memiliki tanah bersertifikat di RT 8. Dia pun juga menjawab secara terang-terangan terkait jumlah emas yang dimiliki, dia mengaku bahwa emas dimiliki tidak lebih dari 10 gram dan itu semua pemberian dari anak-anaknya.

Usia senja dan penglihatan yang buram tidak mengaburkan semangatnya untuk mencari nafkah. Aisyah Alting adalah secuil potret kemiskinan yang ada di Kota Ternate. Pengharapan pendataan dari Regsosek bisa menjadi pembuka jalannya untuk memperoleh bantuan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Keterangan: a. Aisyah Alting, b. Kondisi Rumah Aisyah Alting
Foto: Reza (2022)

Gambar 8.13 Potret Kisah Salah Satu Responden Regsosek

dari pemerintah sebagai jaring pengaman hidupnya. Bantuan selama ini dirasa oleh Aisyah belum cukup untuk menghadapi keras dan tingginya biaya hidup di Ternate.

Keuntungan Rp20–30 ribu sehari menjadi pengharapan syukur dari janda sepuluh anak ini. Ketidakpastian pendapatan yang diperolehnya tidak menjadi batu sandungan untuk berpangku tangan kepada bantuan. Rasa syukur atas nikmat hidup dirasa sudah menjadi rezeki yang luar biasa bagi Aisyah di kala senja usia. Nelangsa penghidupan sebagai penjual kue tidak menyurutkan semangat. Tatapan sayu Aisyah Alting memberikan refleksi bahwa kebahagiaan tidak hanya diukur dari aset harta, tetapi semangat hidup untuk terus berjuang sekalipun tulang hanya tinggal berbalut kulit.

Kisah hidup nelangsa dari kerasnya penghidupan di Kota Ternate juga tercatat secara emik di Kelurahan Foramadiahi Kecamatan Pulau Ternate. Berada di selatan kaki Gunung Gamalama dan dekat dengan tempat peristirahatan Sultan Ternate ke-24, Sultan Babullah, menjadikan tempat ini cukup sakral menggambarkan realitas kemiskinan di peri perkotaan Ternate. Kontur tanah yang mendaki membuat model permukiman menjajaki tanah secara berundak. Akses jalan hanya dapat dilalui dengan kendaraan bermotor dan jalan kaki. Kendaraan bermotor pun ada yang tidak dapat mendaki

Buku ini tidak diperjualbelikan.

terjal karena kemiringan jalan mencapai 40–45°. Permukiman di sana juga tidak dialiri air PDAM sehingga untuk konsumsi air warga hanya mengandalkan berkah alam, yakni air hujan. Banyak sekali bak penampung air hujan berada di samping rumah warga. Hal ini menunjukkan ketergantungan warga pada air konsumsi tampungan air hujan. Jika kekeringan melanda panjang, warga sangat sulit mengakses air bersih.

Potret kemiskinan di Foramadiahi tecermin dari Keluarga Hidayat Sula. Rumah didiami oleh dua kepala keluarga (Hidayat Sula dan Amirrudin). Rumah yang berlantai hanya semen kasar dan banyak bolongan tanah ini memperlihatkan situasional aset papan dari keluarga ini. Saat penggalian emik bersama PPL dalam Regsosek, dilihat secara gamblang dari pancaindra bahwa keluarga ini masuk dalam kategori miskin. Penggalian empiris ini juga diperkuat dengan kondisi dalam rumah yang tidak memiliki kursi, gorden (jendela hanya ditutupi pilahan bambu), atap rumah yang banyak bolong, dinding yang hanya berbalut plester seadanya, dan kondisi MCK (mandi cuci kakus) yang sangat tidak layak dengan standar sanitasi kesehatan. Terlebih kondisi dapur yang bergabung dengan WC. Rumah hanya dialiri listrik sebesar 450 watt yang merupakan bantuan subsidi pemerintah. Barang elektronik yang terpantau sekilas juga tidak banyak di rumah tersebut. Barang yang terlihat hanya TV tabung berukuran 14 inci yang gambar dan warnanya pun sudah meredup.

Foto: Reza (2022)

Gambar 8.14 Potret Senyum Kepolosan Nur Santi Hidayat Sula di Foramadiahi Ketika Pendataan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Keluarga ini (Hidayat Sula) hanya sebagai buruh tani pala dan cengkeh, sedangkan anaknya Amirrudin hanya berprofesi sebagai tukang ojek. Perlindungan sosial semacam BPJS dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) tidak dimiliki oleh keluarga ini. Selama ini, keluarga tersebut belum tersentuh pendataan dari pihak aparat kelurahan dan RT setempat. Selain itu, keluarga ini sama sekali tidak tersentuh bantuan sosial pemerintah, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BLT, dan bantuan sosial sembako. Hal ini menunjukkan bantuan pemerintah sebagai jaring pengaman bagi keluarga miskin belum menjangkau seluruh masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan. Nihilnya perlindungan sosial bagi keluarga ini membuat negara seakan absen bagi penghidupan keluarga ini.

Awalnya keluarga ini menolak untuk didata dan merasa pendataan semacam ini percuma dan sia-sia. Keluarga ini memandang bahwa mendata nyatanya hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Keluarga ini merasa selalu didata, tetapi tidak pernah mendapatkan bantuan dan juga lebih sering melihat bantuan yang disalurkan pemerintah hanya ke oknum-oknum yang tidak layak untuk menerima bantuan. Keluarga ini menyampaikan apa adanya terkait kondisi keluarga. Pertanyaan sensitif bagi sebagian orang terkait kepemilikan aset, secara gamblang direspons dan dijawab. Nur Santi Hidayat menyampaikan apa adanya dan tidak menutup informasi apa pun dalam pendataan. Keluarga ini tidak memiliki emas, hanya memiliki satu kendaraan motor (masih kredit), tidak memiliki kulkas, bahan bakar untuk memasak hanya kayu dan minyak tanah. Keluarga ini juga memiliki aset nyata (*tangible asset*) selain rumah, yakni berupa lahan kebun yang lokasinya tidak jauh dari rumah.

Ibu empat orang anak ini juga bekerja sebagai penjual sayur di pasar. Suami istri (Hidayat Sula dan Nur Santi Hidayat) ini hanya sekolah tidak sampai tamat SD. Anak pertama (Amiruddin) memiliki ijazah sarjana, tetapi hanya berprofesi sebagai tukang ojek. Biaya keseharian konsumsi dua KK dalam satu rumah ini menghabiskan uang sekitar 100 ribu rupiah. Biaya tersebut bagi keluarga ini cukup untuk memberi makan delapan anggota keluarga dengan Rp12.500,00/

Buku ini tidak diperjualbelikan.

per orang dalam sehari. Harapan keluarga ini dari pendataan Regsosek adalah adanya perhatian pemerintah tidak hanya terkait bantuan tetapi juga jaring pengaman penghidupan (*social safety net*).

H. Penutup: Regsosek Hadir demi Mencatat Indonesia

Regsosek hadir sebagai upaya pemerintah mendata secara menyeluruh. Kehadirannya diharapkan dapat mengatasi kesulitan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, dalam keterpaduan dan transparansi data yang akan sangat bermanfaat dalam penyusunan kebijakan, salah satunya dalam penyaluran bantuan tepat sasaran agar tidak menimbulkan efek kesenjangan antarmasyarakat penerima bantuan. Regsosek hadir sebagai penawar sekelumit kesahihan atas saling klaim "status kemiskinan", dan juga sebagai "*counter* narasi data" atas klaim sepihak dari segelintir oknum yang hanya memanfaatkan informasi kurang valid atas orang-orang yang sesungguhnya tidak layak mendapatkan bantuan sosial pemerintah.

Regsosek diharapkan sebagai penawar *obstacle* patologi sosial kronis dari permasalahan sosial klasik, seperti kemiskinan. Sejatinya, satu data Regsosek menjadi pendataan awal ihwal mulia dari pemerintah pusat dan daerah dalam mencatat Indonesia, menarasikan data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Penggalian data emik di Ternate dari Kasturian di kaki Gunung Gamalama hingga Pulau Hiri menjadi suatu perspektif diungkit dari pendalaman realitas riil pendampingan proses Regsosek. Sungguh subjektif jika penggalian ini dapat memberikan kedalaman emik dari proses Regsosek, lima hari efektif penggalian emik masih dirasa belum memadai dalam menguak realitas sosial. Usaha keras dalam penarasian realitas dari petugas Regsosek dalam mencacah angka, sepatutnya perlu juga ditumpahkan dalam gumpalan narasi teks berparagraf. Aspek yang terdokumentasi dari kuesioner Regsosek dengan penggalian emik ini dapat memberikan pandangan dari sisi yang berbeda membedah realitas masyarakat. Angka dapat dimanipulasi,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan angka hanya sederet nominal yang dapat terjebak dalam hiperrealitas, sebagaimana meminjam premis Jean Baudrillard (1983 dalam Scott, 2007, pp. 14–17) menekankan hiperrealitas pada sesuatu yang dapat dilebih-lebihkan dari gejala realitas kepalsuan gambar, angka ataupun teks (Mantra, 2012; Piliang, 2015; Wardhana, 2022). Realitas tersebut dapat dibuat-buat dan dimanipulasi. Penggalian proses emik Regsosek inilah menjadi solusi dari penawar kepalsuan. Setidaknya, kelemahan ketidakpaduan dan ketidaksatuan data dapat terkuratif dari program satu data Regsosek.

Regsosek menjadi jawaban dari keluarga yang selama ini tidak terdata. Mendata bangsa dengan mencatat detail informasi profil setiap warga negara tanpa harus ada yang ditutupi atau disembunyikan. Satu ungkapan khas lokal Ternate yang tertangkap dari Pulau Hiri dan bisa dijadikan refleksi bagi seluruh perangkat pemangku kepentingan dan masyarakat luas, yakni mendata tidak boleh berbohong (*mandata ba foya*). Ungkapkan apa adanya, tidak boleh ditutupi, dan tidak ada yang boleh ditakuti, Regsosek bukti hadirnya negara di tengah masyarakat. Regsosek bukan penyalur bantuan sosial pemerintah, tetapi Regsosek awal keterbukaan mencatat satu data untuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang termarginalkan dari gegap gempita pembangunan.

Daftar Pustaka

Agustini, P. (2020, 27 Januari). Peraturan presiden satu data Indonesia (SDI). *Kominfo*. https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/peraturan-presiden-satu-data-indonesia-sdi/

Andjarwati, D. E., & Kusumartono, F. X. H. (2019). Model dinamika pengembangan kota-kota di wilayah timur Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum, 11*(1), 16–28. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/105250

Aninditya, H. R. (2022, 7 September). 13 kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia, nomor 3 ada kota kaya rempah. *Inewsmaluku*. https://maluku.inews.id/berita/kota-dengan-biaya-hidup-termahal-di-indonesia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BPS. (2021). *Indeks kebahagiaan 2021*. https://www.bps.go.id/publication/2021/12/27/ba1b0f03770569b5ac3ef58e/indeks-kebahagiaan-2021.html

Badan Pusat Statistik Kota Ternate. (2022). *Kecamatan Pulau Hiri dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kota Ternate. https://ternatekota.bps.go.id/publication/2022/09/26/5d1f2bd0ed4e7e8ba640d5f5/kecamatan-pulau-hiri-dalam-angka-2022.html

Badan Pusat Statistik. (2022). *Wilkerstat BPS*. Playstore. https://play.google.com/store/apps/details?id=org.bps.aan.wilkerstat&hl=en_US&gl=US&pli=1

Bappeda Kota Ternate. (2016). *Monografi Kota Ternate*.

BPS Kota Ternate. (2016). *Luas Pulau di Wilayah Kota Ternate*. Badan Pusat Statistik Kota Ternate. https://ternatekota.bps.go.id/statictable/2016/07/27/12/luas-pulau-di-wilayah-kota-ternate.html

BPS Kota Ternate. (2022, 1 September). *Halo, #SahabatData! Kabar baik untuk kita semua. Pendaftaran Petugas Pendataan REGSOSEK BPS KOTA TERNATE telah dibuka!* [Terlampir gambar][status update]. Facebook. https://www.facebook.com/photo?fbid=396884822569932&set=pcb.396884872569927

BPS Kota Ternate. (2022, 1 Oktober). *Haloha #SahabatData. Ada kabar baik nih, dibanding batunggu dia yg tra pasti-pasti* [Terlampir gambar][status update]. Facebook. https://www.facebook.com/photo/?fbid=417671207157960&set=a.181635047428245

BPS Provinsi Maluku Utara. (t.t). *Proyeksi penduduk menurut Kabupaten/Kota (jiwa) 2020–2022*. https://malut.bps.go.id/indicator/12/55/1/proyeksi-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html

Chairuddin, Suryana, N., & Wicaksono, H. (2021). Dukungan sistem informasi geografis untuk pendataan bantuan sosial berbasis asyarakat. Dalam Femmy, A. M. Yusuf, E. Tjandra, & S. Purwani (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Inovasi dan Adopsi Teknologi (INOTEK), 1*(1), 147–158. STMIK Rosma. https://e-journal.rosma.ac.id/index.php/ inotek/article/view/115

Creswell, J. W. (2014). *Qualitative, quantitative and mixed methods approaches* (Fourth). Sage Publication.

Djalil, A. G., Sela, R. L., & Tilaar, S. (2015). Evaluasi peruntukan lahan dan pemetaan zonasi tingkat risiko bencana letusan Gunung Api Gamalama di Kota Ternate (Studi kasus: Gunung Api Gamalama, Kota

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ternate). *Spasial, 2*(3), 11–20. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/9668

Harkantiningsih, N. (2014). Pengaruh kolonial di Nusantara. *KALPATARU, 23*(1), 67–80. https://jurnalarkeologi.kemdikbud.go.id/index.php/kalpataru/article/view/51

Hasim, R., Abdullah, O. M. T., & Umar, S. R. H. (2019). Kebangkitan kesultanan Ternate pada era Reformasi 1998–2002. *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan, 7*(2), 69–103. https://doi.org/10.24252/rihlah.v7i2. 11484

Indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia tahun 2021 mencapai 72,29, meningkat 0,35 poin (0,49 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (71,94). (2021, 15 November). *BPS*. https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/15/1846/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2021-mencapai-72-29--meningkat-0-35-poin--0-49-persen--dibandingkan-capaian-tahun-sebelumnya--71-94-.html

Iriyanto, N. (2010). *Benteng-benteng kolonial Eropa di Pulau Ternate: Dalam peta pelayaran dan perdagangan Maluku Utara*. [Tesis tidak diterbitkan]. Universitas Gadjah Mada.

Irsyadi, H. (2015). Legu Gam sebagai refleksi relasi antaretnik pada kemajemukan masyarakat Ternate. *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan, 2*(1), 33–44. https://doi.org/10.33387/jeh.v2i1.821

Jati, W. R. (2013). Kearifan lokal sebagai resolusi konflik keagamaan. Walisongo: *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 21*(2), 393–416. 10.21580/ws.21.2.251

Jayaputra, A. (2017). Bantuan rehabilitasi rumah bagi warga miskin di Kota Padang. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 12*(2), 154–170. https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpks/article/view/652

Kota rempah jadi branding Ternate tingkatkan nilai ekonomi. (2022, 30 Agustus). *malut.kemenkumham.* https://malut.kemenkumham. go.id/berita-kanwil/berita-utama/kota-rempah-jadi-branding-ternate-tingkatkan-nilai-ekonomi

Katherina, L. K. (2021, 24 September). Kota Ternate: Hiruk pikuk di kaki Gunung Gamalama. *Kependudukan*. https://kependudukan.brin.go.id/kajian-kependudukan/bencana-dan-perubahan-iklim/kota-ternate-hiruk-pikuk-di-kaki-gunung-gamalama/#:~:text=Pulau kecil dengan luas 162,BPS Kota Ternate%2C 2021

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). Makam Sultan Babullah. https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/cagarbudaya/detail/2016052300008/makam-sultan-babullah

Kusuma, R. (2022). Integrasi sosial masyarakat golongan miskin di perkotaan. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 7*(1), 213–231. https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.11643

Kusnandar, V. B. (2021, 7 Sepetember). Mayoritas Penduduk Maluku Utara Beragama Islam. *Katadata*. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/mayoritas-penduduk-maluku-utara-beragama-islam

La Hade, M. U. H. S. D. J., Karman, A. S., & Abd Rahman, S. (2021). Ritual kololi kie pada masyarakat adat kesultanan Ternate. *Etnohistori: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan, 8*(1), 30–41. https://doi.org/10.33387/etnohistori.v8i1.4076

Lachmann, R. (2008). Mnemonic and intertextual aspects of literature. Dalam A. Erll & A. Nunning, *Cultural memory studies: an international and interdisciplinary handbook*, (pp. 301–310). Walter de Gruyter. https://doi.org/10.1515/ 9783110207262

Mantra, D. (2012, 13 April). Hiper-realitas perekonomian nasional. *Kompas*. https://nasional.kompas.com/read/2012/04/13/02503211/index-html?page=all

McCabe, J. A., Osha, K. L., Roche, J. A., & Susser, J. A. (2013). Psychology students' knowledge and use of mnemonics. *Teaching of Psychology, 40*(3), 183–192. https://doi.org/10.1177/0098628313487460

Nanuru, R. F. (2011). Ontologi Hibua Lamo dalam perspektif Jürgen Habermas. *Jurnal Filsafat, 21*(1), 31–47. https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/4742

Pattinama, M. J. (2009). Pengentasan kemiskinan dengan kearifan lokal (studi kasus di Pulau Buru-Maluku dan Surade-Jawa Barat). *Jurnal Makara Sosial Humaniora, 13*(1), 1–12. www.jurnalkesos.ui.ac.id/index.php/ humanities/article/view/195

Peta administrasi Kota Ternate. (2017). *Peta-kota*. https://3.bp.blogspot.com/-QWIUygI_4qw/WN_Pz5JIdQI/AAAAAAAAAEFc/kTuxYHBpJfMCu1Y0BafxJnTD9hZOuysywCLcB/s1600/peta%2Bkota%2Bternate.png

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Piliang, Y. A. (2015). Uang dan hiper-realitas: Sirkulasi modal dan jagad raya moneter. *Extension Course Filsafat (ECF) Filsafat Uang, 1*. https://journal.unpar.ac.id/index.php/ECF/article/view/1987

Prayoga, R. A. (2021). Aktivasi modal sosial sebagai strategi menjaga kelangsungan hidup. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 20*(2), 115–128. https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpks/article/view/2424

Pressley, M., Levin, J. R., & McDaniel, M. A. (2014). Remembering versus inferring what a word means: Mnemonic and contextual approaches. Dalam M. G. McKeown & M. E. Curtis (Ed.), *The nature of vocabulary acquisition* (107–127). Psychology Press.

Qodi, Z. (2012). Involusi politik pemekaran, etnisitas, dan agama: Tantangan reformasi birokrasi kasus maluku utara. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 4*(4), 217–226. Https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.217-226

Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. T. S. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2*(1), 90–102. https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/995

Ristianto, C. (2019, 24 Juli). Menurut Bappenas, ini penyebab kementerian dan lembaga pemerintah punya data yang berbeda-beda. *Kompas*. https://nasional.kompas.com/read/2019/07/24/17375821/menurut-bappenas-ini-penyebab-kementerian-dan-lembaga-pemerintah-punya-data.

Rozi, S. (2006). Merentas jalan panjang perdamaian: Negara & masyarakat dalam resolusi konflik. *Jurnal Penelitian Politik, 3*(1), 77–89. https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/423

Sadjim, U. M., Muhadjir, N., & Sudarsono, F. X. (2016). Revitalisasi nilai-nilai bhinneka tunggal ika dan kearifan lokal berbasis learning society pascakonflik sosial di Ternate. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi, 4*(1), 79–91. https://doi.org/10.21831/jppfa.v4i1.7227

Sarihi, T. D., Malik, A. A. M., & Karongkong, H. H. (2022). Analisis pemanfaatan lahan pada kawasan rawan bencana di Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. *Fraktal: Jurnal Arsitektur, Kota dan Sains, 7*(2). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/fraktal/article/view/39-50

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Scott, J (Ed.). (2007). *Fifty key sociologists: The contemporary theorists. Routledge.*

Setyaningrum, P. (2022, 10 Januari). 7 fakta Maluku Utara, provinsi paling bahagia di Indonesia yang jarang diketahui. *Kompas*. https://makassar.kompas.com/read/2022/01/10/154143078/7-fakta-maluku-utara-provinsi-paling-bahagia-di-indonesia-yang-jarang?page=all.

Sherraden, M. (2006). *Aset untuk orang miskin: Perspektif baru usaha pengentasan kemiskinan*. Raja Grafindo Persada.

Stefanus, & Koestoro, L. P. (2018). Benteng portugis Ujung Watu, Jepara: Hubungan kekuatan maritim nusantara. *Berkala Arkeologi Sangkhakala, 21*(1), 80–99.

Syahrain, R. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi komunitas warga Sulawesi Selatan ke Kota Ternate. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora (JSEH), 5*(2), 83–100 https://garuda.kemdikbud. go.id/documents/detail/1808307

Umar, J. (2019). Identitas etnik dan dinamika politik lokal orang Makeang di Ternate. *Humano: Jurnal Penelitian, 10*(1), 354–363. http://dx.doi.org/10.33387/hjp.v10i1.1345

Wardhana, A. A. N. A. S. (2022). Hiperrealitas dalam permainan video daring: Simulasi, simulakra, dan hiperrealitas Garena Free Fire. *PERSPEKTIF, 11*(2), 607–614. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6011

Yulasteriyani, Y., Randi, & Hasbi, M. (2019). Kemiskinan masyarakat di Indonesia: Perspektif sosiologi Islam dan fenomenologi barat. *Intizar, 25*(2), 77–86. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/4463

Buku ini tidak diperjualbelikan.

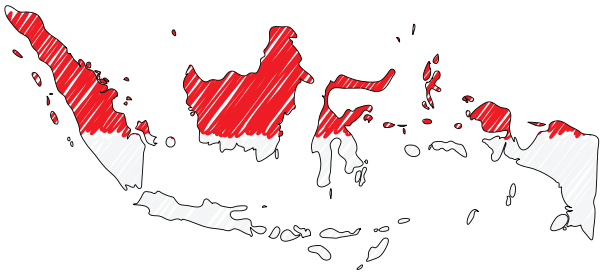

#9

Ruang Sadar dan Representasi Makna: Menyusuri Pembelajaran Regsosek

Dian Karinawati Imron

Pelaksanaan Regsosek tentu berkesan bagi penyelenggara, penanggung jawab, petugas lapangan, pemerintah setempat, dan masyarakat lokal. Mengapa? Ia hadir dalam ruang sadar, ruang personal, dan ruang sosial para pemangku kepentingan. Dalam waktu singkat, Badan Pusat Statistik mengemban amanah pendataan dengan nilai kebaruan 1) *geotagging*; secara tidak langsung meneguhkan pentingnya pendataan spasial, bukan sebatas numerikal; 2) mengikat simpul jejaring mitra pendata lokal; dan 3) menengahi absennya integrasi data. Pada tataran daerah, pemangku kepentingan formal, sosial, dan kultural turut berperan walaupun tidak dapat dipungkiri partisipasi kelembagaan sosial dan kultural belum optimal. Pada tataran lokal, pengalaman petugas pendata dan kisah keluarga terdata melengkapi refleksi pendataan. Para pihak pun telah mengerahkan kemampuannya di tengah keterbatasan.

D. K. Imron
Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: dian073@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Imron, D. K. (2023). Ruang sadar dan representasi makna: menyusuri pembelajaran regsosek. Dalam M. A. Humaedi., D. K. Imron, & A. Pramono (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 1 Indonesia Tengah-Timur* (345–349). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.775.c702 ISBN: 978-623-8052-94-3 E-ISBN: 978-623-8052-98-1

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pada bab penutup ini, tujuh amatan dikemas menjadi rangkuman temuan yang mencerminkan ruang sadar para pihak dan pemaknaan pengalamannya. Pendataan lapangan memperlihatkan ragam kesadaran, *naïve consciousness* dan *critical consciousness*. Rapa dkk. (2020) menyebutkan, dimensi kesadaran kritis, meliputi a) *critical reflection*, b) *critical motivation*, dan c) *critical action* yang ketiganya juga tergambarkan dari proses pendataan. Kegiatan Regsosek yang menyentuh sisi kritis pemahaman masyarakat secara tidak langsung menjadi jalan tranformasi pengetahun. Freire dalam Jemal (2017) mengutarakan pengetahuan transformatif membebaskan seseorang dari opresi, melalui dialog yang terbuka. Freire dan Macedo (2013) juga mengemukakan hubungan literasi dengan relasi sosial dan praktik kebudayaan untuk emansipasi perubahan.

Sejalan dengan tujuan buku ini yang disampaikan pada pengantar. Buku ini diharapkan (1) memberi penjelasan dan saran terhadap proses bisnis Regsosek; (2) mendorong perbaikan proses bisnis berdasarkan temuan di lapangan, serta analisis *forecasting*; dan (3) mendokumentasikan pelaksanaan Regsosek secara emik dari berbagai daerah, sebagai pembelajaran baik untuk para pihak maupun masyarakat mengenai potensi dan kendala membangun Satu Data Indonesia. Ketiga tujuan buku ini dijawab secara terpadu melalui penarasian pembelajaran temuan lapang.

Penjelasan dan masukan proses bisnis Regsosek dapat diamati dalam kerangka *plan-do-check-act*. Berbagai temuan di lapangan menggambarkan ragam tantangan geografis, kendala teknis, adaptasi petugas pendata, dukungan struktural & kultural, dan respons masyarakat terhadap pendataan. Penarasian rangkuman temuan di lapangan diterangkan sebagai berikut.

Pertama, tujuh lokasi amatan mengingatkan bahwa situasi geografis, perubahan cuaca, hujan, dan banjir memengaruhi petugas pendata dan juga penduduk yang didata. Proses wawancara di rumah penduduk yang tergenang banjir dan diguyur hujan menuntut pendata untuk peka terhadap situasi dan cair dalam membangun komunikasi. ***Kedua***, situasi ekonomi dan sosial masyarakat juga tidak dapat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dilepaskan untuk menghindari kesalahpahaman dan menyinggung isu sensitif. Bagi masyarakat yang setiap harinya berjualan kue di pasar, bekerja sebagai buruh tani, mengumpulkan rongsokan hingga yang tidak memiliki rumah untuk menetap, proses pendataan bisa jadi "mengganggu dan menghabiskan waktu".

Tentu, pemahaman dan keterampilan petugas pendataan diuji, tetapi lebih baik jika dibekali kemampuan menghadapi hal tersebut. Pada beberapa wilayah, aspek keamanan dan kerentanan konflik juga perlu dikaji bersama sebelum petugas turun lapang. Ada pula lokasi di mana petugas pendata lebih banyak mendata saat malam hari sehingga mitigasi keamanan di lingkup pendata dan penanggung jawab kegiatan dapat dirumuskan. Temuan lapang menunjukkan tidak semua PPL dan PML berdomisili di lokasi target pendataan dan keterbatasan akses menyebabkan petugas pendata menginap di lokasi. Pembaruan informasi akses dan tantangan lokasi pendataan merupakan prakondisi penting untuk dibahas bersama.

Ketiga, dukungan kelembagaan struktural dan kultural hingga level lokal yang dekat dengan keseharian warga memiliki peran signifikan mendukung kelancaran pendataan. Temuan lapangan mengisahkan upaya sosialisasi perangkat desa dan RT yang dilakukan melalui pengumuman di masjid, acara pengajian, dan hajatan budaya lebih mudah diterima masyarakat. Absennya kelembagaan dan tokoh berpengaruh dari ke dua lembaga tersebut menghadirkan jarak (*gap*) pemahaman antarpihak. ***Keempat***, teknis pendataan, seperti *blank spot* sinyal, foto rumah (rumah, dinding, atap, dan toilet), dan kepemilikan dokumen identitas. Kesulitan sinyal terjadi di beberapa lokasi pendataan. Kelengkapan data foto rumah ditentang sebagian masyarakat karena dipandang sebagai privasi. Kejadian penolakan beberapa masyarakat juga memberikan makna bahwa data tersebut sensitif dan diperlukan strategi pendataan khusus terkait isu-isu sensitif bagi masyarakat. Kemudian, dokumen resmi identitias diri seperti KTP, KK, & BPJS terbukti tidak dimiliki seluruh warga. Temuan ini memberikan tuntunan akan tawaran "respons cepat" di mana petugas pendataan dapat mendorong ketua RT dan dinas terkait turut terlibat mengatasi situasi ini.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kelima, justifikasi dan indikator kemiskinan. Pengalaman di lapangan memperlihatkan tidak mudahnya justifikasi kategori miskin dengan latar belakang pekerjaan dan situasi sosial yang beragam. Justifikasi kategori miskin perlu dicermati bersama untuk menghindari bias data. *Data pekerjaan* misalnya. Pekerjaan sebagai nelayan, petani, buruh tani, dan perintis usaha wisata belum tentu menunjukkan aktivitasnya dilakukan setahun penuh. Ada masa tidak bekerja saat musim menunggu panen, saat musim tidak melaut, dan saat tidak adanya wisatawan. Data pekerjaan ini pula memengaruhi penggalian data mengenai pendapatan. Selanjutnya, *data kepemilikan aset* di mana warga tidak terbuka mengenai kepemilikan asetnya. Temuan lapang memperlihatkan warga perantau di kota yang dalam keadaan sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi memiliki aset di kampung halaman. Begitu pun dengan pekerja migran yang membangun rumah dengan desain bagus, tetapi hanya memiliki sedikit barang isi rumah, bahkan memiliki hutang. "Aset semu" juga ditemukan. Semu karena kepemilikannya milik warga, tetapi hasil panennya berpindah tangan. Warga tidak terbuka memberikan informasi karena khawatir tidak mendapatkan bantuan sehingga ditemui adanya warga yang memanipulasi informasi.

Keenam, keluarga penyandang disabilitas yang ditemui petugas pendata menuntun masukan terkait pendekatan yang memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas. Tujuannya agar pendata dapat berinteraksi dan menggali data dengan prinsip saling memahami. ***Ketujuh***, kendala untuk menemui warga karena sedang melaut, di ladang berhari-hari, pekerja perantau, pekerja dengan mobilitas tinggi. Kejadian ini termasuk cukup sering dialami petugas sehingga beberapa penulis menyebutkan pentingnya membuat janji temu dan pelibatan RT dalam hal ini. ***Terakhir***, pendekatan sosialisasi dengan tujuan edukasi. Temuan lapang cukup menggambarkan pemahaman masyarakat yang mengartikan pendataan sebagai tanda datangnya bantuan. Pendekatan sosialisasi dapat dikembangkan melalui dialog yang mengedepankan tumbuhnya kesadaran kritis atas manfaat data bagi masyarakat.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Analisis *forecasting* menekankan pada pentingnya mitigasi risiko dan mekanisme *feedback* dalam proses *do, check*, dan *act*. Mitigasi dan mekanisme *feedback* dapat disusun dengan mempertimbangkan seluruh temuan lapang. Pembelajaran penting dari pengalaman pendataan juga menyangkut pengetahuan dan keterampilan sosial pendata. Pelatihan diharapkan membekali petugas pendata dalam hal 1) *probing* dalam wawancara, 2) analisis situasi sosial dan ekonomi, dan 3) dialog dan edukasi manfaat data.

Penarasian Regsosek juga menghadirkan situasi *riil* masyarakat yang hidup di pegunungan, di sekitar laut, di perbatasan hutan, dan wilayah terpencil. Kisah keseharian masyarakat mengingatkan nilai-nilai yang serupa yaitu keteguhan, kepedulian, dan ketulusan. Masyarakat menjalani kehidupan yang tidak mudah dengan berbagai keterbatasan. Proses pendataan selayaknya tidak berhenti pada "mendapatkan data", tetapi juga membangun relasi baik. Keseluruhan narasi emik Regsosek semoga melengkapi makna pendataan yang reflektif, mengisi kesenjangan pemahaman, dan mempertemukan para pihak dalam ruang sadar kebersamaan.

Daftar Pustaka

Freire, P., & Macedo, D. (2005). *Literacy: Reading the word and the world. Routledge.*

Jemal, A. (2017). Critical Consciousness: A Critique and Critical Analysis of the Literature. *Urban Rev, 49*, 602–626. https://doi.org/10.1007/s11256-017-0411-3

Rapa, L. J., Bolding, C. W., & Jamil, F. M. (2020). Development and initial validation of the short critical consciousness scale (CCS-S). *Journal of Applied Developmental Psychology, 70*. https://doi.org/10.1016/j.appdev.2020.101164

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

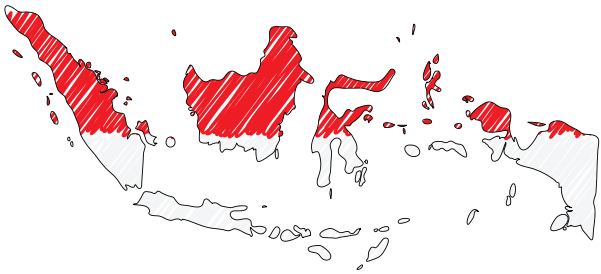

Lampiran Biodata Kepala BPS Kabupaten/Kota

Kabupaten Timor Tengah Selatan

Kepala BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan. Patrisius Tupen, SE., memulai karir sebagai staf di BPS provinsi. Sebelum menjabat sebagai Kepala BPS TTS pada Oktober 2019, Pak Patris menjabat sebagai Kepala BPS TTU. Bapak 4 anak ini menyambut baik kedatangan tim KSDK di TTS dan mendukung penuh penulisan narasi emik yang dilaksanakan dalam rentang 31 Oktober–6 November 2022. "Silakan tulis apapun yang ditemukan di lapangan, kami terbuka", pesannya.

Kabupaten Lombok Utara

Kepala BPS Kabupaten Lombok Utara. Drs. Syamsudin lahir di Kabupaten Lombok Tengah tahun 1965. Mendapatkan gelar Doktorandus (Drs.) tahun 1988 dari Universitas Mataram. Dalam perjalanan karir di Badan Pusat Statistik, beliau pernah menjabat sebagai Kepala BPS Kota Mataram (2001–2005), Kepala BPS Kabupaten Lombok Barat (2005–2008), Kabag TU BPS Provinsi NTB (2008–2018), Kepala BPS Kabupaten Lombok Tengah (2018–2021), dan sekarang menjabat Kepala BPS Kabupaten Lombok Utara (2021–Sekarang).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kabupaten Wajo

Kepala BPS Kabupaten Wajo. H. Rustan M.Si., lahir di Wajo pada Desember 1966. Beliau menyelesaikan Pendidikan S1 di bidang Pertanian, Universitas Hasanuddin dan melanjutkan studi Magister di universitas yang sama di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beliau memulai karir menjadi pelaksana tugas Kasi Statistik Kependudukan pada tahun 1995 di BPS Kabupaten Luwu. Beliau bertugas di BPS Kabupaten Majene pada tahun 2003 dan menjabat sebagai Kasi IPDS. Beliau diangkat menjadi Kepala di BPS Kabupaten Majene (2005), dipindahtugaskan menjadi Kepala BPS Kabupaten Wajo (2006), dan kemudian tahun 2011 dengan jabatan yang sama di BPS Kabupaten Bone. Sejak tahun 2016, beliau menjabat Kepala BPS Kabupaten Soppeng, dan mulai tahun 2021 beliau menjabat Kepala BPS Kabupaten Wajo.

Kabupaten Donggala

Kepala BPS Kabupaten Donggala. Agus Paryanto, kelahiran Jombang berusia lima puluh enam tahun. Saat ini diamanahi untuk memimpin Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala. Beliau menempuh studi Sarjana jurusan Ekonomi. Beliau mengemban tugas pertama di Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau mengabdikan diri selama hampir tiga dekade di wilayah Sulawesi Tengah. Adaptasi, komitmen, dan ketulusan adalah modal yang mebuat beliau mampu bertahan menjalankan tugas. Sejak awal penempatan sampai akhirnya menetap di Sulawesi Tengah banyak hal yang dilalui dan persoalan pekerjaan dapat diatasi dengan tim yang solid.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kabupaten Gorontalo

Kepala BPS Kabupaten Gorontalo. Awaluddin K, S.E., M.M. Menempuh Pendidikan Pascasarjana jurusan Manajemen di Universitas Hasanudin. Beliau menjabat sebagai Kepala BPS Kabupaten Gorontalo pada 12 Oktober 2021. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPS Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

Kota Ternate

Kepala BPS Kota Ternate. Harim Arrosid, S.ST., M.Si. lahir pada tanggal 25 Oktober 1979, menamatkan pendidikan sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) tahun 2003 dan menyelesaikan studi masternya pada tahun 2014 di Institut Teknologi Surabaya. Pengalaman beliau pernah menjadi Kasi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara 2009–2012, Kasi Statistik Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar BPS Provinsi Sulawesi Utara 2014–2016, Kepala BPS Kabupaten Pulau Morotai 2016–2018, Kepala BPS Kabupaten Halmahera Utara 2018–2022, dan sekarang menjadi Kepala BPS Kota Ternate.

Kabupaten Manokwari

Kepala BPS Kabupaten Manokwari. Melianus Yosep Wamafma. Beliau menempuh pendidikan Pascasarjana jurusan Lingkungan Hidup di Universitas Papua di Manokwari. Selama bekerja selalu tenang untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang silih berganti dijalani dengan suka cita karena merupakan amanah. Prinsip beliau dalam bekerja ialah membangun komunikasi yang efektif.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

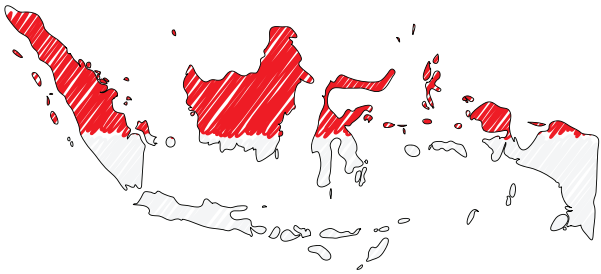

Glosarium

Agraris	:	mengenai pertanian atau tanah pertanian; cara hidup petani
Akumulasi primitif	:	fase awal perkembangan kapitalisme di mana modal dan kekayaan kapitalis awalnya dikumpulkan melalui proses pengambilalihan sumber daya alam, tanah, dan tenaga kerja secara paksa atau eksploitatif
Aparatur Sipil Negara	:	kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah
Apatis	:	acuh tidak acuh; tidak peduli; masa bodoh
Aru Banjar	:	perpaduan antara tradisi suku Banjar dengan perayaan Maulid Nabi, dilaksanakan dengan acara makan-makan di rumah masyarakat bersuku Banjar dengan hidangan ayam yang berbagai macam.
Awik-awik	:	hukum adat Suku Sasak di Lombok berupa peraturan atau undang-undang yang disusun dan ditetapkan oleh anggota masyarakat desa
Bantuan Langsung Tunai	:	program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin
Bantuan Sosial	:	pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Basis Data	:	kumpulan data yang terorganisir, yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer
Berkongsi	:	mengadakan persekutuan dagang
Bottom Up	:	pendekatan yang komunikasi dan arahannya sebagian besar ditetapkan dan disuarakan oleh para anggota organisasi, dan disampaikan kepada pemimpin organisasi atau manajemen tingkat atas
Bro	:	istilah lokal di Gili Trawangan bagi para pekerja lepas yang mengerjakan pekerjaan apapun di bidang pariwisata
Bule	:	keturunan asli Eropa atau orang kulit putih
Business as usual	:	kerangka kerja yang sudah ditetapkan dalam perusahaan agar tahapan proses kerja dilaksanakan dengan baik
By Name By Address	:	sesuai nama dan alamatnya
BLT-DD	:	Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa adalah program bantuan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga atau individu yang membutuhkan, biasanya dalam situasi darurat atau dalam kondisi ekonomi yang sulit.
BST	:	Bantuan Sosial Tunai, program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah untuk membantu sekitar 10 juta keluarga miskin penerima manfaat yang terdampak pandemi Covid-19.
Cidomo	:	dokar yang ditarik kuda memakai roda dari ban mobil bekas
Command center	:	suatu tempat atau lokasi untuk menyediakan perintah, koordinasi, dan pembuatan keputusan cepat dalam mendukung atau merespons kejadian penting
Commuting	:	ulang-alik; perjalanan pulang pergi
Daily Worker	:	pekerja harian lepas, khususnya di bidang pariwisata

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dana Desa	:	dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	:	data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial
Diferensiasi	:	suatu proses pembedaan hak dan kewajiban warga masyarakat berdasarkan perbedaan usia, jenis kelamin, dan pekerjaan
Door to door	:	mengunjungi secara langsung dari rumah ke rumah
Emik	:	pengkajian sudut pandang dari subjek yang diteliti, baik kelompok masyarakat ataupun para petugas pendata (Petugas Pendataan Lapangan/PPL dan Petugas Pemeriksaan Data Lapangan/PML); penelitian yang sepenuhnya mengkaji perspektif spesifik pada karakter sosial budaya (*social-cultural specificit*y) setempat
Enumerator	:	petugas lapangan yang membantu tugas tim survei dalam kegiatan pengumpulan data
Entitas	:	sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik
Equilibrium	:	kondisi yang menggambarkan kesetaraan
Era kolonial	:	periode dalam sejarah ketika negara-negara Eropa melakukan penjajahan dan pengendalian terhadap wilayah-wilayah di luar batas mereka sendiri
Etik	:	penjelasan, deskripsi, dan analisis yang mewakili cara pandang pengamat sendiri sebagai orang di luar masyarakat yang diteliti; membawa nilai universalitas
Evidence Based Policy	:	kebijakan yang diambil dengan berdasarkan pada data dan fakta
Geotagging	:	data dan informasi geografis yang direkam dalam suatu sistem informasi digital yang berupa metadata
Geohistoris	:	Geografi Kesejarahan; ilmu yang mempelajari tentang sejarah di suatu wilayah geografis

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Geospasial	:	aspek keruangan yang dapat menunjukan, lokasi, bentuk, letak dan lokasi suatu obyek yang berada dipermukaan bumi
Governmentality	:	merupakan konsep kekuasaan yang digunakan untuk mempelajari kapasitas otonom individu dalam melakukan kontrol diri dan bagaimana hal itu berkaitan dengan kepentingan politik-ekonomi negara
Global Positioning System (GPS)	:	sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan tiga-dimensi serta informasi mengenai waktu, secara kontinyu di seluruh dunia tanpa bergantung waktu dan cuaca, kepada banyak orang secara simultan.
High-modernism	:	pendekatan teknokratik dalam perencanaan negara modern
Homestay	:	rumah warga lokal yang disewakan untuk tempat menginap para turis
in-between	:	berada di antara
Indikator	:	sesuatu yang dapat memberikan (menjadi) pe-tunjuk atau keterangan
Individualisme	:	pandangan yang menekankan kemerdekaan dan kebebasan individu untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri
Inflasi	:	inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu
Indeks Kesejahteraan	:	suatu indikator yang menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan
Interoperabilitas	:	berasal dari kata “interoperability” yang terdiri dari 3 kata, yaitu: “inter” yg artinya antar (beberapa hal), “operate” yg artinya bekerja, dan “ability” yg artinya kemampuan/kebisaan. Sehingga “kemampuan bekerja antar beberapa hal” atau dalam bahasan ini berarti kemampuan untuk dapat dioperasikan bersama oleh berbagai *stakeholders*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

IDM	:	Indeks Desa Membangun, merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial Indeks Ketahanan Ekonomi Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan
IPM	:	Indeks pembangunan Manusia, menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya
Island Hopping	:	mengunjungi lebih dari satu pulau yang saling berdekatan, dapat juga dimaknai menjadi sarana untuk menyeberang dari satu pulau ke pulau lain yang berdekatan
Jaminan Sosial	:	salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
Komodifikasi	:	tranformasi nilai guna menjadi nilai tukar
Koseka	:	Koordinator Sensus Kecamatan
KPMD	:	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kuda	:	istilah satuan ikat yang digunakan masyarakat setempat di Timor Tengah Selatan, biasanya 1 kuda atau 1 ikat memiliki berat kurang lebih 20 kilogram
Kuesioner	:	alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis
Liberalisme	:	aliran ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berusaha dan berniaga (pemerintah tidak boleh turut campur)
Literasi	:	literasi merujuk pada kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, dan memahami informasi tertulis. Literasi juga dapat mencakup pemahaman terhadap konsep-konsep matematika dan pengetahuan umum.
Livelihood system	:	sistem mata pencarian yang berkesuaian dengan sumber daya lingkungan stempat
Materialisme Kultural	:	pendekatan teoritis dalam ilmu sosial dan humaniora yang menekankan pentingnya aspek material, seperti budaya, simbol, representasi, dan praktik, dalam membentuk masyarakat dan identitas sosial

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Merkantilisme	:	sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa dengan pengaturan seluruh ekonomi nasional oleh pemerintah dengan kebijaksanaan yang bertujuan mengumpulkan cadangan emas, memperoleh neraca perdagangan yang baik, mengembangkan pertanian dan industri, dan memegang monopoli atas perdagangan luar negeri
Mode Produksi	:	cara di mana masyarakat memproduksi barang dan jasa yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup
Mode Reproduksi	:	proses sosial dan ekonomi yang terlibat dalam pemeliharaan dan reproduksi kehidupan sehari-hari, termasuk reproduksi fisik dan sosial manusia, serta pemeliharaan rumah tangga dan keluarga
Pajak Bumi dan Bangunan	:	pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya
Panai'	:	uang lamaran atau mahar (mas kawin) dan uang bawaan untuk perkawinan dalam tradisi masyarakat Bugis
Papalele	:	istilah setempat yang biasa digunakan oleh masyarakat di NTT untuk menyebut para pelaku eknomi lokal atau pedagang keliling yang menjajakan dagangannya dengan berkeliling dari kampung ke kampung
PBDT	:	Pemutakhiran Basis Data Terpadu digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. Basis Data Terpadu membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran dan sumber daya program perlindungan sosial.
Pinggir	:	istilah masyarakat Gili Trawangan untuk penyebut pesisir Pulau Lombok
PML	:	Petugas Pemeriksaan Lapangan
Positivistik	:	pandangan filsafat bahwa pengetahuan yang sah hanya dapat diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap dunia nyata, dengan menekankan pada fakta-fakta yang dapat diamati dan diukur secara objektif
PPL	:	Petugas Pendataan Lapangan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pre-list	:	Daftar nama warga yang diberikan kepada petugas lapangan untuk diwawancara dan diverivikasi dengan ketua RT/SLS pada saat kegiatan Regsosek berlangsung
Proxy Mean Test	:	metode memperkirakan kondisi sosial-ekonomi setiap rumah tangga dengan menggunakan data karakteristik rumah tangga seperti jumlah anggota keluarga, status pendidikan, kondisi rumah, kepemilikan aset dan lain-lain
Resource Curse	:	daerah yang memiliki potensi dan kekayaan alam besar tetapi justru masyarakat tidak mampu memperoleh hasilnya untuk peningkatan kesejahteraan
Realtime	:	waktu aktual di mana sesuatu terjadi
Regsosek	:	Registrasi Sosial Ekonomi
Sensus	:	penghitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu
Sensus Long Form	:	Sensus lanjutan dari Sensus Penduduk tahun 2020 yang dilakukan Badan Pusat Statistik
Sensus Penduduk	:	kegiatan perhitungan jumlah penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik secara periodik, yaitu setiap 10 tahun sekali
Simplifikasi	:	penyederhanaan
Sinuwun	:	sebutan untuk baginda raja, atau yang dimuliakan
SLS	:	Satuan Lingkungan Setempat; Lingkungan Rukun Tetangga (RT)
Stunting	:	gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.
SUSENAS	:	Survei Sosial Ekonomi Nasional
Survei	:	teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabula Rasa	:	pandangan epistemologi bahwa seorang manusia lahir tanpa isi mental bawaan, dengan kata lain "kosong", dan seluruh sumber pengetahuan diperoleh sedikit demi sedikit melalui pengalaman dan persepsi alat indranya terhadap dunia di luar dirinya
Top-Down	:	dikendalikan, diarahkan, atau dilembagakan dari tingkat atas struktur perusahaan; Melanjutkan dengan memecahkan aspek-aspek umum yang besar (sebagai suatu masalah) menjadi konstituen-konstituen yang lebih kecil dan lebih rinci: bekerja dari yang umum ke yang khusus
Uab Meto/Dawan/ Atoni	:	bahasa anak cabang Austronesia yang banyak dituturkan oleh suku Atoni di pulau Timor. Bahasa ini banyak dipakai oleh masayarakat di Timor Tengah Selatan terutama pada suku Amanuban, Amanatun dan Mollo
Unifikasi	:	dikendalikan, diarahkan, atau dilembagakan dari tingkat atas struktur perusahaan; Melanjutkan dengan memecahkan aspek-aspek umum yang besar (sebagai suatu masalah) menjadi konstituen-konstituen yang lebih kecil dan lebih rinci: bekerja dari yang umum ke yang khusus
Variabel	:	faktor atau unsur yang ikut menentukan perubahan
Wilkerstat	:	wilayah kerja statistik untuk kegiatan sensus dan survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik

Buku ini tidak diperjualbelikan.

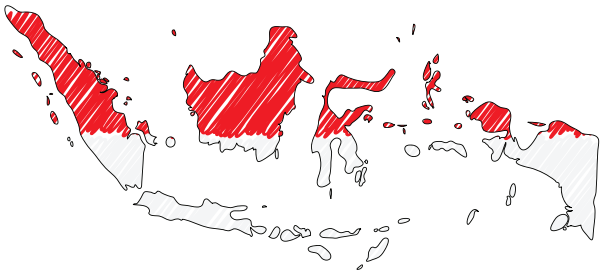

Tentang Editor

M. Alie Humaedi, lahir di perdesaan pesisir Cirebon pada 1976. Beliau menempuh Pendidikan S-1 Tafsir Hadits dan program Magister pertamanya pada Jurusan Hubungan Antaragama di IAIN Sunan Kalijaga. Beliau melanjutkan program doktoralnya pada bidang Antropologi Agama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Seiring Studi S-3, ia juga lulus dari magister keduanya di bidang Kajian Budaya, Universitas Sanata Dharma. Beliau menjadi livehood investigator pada lembaga-lembaga nasional dan internasional yang bergerak di bidang pelayanan kemanusiaan. Beliau bergabung menjadi peneliti di Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya (PMB), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2008.

Pada usia 36 tahun, ia telah menduduki jabatan Peneliti Ahli Utama IV/e bidang Kajian Budaya dan telah dikukuhkan sebagai profesor riset pada tanggal 14 Mei 2020. Selain aktivitasnya di LIPI, ia pernah menjabat sebagai *Deputy Director Social Culture and Public Awareness, Asia Pasific Center for Ecohydrology* UNESCO (2016–2017), *Lead Researcher* Kebencanaan Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk urusan kemanusiaan (UNOCHA, 2007–2008), External Evaluator untuk program "Penataan Wilayah di Desa-desa Adat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Maluku" (AustraliaAid, 2016), External evaluator untuk program International Moslem Aid (2015), peneliti program Netherland Institute voor Livelihood dan Pemberdayaan Sosial-Ekonomi di Aceh pada Christian Aid (2006). Pada tahun 2021, Ia mendapatkan penghargaan Satyalencana Wirakarya Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia dalam bidang "Pemajuan Kebudayaan Daerah". Pada tahun 2022, ia menjabat sebagai Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas (KSDK) bersamaan dengan integrasi fungsional peneliti ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia dapat dihubungi di KSDK-BRIN, Gedung Sasana Widya Sarwono (SWS) Lt. VI, Jl. Gatot Subroto 10 Jakarta. *E-mail*: humaedi2014@gmail.com.

Dian Karinawati Imron, lahir di Bontang, Kalimantan Timur. Dian menyelesaikan studi Sarjana Sastra Inggris (2013) di Universitas Hasanuddin dan studi Pascasarjana di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (2016) di Universitas Gadjah Mada. Dian memiliki minat pada topik kesusastraan, kesejahteraan sosial, bahasa Isyarat Indonesia, *community development* dan *Corporate Social Responsibility*. Dian mendapatkan kesempatan mempelajari kebudayaan multikultural di *Iowa State University.* Pengalaman penelitian di antaranya, *Organizational Capacity Assessment* PT Pertamina EP Subang, Asesmen Program *Smart Village* Kemendesa PDTT dan asistensi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) Kementerian KLHK. Dian bergabung sebagai Peneliti pada Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tahun 2022. *E-mail*: dian073@brin.go.id

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Agus Pramono, lahir di Surabaya, Jawa Timur. Agus menamatkan studi Sarjana Ilmu Politik dan Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia di Universitas Airlangga. Bekerja di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial BPS sejak 2011 dan menekuni minat studi terkait statistik sosial dan politik. Agus terlibat dalam berbagai penyusunan indeks bersama kementerian/lembaga seperti Indeks Demokrasi Indonesia bersama Kemenkopolhukam, Bappenas, dan Kemendagri, Indeks Penilaian Integritas bersama KPK, Indeks Risiko Terorisme bersama BNPT, dan Survei terkait Pencucian Uang dan Pembiayaan Tindak Pidana Terorisme bersama PPATK. Pengalaman penelitian lain berupa penugasan dari BPS untuk melakukan kajian tentang suku bangsa bersama ISEAS Singapore (2013–2014) dengan output buku dan beberapa jurnal internasional. Selain penyusunan indeks dan penelitian, sejak 2015 beraktivitas sebagai dosen tidak tetap di sekolah kedinasan BPS (STIS). Di luar BPS Agus terlibat dalam penulisan buku yang diterbitkan Pusat Studi Ham Universitas Airlangga dan Airlangga University Press serta menulis kolom di surat kabar Kompas. *E-mail*: aguspram@bps.go.id

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

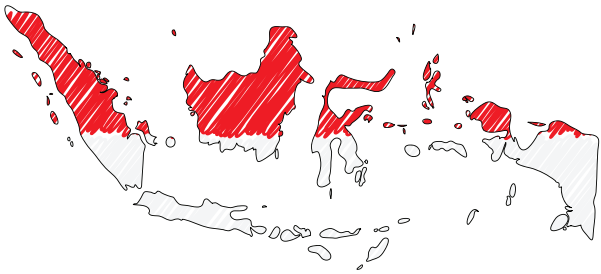

Tentang Penulis

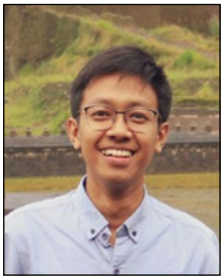

Gustaf Wijaya, lahir di Trenggalek, Jawa Timur pada 1990, menjadi PNS di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 2015. Menyelesaikan studi S-1 program Studi Sastra Inggris di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dan program Magister Media dan Komunikasi, Universitas Airlangga (UNAIR). Anggota tim riset Kuliner Analitik: Kodifikasi dan Pengembangan Sistem Informasi Makanan Tradisional Khas Indonesia untuk Industri Kreatif yang dibiayai Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP, 2017–2019) dan Penyusunan Sistem Informasi untuk Bimbingan Pendataan Kuliner Tradisional yang dibiayai Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf, 2018). Serta Prioritas Riset Nasional (PRN) dalam penelitian Komodifikasi Tradisi Unggul (2020–2021). Aktif menghasilkan artikel ilmiah terkait media dan komunikasi. Saat ini bergabung dalam Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas BRIN, bermukim di Gresik, Jawa Timur. *E-mail*: wijaya.gustaf@gmail.com

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bilal As'adhanayadi, lahir dan dibesarkan di Tegal Jawa Tengah Indonesia, menamatkan Pendidikan Tinggi sebagai Sarjana Sosiologi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017. Mengawali karir sebagai Peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial sejak tahun 2019 hingga 2021. Beralih ke Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tahun 2022 sebagai Peneliti pada Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas. Memiliki minat penelitian pada isu-isu sosial, seperti kajian tentang kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Beberapa publikasi penelitian dapat diakses melalui https://linktr.ee/asadhanayadibilal. *E-mail*: bila001@brin.go.id

Rudy G. Erwinsyah adalah Peneliti Ahli Pertama pada Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas (KSDK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan kepakaran Antropologi Pembangunan. Menamatkan pendidikan Sarjana Antropologi (S.Ant.) dan Master of Arts (M.A.) pada Departemen Antropologi, Universitas Gadjah Mada (UGM). Ketertarikannya antara lain pada isu-isu sosial-ekonomi dan ekologi masyarakat perdesaan, terutama kajian wilayah *frontier* di Kalimantan dan Papua. Selain aktif sebagai Peneliti di BRIN, juga menjadi Pengelola Jurnal Sosio Informa pada Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dan tutor mata kuliah Metode Penelitian Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FHISIP Universitas Terbuka. Publikasi yang pernah dihasilkan dapat diakses pada https://rudger.my.id, korespondensi melalui rudy006@brin.go.id.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Delfirman, lahir di Jakarta, 29 Desember 1986. Menamatkan Pendidikan Tinggi sebagai Sarjana Sosiologi di Universitas Indonesia pada tahun 2010. Mengawali karir sebagai Peneliti di beberapa Perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang media massa, yaitu Kompas Gramedia (Tribunnews Network, Kompas.com) dan MRA Broadcast Media Group. Lalu, bergabung sebagai Peneliti di Sub bidang Rehabilitasi Sosial, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos), Kementerian Sosial RI pada tahun 2019. Selama di Kemensos RI sudah menghasilkan beberapa publikasi terutama di bidang Rehabilitasi, Pemberdayaan, dan Perlindungan Sosial. Lalu, pada tahun 2022 bergabung di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Informasi mengenai hasil penelitian yang pernah dilakukan dapat diakses melalui https://linktr.ee/delfirman. *E-mail*: delf002@brin.go.id

Fatwa Nurul Hakim merupakan peneliti di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebelumnya beliau merupakan peneliti di Balai Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial. Memperoleh gelar Sarjana Sosiologi tahun 2010 di Universitas Sebelas Maret dan Magister Sosial tahun 2021 di universitas yang sama. Fokus riset dan publikasi ilmiahnya berpusat pada isu–isu kesejahteraan sosial, patologi sosial, sosiologi perdesaan, dan dinamika perubahan masyarakat kontemporer. Ia dapat dihubungi melalui surel di alamat fatw001@brin.go.id

Buku ini tidak diperjualbelikan.

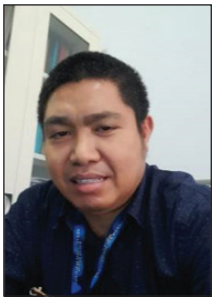

Sahajuddin, lahir di Jeneponto pada Mei 1975. Menyelesaikan Strata satu (S-1) di Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra (Ilmu Budaya) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tahun 1999. Menyelesaikan Strata dua (S-2) di Universitas Hasanuddin (UNHAS) Program Antropologi, konsentrasi Ilmu Sejarah pada tahun 2007, dan sekarang menempuh Pogram Doktor (S-3) *By Research* Ilmu Sejarah di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. Beliau bergabung sebagai PNS pada tahun 2008 di Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sulawesi Selatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai peneliti bidang sejarah. Pernah menjadi Dosen Luar di Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin (2000–2015), dosen Luar Biasa di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia, Makassar (2012–2014). Beliau bergabung sebagai peneliti Pusat Riset Kesejahteraan Sosial ,Desa, dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional (2022). *E-mail*: saha004@brin.go.id

Risyanto, lahir pada tahun 1966 di Tegal. Beliau menempuh studi Pascasarjana jurusan Ekonomi Pembangunan, di Universitas Jenderal Soedirman dan studi Doktoral jurusan Administrasi Publik, di Universitas Negeri Gorontalo. Beliau bergabung sebagai PNS di Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada tahun 1990. Beliau kemudian bergabung dengan BPS Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 dan BPS Provinsi Jambi pada 2017. Beliau bergabung sebagai peneliti Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tahun 2022. *E-mail*: risy002@brin.go.id

Buku ini tidak diperjualbelikan.

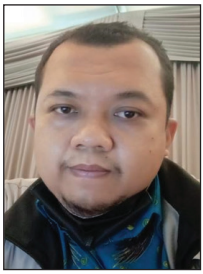

Arditya Wicaksono menyelesaikan studi S-1 Ilmu Administrasi Negara Unair pada tahun 2007 dan studi S-2 Ilmu Sosial Unair pada tahun 2009. Minat riset beliau ialah pada kebijakan publik. Beliau senang mengamati fenomena sosial masyarakat spesifik isu agraria dan ruang. Mempelajari ruang sebagai *landscape* berarti harus *ngeh* dengan dinamika manusia didalamnya. *Landscape* yang dianggap baik belum tentu nyata karena didalamnya memerlukan proses harmoni yang panjang, dengan segala intrik manusia akan selalu menarik diamati. Kegiatan Regsosek ini memberikan pembelajaran bahwa data yang baik tidak hanya jujur menceritakan faktual lapangan, tetapi perlu kesiapan mental pelaksana dan segenap orang yang berkepentingan untuk jujur mengatakan masih banyak yang harus kita perbaiki untuk data Indonesia lebih baik. Ia merupakan peneliti di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas pada tahun 2022. *E-mail*: ardi013@brin.go.id

Tedi Gunawan merupakan Peneliti pada Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas (KSDK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dengan kepakaran di bidang Politik dan Pemerintahan. Lahir di Bantul pada Juli 1988. Lulusan dari Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada tahun 2011. Menyelesaikan dua program master sekaligus di Graduate School of International Relations, Ritsumeikan University (2020) dan Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (2021). Mimpinya adalah menjadi peneliti handal di bidang pembangunan desa. Melalui buku ini, penulis mencoba menarasikan kisah di daerah rural yang luput dari pendataan angka-angka pada kegiatan pendataan Regsosek 2022. *E-mail*: tedi003@brin.go.id

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Lukman Nul Hakim adalah peneliti di Pusat Penelitian Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebelumnya, peneliti di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Lukman telah menyelesaikan S-2 dari Fakultas Psikologi Universitas Jamia Millia Islamia dan S-3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Minat penelitiannya adalah pada analisis kebijakan, psikologi kognitif, pengambilan keputusan kelompok, dan pengembangan manusia. Lukman memiliki pengalaman panjang dalam proses pembuatan kebijakan publik nasional. Ia telah menulis *policy paper* yang sesuai dengan isu atau kebijakan yang menjadi perhatian DPR RI. Dia terlibat dalam pembuatan kertas kebijakan untuk RUU tentang penyelenggaraan haji, pencarian dan penyelamatan, kesehatan mental, pekerja sosial, warisan budaya, penanggulangan bencana, dan lanjut usia. Ia juga dosen paruh waktu di Universitas Islam Internasional Indonesia, Universitas Terbuka, dan Universitas Indonesia. *E-mail*: lukm011@brin.go.id.

Reza Amarta Prayoga merupakan peneliti di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebelumnya ia adalah peneliti dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ia memperoleh gelar Sarjana Sosiologi tahun 2011 di Universitas Andalas, dan Master of Art Sosiologi tahun 2013 di Universitas Gadjah Mada. Fokus riset dan publikasi ilmiahnya berpusat pada isu–isu sosial, kesejahteraan, ketimpangan sosial, dan budaya. Ia dapat dihubungi melalui surel di alamat reza010@brin.go.id

Buku ini tidak diperjualbelikan.

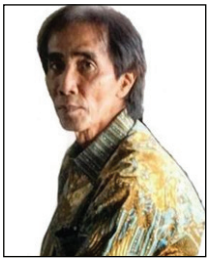

Djoko Puguh Wibowo adalah peneliti Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebelumnya peneliti dari Pusat Pengembangan Kebijakan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, tahun 1984 dan Master of Science Ilmu Lingkungan tahun 2002 dari Universitas Indonesia. Fokus riset dan publikasi fokus pada isu-isu pariwisata, ketahanan pangan, dan kebencanaan. Tahun 2017 sampai sekarang sebagai inisiator dan mendampingi Pemerintah Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten dalam pengembangan Kopi dan Ekowisata (mitigasi dan konservasi, wisata alam, ekonomi lokal). *E-mail*: dpwibowo@gmail.com

Yudha Raphael, lahir di Jakarta 23 Maret 1994 adalah peneliti pada Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Menamatkan pendidikan sarjana pada jurusan Teknik Informatika STMIK Swadharma pada tahun 2016. Sebelum menekuni dunia riset, penulis mengawali karir di bidang seni pada Pusat Pengembangan Perfilman (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Dilanjutkan di bidang perencanaan pada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi), lalu pada tahun 2022 bergabung sebagai Peneliti pada Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Memiliki antusiasme yang besar pada isu-isu yang terkait dengan pemanfaatan teknologi, kebudayaan, kearifan local, dan kesejahteraan sosial. *E-mail*: yudh015@brin.go.id

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

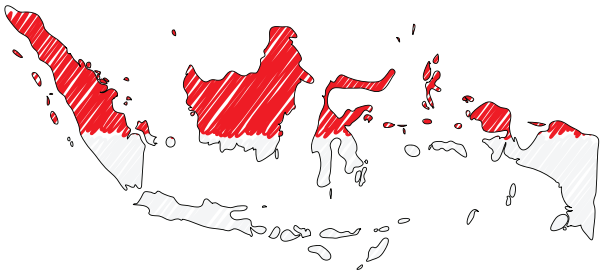

Indeks

akumulasi primitif, 87, 96, 364
apatis, 86, 364
awik-awik, 70, 92

Bantuan Langsung Tunai, 4, 95, 138, 198, 211, 289, 351, 352, 364
biota laut, 70
business as usual, 62
by name by address, 30, 36, 56, 64

cengkeh, 219, 307, 311, 337
commuting, 72, 352

dana desa, 95, 97, 352, 353
data kependudukan, 3
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 74, 95, 123, 147, 353
diferensiasi, 97, 353
Donggala, vi, xviii, 13, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 242, 243, 244, 250, 251, 256, 257, 258, 259, 360

Emik, 1, 10, 13, 17, 59, 101, 165, 215, 261, 301, 345, 353
empati, 149
episentrum, 11, 59
Equilibrium, 353
etik, 353
Evidence Based Policy, 353

fenomena sosial, 116
forum konsultasi publik, 34, 174

geospasial, 220, 354
geotagging, 6, 32, 33, 121, 127, 232, 235, 243, 273, 290, 305, 345
Gili Trawangan, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 352, 356
gizi, 18, 20, 21, 26, 36, 58, 74, 357
Gorontalo, 12, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

180, 181, 182, 183, 186, 187, 190, 191, 193, 195, 199, 201, 204, 205, 207, 208, 212, 213, 361, 374
governmentality, 100, 354

indeks desa membangun, 266, 299
Indeks Desa Membangun, 355
individualisme, 83, 97
informan, 8, 9, 115, 147
interoperabilitas, 167, 354
Island Hopping, 67, 355

jaminan sosial, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 79, 102, 211

Kasturian, 306, 309, 310, 311, 316, 334, 338
kelembagaan sosial, 139, 162
Kelindan, 14, 301
Koloni, 20
komodifikasi, 355, 371
komoditas, 18, 25, 26, 29, 66, 113, 227, 258

Liberalisme, 355
literasi, 76, 81, 355
livelihood system, 109, 115, 355
Lombok Utara, 11, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 74, 75, 76, 83, 85, 97, 99, 359

Manokwari, 13, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275, 277, 278, 279, 287, 291, 292, 295, 299, 300, 361
materialisme kultural, 60
Materialisme Kultural, 355
merkantilisme, 356
mode produksi, 60, 356
mode reproduksi, 60

pangan, 254
Papalele, 26, 356
positivistik, 60, 356
Program Keluarga Harapan, 211, 254, 289, 337
proxy mean test, 35
Proxy Mean Test, 357
Pulau Hiri, 306, 308, 309, 313, 314, 320, 321, 325, 331, 332, 333, 338, 339, 340

revolusi industri, 97

sensus long form, 84
Sensus Long Form, 357
simplifikasi, 60
Simplifikasi, 357
SLS, 5, 12, 15, 23, 29, 33, 34, 35, 42, 43, 44, 45, 53, 71, 73, 76, 132, 134, 161, 232, 234, 237, 244, 272, 305, 357
stunting, 9, 11, 18, 21, 22, 35, 36, 57, 58, 74, 357

tabula rasa, 60
Ternate, 13, 14, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 361

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Timor Tengah Selatan, 11, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 29, 32, 39, 41, 51, 56, 58, 355, 358, 359
Top-Down, 358

Uab Meto, 19, 358
Unifikasi, 3, 358

verifikasi, 27, 28, 31, 32, 37, 39, 48, 54, 106, 124, 130, 131, 133, 174, 228, 235, 239, 258, 306

Wajo, 12, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 150, 151, 153, 156, 162, 163, 360
Wilkerstat, 273, 305, 306, 332, 340, 358

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PANCASILA

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

Mencatat UNTUK MEMBANGUN NEGERI

Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi

Jilid 1 Indonesia Tengah-Timur

Penarasian emik Registrasi Sosial Ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) RI pada tahun 2022 di 16 wilayah amatan merekam tantangan petugas survei dalam mengemban tugas negara untuk menghimpun data yang valid, akurat, dan transparan demi terwujudnya "Satu Data Kependudukan Indonesia". Oleh karena data tak sekadar angka, diperlukan pendalaman untuk mengungkap sisi sosial-politik atas data yang bersifat lokal.

Buku ini mengulas aspek yang tersembunyi dari survei, yaitu aspek kualitatif. Berbagai data kualitatif dari pertanyaan-pertanyaan dalam survei dikembangkan dan diperdalam sesuai konteks wilayah survei turut menjadi bagian penting yang disajikan. Narasi emik yang selama ini menjadi kenangan petugas survei saat proses pendataan pun menjadi bagian menarik dalam buku ini. Proses penggalian sudut pandang subyek yang diteliti maupun para petugas pendata tidak terlepas dari karakter sosial budaya wilayah-wilayah lokal setempat yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Banyaknya permasalahan yang diangkat melalui pendekatan penelitian kualitatif menghasilkan narasi terceritakan yang cukup panjang. Dengan pertimbangan komprehensifitas tulisan, penarasian emik ini pun dipecah menjadi dua seri dalam penerbitan bukunya. Jilid 1 ini mengemukakan narasi emik pada wilayah amatan Indonesia Tengah dan Timur. Sekalipun dipecah, masing-masing seri buku tersebut memiliki ruang lingkup pembahasan yang sama dan diberikan alat ikat yang memadai agar hubungan antara Jilid 1 dan Jilid 2 tetap ada.

BRIN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, Anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie Lt. 8, Jln. M.H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: +62 811-1064-6770
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.go.id

DOI 10.55981/brin.775

ISBN 978-623-8052-94-3